

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DERAH

4.1 URUSAN WAJIB

4.1.1 Dinas Pendidikan

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melaksanakan beberapa program dibidang pendidikan guna meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan. Anggaran belanja langsung untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui APBD Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp201.311.101.479,00 dan telah terealisasi sebesar Rp183.173.627.433,00 atau sebesar 90,99%. Adapun anggaran yang tidak terserap pada anggaran Dinas Pendidikan melalui APBD Tahun 2012 sebesar Rp 18.137.474.046 atau (9,01%) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program pendidikan menengah kegiatan Pembinaan teknis tamatan SMA/SMK
2. Kegiatan monitoring SMA RSBI
3. Sisa anggaran penawaran kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
4. Sisa anggaran unit cost transportasi, setelah disesuaikan dengan standar biaya umum
5. Biaya akomodasi yang tidak sesuai standar.

Pada tahun 2012 Dinas Pendidikan mempunyai 11 program dan 132 kegiatan, adapun program yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Target Nasional bagi pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 adalah 75% anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan pendidikan. Di Provinsi Jambi terdapat peningkatan angka partisipasi dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya dalam akses layanan PAUD. Adapun jumlah lembaga menurut jenis Satuan PAUD Tahun 2012 berjumlah 2.856 terdiri dari :

1. RA berjumlah 152 lembaga
2. TK berjumlah 1.170
3. KB berjumlah 1.303
4. TPA berjumlah 48
5. SPS berjumlah 333

Untuk mendukung kegiatan PAUD telah dilakukan Pembangunan Rumah Pintar 1 Unit di Kota Sungai Penuh, rehab rumah pintar 1 unit Kota Jambi, sehingga sampai dengan tahun 2012 setiap Kab/Kota telah memiliki rumah pintar.

Sumber dana Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal selain bersumber dari unsur masyarakat sebagai wujud partisipasinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu 30,988.220.000 realisasi sebesar Rp 29.121.259.900 atau sekitar 93,98 % sedangkan yang bersumber dari APBD sebesar 8.429.047.650,00 Kegiatan yang dilaksanakan secara kesuluruhan adalah : Pendampingan *Early Childhood Education and Development* (ECED), Penyelenggaraan Gebyar PAUD, Pembinaan Rintisan PAUD jenis Kelompok Bermain dan TPA, Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas anak usia Dini , pelatihan

Mdel layanan PAUD , Pembangunan Rumah Pintar , pembinaan dan pengembangan PKBM .

dari pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini, tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Murni 64,80% pada tahun 2011 dan 72,12% pada Tahun 2012.

2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Secara umum program pendidikan dasar bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, disamping itu program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dari dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp50.491.818.667,00 dengan penggunaan dana adalah: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP, pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket A, pembinaan Olimpiade Sains Siswa SD, rehabilitasi Ruang Kelas SD, pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B, pengadaan Meubelair Pengganti SD, Program makanan tambahan anak Sekolah (PMTAS) pelatihan Paket Aplikasi sekolah , peningkatan mutu kompetensi Guru melalui Lesson studi ,pembrantasan Buta Aksara Alqu'ran , pendampingan Pengelolaan Dana BOS Provinsi dan sebagainya.

Pada jenjang SD/MI telah dibangun Ruang Kelas baru 9 Unit , Penbanguna ruang Majelis Guru 27 paket, meubeler siswa SD RSBI 28 Paket masing masing 2 ruang . Pada jenjang SMP/MTs telah dilaksanakan Penambahan ruang Kelas Baru dan sarana Prasarana lainnya 18 Ruang Kelas Baru, Pembangunan SMP RSBI SMP 11 Kota Jambi , Rehab 1 Paket ,

Pengadaan meubeler SMP sekolah baru dan Pengganti sebanyak 25 Paket , meubeler Siswa SMPN RSBI 23 unit, Pengadaan alat Peraga Matematika Buku dan Komputer .

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar secara umum bukan dari masalah infrastruktur layanan, permasalahan lebih kepada unsur motivasi peserta didik maupun kesungguhan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya serta pihak pengelola pendidikan dalam proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan, sehingga apa yang diperoleh dalam proses pendidikan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap berupaya mengalokasikan pembiayaan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik, sehingga diharapkan permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh masih terdapatnya Guru yang belum berkualifikasi Strata 1 sebagaimana harusnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dapat terpenuhi.

Tabel . 4.1 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar

N0	Kabupaten/Kota	Jumlah SD		Jumlah SMP	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	209	59.815	60	22.562
2	Kota Sungai Penuh	71	9.890	12	4.347
3	Kab. Batanghari	208	30.871	50	6.935
4	Kab. Bungo	229	40.495	59	12.205
5	Kab. Kerinci	228	25.629	55	7.923
6	Kab. Tanjab Barat	203	36.101	58	5.164
7	Kab Merangin	307	30.449	89	6.675
8	Kab. Sarolangun	185	29.287	60	7.035
9	Kab. Tebo	234	37.522	56	12.185
10	Kab. Muaro Jambi	236	34.142	73	10.503
11	Kab. Tanjab Timur	205	20.063	46	5.973
JUMLAH		2.315	354.264	618	101.507

Implementasi dari program ini telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 99,80% tahun 2012 menjadi 99,90% pada tahun 2012. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB juga mengalami peningkatan 97,72 % tahun 2011 menjadi 98,15% pada tahun 2012.

3. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka upaya perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK).

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah. Pada tahun 2012 telah dicanangkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) oleh Mendikbud RI untuk memperluas kesempatan dan jangkauan partisipasi semua golongan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp. 88.359.995.960, dimana pada jenjang SMA telah melaksanakan Pembangunan RKB dan Rehab SMA RSBI 6 Unit , ruang penunjang lainnya 12 unit , pengadaan peralatan 9 unit , pengadaan LapTop SMA Titian teras Abdurahman Sayoeti 48 unit , pengadaan Laboratorium IPA 5 Ruang . Pada jenjang SMK telah dilaksanakan pembangunan 8 Unit Sekolah Baru, pembangunan 33 Ruang Kelas Baru yang tidak bertingkat, sedangkan bertingkat 4 unit , pembangunan ruang penunjang lainnya 5 unit, ruang praktek 5 ruang , serta ada beberapa kegiatan pada Program Pendidikan Menengah antara lain : kegiatan pembinaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA, penyelenggaraan Paket C, kegiatan pembinaan peserta FLSSN SMA, kegiatan lomba seni Nasional , lawatan sejarah , kegiatan Pembangunan Bisnis center. Selain pada jenjang pendidikan umum, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah melaksanakan perhatian terhadap fasilitas pendidikan pada Pondok Pesantren antara lain dengan Pembangunan 2 Ruang

Kelas Baru, pengadaan alat labor IPA 1 paket, pengadaan meubeler Pondok Pesantren 2 ruang , pengadaan Komputer 2 unit , Dengan harapan satuan pendidikan pada jenjang menengah yang tersebar diwilayah Provinsi Jambi dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Tabel. 4.2 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah SMA		Jumlah SMK	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	33	15.554	39	7.072
2	Kota Sungai Penuh	9	3.489	5	908
3	Kab. Batanghari	13	5.522	6	502
4	Kab. Bungo	18	6.518	15	759
5	Kab. Kerinci	13	5.021	6	347
6	Kab. Tanjab Barat	24	4.892	9	140
7	Kab Merangin	20	6.158	13	225
8	Kab. Sarolangun	18	4.227	24	1.211
9	Kab. Tebo	19	5.509	11	2.843
10	Kab. Muaro Jambi	18	5.951	10	792
11	Kab. Tanjab Timur	12	3.640	7	462
JUMLAH		173	66.481	139	15.261

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut berdampak terhadap target capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada RPJMD antara lain Angka Partisipasi murni pada Jenjang PAUD sebesar 64,80% ,jenjang SD 99,90% (SMP) yaitu 98,15% dan jenjang pendidikan menengah 67,09%. Selain hal tersebut, untuk menunjang proses belajar mengajar, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah

mengadakan dan mendistribusikan Meubeler, Alat Permainan Edukatif (APE) dan beberapa perangkat komputer/laptop

Untuk bantuan Beasiswa Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.4.3 Bantuan Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambitahun Anggaran 2012

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PENERIMA	ALASAN
1	BEASISWA STRATA 3 (S3)	138 Orang	121 Orang	17 Orang	Penerima bantuan dikti aktif telah selesai studi
2	BEASISWA STRATA 2 (S2)	427 Orang	411 Orang	16 Orang	Penerima Bantuan Dikti Aktif dan telah selesai
3	BEASISWA STRATA 1 (S1)	1910 Orang	1852 Orang	58 Orang	Telah Selesai Studi
4	BEASISWA STRATA 3 (S3) LANJUTA TAHUN 2011	26 Orang	21 Orang	5 Orang	Penerima Bantuan Studi Beasiswa Dikti
5	BEASISWA STRATA 2 (S2) LANJUTA TAHUN 2011	95 Orang	58 Orang	37 Orang	Telah Selesai Studi dan Penerima Bantuan Dikti
6	BEASISWA STRATA 1 (S1) Program Jalur SNMPTN	7 orang	7 orang		
7	BEASISWA STRATA 1 (S1) Program Jalur Kemitraan ITB	13 orang	7 orang		
8	BEASISWA STRATA 1 (S1) Program Jalur Khusus Teknik Pertambangan	64 orang	64 orang		
9	BEASISWA STRATA 2 (S2) BAGI GURU SMP/SMA/SMK JALUR FMIPA	35 Orang	35 Orang		
10	BEASISWA STRATA 2 (S2) BAGI GURU SMP/SMA/SMK JALUR FMIPA UI TAHUN 2010	24 Orang	24 Orang		

Berikut ini sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melaksanakan Ujian Nasional bagi peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK dengan hasil sebagai berikut :

Tabel.4.4 Jumlah Nilai rata – rata UN SD dan SMP Tahun 2011/2012

No	Kabupaten / Kota	Rata-rata SDN	Rata-rata SDS	Rata-Rata SMP	Rata-rata SMP terbuka
1	Kota Jambi	22,74	23,17	32,09	0
2	Kota Sungai Penuh	22,27	22,65	32,37	0
3	Batanghari	21,6	23,93	31,2	0
4	Bungo	19,99	21,83	30,13	0
5	Kerinci	20,88	20,55	32,36	31,03
6	Tanjab Barat	20,34	21,75	30,87	31,68
7	Merangin	20,43	0	30,46	28,55
8	Sarolangun	21,25	20,32	30,42	27,9
9	Tebo	19,93	19,58	28,37	0
10	Muaro Jambi	20,89	21,36	30,66	0
11	Tanjab Timur	20,5	21,55	30,69	29,89
Provinsi Jambi		20,97	22,81	30,91	29,58

 : Peringkat 1
 : Peringkat 2
 : Peringkat 2

Tabel.4.5 Jumlah Nilai rata – rata UN SMA Negeri/Swasta Tahun 2011/2012

No	Kabupaten / Kota	Program Studi			KET
		Bahasa	IPA	IPS	
1	Kota Jambi	35,40	48,86	44,81	-
2	Kota Sungai Penuh	-	49,59	47,91	-
3	Batanghari	-	47,57	45,65	-
4	Bungo	-	46,23	43,63	-
5	Kerinci	-	49,09	46,67	-
6	Tanjab Barat	-	45,87	43,87	-
7	Merangin	-	47,69	45,80	-
8	Sarolangun	-	46,82	46,20	-
9	Tebo	44,44	44,98	42,90	-
10	Muaro Jambi	37,28	47,50	44,99	-
11	Tanjab Timur	-	46,74	43,47	-
Provinsi Jambi		38,42	47,63	44,95	0,00

 : Peringkat 1
 : Peringkat 2
 : Peringkat 2

Tabel.4.6 Jumlah Nilai rata – rata UN SMK Negeri/Swasta Tahun 2011/2012

No	Kabupaten / Kota	Peserta	Mata Uji				Jumlah Nilai
			B. Indo	B. Ing	Matik	Kompetensi	
1	Kota Jambi	3.273	7,13	7,46	7,28	7,99	29,86
2	Kota Sungai Penuh	649	7,17	7,81	7,64	7,87	30,49
3	Batanghari	518	6,22	6,98	6,61	7,72	27,53
4	Bungo	298	7,31	6,39	7,76	7,63	29,09
5	Kerinci	267	7,74	7,80	8,41	8,45	32,40
6	Tanjab Barat	446	7,01	7,22	6,65	7,69	28,57
7	Merangin	664	7,59	7,33	7,32	7,47	29,71
8	Sarolangun	984	7,18	7,35	7,29	7,96	29,78
9	Tebo	663	7,25	6,90	7,19	7,51	28,85
10	Muaro Jambi	621	6,98	6,66	6,95	7,76	28,35
11	Tanjab Timur	247	7,34	6,97	7,17	7,77	29,25
Provinsi Jambi		9.135	7,15	7,28	7,28	7,84	29,55

 : Peringkat 1
 : Peringkat 2
 : Peringkat 2

4. Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus/Layanan Khusus)

Pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya fokus pada pendidikan bagi siswa normal saja, namun upaya pembangunan dan pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus juga mendapat perhatian yang proporsional. Secara umum penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus/Pendidikan Layanan Khusus merupakan layanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kekhususan baik dari segi fisik maupun kecerdasan, pada jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Inklusi, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) lainnya.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Biasa (PLB/PK/PLK) di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dari dana APBD sebesar Rp. 4.648.136.000,00 penggunaan masing-masing sumber dana

adalah peningkatan mutu PKLK tingkat Menengah , Pengadaan Peralatan SDLB dan PLB serta Dukungan Operasional dan Event-event Nasional .

4.1.2. Dinas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2012 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan Program Pembangunan tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 28.109.351.290. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai masalah dan hambatan yang disebabkan karena berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan fisik dan biologis maupun lingkungan sosial budaya yang begitu cepat berubah.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: Program Promosi Kesehatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program jaminan kesehatan masyarakat Miskin, Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program Upaya Kesehatan Perorangan.

A. Program Kesehatan

1. Program Promosi Kesehatan

a. Program Desa Siaga Aktif

Desa/siaga dan kelurahan siaga aktif Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya telah melakukan kegiatan yang di sesuaikan dengan kemampuan dukungan anggaran yang diberikan dari APBD. Pencapaian program sudah cukup baik hal ini dapat ditunjukkan dari hasil pencapaian yang dilaporkan dari Dinas Kesehatan Kab/kota.

Tabel 4.7. Hasil Pencapaian Program Desa Siaga Aktif Tahun
2012

N0	Kab/Kota	Jumlah Desa / Kel.	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF				Jumlah Poskesdes yang beroperasi
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sungai Penuh	69	34	30	4	1	5
2	Batang Hari	113	49	10	4	4	53
3	Bungo	146	146	0	0	0	67
4	Tanjab Barat	134	63	7	0	0	56
5	MA. Jambi	154	79	46	7	2	88
6	Kerinci	246	38	86	22	0	32
7	Sarolangun	141	78	11	10	0	68
8	Tanjab Timur	93	75	18	0	1	26
9	Tebo	107	72	26	6	3	102
10	Merangin	212	54	17	8	45	20
11	Kota Jambi	62	8	0	0	0	8
	TOTAL	1384	621	234	61	56	499
Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota Desember 2012							

Jika dilihat dari tabel diatas maka desa siaga aktif bila dilakukan perhitungan sesuai dengan pedoman yang di keluarkan Pusat promosi kesehatan bahwa jumlah kumulatif dari pratamasampai dengan mandiri dibagi dengan jumlah desa yang ada maka presentase sudah mencapai 70,23 %. Angka pencapaian ini sudah cukup baik Bila dilihat target program desa siaga aktif Provinsi Jambi sebesar 25% dan target nasional sebesar 40% pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut 621 adalah dengan kriteria pratama. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak forum yang tidak aktif dan UKBM yang aktif adalah posyandu. Dari sisi kuantitas sudah cukup baik dan hal ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai desa siaga aktif purnama dan mandiri sehingga akan dapat kita lihat bahwa pemberdayaan kesehatan akan semakin baik jika UKBM yang ada di desa juga lebih

banyak aktif serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendukung anggaran maupun pembinaan yang dilakukan sampai ketingkat desa. Untuk memperkuat kelembagaan Desa siaga aktif di tingkat provinsi maka keluarnya SK Gubernur Jambi nomor 378/Kep.Gub/Dinkes/2012 tentang kelompok kerja Operasional desa/kelurahan siaga Aktif menuju Jambi EMAS 2015 dan diharapkan dapat di tindaklanjuti oleh kab/kota sampai ketingkat desa.

Untuk meningkatkan kemitraan dengan ormas maka telah dilakukan kerjasama dengan Fatayat NU dalam mengembangkan model di 2 kabupaten yaitu kabupaten Tebo dan Batanghari. Yang telah melakukan kegiatan di 7 desa. Menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan sosialisasi kegiatan dengan ormas tersebut dengan mengundang 11 cabang fatayat NU kab/kota. Sehingga diharapkan dapat menerapkan model desa siaga aktif yang telah dikembangkan di kabupten Batanghari dan Tebo

b. Pencapaian Pogram Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) tatanan Rumah Tangga

Program PHBS sejak digulirkan oleh pemerintah pusat baru pada tahun 2011 dikeluarkannya Permenkes Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Dengan hal tersebut tentunya akan memberikan payung hukum bagi Provinsi dan kabupaten dalam upaya meningkatkan kegiatan maupun dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Hasil pencapaian pada tahun 2011 mencapai

38 % untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target rumah tangga BerPHBS sebesar 50% Provinsi Jambi dan target nasional sebesar 60% pada tahun 2012. Hasil Pencapaian pada tahun 2012 yang dilaporkan dinas kesehatan kabupaten kota adalah sebesar 53% Berikut hasil pencapaian program PHBS tahun 2012 per Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Tabel 4.8. Pencapaian Rumah Tangga BerPHBS Tahun 2012

N0	KAB/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA YG DI PANTAU	RUMAH TANGGA BER-PHBS	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SAROLANGUN	57096	34751	21455	61%
2	KOTA JAMBI	115718	12901	3169	25%
3	TEBO	75822	22300	11374	51%
4	MERANGIN	66552	30966	7824	25%
5	TANJAB BARAT	71607	19180	13975	73%
6	BUNGO	75696	67800	41671	61%
7	KERINCI	13905	5513	3070	56%
8	TANJAB TIMUR	58761	3708	2585	70%
9	BATANG HARI	58761	3708	2583	69%
10	SUNGAI PENUH	20686	6004	4576	76%
11	MUARO JAMBI	83186	23357	15015	18%
	TOTAL	697790	230188	127297	53%

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota Desember 2012

Untuk mencapai hal tersebut maka upaya intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS dengan meningkatkan sosialisasi PHBS di media cetak maupun elektronik, melakukan upaya peningkatan Sumber daya manusia di puskesmas dalam perencanaan PHBS. Puskesmas adalah ujung tombak dalam upaya melakukan pembinaan PHBS

di tingkat desa sehingga peran puskesmas sangat menentukan keberhasilan dari program PHBS. Adanya Anggaran Biaya Operasional kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat untuk setiap puskesmas yang dapat digunakan dalam upaya pembinaan rumah tangga BerPHBS. Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Lomba Desa/kelurahan yang PHBS. Dengan lomba ini akan dapat mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengetahui program PHBS yang pada akhirnya akan memberikan dampak dari dukungan kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Dari hasil lomba tersebut dihasilkan dengan 2 kategori yang akan diajukan ketingkat Nasional sebagai berikut :

a. Lomba PHBS dengan kategori Kabupaten

1. Juara I Kabuapten Tanjung Jabung Timur
2. Juara II Kabuapeten Merangin
3. Juara III Kabupaten Sarolangun

b. Untuk Lomba PHBS dengan kategori Kota

1. Juara I Kota Sungai Penuh
2. Juara II Kota Jambi

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melakukan upaya dengan membuat program SMS sehat kerjasama denga PT. Telkomsel dengan jumlah penerima pesan sebanyak 2.400 orang. Upaya ini memberikan informasi PHBS yang dapat diterima di ponsel kader yang akan di sebarluaskan kepada masyarakat desa khususnya di kelompok pengajian.

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 telah dibuat 8 indikator dan target yang akan dicapai setiap tahunnya, dari 8 delapan indikator yang telah ditetapkan yang menjadi indikator utama program perbaikan gizi masyarakat adalah cakupan D/S dan penanganan anak gizi buruk.

a. Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu Tahun 2012

Pada tabel 3.1 di bawah ini dapat dilihat hasil pelaksanaan pemantauan pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi. Tujuan Pemantauan Pertumbuhan Balita adalah meningkatkan pelayanan gizi sesuai dengan Prosedur Pemantauan Pertumbuhan Balita.

Tabel 4.9. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH 0-59 BLN	S	K	D	N
1	KERINCI	24.080	24.080	22.154	15.321	13.659
2	SEI PENUH	8.494	8.494	7.821	6.519	5.863
3	MERANGIN	33.137	33.137	29.268	19.765	15.726
4	SAROLANGUN	21.802	21.802	20.821	19.961	17.051
5	BATANGHARI	25.005	25.005	20.913	17.031	12.781
6	MA JAMBI	30.709	30.709	29.219	23.719	20.524
7	TJB TIMUR	21.090	21.090	18.503	15.597	13.395
8	TJB BARAT	23.351	23.351	20.103	17.608	16.472
9	TEBO	27.559	27.559	26.512	16.769	14.441
10	BUNGO	31.046	31.046	29.166	21.050	17.647
11	JAMBI	44.707	44.707	44.707	27.527	21.462
	PROVINSI	290.979	290.979	269.187	200.867	169.021

Tabel 4.10. Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	KABUPATEN / KOTA	D'	BGM	2T	D / S	N / D'	N / S	K / S	BGM / D
1	KERINCI	14.082	25	121	63,63	96,99	56,72	92,01	0,17
2	SEI PENUH	6.082	30	133	76,75	96,40	69,03	92,08	0,45
3	MERANGIN	17.165	107	330	59,65	91,61	47,46	88,32	0,54
4	SAROLANGUN	18.381	107	61	91,56	92,77	78,21	95,50	0,54
5	BATANGHARI	14.203	87	340	68,11	89,99	51,11	83,63	0,51
6	MA JAMBI	21.659	1	240	77,24	94,76	66,83	95,15	0,00
7	TJB TIMUR	14.330	94	128	73,95	93,48	63,51	87,73	0,60
8	TJB BARAT	16.756	52	79	75,40	98,30	70,54	86,09	0,29
9	TEBO	15.052	55	231	60,85	95,95	52,40	96,20	0,33
10	BUNGO	18.826	275	164	67,80	93,74	56,84	93,95	1,31
11	JAMBI	24.055	252	504	61,57	89,22	48,00	100,0	0,91
	PROVINSI	180.592	1.085	2.329	69,03	93,59	58,09	92,51	0,54

Sumber : Laporan Bulanan Gizi Kabupaten/Kota sampai dengan November Tahun 2012

Pada tabel di atas dapat dilihat hasil pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi dimana diperoleh hasil untuk cakupan partipasi masyarakat (D/S) sebesar 69,03 %, yang naik timbangannya (N/D') sebesar 93,59 %, keberhasilan penimbangan (N/S) sebesar 58,09% balita yang mempunyai KMS (K/S) sebesar 92,51%. Jumlah balita di Bawah Garis Merah (BGM) datang ke penimbangan sebesar 0,54% untuk kegiatan penimbangan target indikator D/S yang harus dicapai pada tahun 2012 yaitu 66%.

b. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada tabel 3.2 di bawah ini disajikan jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tahun 2012.

Tabel 4.11. Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS DIRAWAT	PERSENT ASE KASUS DIRAWAT (%)	PERKEMBANGAN KASUS SETELAH PERAWATAN				
					GIZI BAIK	GIZI KURANG	GIZI BURUK	PINDAH	JUMLAH MENINGGAL
1	KERINCI	7	7	100	5	0	2	0	0
2	SEI. PENUH	6	6	100	5	0		0	1
3	MERANGIN	14	14	100	4	5	5	0	0
4	SAROLANGUN	34	34	100	33	0		1	0
5	BUNGO	4	4	100	3	0		1	0
6	TEBO	9	9	100	7	0		1	1
7	BATANGHARI	18	18	100	7	7	2	0	2
8	TANJAB TIMUR	7	7	100	7	0		0	0
9	TANJAB BARAT	1	1	100	1	0		0	0
10	KOTA JAMBI	31	31	100	17	0	12	0	1
11	MUARO JAMBI	11	11	100	8	0	3	0	0
	PROVINSI	142	142	100	97	12	24	3	5
Sumber : Laporan Bulanan Kasus Gizi Buruk Kabupaten/Kota Tahun 2012									

Pada tabel 4.11 dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tahun 2012 sebanyak 142 kasus dan sebanyak 5 orang meninggal. Semua kasus gizi buruk mendapat perawatan (100%), adapun perawatan yang diberikan berupa rawat inap atau rawat jalan. Berdasarkan laporan perkembangan kasus, sebanyak 97 kasus menjadi gizi baik, 12 kasus gizi kurang, 24 kasus masih gizi buruk. Bagi penderita pasca perawatan pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa formula pemulihan yang diberikan kepada sebanyak 33 anak. Jumlah penderita gizi buruk yang meninggal pada tahun 2012 (5 orang) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 (7 orang).

Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi disebabkan oleh masalah konsumsi yang kurang dan atau adanya infeksi seperti : cacingan, pneumoni, kelainan syarat, TB paru, hidrocephalus, brain

atrofi, microcephalus, kelainan jantung dan down sindrom. Masalah lain yang ditemukan masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak terutama dalam hal pemberian makan, kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan akibat kemiskinan.

3. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Provinsi Jambi diupayakan juga melalui pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi. Program ini dilakukan melalui program **“Satu Millar Satu Kecamatan (SAMISAKE)”** yang pada tahun 2012 sasaran kepesertaannya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di 81 Kecamatan uji coba program samisake dan 50 Kecamatan lainnya.

Adapun rencana pencapaian Jamkesmasprov Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini.

Tabel 4.12 Rencana Tahapan Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Jambi Tahun 2010 s/d 2014

No	Bentuk Jaminan	Tahap Penjaminan/Tahun (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jamkesmas	27,64	27,64	28,00	29,00	30,00
2.	Jamkesmasda (Provinsi + Kab/kota)	9,19	9,19	13,00	16,00	20,00
3.	Jaminan Mandiri (Jamsostek Askes Sosial, Komersil, Swasta lainnya)	10,75	20,00	30,00	40,00	50,00
	Total	47,58	56,83	71,00	85,00	100,0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Pada tahun 2012 telah diterbitkan Kartu Kepesertaan Jamkesmas Provinsi Jambi sebanyak 34.133 orang, secara lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Masyarakat Miskin dan Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesmasda di Provinsi Jambi Tahun 2012

No	Kab/Kota	Jumlah Maskin (org)	Jamkesmas da Prov (org)	Jamkesda Kab/Kota
1.	Kota Jambi	120.645	2.760	4.364
2.	Kab. Muaro Jambi	82.598	1.973	10.000
3.	Kab. Batanghari	84.990	1.282	54.761
4.	Kab. Tanjab Barat	68.198	2.486	15.000
5.	Kab. Tanjab Timur	75.409	296	3.570
6	Kab. Sarolangun	85.317	4.703	7.750
7.	Kab. Merangin	86.949	1.923	8.450
8.	Kab. Tebo	71.117	2.954	10.500
9	Kab. Bungo	63.886	451	6.000 dan seluruh masy. Berobat gratis di Puskesmas
10.	Kab. Kerinci	109.907	596	11.000
11.	Kota Sungai Penuh	-	215	32.000
Total		849.016	19.639	254.167

Sumber : Juknis Jamskesmas Samisake, 2011

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. PENCAPAIAN KINERJA :

a) CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Tabel 4.14. Capaian Indikator Sasaran

No	Kabupaten/ Kota	Persentase Persalinan yg ditolong tenaga kesehatan (PN)		Persentase kunjungan bayi		Persentase penjaringan kesehatan siswa SD kelas 1 dan setingkat		Persentase Puskesmas dengan Kinerja yang Baik	
		Targ. (%)	Capa. (%)	Targ.((%)	Capa. (%)	Targ. (%)	Capa. (%)	Targ. (%)	Capa. (%)
1	Kerinci	88,5	89.33	80	80.49	70	99.43	60	57,14
2	Merangin	88,5	81.10	80	89.12	70	97.37	60	33.33
3	Sarolangun	88,5	94.24	80	93.27	70	0	60	35,71
4	Batanghari	88,5	95.21	80	77.18	70	100	60	75
5	Muaro Jambi	88,5	90.47	80	95.53	70	0	60	55,55
6	Tanjab. Timur	88,5	87.67	80	80.30	70	100	60	17,65
7	Tanjab. Barat	88,5	94.45	80	87.85	70	46.32	60	81,25
8	Tebo	88,5	91.16	80	95.46	70	97.10	60	92,31
9	Bungo	88,5	90.17	80	80.82	70	100	60	38,89
9	Kota Jambi	88,5	90.25	80	98.12	70	0	60	100
11	Sungai Penuh	88,5	93.41	80	93.67	70	94.15	60	83,33
Provinsi		88,5	90.05	80	89.63	70	86.00	60	60,92

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran tersebut secara umum telah mencapai target, namun demikian masih ada Kabupaten/Kota yang belum mencapai target. Untuk indikator Persalinan yg ditolong tenaga kesehatan (PN), Kab/Kota yang belum mencapai target adalah Kabupaten Merangin yaitu hanya sebesar 81,10% (Target 88,5%). Indikator kunjungan bayi secara umum semua Kabupaten/Kota juga sudah mencapai target, hanya kabupaten Batanghari yang capaiannya belum mencapai target (77,18%). Untuk indikator penjaringan kesehatan siswa SD kelas 1 dan setingkat, Kabupaten/Kota yang capaiannya belum mencapai target ada 4 (empat) kabupaten, 3 (tiga) kabupaten capaiannya masih 0 (nol) dan 1 (satu) kabupaten yang capaiannya sebesar 46,32% (target 70%). Untuk indikator puskesmas dengan kinerja yang baik, kabupaten/ kota yang

capaiannya paling tinggi adalah Kota Jambi (100%) sedangkan yang terendah capaiannya adalah Kabupaten Tanjab. Timur sebesar 17,65% (target 60%)

b)CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN

Tabel. 4.15. Capaian Indikator Kegiatan

No	Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan antenatal (ANC) K4		Persentase pelayanan penanganan komplikasi kebidanan (PK)		Persentase pelayanan kesehatan pada ibu nifas (KF1)	
		Targ. (%)	Capa. (%)	Targ. (%)	Capa. (%)	Targ. (%)	Capa. (%)
1	Kerinci	93	91.46	63	52.62	88,5	89.70
2	Merangin	93	84.37	63	61.58	88,5	80.37
3	Sarolangun	93	93.91	63	75.12	88,5	93.67
4	Batanghari	93	94.45	63	97.41	88,5	95.27
5	Muaro Jambi	93	93.07	63	84.16	88,5	92.28
6	Tanjab. Timur	93	87.94	63	53.80	88,5	90.14
7	Tanjab. Barat	93	97.35	63	76.37	88,5	94.74
8	Tebo	93	85.32	63	42.52	88,5	77.55
9	Bungo	93	94.71	63	34.91	88,5	90.05
9	Kota Jambi	93	93.11	63	68.63	88,5	90.21
11	Sungai Penuh	93	93.76	63	56.03	88,5	90.30
Provinsi		93	93.51	63	64.62	88,5	89.08

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel. 4.16. Capaian Indikator Kegiatan

No	Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan kunjungan neonatal (KN 1)		Persentase penanganan komplikasi pada neonatal (PK)	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Kerinci	93	95.63	40	37.40
2	Merangin	93	87.15	40	71.25
3	Sarolangun	93	95.02	40	81.66
4	Batanghari	93	95.32	40	65.76
5	Muaro Jambi	93	96.01	40	22.25
6	Tanjab. Timur	93	95.38	40	31.17
7	Tanjab. Barat	93	99.78	40	78.34
8	Tebo	93	94.32	40	21.31
9	Bungo	93	93.45	40	25.25
9	Kota Jambi	93	93.23	40	33.59
11	Sungai Penuh	93	100.29	40	29.66
Provinsi		93	94.27	40	45.56

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel. 4.17. Capaian Indikator Kegiatan

No	Kabupaten/ Kota	Persentase SD dan setingkat melaksanakan penjangkauan kesehatan		Persentase pembinaan sekolah sehat melalui program UKS	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Kerinci	70	94.46	100	100
2	Merangin	70	70.73	100	100
3	Sarolangun	70	80.51	100	100
4	Batanghari	70	95.37	100	100
5	Muaro Jambi	70	91.29	100	100
6	Tanjab. Timur	70	88.41	100	100
7	Tanjab. Barat	70	78.30	100	100
8	Tebo	70	69.81	100	100
9	Bungo	70	96.40	100	100
9	Kota Jambi	70	100	100	100
11	Sungai Penuh	70	100	100	100
Provinsi		70	86.46	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel. 4.18. Capaian Indikator Kegiatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang Menerapkan Mutu di Puskesmas		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 50% Puskesmas menerapkan minimal 9 Program Pengembangan		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 75% Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas (P1,P2,P3))	
		Target (Puskesmas)	Capaian	Target (PKM)	Capaian	Target (Puskesmas)	Capaian
1	Kerinci	9	12	9	4	14	18
2	Merangin	9	6	9	4	14	18
3	Sarolangun	7	5	7	3	11	6
4	Batanghari	8	12	8	8	12	12
5	Muaro Jambi	9	10	9	8	14	18
6	Tanjab. Timur	8	3	8	4	13	8
7	Tanjab. Barat	8	13	8	6	12	16
8	Tebo	7	12	7	6	11	13
9	Bungo	9	7	9	5	14	12
10	Kota Jambi	10	20	10	10	15	20
11	Sungai Penuh	3	5	3	2	4	6
Provinsi		7 kab/kota	7 Kab/ Kota	4 Kab/ Kota	2 kab/kota	6 Kab/ Kota	8 Kab/ Kota

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari 10 (sepuluh) indikator kegiatan yang ada pada pada tabel diatas, secara umum telah mencapai target, namun demikian masih ada Kabupaten/Kota yang belum mencapai target. Untuk pelayanan antenatal (ANC) K4, kabupaten yang capaiannya diatas target paling tinggi adalah kabupaten Tanjung Jabung Barat (97,45%), sedangkan yang terendah adalah kabupaten Merangin (84,37%).

Untuk pelayanan penanganan komplikasi kebidanan (PK), kabupaten yang capaiannya diatas target paling tinggi adalah kabupaten Batanghari (97,41%), sedangkan yang terendah adalah kabupaten Bungo (34,91%). Untuk pelayanan kesehatan pada ibu nifas (KF1), kabupaten yang capaiannya diatas target paling tinggi adalah kabupaten Batanghari (95,27%), sedangkan yang terendah adalah kabupaten Tebo (77,55%).

Untuk pelayanan kunjungan neonatal (KN 1), kabupaten yang capaiannya diatas target yang paling tinggi adalah kabupaten sungai penuh (100,29%), sedangkan untuk kabupaten yang capaiannya paling rendah adalah kabupaten Merangin (87,15%). Untuk penanganan komplikasi pada neonatal (PK), kabupaten yang capaiannya diatas target paling tinggi adalah kabupaten Sarolangun (81,66%), sedangkan yang terendah adalah kabupaten Tebo (21,31%).

Untuk indikator kegiatan dari SD dan setingkat yang melaksanakan penjangkaran kesehatan dan yang melakukan pembinaan sekolah sehat melalui program UKS juga menunjukkan peningkatan capaian diatas target. Untuk SD dan setingkat yang melaksanakan

penjaringan kesehatan, kabupaten yang capaiannya paling tinggi adalah kota Sungai Penuh (100%) dan Kota Jambi (100%), sedangkan yang terendah adalah kabupaten Tebo (69,81%). Untuk pembinaan sekolah sehat melalui program UKS, semua kabupaten sudah mencapai target (100%).

Untuk Indikator kegiatan Kabupaten/Kota yang mempunyai 50% puskesmas yang menerapkan mutu di puskesmas yang capaiannya paling besar diatas target adalah Kota Jambi (20 PKM), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tanjab. Timur (3 PKM). Untuk kab/kota yang mempunyai 50% Puskesmas menerapkan minimal 9 Program Pengembangan hanya 2 (dua) yaitu Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sedangkan untuk Kab/Kota yang mempunyai 75% Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas (P1,P2,P3), rata-rata kabupaten capaiannya sudah diatas target, yang belum mencapai target hanya ada 3 (tiga) kabupaten, yaitu Sarolangun (6 PKM), Tanjab. Timur (PKM) dan Bungo (12 PKM).

5. Program Upaya Kesehatan Perorangan

a. Persentase rumah sakit pemerintah yang terakreditasi

Sesuai dengan undang-undang No.44 Tahun 2009, pasal 40 ayat 1, menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **wajib** dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Namun pelaksanaan akreditasi rumah sakit bukan hal yang mudah, karena salah satu faktor profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit tentang pemahaman

pelaksanaan akreditasi rumah sakit belum optimal. Pada tahun 2011 Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi baru 50 % atau baru 7 rumah sakit dan tahun 2012 bertambah 3 rumah sakit atau 71,4 % dari 14 Rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Jambi. Artinya secara target untuk tahun 2012 rumah sakit yang terakreditasi sesuai target yang ditentukan yaitu 3 rumah sakit.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Perorangan dengan dana Rp. 103.976.000, realisasi keuangan Rp.103.976.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%,
2. Kegiatan penilaian Lomba RS Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) dengan dana Rp. 79.168.000, realisasi keuangan Rp.67.606.000,- (85,4%) dan realisasi fisik 100%,

Dengan demikian sangat diharapkan kerjasama secara lintas program dan lintas sektoral dari berbagai stake holder (Tim KARS, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Rujukan). Di Provinsi Jambi sendiri sudah terbentuk tim pembina akreditasi rumah sakit yang melibatkan berbagai stake holder guna mendukung pelaksanaan akreditasi di rumah sakit. Pada tahun 2012 telah dibimbing 10 rumah sakit Pemerintah yang secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.19 Data Rumah Sakit Yang Sudah Terakreditasi
Dan Yang Belum Di Provinsi Jambi Tahun 2012**

No	Nama Rumah Sakit	Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Keterangan
1	RSUD Raden Mattaher Jambi	✓		12 pelayanan Tahun 2010
2	RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi	✓		5 pelayanan Tahun 2011
3	RSUD H. Abdoel Madjid Batoe Kab. Batanghari	✓		5 pelayanan Tahun 2011
4	RSUD KH Daud Arif Kabupaten Tanjab. Barat		✓	Bimbingan akreditasi Provinsi
5	RSUD H. Hanafie Kab. Bungo	✓		5 pelayanan Tahun 2011
6	RSUD ST. Taha Saifudin Kab. Tebo		✓	-
7	RSUD Kolonel Abundjani Kab. Merangin	✓		Bimbingan akreditasi Provinsi
8	RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kab. Sarolangun		✓	Bimbingan akreditasi Provinsi
9	RSUD Mayjen H. A Thalib Kab. Kerinci	✓		Bimbingan akreditasi Provinsi
10	RSUD Ahmad Ripin Kab. Muaro Jambi	✓		Bimbingan akreditasi Provinsi
11	RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur		✓	-
12	RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi		✓	-
13	RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	✓		5 pelayanan Tahun 2011
14	RS Bhayangkara Jambi	✓		5 pelayanan Tahun 2010
15	RS DR. Bratanata Jambi	✓		5 pelayanan Tahun 2010 12 pelayanan Tahun 2011
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi				

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 ada 4 (empat) rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi yaitu :

1. RSUD Abdul Manap Kota Jambi
2. RSUD H.Abdoel Madjid Batoe Kab.Batanghari
3. RSUD H.Hanafie Kab Bungo
4. RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Sedangkan tahun 2012 ada 3 (tiga) rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi yaitu :

1. RSUD Mayjend H. A.Thalib Kabupaten Kerinci
2. RSUD Kol.Abundjani Kabupaten Merangin
3. RSUD H. Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi

Jadi jumlah rumah sakit Pemerintah yang terakreditasi sampai tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh) rumah sakit atau sekitar 71,4 % dari jumlah 14 rumah sakit Pemerintah se Provinsi Jambi, sementara target yang ditentukan untuk tahun 2013 adalah 3 RS, dan rumah sakit yang dilakukan pembinaan dan bimbingan dari tim pembina akreditasi rumah sakit provinsi antara lain adalah :

1. RSUD Prof. DR. HM. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun
2. RSUD Kol. Abundjani Kabupaten Merangin
3. RSUD Mayjend H.A Thalib Kabupaten Kerinci

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Berdasarkan kepada kewenangan yang ada telah disusun Program baik yang merupakan kewenangan daerah melalui Tugas Pokok dan Fungsi maupun kewenangan yang dilakukan bersama melalui tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Berdasarkan Sasaran Program yang tercatum dalam Renstra Dinas Kesehatan yaitu Meningkatnya ketersediaan Obat esensial Generik di sarana Pelayanan Kesehatan dasar, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Kegiatan beserta target dan pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 4.20 Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target 2012	Capaian 2012

Sasaran :

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Utama :

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin

Indikator Kinerja Kegiatan :

1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90	90
2	Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Provinsi Jambi yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100	100
3	Persentase kabupaten/kota melaksanakan program kefarmasian dan alat kesehatan.	100	100
4	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memilih obat melalui metode CBIA	100	100

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari 4 Indikator kegiatan pencapaian pada tahun 2012, ke 4 indikator telah tercapai targetnya, namun demikian ke 4 kegiatan ini tetap berkesinambungan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu ke 4 kegiatan ini merupakan tugas pokok dari seksi farmasi dan perbekalan kesehatan untuk memonitor sejauh mana pelaksanaan program kefarmasian dan alkes yang telah dilaksanakan di 11 Kabupaten/kota.

A. CAPAIAN PROGRAM

Tabel 4.21. Capaian program pelayanan kefarmasian

No	Program / Sasaran	Target	Capaian	Ket
1	Peningkatan Pelayanan kefarmasian			
	Jumlah sarana Yankes yang melaksanakan PIO			
	Puskesmas	20%	92,54%	
	RSU	60%	83,33%	
	Apotek	50%	*	
	Jumlah sarana Yankes yang Melaksanakan POR			
	Puskesmas	50%	100%	
	RSU	42%	*	
2	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan 11 kab/kota mengalokasikan dana obat melalui APBD sehingga tercapai tingkat ketersediaan obat sesuai target			
	Dana obat/kapita (Rp)	14.000	8.342	
	Tingkat ketersediaan %	95	84	
3	Peningkatan Produksi dan distribusi alat kesehatan			
	Sarana distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan distribusi	55%	56%	
	Alkes yang memenuhi syarat (diuji)	100%	100%	
4	Peningkatan Produksi dan Distribusi kefarmasian			
	Sarana yang melaksanakan yang melaksanakan pelaporan Narkotika			
	Jumlah sarana melaporkan SIPNAP	100%	31,20%	
	Jumlah PBF melaporkan dinamika obat	70%	75%	
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi				

* Pelayanan kefarmasian di Apotek pada tahun 2012 belum diterima laporan kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) sehingga, belum dapat dihitung berapa capaiannya. Sedangkan Penggunaan Obat Rasional (POR) belum dapat dihitung capaiannya karena masih banyak RSUD yang belum memiliki formularium sebagai acuan dalam pengobatan di Rumah Sakit.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Persentase Desa UCI

Dalam upaya untuk mencapai target Desa UCI, Kemenkes RI menetapkan kebijakan upaya percepatan dengan Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional UCI (Universal Child Immunization) 2010-2014 (GAIN UCI) dimana upaya percepatan pencapaian UCI di seluruh desa/kelurahan pada tahun 2014 melalui suatu gerakan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat dan berbagai pihak terkait secara terpadu.

Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2012 untuk desa UCI adalah : 87% dengan realisasi capaian: 89,6 %. Ini dapat terlaksana dengan adanya dukungan kegiatan Peningkatan UCI.

b. Case Detection Rate (CDR) : Persentase Penemuan kasus Baru BTA (+) yang ditemukan.

Implementasi strategi DOTS di Provinsi Jambi saat ini telah dilakukan secara ekspansif dengan hasil cukup baik. Pada tahun 2012 angka cakupan penemuan kasus baru TBC Paru BTA (+) mencapai 65 % (3.313 penderita) dan angka kesembuhan sebesar 90.10 %. Angka cakupan penemuan kasus baru TBC Paru BTA (+) tahun 2012 ini kalau merujuk kepada Renstra Tahun 2010-2015 dimana target IKU tahun 2012 sebesar 69 % maka angka ini masih dibawah target. Untuk mendukung pencapaian penemuan kasus baru BTA (+) yang ditemukan (CDR) dilakukan

kegiatan Peningkatan penemuan dan kesembuhan penderita TB

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi program P2 TBC Paru di 11 kab/kota
2. Pembinaan Teknis terhadap pengelola Program P2 TBC Paru kab/kota dan Puskesmas
3. On the Job Training kepada petugas Poliklinik dan petugas Laboratorium Puskesmas
4. Pelatihan petugas Puskesmas dan RS pemerintah dan swasta (medis/paramedis/ laboratorium).

Mitra Kerja Dinas Kesehatan dalam penanggulangan P2 TB Paru

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
2. RS Pemerintah dan swasta
3. Rutan/Lapas
4. Industri (PT. LPP dan PT Agrowiyana)
5. NGO (PPTI)

Dalam pelaksanaan program P2 TBC Paru tahun 2012 ditunjang pendanaan dari APBD II, APBD I, Dana BOK, APBN dan GF-ATM Komponen TB. Sampai saat ini komponen pendanaan terbesar bersumber dari dana hibah GF-ATM Komponen TB (lk 90%).

Hambatan/masalah dalam pelaksanaan P2 TBC Paru tahun 2012:

1. Tingginya angka mutasi di tingkat Puskesmas, hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap program karena untuk menjadi tenaga terampil di bidang TBC Paru

harus menjalani pelatihan terlebih dahulu sedangkan tingginya angka mutasi di Puskesmas tidak sebanding dengan alokasi dana yang ada untuk pelatihan petugas Puskesmas.

2. Masih ada Puskesmas yang belum mempunyai tenaga laboratorium, sedangkan penegakkan diagnosa TBC Paru harus melalui pemeriksaan dahak di laboratorium.

c. Persentase Penanggulangan KLB <24 jam

Pada tahun 2012 penanggulangan KLB ditangani 100%, dimana kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang penanggulangan KLB <24 jam adalah penyelidikan epidemiologi, identifikasi.

Adapun Penanggulangan KLB yang dilaksanakan pada tahun 2012 : Kota Sungai Penuh : DBD, keracunan makan, campak dan chikungunya, Kab Tanjab Timur : campak, Kab Muaro Jambi : campak, keracunan makanan dan hepatitis A, Kota Jambi keracunan makanan, campak dan hepatitis A, Kab Tanjab Barat : keracunan makanan dan campak, Kab. Merangin : campak, Kab Sarolangun campak, Kab. Batang Hari campak. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi KLB di beberapa Kab/Kota seperti : Kab Tebo : campak, Kab Tanjab. Barat : dipteri, tetanus neonatorum, campak, pertusis, Kab. Sarolangun : diare, campak, Kab. Kota Sungai Penuh : keracunan makanan, DBD, Kab. Tanjab. Timur : keracunan makanan, Kab. Muaro Jambi : malaria, campak, Kab. Merangin : DBD, dan Kota Jambi : DBD.

Dalam mendukung pencapaian indikator dilakukan beberapa kegiatan yaitu kegiatan surveilans epidemiologi

dan kewaspadaan dini terhadap penyakit potensi wabah, dengan bentuk kegiatan berupa:

1. Pengumpulan data, identifikasi dan pelacakan kasus berdasarkan laporan dari Puskesmas dan Dinas kesehatan kab/kota.
2. Mengolah dan Menganalisa data yang didapat untuk mengetahui Pola penyebaran penyakit dan rencana tindak lanjut penanggulangan wabah.
3. bersama-sama dengan Dinas kesehatan Kabupaten/kota melaksanakan tindakan penanggulangan wabah.

d. Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2011 adalah 70 desa, sedangkan untuk tahun 2012 ditargetkan sebanyak 20 desa dan realisasi sebanyak 20 desa, Kumulatif sampai dengan tahun 2012 : 90 desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Community Water Services and Health Project (CWSHP) di 5 Kabupaten yaitu Muaro Jambi, Batang Hari, Bungo, Sarolangun, dan Tanjab. Barat.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku bersih sehat. Sebagai indikator pencapaian STBM, salah satunya adalah adanya deklarasi masyarakat desa bebas buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF).

Analisis keberhasilan pencapaian desa STBM tahun 2012 sebesar 100% adalah :

- Pelaksanaan STBM dilakukan secara intensif melalui proyek CWSH yang terencana, terkoordinasi secara lebih baik.
- Pembiayaan yang berbasis masyarakat dan dukungan pembiayaan oleh ADB sesuai kebutuhan.
- Adanya community fasilitator (desa)
- Adanya dukungan pemerintah daerah (Bupati) secara intensif.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilakukan kegiatan Sosialisasi kebijakan kesehatan lingkungan (pendampingan ADB) dengan dana Rp. 102.305.000, realisasi keuangan Rp.95.907.500,- (93,75%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan upaya penyehatan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan dan kesehatan tempat kerja dengan dana Rp. 58.445.000, realisasi keuangan Rp. 58.445.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

e. Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan Sehat

Kab/Kota/Kawasan Sehat merupakan suatu program/kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi aman, nyaman, bersih dan sehat secara terkoordinasi lintas program/lintas sektoral melalui 9 pilihan tatanan yang telah ditetapkan yaitu kawasan permukiman sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan pertambangan sehat, kawasan kehutanan yang sehat, prasarana umum perkotaan yang sehat, budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat,

kehidupan sosial yang sehat dan ketersediaan pangan dan gizi.

Di Provinsi Jambi kegiatan ini telah disosialisasikan sejak tahun 2005 ke semua Kab/Kota, dan pada tahun 2007 juga telah terbentuk Tim Pembina Kab/Kota sehat dengan surat keputusan No. 184/Kep.Gub/Dinkes/2007 serta No. 29 tahun 2008.

Untuk mendukung indikator sasaran Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan Sehat dilakukan beberapa kegiatan yaitu : Kegiatan monitoring kualitas lingkungan (udara) dengan dana Rp. 23.400.000, realisasi keuangan Rp. 22.980.000,- (98,21%) dan realisasi fisik 100%, Kegiatan pemberdayaan desa lingkungan bersih dan sehat dengan dana Rp. 56.870.000, realisasi keuangan Rp. 55.970.000,- (98,42%) dan realisasi fisik 100%.

Realisasi kegiatan tahun 2012 untuk Kab/Kota/Kawasan Sehat adalah 27,27% dimana target yang ditetapkan 70%. Kurang berhasilnya kegiatan ini disebabkan karena :

- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan secara lintas program/sektoral belum optimal.
- Kurangnya sosialisasi di semua tingkat (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)
- Tidak adanya pembiayaan dari APBN/APBD Kabupaten/ Kota

Kab/Kota yang telah membentuk Forum Kab/Kota sehat adalah :

1. Kab. Kerinci
2. Kota Sungai Penuh
3. Kota Jambi

4.1.2.1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pada tahun anggaran 2012 program yang telah dilaksanakan oleh RSUD Raden Mattaher sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perawatan, beberapa kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan perawatan pasien RSUD Raden Mattaher. Adapun pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher Jambi yaitu : pelayanan rawat jalan mencakup poliklinik spesialis antara lain poliklinik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit anak, bedah (bedah orthopedi, saraf, digestive, bedah tumor), telinga hidung tenggorokan, penyakit mata, penyakit saraf, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit kulit dan kelamin, penyakit gigi dan mulut (bedah mulut), penyakit jiwa, konsultasi gizi, pemeriksaan kesehatan. Poliklinik umum dan poliklinik lain sesuai perkembangan (VCT/Voluntari Conseling dan Testing). Untuk pelayanan rawat inap terdiri dari perawatan terpadu (paviliun Khusus, Nurdin Hamzah, Gapkindo, Teratai, Jamsostek), perawatan penyakit Dalam, Kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan anak, perinatologi, bedah dan bedah tulang, telinga hidung tenggorokan, penyakit mata, saraf, jantung, penyakit paru. Pelayanan penunjang medik mencakup radiologi (CT-Scan, Rontgen, USG, Panoramic, dll), patologi klinik (laboratorium khusus), patologi anatomi (Laboratorium anatomi), farmasi. Pelayanan penunjang diagnostik

mencakup pelayanan operasi (Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency), gawat darurat, ICU/ICCU, Hemodialisa, Cardiopulmonary, Endoscopy, Treadmill. Pelayanan medik lainnya antara lain medical chek up, rehabilitasi medik (fisioterapi), pemulasaran jenazah, konsultasi HIV serta pelayanan non medis antara lain gizi, sterilisasi, loundry dan incenerator.

Secara umum penilaian dimaksud sudah pada indikator baik, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian oleh UKG-PPP, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Pada pelaksanaan kegiatan di RSUD Raden Mattaher ada beberapa indikator yang di ukur dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.22 Indikator RSUD. Raden Mattaher Jambi Tahun 2008 s.d 2012

NO	INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	150.350	142.703	158.189	119,467	111.504	Kunj
2	Rawat Inap	16.855	17.066	15.004	16,835	17.770	Orang
3	Bed Occupancy Rate	81,7	76,25	72,7	82,7	80,43	%
4	Bed Turn Over	54,9	53,16	48,2	52,4	56,23	Kali
5	Length of stay	4,3	4,23	4,5	4,7	5,08	Hari
6	Turn Over Internal	1,2	1,63	2,1	1,2	1,27	Hari
7	Gross Death Rate	5.20	4,92	6,34	5,98	59.03	‰
8	Nett Death Rate	2.30	2,57	3	3,14	31.74	‰
9	Kunjungan IGD	15,345	18.130	16.143	24.039	24,963	Kunj
10	Operasi Besar	1,637	1.774	1.827	2.200	2,408	Kali
11	Operasi Sedang	458	654	732	748	724	Kali
12	Operasi Kecil	4,158	5.341	6,415	9.002	6,066	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	15.981	16,225	14,052	15.811	16.720	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48	394	402	494	483	485	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48	498	439	458	541	564	Orang
Jumlah TT Tersedia		307	321	315	321	316	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Tahun 2012

Dari tabel di atas terlihat perbandingan indikator pelayanan pasien di RSUD Raden Mattaher antara tahun 2011 dengan

tahun 2012 antara lain, BOR pada tahun 2011 sebesar 82,7% menurun menjadi 80,43% tahun 2012. Hal ini disebabkan pengurangan jumlah tempat tidur yang tersedia menurun akibat pembongkaran ruang rawat inap yang akan dibangun. Tempat tidur tercatat sebanyak 321, namun dalam kenyataannya yang dapat digunakan hanya 308 TT, sehingga penghitungan BOR menjadi menurun. BTO pada tahun 2011 sebesar 52,4 meningkat menjadi 56,23 kali pada tahun 2012 karena pasien yang menunggu sebelum dirawat (antri) sudah ada. LOS pada tahun 2011 selama 4,7 hari menjadi 5,08 hari pada tahun 2012, hal ini diakibatkan oleh jumlah pasien yang berpenyakit kronis dan pasien ulangan sehingga masa hari rawat menjadi lebih panjang.

TOI pada tahun 2011 tetap pada tahun 2012 yaitu 1,27 hari, menggambarkan padatnya hunian tempat tidur di RSUD Raden Mattaher. GDR juga tetap sama pada tahun 2011 dengan tahun 2012 yaitu 59,03 ‰ begitu juga dengan NDR tetap sama pada tahun 2011 dan 2012 yaitu 31,74 ‰ .

Disamping itu indikator lainnya yang dapat di uraikan adalah jumlah kunjungan rawat jalan, menurun dari 1119.467 kunjungan pada 2011 menurun menjadi 111.504 pada tahun 2012. Berbagai hal yang mengakibatkan turunnya kunjungan rawat jalan antara lain, berfungsinya sistem rujukan yang diterapkan oleh PT. Askes yaitu pelayanan dasar dilayani di Puskesmas dan Rumah Sakit sebelum di rujuk ke RSUD Raden Mattaher.

Khusus pelayanan Jamkesmas dan Jamkesmasda dari bulan ke bulan selama tahun 2012 meningkat secara

drastis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23 Kunjungan Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2012

Bulan	Total Pelayanan	Askes	Umum	Jamkesmas	Jamkesda	Astek	Gratis
Januari	31.221	5768	2862	1105	799	368	2
Februari	14.539	5134	2268	862	884	337	0
Maret	5.793	5245	2799	1067	1005	453	0
April	5.405	4681	2045	937	846	319	54
Mei	2.162	5186	2375	967	949	356	76
Juni	204	5207	2190	855	922	329	72
Juli	10.584	4.727	3977	864	651	317	48
Agustus	6.873	3679	1799	690	408	235	62
September	8.370	4.623	1882	940	563	318	44
Oktober	8.977	4.678	2174	991	724	346	64
November	8.775	4759	1983	943	668	303	119
Desember	8.601	4783	1824	953	666	309	66
Total	111.504	58.470	28.178	11.174	9.085	3.990	607

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2012, dari total pelayanan rawat jalan sebesar 111.504 kunjungan, terdiri dari kunjungan pasien Askes, Umum, Jamkesmas, Jamkesda, Astek dan gratis. Terbanyak jumlah pasien Askes disusul pasien umum dan Jamkesmas.

Kemudian pola penyakit rawat jalan yang datang berobat ke RSUD Raden Mattaher selama tahun 2012 dikategorikan sepuluh penyakit terbanyak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24 Sepuluh Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2012

No	Penyakit	Total	Presentase
1	HHD	18.496	30,4
2	Hipertensi	7.044	11,6
3	Diabetes Melitus	6.098	10
4	TB Baru	5.143	8,4
5	ISPA	4.714	7,7
6	Neoplasma jinak kulit	4.687	7,7
7	Rheumatoid Arthritis	4.409	7,2
8	Dyspepsia	3.829	6,3

9	Asma	3.583	5,9
10	OMA	2.931	4,8
Total		60.934	100

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2012

Selanjutnya pasien rawat inap dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.25. Jumlah Pasien Rawat Inap RSUD Raden Mattaher
Jambi Tahun 2012

Bulan	Total Pelayanan	umum	askes	Jamkesmas	astek	jamkesda
Januari	1.718	336	440	484	75	383
Februari	1.458	267	393	463	42	293
Maret	1.524	232	450	493	37	312
April	1.450	250	410	467	40	283
Mei	1.515	252	412	465	51	335
Juni	1.368	263	352	436	48	269
Juli	1.489	293	399	532	34	231
Agustus	1.267	306	366	417	34	144
September	1.483	354	431	427	35	236
Oktober	1.530	331	415	502	30	252
November	1.432	318	428	402	38	246
Desember	1.536	302	439	485	41	269
Total	17.770	3.504	4.935	5.573	505	3.253

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2012, dari total pelayanan rawat inap sebesar 17.770 orang, terdapat 5.573 orang atau sebesar 31,36% pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan 3.253 orang atau sebesar 18,31% pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesmasda.

Jenis penyakit yang diderita pasien rawat inap pada umumnya termasuk dalam 10 jenis penyakit terbesar di RSUD Raden Mattaher selama tahun 2012 dengan katagori sebagai berikut :

Tabel 4.26 Sepuluh Penyakit Terbesar Rawat Inap Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2012

No	Penyakit	Total	Presentase
1	Dyspepsia	471	14,7
2	Diabetes Mellitus	449	14,0
3	TB Paru	354	11,0
4	Stroke	334	10,4
5	Hipertensi	326	10,2
6	Malaria	322	10,0
7	CRF	258	8,0
8	Pneumonia	255	7,9
9	DBD	244	7,6
10	Asma	196	6,1
Total		3.209	100

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher. 2012

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan jumlah tindakan operasi yang meningkat pesat seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.27 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Jumlah Tindakan Operasi

No	Pelayanan	Tahun		Satuan
		2010	2011	
1	Kunjungan IGD	24.039	24.963	Kunjungan
2	Operasi Besar	2.200	2.408	Kali
3	Operasi Sedang	748	724	Kali
4	Operasi Kecil	9.002	6.066	Kali

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher. 2012

2. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasana

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal RSUD sebagai Rumah Sakit Pendidikan, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan antara lain : *In House Training*, pendidikan dan pelatihan di

luar RS serta Temu ilmiah Sedangkan untuk mendidik siswa-siswa sekolah kesehatan yang ada di Provinsi Jambi dan bagi mahasiswa Kedokteran Universitas Jambi dibuat suatu kerja sama antara RSUD Pendidikan Raden Mattaher dengan 13 Institusi Kedokteran/Pendidikan Kesehatan serta MoU RSUD Pendidikan Raden Mattaher dengan RS Jejaring. Kemudian untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tersebut disusun sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis perjanjian kerja sama.

Ikatan kerjasama tersebut meliputi kegiatan praktek klinik keperawatan, kebidanan, gizi, kesehatan gigi, farmasi, analis kimia, kesehatan lingkungan, kepaniteraan klinik junior dan senior, pengambilan data, penelitian dan magang. Untuk kegiatan pengambilan data/penelitian sebanyak 663 orang dan magang mahasiswa sebanyak 82 orang.

Kegiatan pelatihan di dalam rumah sakit (*in house training*) berlangsung sebanyak 5 kali dengan jumlah peserta sebanyak 282 orang dan pertemuan ilmiah sebanyak 20 kali yang diikuti oleh 1.820 orang. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher, beberapa peralatan yang dilaksanakan pengadaannya bersumber dari dana APBD, BLUD, DAK, APBN.

3. Program Sistem Administrasi Rumah Sakit dan Badan Layanan Umum.

Sejalan dengan peningkatan mutu layanan administrasi dan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Raden Mattaher telah menyusun program Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS). Dengan dibangunnya jaringan dan program tersebut diharapkan Sistem Pencatatan dan Administrasi RS akan berjalan dengan cepat, tepat dan akurat.

Demikian juga untuk mendukung prosedur penatalaksanaan sistem keuangan BLUD, RSUD Raden Mattaher juga telah bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun Sistem dan prosedur Penatausahaan Keuangan RS dan Sistem Penyusunan Laporan Keuangan sehingga Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengeluaran dan Pendapatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien

4.1.2.2. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapatkan penghasilan berupa retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan ASKES, Pelayanan Jamkesmas dan Pelayanan Jamkesda.

Sesuai Keputusan Gubernur Jambi No.149/Kep.Gub/RSJD/2011 tanggal 7 April 2011, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah sehingga 100% pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit.

Pada tahun 2012, penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.672.782.208,-. Untuk jelasnya, berikut ditampilkan tabel rincian target dan penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012.

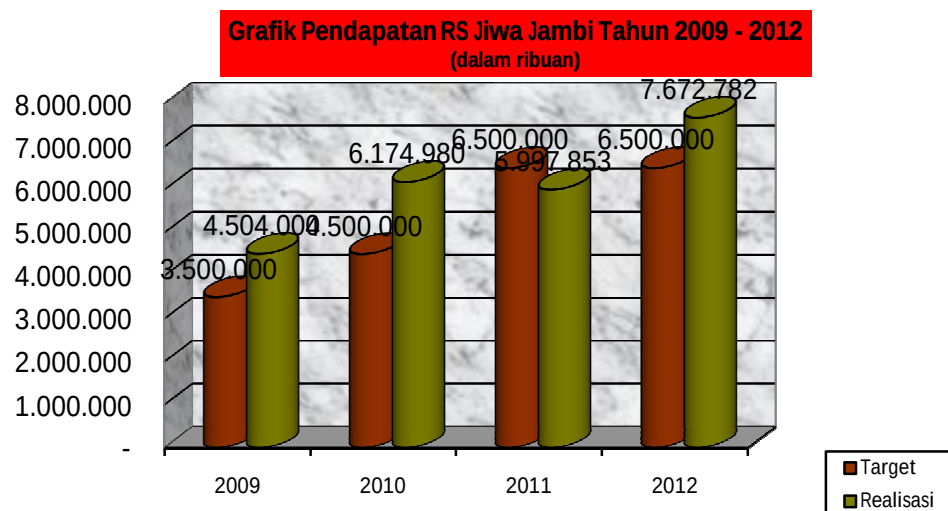
Tabel 4.28 Rincian, Target dan Realisasi Penerimaan

No	Rincian Penerimaan	Penerimaan Target	Realisasi
1	Pelayanan Rawat Jalan	Rp. 550.000.000	806.496.750
2	Pelayanan Rawat Inap	Rp. 400.000.000	335.663.400
3	ASKES	Rp. 350.000.000	533.922.290
4	JAMKESDA	Rp. 300.000.000	2.666.608.253
5	JAMKESMAS	Rp.4.900.000.000	3.030.042.873
	PENERIMAAN LAIN-LAIN DAN SEWA	-	259.434.412
7	Jasa Giro	-	40.614.230
	TOTAL	Rp.6.500.000.000	7.672.782.208

Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2012 meningkat sebesar 78 % tahun 2011.

Berikut ditampilkan grafik pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2012.



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Gambar 4.1 Grafik Pendapatan RS Jiwa Tahun 2009 - 2012

A. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Total anggaran belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 sebesar Rp. 33.642.269.508,- yang dialokasikan untuk belanja operasional Rp. 26.379.325.208,- dan belanja Modal Rp. 7.262.944.300,-. Realisasi untuk masing - masing belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.29.Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
		Dalam APBD	Rp	%
I.	Belanja Operasional	26.379.325.208	25.339.792.722	96
	- Belanja Pegawai	16.249.122.635	15.593.432.273	95
	- Belanja Barang dan Jasa	10.130.202.573	9.746.360.449	96
II.	Belanja Modal	7.262.944.300	6.798.875.688	93
	- Belanja Peralatan dan Mesin	2.202.584.600	2.093.624.188	95
	- Belanja Bangunan dan Gedung	5.060.359.700	4.705.251.500	92
Total		33.642.269.508	32.138.668.410	95

Sumber : RSJ Provinsi Jambi

B. Realisasi Program /Kegiatan Urusan Wajib di RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi

1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.

Anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan ini adalah sebesar Rp2.460.124.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.135.055.395,00 atau 86,79%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Alokasi dana untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 36.136.100 dengan realisasi sebesar Rp 29.351.050,00. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Untuk tahun 2012, jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan praktek/magang berjumlah 10 institusi. Dan pelatihan dan pendidikan intern yang dilaksanakan di tahun 2012 adalah sebanyak 3 macam pelatihan yaitu pelatihan Customer Service Pelayanan & Keperawatan, Pelatihan Bantuan Hidup dasar (BHD), pelatihan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) bagi perawat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia habis pakai sebagai salah satu penunjang pokok dalam upaya penyembuhan pasien. Anggaran yang disediakan untuk penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan adalah sebesar Rp 268.000.000,00 Realisasi belanja dari kegiatan ini adalah sebesar Rp 267.708.700,00 atau 99,89%.

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah upaya pelayanan kesehatan yang prima khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya cakupan upaya kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan penunjang. Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.838.000,00 atau 99,46%. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pemenuhan bahan praktek dan percontohan untuk mendukung pemulihan kesehatan.

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Arah kebijakan program ini adalah menghasilkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.

Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Anggaran yang disediakan

untuk program ini adalah sebesar Rp 55.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 34.211.600,00 atau 62,20%

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang upaya pelayanan kesehatan prima.

Indikator Kinerja program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah kegiatan pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit. Alokasi belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp2.999.216.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.451.350.000,00 atau 81,73%.

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa

Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit serta kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 915.000,00.

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan penyuluhan, integrasi ke kabupaten, penjangkaran

gtelandangan dan pasien bebas pasung. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.838.000,00 atau 99,46%.

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah peningkatan gizi masyarakat baik pasien maupun pegawai rumah sakit. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.916.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.730.226.000,00 atau 90,26%.

10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

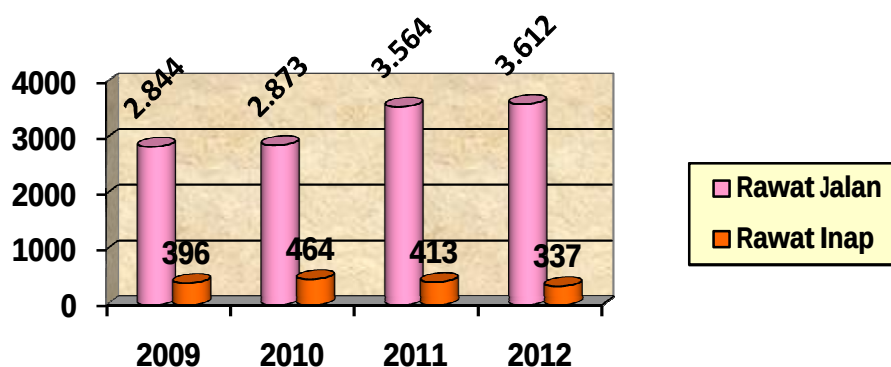
Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD ke arah pelayanan yang menuju pelayanan Rumah Sakit yang terakreditasi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.196.847.473,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.113.645.495,00 atau 98,98%.

C. Capaian/Perubahan Data Mikro Sektor (2009 dan 2012)

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di tahun 2012 berupa pembangunan Gedung rawat inap kelas III (Dana APBD, Dana DAK), pembuatan konblok/parkiran IGD, pembuatan jalan lingkungan & IPAL, pembuatan wastafel ruangan rawat inap kelas III (Gama, MPKP, Arjuna, Srikandi, PICU). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap bagi pasien kurang mampu/miskin yang memiliki

kartu jamkesmas. Berikut disajikan tabel jumlah pasien jamkesmas tahun 2009 dan 2012.

Grafik Kunjungan Pasien Jamkesmas Tahun 2009 - 2012



Gambar 4.2. Grafik kunjungan pasien Jamkesmas

Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Tabel 4.30 Jumlah Pasien Jamkesmas Tahun 2009 dan 2012

No	URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Pelayanan Rawat Jalan	2.844	2.873	2.343	3.612
2	Pelayanan Rawat Inap	396	464	464	337

Sumber : RSJ Provinsi Jambi

D. Capaian/Perubahan Data Makro Sektor (2009 - 2012)

Secara makro, pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2012 berdampak pada peningkatan kinerja para aparatur. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap dari

tahun sebelumnya serta indikator lain yang dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Berikut disajikan tabel utilisasi/pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2009 - 2012.

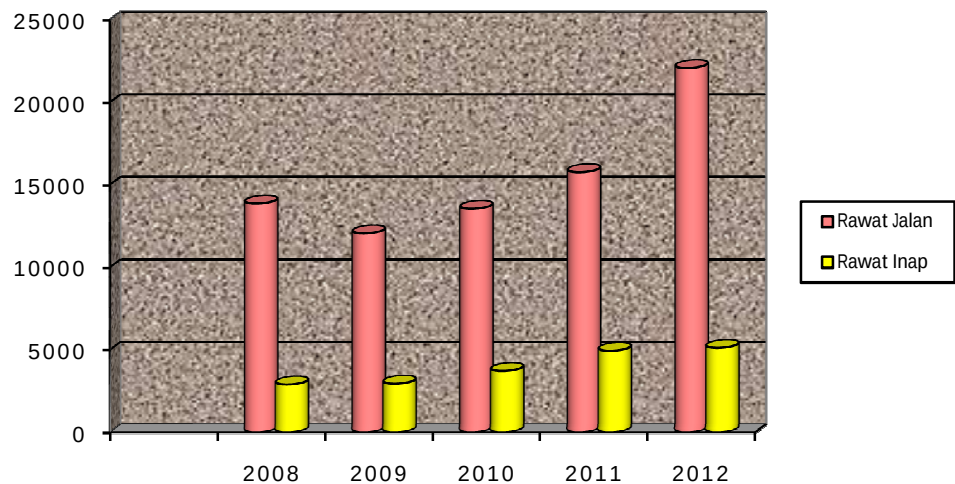
Tabel 4.31 Utilisasi/Pemanfaatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2012

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2010	2011	2012
1.	Kunjungan Pasien R. Jalan	Kunjungan	13.009	13.538	22.281
2.	Kunjungan Pasien R. Inap	Kunjungan	2.940	3.711	5.112
3.	Jumlah Tempat Tidur	Buah	200	200	200
4.	Bor Occupancy rate (BOR)	%	74	1	- Kelas I & II = 51,34 % - Kelas III = 113,60 % - Ruang PICU=217,09 %
5.	Bed Turn Over (BTO)	Kali	3	9	- Kelas I & II = 11,35 - Kelas III = 4,73 - Ruang PICU = 88,3
6.	Lenght of Stay (LOS)	Hari	42	21	- Kelas I & II = 17,31 - Kelas III = 61,33 - Ruang PICU = 10,50
7.	Turn Over Internal (TOI)	Hari	27	8	- Kelas I & II = 14,2 - Kelas III = 10,4 - Ruang PICU = -3,46
8.	NDR (Nett Death Rate)	%	-	-	-
9.	GDR (Gross Death Rate)	%	0	-	0
Sumber : RSJ Provinsi Jambi					

Keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap yang menunjukkan adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

Berikut disajikan grafik kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap tahun 2008 sampai dengan 2012

Gambar.4.3 Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap
RS Jiwa Daerah provinsi Jambi Tahun 2008 –
2012



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini selain kegiatan peningkatan mutu layanan kesehatan juga dilakukan penjangkaran pasien pasungan, gelandangan, kegiatan integrasi berupa promosi dan penyuluhan kepada masyarakat terutama di daerah terpencil.

Pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan sesuai dengan maklumat yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu unit layanan kesehatan jiwa telah menjalankan maklumat tersebut dengan baik.

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien tidak mampu/miskin yang dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

4.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi, yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah, kesiapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penentu arah dan perkembangan dinamika sosial, aktivitas ekonomi serta fungsi-fungsi distribusi. Arah pembangunan infrastruktur ditujukan pada upaya mengakselerasi perkembangan daerah secara menyeluruh dengan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara finansial pemenuhan infrastruktur di Provinsi Jambi memang belum mampu menjangkau pendekatan suplai yang bertujuan merangsang investasi. Namun dengan kemampuan terbatas upaya berkelanjutan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terus dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan, pemeliharaan serta perbaikan tata kelola yang diharapkan mampu memacu terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan secara luas dan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian di Provinsi Jambi.

1. Program dan Kegiatan

Penanganan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang menjadi bagian penopang

utama peningkatan perekonomian dan kemandirian daerah. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015, serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran daerah, dimana porsi terbesar memang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam penanganan atau penyediaan infrastruktur adalah melalui penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang meliputi program dan kegiatan kebinamargaan, program dan kegiatan keciptakaryaan, program dan kegiatan sumber daya air, serta program dan kegiatan pendukung lainnya. Selama tahun 2012, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum adalah senilai Rp664.971.405.427,00. Dari alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp629.856.222.735,00. atau 94,72%. Adapun rincian program dan kegiatan masing – masing bidang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.32 Program/Kegiatan Bagian Kesekretariatan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2.761.543.000		
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	15.000.000	100
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	385.000.000	371.521.092	96,5
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (ABT)	113.000.000	101.475.945	89,8
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	598.376.000	578.267.000	96,64
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	685.580.000	654.408.480	95,45
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	143.822.000	143.821.700	99,99
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	88.497.000	88.497.000	100
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	165.000.000	162.850.400	98,7
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	67.500.000	66.215.000	98,1
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	469.768.000	466.544.850	99,31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.767.266.000		-
Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	3.091.118.750	2.947.541.000	95,36
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	4.535.616.250	4.321.780.600	95,29
Kegiatan Pengadaan Komputer	837.113.000	807.073.000	96,41
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	885.000.000	855.062.000	96,62
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	355.318.000	354.544.994	99,78
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.600.000	40.600.000	100
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	22.500.000	22.320.000	99,2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	281.250.000		-
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	281.250.000	269.305.000	95,75
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	262.723.000		-
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	120.000.000	116.996.000	97,5
Pendidikan dan Pelatihan Formal	142.723.000	138.200.000	96,83
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	350.000.000		-
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	148.000.000	136.476.500	92,21
Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat	78.000.000	76.287.000	97,80
Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi	94.000.000	93.992.000	99,99
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	30.000.000	29.403.000	98,01
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi			

Tabel 4.33 Program/Kegiatan Bidang Kebinamargaan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program /Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
	407.090.509.027	392.039.421.622	
Program pembangunan jalan dan jembatan	343.430.812.800	331.876.992.688	96,63
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah I (KabTanjab Barat)	7.630.222.000	7.358.419.000	96,44
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah II (KabTanjab Timur dan MaJambi)	65.244.830.000	62.741.288.000	96,16
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah III (KabBungo)	21.187.587.000	20.184.851.000	95,27
Keg. Pemb jalan sumber DAK	19.131.249.800	18.347.096.600	95,9
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (KabBatanghari dan MaJambi)	43.589.321.000	41.568.147.000	95,36
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah V (KabMerangin)	64.135.420.000	63.814.491.000	99,5
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (KabKerinci)	33.903.054.000	31.810.834.000	93,83
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (KabSarolangun)	42.386.621.000	41.095.693.500	96,95
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	17.083.363.000	16.755.462.688	98,08
Pembangunan Jembatan di wil II dan III (Kab. Batang Hari dan Kota jambi)	29.139.145.000	28.200.709.900	96,78
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	63.669.696.227	60.162.428.934	
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan jalan wilayah perkotaan	24.605.629.000	23.336.518.410	94,84
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah III (KabBungo dan Tebo)	16.828.265.000	15.905.108.250	94,51
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi di wilayah barat	4.803.275.227	4.298.305.125	89,49
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di jalan Provinsi Jambi	4.577.976.000	4.381.527.000	95,71
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah VI (KabKerinci)	8.332.085.000	7.822.483.000	93,88
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Rutin di wilayah Timur dan tengah	4.522.466.000	4.418.487.149	97,70
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi			

Tabel 4.34 Program/Kegiatan Bidang Sumber Daya Air serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program /Kegiatan Per Bidang	Realisasi		%
	Anggaran	Keuangan	
1	2	3	4
Program pembangunan turap/talud/ bronjong	18.404.807.500	16.938.328.880	
Kegiatan Perencanaan turap/talud/ bronjong	3.702.150.250	3.606.608.630	97,42
Kegiatan Pembangunan turap/talud/ bronjong	14.702.657.250	13.331.720.250	90,7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	53.198.613.500	47.460.055.150	
Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	3.551.770.250	3.426.232.250	96,46
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	21.666.450.250	18.497.980.000	85,37
Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4.819.696.750	4.468.535.150	92,71
Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi			
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan rawa	22.500.329.250	20.573.929.950	91,43
Kegiatan Pengelolaan sumber daya air	660.367.000	493.377.800	74,71
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.896.782.000	2.694.171.000	93
Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air tanah	2.896.782.000	2.694.171.000	93
Program Pengendalian Banjir	14.264.228.000	13.210.246.950	92,61
Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali		13.210.246.950	92,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Tabel 4.35 Program/Kegiatan Bidang Cipta Karya serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.550.702.600		
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	35.661.538.200	32.259.651.000	90,46
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	5.409.830.000	5.196.650.100	96,06
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	15.651.040.000	14.754.555.900	94,27
Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor dan Prasarana	828.294.400	805.252.750	97,22
Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	3.244.649.100		
Kegiatan Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	984.921.300	954.911.150	96,95
Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.259.727.800	2.005.611.200	88,75
Kegiatan Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	5.665.938.000	5.397.870.600	95,27
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.636.210.300		
Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum	20.636.210.300	19.249.158.750	93,28
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	150.000.000		
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150.000.000	109.813.950	73,21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Tabel 4.36 Program/Kegiatan Bidang UPTD Balai Pengujian serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program /Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.352.040.400	2.068.514.310	87,98
Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1.997.376.400	1.815.221.810	90,88
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	353.664.000	253.292.500	71,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Tabel 4.37 Program/Kegiatan Bidang UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program /Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			
Pengadaan Alat-alat berat	5.161.795.250	5.113.404.988	99,06
Rehabilitasi/Pemel. Alat-alat berat	2.441.496.500	2.107.020.500	86,30
Operasional Alat alat Berat	4.258.963.750	2.221.704.625	52,17
Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Operasional Peralatan	527.744.500	487.263.722	92,33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan Kebinamargaan

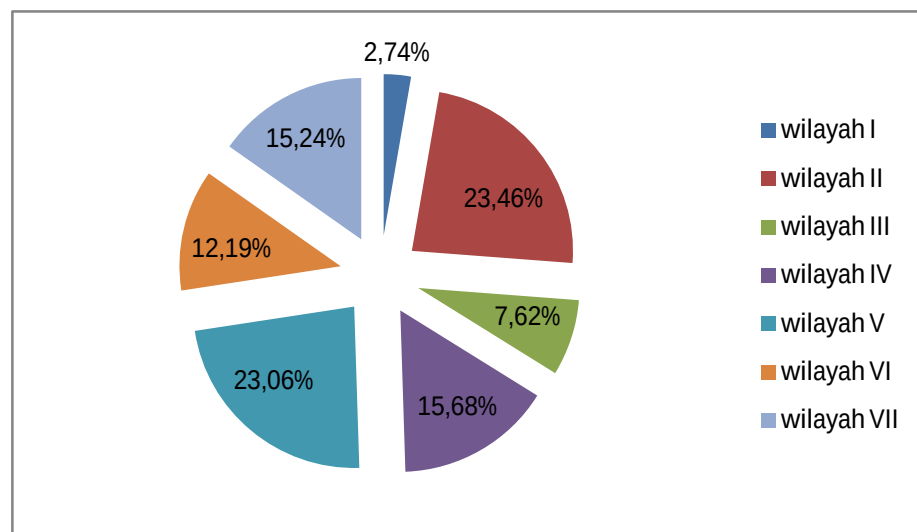
Penanganan infrastruktur Kebinamargaan di Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2012 difokuskan pada program pembangunan jalan dan jembatan; dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan infrastruktur kebinamargaan pada Tahun Anggaran 2012 ini mencapai Rp. 407.090.509.027,- yang digunakan untuk implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dimana jalan yang harus ditangani di Provinsi Jambi adalah sepanjang 1.504,929 kilometer.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program kebinamargaan pada umumnya tidak ada permasalahan yang berarti. Dari Alokasi sebesar Rp.407.090.509.042, realisasi keuangan yang terserap sebesar Rp. 392.040.095.823 atau 96,30%. Dan selebihnya sebesar Rp.15.050.413.284 (3,7%) merupakan sisa tender dan menjadi SILPA APBD Tahun Anggaran 2012. Sedangkan pekerjaan berbentuk fisik seluruhnya mencapai 100%.

1. Program pembangunan jalan dan jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan ini mendapatkan alokasi terbesar anggaran kebinamargaan, yaitu sebesar Rp.343.430.812.800,-. Atau 84,36 % dari total anggaran bidang kebinamargaan dan terealisasi sebesar 96,63 %. Pendistribusian kegiatan dalam program pembangunan jalan dan jembatan ini menggunakan pendekatan kewilayahan dimana Provinsi Jambi dibagi

menjadi 7 wilayah yang terdiri dari wilayah I (Kabupaten Tanjab Barat), wilayah II (Kab. Tanjab Timur dan Ma. Jambi), Wilayah III (Kab. Bungo), Wilayah IV (Kab. Batanghari dan Ma. Jambi), Wilayah V (kab. Merangin), Wilayah VI (Kab. Kerinci) dan wilayah VII (Kab. Sarolangun). Khusus distribusi anggaran pembangunan jalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.4 Distribusi anggaran pembangunan jalan

Salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan adalah membuka keterisolasian wilayah-wilayah produksi pertanian utama yang berada di wilayah Barat dan Tengah Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga bertujuan secara tidak langsung untuk mengurai kemandegan (*bottlenecking*) yang selama ini dianggap menjadi faktor utama rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dan fluktuasi inflasi perdesaan. Oleh karena itu, prioritas penanganan jalan dan jembatan tahun 2012 adalah Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pulau Rengas – Jangkat (*Multiyears*); ruas Jalan Bts. Kerinci – Sangg. Agung; Tempino – Ma. Bulian; Simp.

Pelawan – Sei. Salak – Pekan Gedang – Ma. Talang dan Jalan Simp. Pudak – Suak Kandis – Desa Simpang. Program prioritas tersebut menyerap alokasi 45 % dari total APBD Kebinamargaan Provinsi Jambi. Sisanya tersebar di seluruh ruas jalan lainnya. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kabupaten/kota.

Sedangkan untuk penanganan jembatan selama tahun 2012 meliputi Pembangunan Jembatan Gantung di Angso Duo (Jembatan Pedestrian) sepanjang 491,5 Meter yang pada tahun 2012 dalam tahap pemancangan tiang pancang dengan alokasi Rp.17 Milyar dan diharapkan selesai pada tahun 2014 melalui kontrak Multy Years. Sampai dengan Desember 2012 terhadap Kontrak Anak-I progres fisik dan keuangan telah terealisasi 100% dari Alokasi yang dianggarkan Rp.17 Milyar. Sedangkan terhadap Kontrak Induk progres fisik dan keuangan mencapai 22,051% dari Nilai Kontrak Induk sebesar Rp. 77.093.202.000,-.

2. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.63.669.696.227,- atau 15,64% dari total anggaran kebinamargaan tahun 2012 dan telah terserap sebesar 94,49%. Secara keseluruhan, penanganan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan adalah peningkatan jalan efektif 237,00 km atau 15,75% dari total panjang jalan Provinsi yang menyerap 85,23% alokasi anggaran Bina Marga tahun 2012 dan pelaksanaan pekerjaan fungsional sepanjang 595,20 km atau 39,55% dari total panjang jalan Provinsi. Dengan total penanganan jalan

hanya sepanjang 832,20 km, atau 55,30% terindikasi bahwa APBD 2012 masih jauh dari rasio kecukupan.

Padahal di sisi lain laju kerusakan masih cukup tinggi terkait adanya eksploitasi sumberdaya alam yang penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemeliharaan semata. Kenyataan ini dapat dilihat dari laporan statistik kondisi jalan hingga bulan Desember 2012:

- 1) Kondisi Baik sepanjang 551,080 Km atau (36,618 %);
- 2) Kondisi Sedang sepanjang 544,915 Km atau (36,209%);
- 3) Kondisi Rusak Ringan sepanjang 280,003 Km atau (18,606%);
- 4) Kondisi Rusak Berat sepanjang 128,931 Km atau (8,56%).

Persentase kenaikan terbesar adalah jalan yang berkondisi baik dengan kenaikan sebesar 2,058 % dibanding kondisi Desember 2011 (sebesar 34,560%) Sedangkan jalan yang berkondisi rusak ringan sampai rusak berat turun sebesar 1,267% dibanding periode yang sama tahun 2011.

Berdasarkan analisa, rumusan kelayakan rasio kecukupan yang ideal sesuai target RPJMD dengan laju kerusakan seperti saat ini adalah 20 : 80, atau 300,986 km pekerjaan efektif dan 1.203,943 km pekerjaan fungsional/ pemeliharaan yang apabila diuangkan secara total kebutuhan ideal sedikitnya Rp.545 Milyar berdasarkan harga berlaku tahun 2012.

b. Program dan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendung, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya untuk memberikan jaminan pelayanan terhadap lahan irigasi seluas 6.029 ha (kewenangan Provinsi) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi daerah irigasi, bendung dan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi serta pengawasan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya pertanian secara luas.

Penanganan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Jambi pada tahun 2012 lebih dititik beratkan pada program pembangunan turap/talud/bronjong; program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; program penyediaan dan pengelolaan air baku; dan program pengendalian banjir. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur bidang sumber daya air ini pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 88.764.431.000.- dan telah terserap sebesar 88,62%.

1. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.18.404.807.500,- dan telah terealisasi sebesar 92,03%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah perencanaan turap/talud dan bronjong dan pembangunan turap/talud/bronjong. Secara keseluruhan, target capaian program ini selama 5 (lima) tahun adalah sepanjang 6.400 meter. Sedangkan dalam implementasinya baru mampu disusun rencana desain sepanjang 2.833 meter (44,27%) yang meliputi pembangunan turap, penahan tebing sungai, pelindung tebing sungai.

Kegiatan perencanaan (survey investigasi sungai, pelindung tebing, bangunan pengendali banjir, dll) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kawasan atau lokasi-lokasi yang memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan skala prioritas (urgensi, kemendesakan, biaya, dampak, dll). Hasil dari kegiatan perencanaan ini menjadi salah satu masukan bagi penentuan alternatif dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur SDA (fisik) tahun berikutnya. Beberapa lokasi yang disurvei melalui kegiatan ini antara lain: pengendali banjir sungai Kenali Asam Kota Jambi, penahan tebing sungai di Desa Pasar Terusan Kabupaten Batanghari, penahan tebing sungai di Desa Kembang Tanjung Mersam Kabupaten Batanghari, Pelindung Tebing Desa Tanjung Beringin Desa Baru Kibul, Desa Tanjung Putus, Desa Ma. Kibul Kabupaten Merangin, Penahan Tebing Sungai Batang Tembesi Kab. Sarolangun, Penahan Tebing Desa Teluk Melintang Kec. Mersam Kab. Batang Hari, Pelindung Tebing Desa Aur Gading Kec. Jujuhan

Batang Jujuhan Kab. Bungo, Pelindung Tebing Desa Pulau Batu Kec. Jujuhan ilir Kab. Bungo, Penahan Tebing Sungai Batang Merao Desa Kampung di Ilir dan Dusun Di Ilir Kec. Hamparan Rawang Kab. Kerinci, dan Penahan Tebing Depan Rumah Bupati Sei. Batang Tembesi Kab. Sarolangun. Untuk kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong,

Pada tahun 2012 telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan beberapa infrastruktur sumber daya air, diantaranya: Pembangunan Penahan Tebing Sungai Tembuku Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, Pembangunan Pelindung Tebing Sungai Kumpeh Kab. Muaro Jambi, Pemeliharaan Turap Muara Sabak Kab. Tanjab Timur, Pembangunan Pelindung Tebing Dusun Benteng Merukam Desa Panca Karya Kec. Limun Kab. Sarolangun, Pembangunan Pelindung Tebing Sungai Batang Bungo Kab. Bungo, Pembangunan Penahan Tebing Sungai Batang Uleh Kab. Bungo, dan Pembangunan Pelindung Tebing Batang Merao Desa Koto Dua lama Kec. Air Hangat Kabupaten Kerinci.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.53.198.613.500,- dan telah terealisasi sebesar 89,21%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah perencanaan pembangunan jaringan irigasi; rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; pembangunan jaringan irigasi; rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan rawa dan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Melalui program ini telah dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan irigasi seluas 5.996 ha dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 4.773 ha dengan rincian sebagai berikut:

- rehabilitasi saluran primer sepanjang : 3553,4 meter,
- saluran sekunder sepanjang 2608 meter,
- rehabilitasi jalan inspeksi : 8.673 meter,
- rehabilitasi bangunan pelengkap sebanyak 8 bh,
- rehab bendung 1 buah,
- rehab lantai saluran 745 meter,
- rehabilitasi pintu air sebanyak 3 unit,
- rehabilitasi bronjong sepanjang 26 meter dan
- pemeliharaan jaringan irigasi yaitu saluran Primer sepanjang 49.812 meter dan saluran sekunder sepanjang 24.520 meter.

Daerah Irigasi yang direhab/dipelihara pada tahun 2012 meliputi DI. Suban Kab. Tanjab Barat, DI. Napal Sisik Desa Napal Sisik Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari, DI. Limun Singkut Kab. Sarolangun, Pembebasan Lahan DI. Batang Asai Kab. Sarolangun, DI. Batang Uleh Kab. Bungo, DI. Pagar Puding Kab. Tebo, DI. Sumur Anyir Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, DI. Sei. Tarantam Besar Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo, DI. Sei. Talang Cabuk Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo, DI. Sei Air Lintah Kab. Kerinci, DI. Sei Air Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci, DI. Karneo Ds. Simpang Karneo Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari, dan DI. Sei. Gunung Selasih Kab. Kerinci.

Selain jaringan irigasi, dilakukan pula rehabilitasi jaringan rawa seluas 4693 ha dan Pemeliharaan Jaringan Rawa seluas 5600 ha dengan rincian sebagai berikut:

- rehabilitasi saluran rawa saluran primer sepanjang 3.500 m,
- saluran sekunder sepanjang 54.466 meter,
- saluran sub sekunder sepanjang 182.001 meter,
- saluran kolektor 24.485 meter dan
- pemeliharaan saluran rawa yaitu saluran Primer sepanjang 27.610 meter, saluran Kolektor dan sekunder sepanjang 79.180 meter,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Rawa yang pada tahun 2012 dilaksanakan pada DR. Kempas Jaya Kab. Tanjab Barat, Rehabilitasi DR. Simbur Naik Kab. Tanjab Timur, Rehabilitasi DR. Simpang Datuk Kab. Tanjab Timur (DAK), Lanjutan Rehabilitasi DR. Simpang Puding Kab. Tanjab Timur (DAK), Rehabilitasi DR. Kota Raja Kab. Tanjab Timur, Rehabilitasi DR. Kota Harapan Kec. Muara Sabak Kab. Tanjab Timur, Lanjutan Rehabilitasi DR. Kempas Jaya Kab. Tanjab Barat, Rehabilitasi DR. Desa Rantau Kapas Mudo Kec. Muaro Tembesi, Pengawasan Rehabilitasi DR. Kota Raja Kab. Tanjab Timur, dan Pengawasan Rehabilitasi DR. Kota Harapan Kec. Muara Sabak Kab. Tanjab Timur.

Untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi yang telah ada juga dilakukan kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, melalui kegiatan Operasional dan pemeliharaan (OP) yang meliputi: Daerah Irigasi Batang Uleh di Kab. Bungo, Daerah Rawa Tangkit Baru di Kab. Muaro Jambi, Daerah Irigasi Limun Singkut di Kab. Sarolangun, Daerah Rawa Penghanyut di Kab. Tanjab Timur, Daerah Irigasi Suban di Kab. Tanjab Barat, Daerah Irigasi Tanduk di Kab. Kerinci, Daerah Rawa Sungai Rambai di Kab. Tanjab Barat, Tanggul Desa Mekarsari Kab.

Muaro Jambi, DR. di Kec. Bram Itam Kab. Tanjab Barat, dan kegiatan Rehab Rumah Penjaga Bendung DI. Limun Singkut Kab. Sarolangun.

3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.896.782.000,- dan telah terserap sebesar 93,00%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa pembangunan sumur-sumur air tanah dan dari target RPJMD sebanyak 31 unit sumur air dalam untuk pemenuhan air baku dari tahun 2010 – 2015, pada tahun 2012 telah dibangun 4 unit atau 12,9 % di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo

4. Program Pengendalian Banjir

Alokasi anggaran untuk program pengendalian banjir pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.14.264.228.000,- dan telah terserap 92,61%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali berupa normalisasi Sungai Desa Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Lanjutan Normalisasi Sungai Pasir Putih Kota Jambi, Lanjutan Pembangunan Pintu Pengatur Sungai di Komplek Candi Muaro Jambi, Pengendalian Banjir Palmerah dan Sekitarnya, Pemeliharaan Sungai Medak di Komplek Candi Muaro Jambi, Pemeliharaan Sungai Jambi di Komplek Candi Muaro Jambi, Pemeliharaan Sungai Terusan di Komplek Candi Muaro Jambi, Pemeliharaan Sungai Batanghari di Depan Rumah Dinas Gubernur, Normalisasi Sungai di Kenali Asam Kota Jambi, Normalisasi Sungai Payo Mengkuang Desa Lubuk Sepuh di Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Pemeliharaan Waduk Sungai Gelam Kab.

Muaro Jambi, serta Pemeliharaan Turap Sabak Kab. Tanjab Timur.

c. Program dan Kegiatan keCiptaKarya

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, diperlukan upaya peningkatan, pengembangan dan penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*) wilayah. Kebutuhan dasar tersebut berupa infrastruktur yang memadai, sehingga dengan semakin memadainya sarana dan prasarana, diharapkan akan mampu bermanfaat luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Pada tahun 2012 program-program keciptakarya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 87.247.500.000,00 dengan serapan sebesar 92,53%. Program-program yang dilaksanakan adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong; program pemberdayaan komunitas perumahan; program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta program pembangunan infrastruktur perdesaan. Secara keseluruhan program – program tersebut bertujuan untuk pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.57.550.702.600,- dan telah terserap 92,12%. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah kegiatan pembangunan gedung kantor, kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan, kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan kegiatan

perencanaan gedung kantor dan prasarana. Untuk kegiatan perencanaan teknis yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah perencanaan master plan dan DED JSDC (Jambi Safety Driving Center), perencanaan DED, master plan dan FS Jambi Sport Center, Review DED Pembangunan Pasar Angso Duo dan penyusunan FS kerja sama pembangunan dan pengelolaan Pasar Angso Duo, serta penyusunan master plan dan FS kawasan bisnis lokasi eks Dinas Peternakan.

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.3.244.649.100,- dan telah terserap 91,24%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong dan kegiatan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, dari anggaran Rp.984.921.300,- telah terserap 96,95%. Sedangkan kegiatan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong menyerap 88,75% dari anggaran sebesar Rp.2.259.727.800,-.

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.665.938.000,- dan telah terserap 95,27%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat. Melalui kegiatan ini telah terlaksana pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum seperti mesjid, pesantren, pembuatan sumur, pembangunan los

pasar, rehabilitasi rumah tradisional, dan pemenuhan fasilitas dasar lainnya.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat dan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum atau air bersih yang layak bagi masyarakat sampai saat ini masih menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini didasarkan pada kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat (baik di perkotaan maupun perdesaan) terhadap air bersih dan air minum masih relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan penyediaan air bersih dan air minum ini.

Program keciptakaryaan yang menangani penyediaan air bersih ini adalah program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp.20.636.210.300,- dan telah terserap 93,28% melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih/ air minum. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan infrastruktur pemukiman yang layak dan sehat untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat yang sampai saat ini kondisinya masih belum sesuai dengan harapan.

Melalui kegiatan pembangunan jaringan air bersih/ air minum pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan 11 paket pekerjaan pengadaan pipa PVC (pipa distribusi) dan sambungan rumah untuk air bersih/air minum yang meliputi wilayah Kabupaten Bungo, Muaro Jambi, Sarolangun, Batanghari, Merangin, Kerinci, Tanjabbar, dan Tanjab Timur. Gambar berikut memperlihatkan sambungan rumah untuk air minum yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012.



Gambar 4.5 sambungan rumah untuk air minum pada tahun 2011 dan 2012.

5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 dan telah terserap 73,21 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Program dan Kegiatan UPTD Balai Pengujian

Dalam penyelenggaraan pembangunan, yang menjadi salah satu tujuan adalah untuk mewujudkan mutu pembangunan prasarana fisik bidang jalan, pengairan dan gedung yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan Standar lainnya serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. UPTD Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis dan Teknis Penunjang dalam bidang pelayanan jasa pengujian kualitas Tanah, Geologi dan Bahan Bangunan. Secara umum Laboratorium mempergunakan metode uji Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Standar Internasional (ASTM) serta standar – standar baku mutu lainnya. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan teknologi dan pelayanan kepada pihak ketiga dan masyarakat maka UPTD Balai Pengujian telah mendaftar ke KAN pada tahun 2010 untuk diakreditasi dan sudah di Asessmen Awal pada tanggal 26 – 27 Juli 2011 oleh Asessor KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai ISO / IEC 17025 : 2005. Pada Tahun 2012 tepatnya tanggal 21 Juni 2012 berhasil diperoleh sertifikasi akreditasi ISO / IEC 17025 : 2005 dari KAN.

UPTD Balai Pengujian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2012 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.2.352.040.400,- dengan serapan sebesar (87,98%). Melalui alokasi anggaran tersebut maka

dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program ini merupakan satu-satunya program yang dilaksanakan UPTD Balai Pengujian pada tahun 2012, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.352.040.400,- dan serapan sebesar (87,98%). Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah kegiatan pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang telah menyerap 90,88% dari anggaran Rp.1.997.376.400,- dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.353.664.000,- dan serapan anggaran sebesar 71,62%.

e. Program dan Kegiatan UPTD Balai Peralatan dan Perbaikan

Sebagai tindak lanjut penanganan secara berkesinambungan terhadap kerusakan jalan di wilayah Provinsi Jambi, terutama dalam mencapai target kondisi jalan MANTAP sangat diperlukan adanya upaya pemeliharaan secara rutin. Tahun 2012, dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan, dan dalam upaya mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan di provinsi jambi, maka UPTD balai peralatan dan perbekalan membentuk suatu kerjasama dengan bidang kebinamargaan.

Dalam upaya mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan di Provinsi Jambi, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan alat berat milik Pemerintah. Hingga tahun 2012, Pemerintah telah memiliki alat berat yang siap

pakai meliputi : Bull Dozer D3 Komatshu sebanyak 1 unit ; Wheel Excavator Hyundai sebanyak 1 unit; Excavator on track Pc 200 sebanyak 2 unit; Excavator on track Pc 130 Sebanyak 2 Unit; Vibro Roller 10 Ton Sebanyak 3 Unit; Vibro Roller 8 ton sebanyak 1 unit; Wheel Loader Back Hoe sebanyak 4 unit; Vibrator Roller SV 502 D 4 Ton Sakai, Hamm sebanyak 2 unit; Dump Truck Ps 120 Mitsubishi, Hino sebanyak 10 unit; Tronton Hino sebanyak 3 unit; Motor Grader MG 300 Mitsubishi, XCMG, Komatshu sebanyak 4 unit; Finisher Maintenance (*Aspalht Finisher*) Sebanyak 1 Unit; Crane Kato 20 ton Tahun 1986 Sebanyak 1 Unit; *Aspalht Recycling* (Daur Aspal) sebanyak 2 unit. Dari kondisi alat berat yang dimiliki ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan atas kerusakan ringan dan kerusakan berat, sementara kondisi alat tersebut masih layak pakai. Dari pengadaan tahun 2011 juga dimiliki 2 *fleet* alat berat terdiri atas: Bulldozer D3, Vibro Roller 10 ton, Excavator on Treck, Motor Greder, Whell Loader Back Hoes, Dump Truck, dan Mobil Tronton ; Bull Dozer D68-ss Komatsu, Shantui sebanyak 2 unit.

Pada tahun 2012, UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.12.390.000.000,- dan telah menyerap 80,14%. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.12.390.000.000,- dan telah terserap 80,14%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan

alat-alat berat, rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat, operasional alat-alat berat dan kegiatan perencanaan dan pengawasan operasional peralatan.

Melalui kegiatan pengadaan alat berat, pada tahun anggaran 2012, UPTD balai peralatan dan perbekalan telah melaksanakan pengadaan alat pendukung alat – alat berat antara lain adalah pengadaan porta camp sebanyak 4 unit, AMP mini mobile beserta alat pendukungnya sebanyak 1 unit, asphalt sprayer sebanyak 1 unit, dump truck sebanyak 5 unit, standing jack hydraulic tronton sebanyak 2 unit dan peralatan-peralatan pendukung lainnya yang mana nantinya akan digunakan untuk membantu bidang kebina margaan dalam hal pemeliharaan rutin Jalan Provinsi Jambi.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Terhadap pelaksanaan urusan pekerjaan umum pada tahun 2012, secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Berikut permasalahan -permasalahannya:

- Untuk Kegiatan Multi Years : Peningkatan Jalan Sp. Pulau Rengas – Ma. Siau – Ds. Tuo – Jangkat sampai akhir Desember 2012 terhadap Kontrak Anak II tahun 2012 progres fisik dan keuangan mencapai 100 % dari Alokasi yang dianggarkan sebesar Rp.60 Milyar. Sedangkan terhadap Kontrak Induk realisasi fisik 43,462% dari rencana 50,164 % (deviasi – 6,702 %) dan realisasi keuangan Rp.64.848.134.800 dari nilai Kontrak Induk Rp. 201.176.824.000 atau terserap 32,21 %. Keterlambatan ini terjadi akibat terkendalanya masalah mobilisasi peralatan dan meterial tahun pertama (tahun 2011)

mengingat awal proyek dimulai dari Desa Rantau Suli/Jangkat ± 130 Km dari Simp. Pulau Rengas dengan kondisi jalannya cukup parah. Dan diperkirakan pada tahun 2013 ini pekerjaan fisik sudah selesai 100%.

- Menghitung kemampuan pekerjaan efektif peningkatan jalan rata-rata beberapa tahun terakhir yang hanya sejumlah 135 kilometer atau hanya sebesar 9,02%, telah memperlihatkan betapa rendahnya kemampuan APBD untuk memberikan keyakinan pemenuhan pencapaian target peningkatan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu dari target 73,70% hanya tercapai 72,68%.
- masih sangat minimnya peralatan dan bahan untuk menunjang pengujian dan pemeliharaan terhadap alat-alat pengujian.

b. Solusi

Dari permasalahan di atas, solusi yang dapat dilakukan adalah:

- Percepatan pelaksanaan pelelangan paket-paket pekerjaan untuk memberikan ruang dan waktu perencanaan terhadap implementasi pekerjaan yang lebih baik.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak selaku unit pemeliharaan rutin jalan sejak tahun 2012 menempatkan mandor-mandor jalan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan jalan per 20 km. Diharapkan strategi ini dapat memelihara lokasi-lokasi fungsional jalan dalam kondisi baik sehingga optimalisasi anggaran dapat segera dicapai.

4.1.4. Bidang Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara

satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana disebutkan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2012 telah berkomitmen untuk melaksanakan kewenangan urusan penataan ruang dengan percepatan penyelesaian RTRW Provinsi Jambi tahun 2011 – 2031.

Sebagai salah satu keberhasilan Provinsi Jambi, pada tahun 2011 lalu RTRW Provinsi Jambi tahun 2011-2031 telah mendapatkan persetujuan Substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum, berikut juga dengan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jambi telah mendapatkan persetujuan substansi yang sama. Dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota tersebut, pada Tahun 2012 ini 2 (dua) sudah ditetapkan menjadi Perda yaitu Kota Sungai Penuh (Perda No : 5/2012) dan Kabupaten Kerinci (Perda No : 24/ 2012), 1 (satu) Kabupaten masih dievaluasi di provinsi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan 8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya dalam tahap pembahasan di DPRD Kabupaten/Kota dan diharapkan selesai dan dapat diPerdakan Tahun 2013. Ini merupakan suatu keterpaduan dan koneksitas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW serta mendapatkan apresiasi pemerintah dengan mampunya Provinsi Jambi secara bersamaan mendapatkan persetujuan substansi dan di Perdakannya 2 (dua) Perda RTRW

Kabupaten/Kota. Terkait dengan usulan perubahan fungsi kawasan hutan saat ini Provinsi Jambi sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012. RTRW Provinsi Jambi sendiri telah selesai dibahas di DPRD Provinsi Jambi dan setelah tahap evaluasi di Kemendagri yang dijadwalkan pada tahun 2013, maka RTRWP Jambi 2011-2031 secara resmi telah berlaku.

1. Program dan Kegiatan

Dalam tahun 2012, Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.500.000,- dan telah terserap Rp. 1.009.071.100,- atau 95,96%. Lebih detil mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.38 Program/Kegiatan Bina Teknik dan Tata Ruang serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program /Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	608.500.000		
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	446.500.000	427.886.100	95,83
Kegiatan Penyusunan Database Infrastruktur Parsial Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000	99.467.000	99,47
	62.000.000	61.982.500	99,97
Program Penataan Ruang	443.000.000		
Peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang provinsi Jambi	443.000.000	419.735.500	94,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.608.500.000,- dan telah terserap 96,85%. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Penyusunan Database Infrastruktur Parsial Bidang Pekerjaan Umum.

b. Program Penataan Ruang

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.443.000.000,- dan telah terserap sebesar 94,75%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang Provinsi Jambi dengan output Identifikasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Sejarah Candi Muaro Jambi.

4.1.5. Urusan Perumahan

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup permasalahan perumahan/penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan.

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini

mencakup permasalahan perumahan/ penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan.

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan di Bidang Perumahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.39 Program/Kegiatan Bidang Perumahan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program /Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)	600.000.000		
Pendukung Program SAMISAKE (Infrastruktur (Jalan Lingkungan, Jembatan, Pengairan dan Lainnya)	600.000.000	252.370.100	42,06
Program Pengembangan Perumahan	50.013.000.000		
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.980.000.000	2.936.854.000	98,55
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (ABT)	3.930.000.000	3.875.911.277	98,62
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah swadaya	14.775.000.000	14.359.310.050	97,19
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah swadaya (ABT)	28.328.000.000	27.743.343.000	97,94

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

2.Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Terkait dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, berdasarkan pada hasil koordinasi dengan pihak BPK Provinsi Jambi untuk pengalokasian tidak boleh tertuang dalam struktur APBD pada Belanja Langsung pada salah satu SKPD dan menjadi kegiatan. Oleh karena itu, disarankan untuk mendistribusikan ke daerah secara langsung sehingga dalam pelaksanaan program SAMISAKE pada Tahun 2012 ini Bidang Perumahan Dinas PU Provinsi hanya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di 10 kab/kota di Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan program ini telah dialokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- dan hanya mampu terserap sebesar 42,06 %. Hal ini diakibatkan oleh pelaksanaan fisik bedah rumah yang terlambat sehingga monitoring dan evaluasi ke lapangan baru berjalan pada akhir tahun anggaran.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.50.013.000.000,- dan telah terserap 97,81%. Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah swadaya. Melalui program pengembangan perumahan, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya melakukan perbaikan-perbaikan kawasan permukiman di Kabupaten/Kota yang setiap tahun diusulkan oleh Kab/kota untuk peningkatan jalan lingkungan maupun sarana prasarana pemukiman lainnya.

Dalam upaya perbaikan permukiman yang dilakukan, maka dilaksanakan terobosan – terobosan untuk

menciptakan suasana permukiman rumah swadaya yang bersih dan nyaman. Melalui program pengembangan perumahan, telah dilaksanakan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 65.526 M', jalan rabat beton sepanjang 13.988 M' dan drainase 3.942 M' yang tersebar di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten/Kota lainnya.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Jika ditelaah berdasarkan kewenangan, maka peningkatan jalan lingkungan yang setiap tahun diusulkan oleh kabupaten/ kota merupakan kewenangan kabupaten/ kota itu sendiri sehingga menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakannya.

b. Solusi

Perlu memperjelas fungsi kewenangan antar tingkat Pemerintahan, termasuk dalam penanganan jalan. Jalan lingkungan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya diserahkan tanggung jawab pemeliharannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.1.6. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam mempersiapkan dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta pelaksanaan

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

Pada tahun anggaran 2012 untuk urusan perencanaan melalui Bappeda Provinsi Jambi telah dianggarkan dana sebesar Rp16.204.354.283 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; program ini bertujuan mempersiapkan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2013, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tahun sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.

Tabel 4.40 Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.764.531.900
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	644.680.000
2	Koordinasi Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	108.778.750
3	Monitoring Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan	1.040.953.100
	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
4	Penyusunan Master Plan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung	750.000.000
5	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	113.000.000
6	Fasilitasi Penyempurnaan Penyusunan Renstra SKPD	107.120.050

Adapun output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan forum SKPD, Konsultasi Publik, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Jambi;tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan APBD dan terlaksananya rapat koordinasi APBN di Provinsi Jambi; Tersusunnya LKPJ Gubernur Jambi Tahun

2010, adanya Master Plan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung, RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 yang telah direview serta Renstra SKPD yang telah disempurnakan sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sering terlambatnya pelaksanaan musrenbang Kab/Kota sehingga Provinsi harus menunggu hasil Musrenbang Kab/Kota; bahan LKPJ sering terlambat disampaikan oleh SKPD dan perkembangan data tidak dilengkapi narasi penjelasan yang baik.

Solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah dengan membuat jadwal pelaksanaan musrenbang Kab/Kota dengan mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten; memperbaiki narasi LKPJ dengan mengkoordinasikannya dengan SKPD terkait.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi secara makro, guna menghasilkan sinergitas antar sektor dan antar pelaku ekonomi. Dalam rangka mencapai program tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp760.493.000, yang tersebar pada beberapa kegiatan, diantaranya: 1) Penyusunan Model Integrasi Pengembangan Lembaga Keuangan dengan BUMDES 2) Penyusunan Model Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Koperasi dan UKM 3) Penyusunan Progres Report Pengemb Kawasan Masurai 4) Penyusunan Rencana Program Akselerasi Pembangunan Kawasan Sebrang Kota 5) Penyusunan RAD Gas Rumah Kaca Prov. Jambi serta pelaksanaan Konreg PDRB yang bekerjasama antara Bappeda dan BPS Provinsi Jambi.

Dengan terlaksananya program ini maka: 1) Tersusunnya model Integrasi Pengembangan Lembaga Keuangan dengan BUMDES, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan lembaga Keuangan dengan BUMDES, 2) Tersusunnya Model Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Koperasi dan UKM, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sistem Informasi Manajemen Koperasi dan UKM 3) Tersusunnya Progres Report Pengemb Kawasan Masurai 4) Adanya Rencana Program Akselerasi Pembangunan Kawasan Sebrang Kota 5) serta adanya RAD Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi yang akan digunakan sebagai roadmap dalam upaya penurunan efek rumah kaca di Provinsi Jambi.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan sosial budaya melalui beberapa kegiatan antara lain; Perencanaan dan koordinasi Bidang Pemerintahan dan SDM; Perencanaan dan Koordinasi program penanggulangan kemiskinan serta Perencanaan dan Koordinasi Program Sosial Budaya. Pada Program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.537.663.300.

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan perkembangan Demokrasi Provinsi Jambi kearah yang lebih baik, Perencanaan dan Koordinasi program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, adanya Laporan Semester Penanggulangan Kemiskinan, tersedianya Data Base SOSBUD; adanya dokumen Analisis Total Factor Productivity Tenaga Kerja Provinsi Jambi dan tersedianya dokumen Indikator Ketenaga Kerjaan di Provinsi Jambi.

Pada Program ini ini juga telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD-SKPD yang berada dalam lingkup Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya.

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Hasil yang telah dicapai adalah terlaksananya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur wilayah melalui Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah Koordinasi, Fasilitas, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang dengan total anggaran Rp 925.800.000.

Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan terkoordinirnya perencanaan infrastruktur wilayah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota secara lebih baik, sebagai upaya pencapaian peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam pelayanan umum di Provinsi Jambi.

Kegiatan Survey dan Pemetaan, telah diperoleh hasil capaian tersedianya database infrastruktur yang menjadi arahan prioritas dalam pengembangan Infrastruktur di Provinsi Jambi. Dalam Kegiatan ini terdapat beberapa keluaran diantaranya Data Kondisi Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Batanghari, Kerinci dan Sungai Penuh. Semua kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat analisis dan arahan dalam rencana pengembangan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah Provinsi Jambi.

5. Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah. Melalui program ini, pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp233.748.000, Provinsi Jambi mengikuti

Rapat Koordianasi gubernur – gubernur dan SKPD terkait se-wilayah BELAJASUMBA di Medan, Sumatera Utara.

Selain itu, sebagai koordinator komite bidang penelitian Rakorgub se-Wilayah Sumatera, Provinsi Jambi juga menjadi tuan rumah rapat komite bidang penelitian. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda dan Balitbangda se-Wilayah Sumatera dan menghasilkan program penelitian bersama yang selanjutnya dibahas dalam Rakorgub se-Wilayah Sumatera. Dalam pelaksanaan program ini di tahun 2012 tidak ditemui kendala yang berarti.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini bertujuan dalam rangka menyediakan datadan menyebarluaskan informasi kepada stakeholders dan untuk keperluan perencanaan program Pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut pada tahun 2012 dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi serta kegiatan Pengembangan Sistem Pemusatan Data Pembangunan Daerahdengan alokasi anggaran Rp412.304.000.

Kegiatan Palayanan data dan Publikasi, merupakan upaya memenuhi kebutuhan dan publikasi data pembangunan yang berupa penyusunan Jambi Dalam Angka dan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2011, kerjasama Bappeda Provinsi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Hasil penyusunan buku tersebut disampaikan kepada Dinas/Badan/Intansi lingkup Provinsi Jambi.

Kegiatan pengembangan sistem pemusatan data pembangunan Daerah, bertujuan mendesain sebuah sistem pemusatan data secara terstruktur dengan cara mengumpulkan data-data mengenai pembangunan daerah

dan dirancang sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam pembuatan laporan yang sesuai dengan kebutuhan, pada kegiatan pengembangan sistem pemusatan data pembangunan Daerah dilaksanakan beberapa sub kegiatan:

- a. Pemeliharaan website Bappeda Provinsi Jambi yang berisikan informasi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya website ini diharapkan semua informasi yang ada pada Bappeda dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Pengembangan aplikasi pemusatan yang dirancang dengan 158ias158e data base berbasis web bertujuan untuk mempermudah dalam pengisian data yang telah terkoneksi langsung ke internet sehingga SKPD terkait dapat melakukan EntryData langsung ditempat masing-masing.
- c. Pemeliharaan server bertujuan untuk meningkatkan fungsi server secara maksimal, beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah memperbaiki jaringan server simda yang mengalami kerusakan, menambah access point untuk memperkuat jangkauan internet.

7. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Tujuan Program ini adalah untuk memfasilitasi dan menkoordinir pelaksanaan Satu Milyar Satu Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp744.235.000,-Kegiatan untuk mencapai program ini antara lain pembuatan Pedoman Umum Pelaksanaan SAMISAKE, yang akan dimanfaatkan oleh Kabupaten/ Kota dan Kecamatan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Samisake Tahun 2012.

Selanjutnya pada kegiatan ini juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Samisake di seluruh kecamatan yang telah mendapatkan bantuan program Samisake, antara lain kegiatan bedah rumah, Beasiswa, Jamkesmasprov dan lain sebagainya.

4.1.7. Perhubungan

Pembangunan urusan Perhubungan dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tahun sebelumnya, bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka memperlancar akseselerasi peningkatan perekonomian daerah. Isu yang saat ini sudah menjadi salah satu permasalahan nasional adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi dari standar kemampuan jalan di Provinsi Jambi.

Oleh karena itu, arah pembangunan urusan Perhubungan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2012 lebih diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan barang. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan perhubungan tersebut maka dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan fasilitas perhubungan. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, maka penanganan dititikberatkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Provinsi Jambi.

1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012, melalui Dinas Perhubungan Provinsi yang menangani urusan perhubungan memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp. 33.047.333.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.755.504.081,- atau sebesar 93,07 %. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.41 Program/Kegiatan Dinas Perhubungan serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program pelayanan	1.421.081.500		
Administrasi Perkantoran			
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	8.850.000	8.850.000	100
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	232.212.000	132.326.187	56,99
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	195.270.000	99.570.000	50,99
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.065.500	68.000.000	99,90
Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60.530.000	54.623.500	90,24
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	100.884.500	98.087.300	97,23
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	151.748.500	146.953.950	96,84
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.968.000	35.897.000	99,80
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	100
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	62.240.000	27.642.500	44,41
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	425.313.000	423.820.640	99,65

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.829.061.800	4.503.393.004	93,26
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	283.411.800	276.339.404	97,50
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	472.000.000	457.975.000	97,03
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	337.450.000	183.189.600	54,29
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.736.200.000	3.585.889.000	95,98
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	81.150.000	69.900.000	86,14
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.150.000	69.900.000	86,14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107.500.000	83.350.000	77,53
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	107.500.000	83.350.000	77,53
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.448.345.300	4.280.099.000	96,22
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3.183.178.300	3.131.813.300	98,39
Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Stndar dan Prosedur Bidang Perhubungan	113.309.000	106.701.700	94,17
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	55.546.100	48.982.300	88,18
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	924.191.900	823.330.900	89,09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	172.120.000	169.270.800	98,34

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	589.031.610	585.171.100	99,34
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang	589.031.610	585.171.100	99,34
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.693.371.090	1.588.511.300	93,81
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	145.562.500	95.248.500	65,43
Kegiatan Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	443.881.500	430.835.200	97,06
Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	148.981.000	145.194.300	97,46
Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan	283.796.000	280.247.950	98,75
Kegiatan fasilitasi perijinan di Bidang Perhubungan	86.527.300	85.466.750	98,77
Kegiatan Pemilihan dan pemberan penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umu teladan	187.134.200	164.644.000	87,98
Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	167.000.000	163.101.600	97,67
Kegiatan pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai	96.632.410	94.454.650	97,75
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang laut, udara dan darat	133.856.180	129.318.350	96,61

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	15.000.000.000	14.546.953.800	96,98
Kegiatan pembangunan gedung terminal	15.000.000.000	14.546.953.800	96,98
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3.270.335.000	2.950.141.050	90,22
Kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman jalan	3.270.335.000	2.950.141.050	90,22
Program peningkatan keaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.607.456.700	971.943.750	60,46
Kegiatan uji petik kendaraan bermotor	1.607.456.700	971.943.750	60,46

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi serta untuk optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp.4.448.345.300,- untuk kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; penyusunan kebijakan, norma, 163ias163e163163163na prosedur bidang perhubungan; sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;

pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan hingga akhir tahun 2012 telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 96,22%.

Kegiatan – kegiatan dalam program ini lebih banyak merupakan kegiatan non fisik untuk pengembangan kapasitas fungsi lembaga dan penunjang keberhasilan program. Hanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang yang merupakan kegiatan fisik. Melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor (JTKB) dan Pelebaran Jalan Masuk/Keluar dan Saluran Air di JTKB Bukit Baling. Hingga Tahun 2012 jumlah JTKB di Provinsi Jambi yang aktif adalah sebanyak 4 Unit yang terletak di Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun dan Kota Sungai Penuh. Data 164ias164e164164164 perhubungan memperlihatkan bahwa keempat unit JKTb tersebut melayani angkutan yang cukup banyak. Berdasarkan laporan JKTb menurut asal tujuan kendaraan tahun 2012, sampai dengan bulan September arus angkutan yang tertinggi terlihat pada JTKB Muaro Jambi yaitu sebanyak 60.018 kendaraan dan JKTb Muara Tembesi sebanyak 31.306 kendaraan. Apabila melihat kecenderungan jumlah kendaraan angkutan yang terus meningkat setiap tahunnya maka kapasitas sarana dan prasarana yang ada harus terus ditingkatkan dan dilengkapi agar pelayanan dapat optimal. Berikut kapasitas jembatan timbang sampai dengan tahun 2012.

Tabel 4.42 Jumlah Jembatan timbang, kapasitas dan tahun pembuatan

Nama JKTB	Muaro Tembesi	sarolangun	Sungai Penuh	Muaro Jambi
Tahun Pembuatan	2010	2005	1973	2009
Kapasitas	80 ton	80 ton	20 ton	80 ton
Bangunan Atap Platform	Ada 1 unit	Ada 2 unit	ada	Ada 2 unit
Gedung Operasional	ada	ada	Ada	ada
Area Parkir Kendaraan	ada	ada	Tidak ada	Ada
Fasilitas jalan (in & out)/ permukaan jalan	baik	baik	baik	baik
Gedung penyimpanan	ada	ada	Tidak ada	ada
Mess Petugas	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
Mess Kepala JT/ Tamu	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
Musholla/ fasilitas Olahraga	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
Bangunan genset	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada
Lapangan penumpukan barang	ada	ada	Tidak ada	ada
Pagar	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada tahun 2012 telah dianggarkan dana sebesar Rp.589.031.610,- dan telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,34%. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang dengan output terpeliharanya sarana dan prasarana jembatan timbang sesuai dengan standar pelayanan. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berfungsinya peralatan penimbangan dalam mendukung kegiatan operasional.

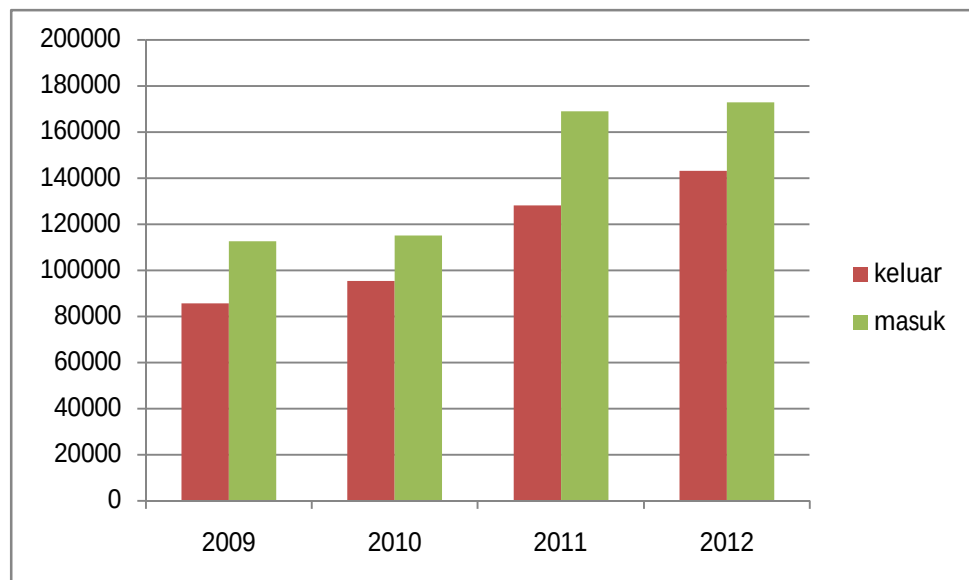
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya program ini adalah peningkatan penyelenggaraan pelayanan operasional transportasi yang aman, nyaman, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada tahun 2012 telah dianggarkan dana sebesar Rp.1.693.371.090,- dan telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 93,81%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

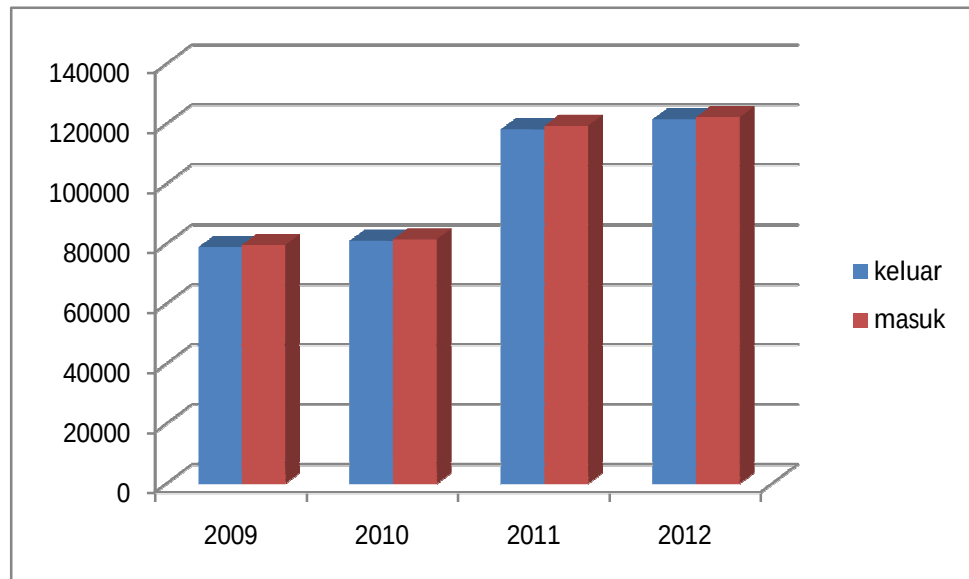
- kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan,
- kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah,
- kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan,
- kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
- kegiatan perijinan di bidang perhubungan
- kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

- kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- kegiatan pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai
- kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang laut, udara dan darat.

Program ini dinilai cukup strategis, mengingat kuantitas kendaraan angkutan umum yang keluar masuk kota – kota di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahunnya dan peningkatan penggunaan sarana transportasi umum baik darat, laut dan udara harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang juga meningkat. Khusus untuk Peningkatan operasional angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.



Gambar 4.6 Peningkatan operasional Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2012



Gambar 4.7 Peningkatan operasional Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2012

Peningkatan operasional AKAP dan AKDP sebagaimana yang diperlihatkan oleh dua gambar di atas menggambarkan peningkatan mobilitas orang dan barang keluar masuk Provinsi Jambi yang dapat diasumsikan bahwa tingkat perekonomian yang semakin meningkat. Disamping itu, hal ini juga memperlihatkan bahwa jasa transportasi darat merupakan salah satu moda perhubungan antar wilayah yang penting untuk memacu pertumbuhan perekonomian secara merata di wilayah Provinsi Jambi.

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah terciptanya kenyamanan dan keselamatan penumpang di area khusus bandara.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung terminal dengan anggaran Rp.15.000.000.000,-.

Kegiatan tersebut telah terealisasi 100% secara fisik dengan serapan anggaran sebesar 96,98%. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya gedung VIP room terminal bandara, dan outcome yang diharapkan terwujud setelah terbangunnya gedung ini adalah meningkatnya kenyamanan dan keselamatan tamu-tamu VIP pemerintah daerah.

e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

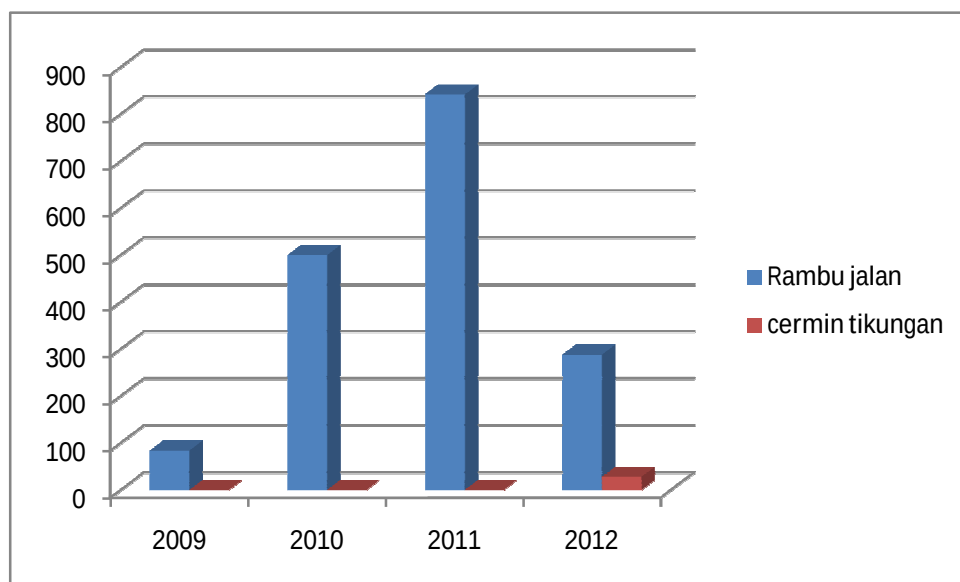
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dan kapabilitas sumber daya manusia dengan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 adalah pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman jalan. Untuk mencapai tujuan di atas maka dianggarkan dana sebesar Rp.3.270.335.000,- dan telah terealisasi secara fisik sebesar 96,43% dengan serapan anggaran sebesar 90,22%.

Melalui kegiatan ini, maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sebagai berikut:

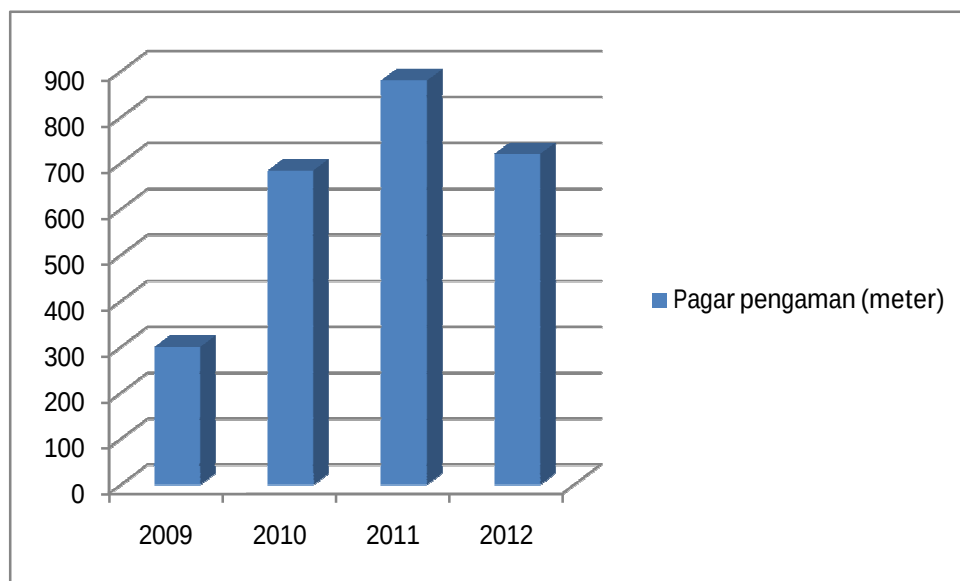
- lampu lalu lintas di simpang tiga sekolah At taufik dan SMP 7;
- pengadaan rambu jalan di Kabupaten Tebo (Ma. Tebo – Pulau Temiang)
- pengadaan rambu jalan di Kab. Merangin (Bangko – Sungai Manau)
- pengadaan rambu jalan Simpang Sijenjang – Suak Kandis
- Pengadaan rambu jalan Simpang Kiri – Ma. Sabak
- Pengadaan dan pengecatan marka jalan di Kota Jambi dan Kab. Muaro Jambi

- Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Batas Kerinci – Sanggaran Agung dan Bangko – Sungai Manau
- Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci
- Pengadaan dan pemasangan rambu tipe F di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi
- Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)
- Pemeliharaan RPPJ dan pembatas median

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran, ketertiban dan keselamatan angkutan jalan dengan benefit terwujudnya lalu lintas yang selamat, aman, nyaman dan 170ias170e. Perkembangan jumlah prasarana angkutan jalan yang dipasang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan menggunakan APBD Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



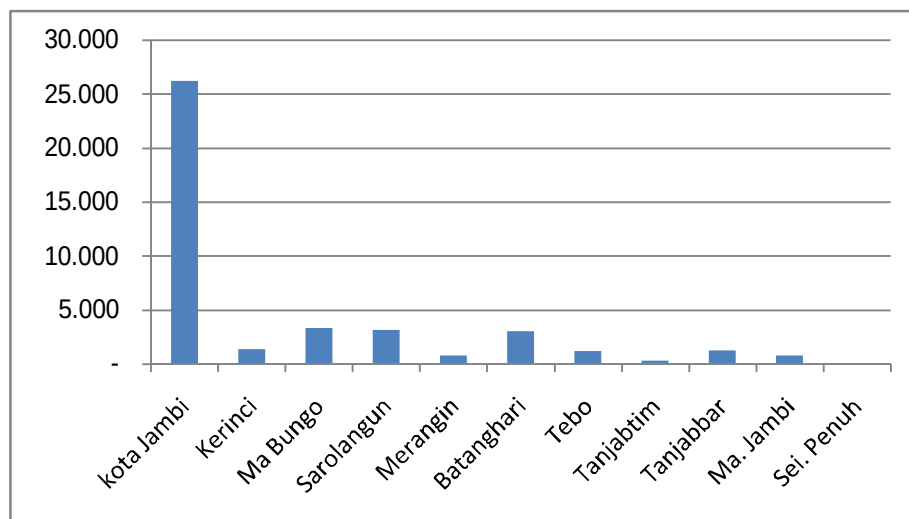
Gambar 4.8 jumlah rambu jalan dan cermin tikungan yang dipasang pada tahun 2009 2012



Gambar 4.9 panjang pagar pengaman (M) yang dibangun pada tahun 2009 – 2012

f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah peningkatan akuntabilitas kelembagaan dan kapabilitas sumberdaya manusia dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. Untuk pelaksanaan kegiatan ini telah dianggarkan dana sebesar Rp.1.607.456.700,- dan selama satu tahun telah terserap sebesar 60,46%. Output kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan dan pengendalian muatan dengan outcome meningkatnya kinerja pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan barang. Gambar di bawah ini memperlihatkan jumlah kumulatif kendaraan yang diuji sampai dengan akhir September 2012.



Gambar 4.10 Jumlah kumulatif kendaraan yang diuji di Provinsi Jambi sampai dengan akhir September 2012

4.1.8. Badan Lingkungan Hidup Daerah

Program pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi merupakan prioritas pembangunan ke 4 (empat) dalam RPJMD Provinsi Jambi yakni *"Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan"*. Pada tahun 2012 program dan kegiatan dibiayai melalui sumber dana APBD murni Provinsi Jambi sebesar Rp6.610.073.400,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terbagi dari program rutin yang terdiri dari 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan program wajib yang terdiri dari 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Administrasi Perkantoran

Terdiri dari 5 program dengan 23 kegiatan yang didukung oleh 5 sasaran strategis, yaitu:

➤ **Sasaran 1 : Tercapainya peningkatan sarana administrasi perkantoran**

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui 11 kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Komunikasi Sumber Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

➤ **Sasaran 2 : Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur**

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 8 kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Meubeler
4. Pengadaan Komputer
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

➤ **Sasaran 3 : Tercapainya peningkatan disiplin kerja aparatur**

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

➤ **Sasaran 4 : Tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur**

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pendidikan dan pelatihan formal.

5. Program Peningkatan Sistem Pelaporann Kinerja dan Keuangan.

➤ **Sasaran 5 : Tercapainya peningkatan 174ias174e pelaporan kinerja dan keuangan**

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*, yang diimplementasikan melalui 2 kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan program tahunan

Program Wajib terdiri dari 4 program dan 11 kegiatan yang didukung oleh 6 sasaran strategis, yaitu:

➤ **Sasaran 1 : Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur**

Sasaran ini diimplementasikan melalui 2 kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyusunan AMDAL

Indikator Kinerja Kegiatan (output) :

- a. Pemantauan kondisi rencana kegiatan yang wajib AMDAL
- b. Rakornis AMDAL se Provinsi Jambi

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

- a. Pemantauan kondisi rencana kegiatan yang wajib AMDAL

Target pemantau kondisi rencana kegiatan yang wajib AMDAL sebanyak 15 perusahaan dan terlaksana sebanyak 20 perusahaan.

- b. Rakornis AMDAL

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 117% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*. Pencapaian kinerja melebihi target pada sub kegiatan “Pemantauan kondisi rencana kegiatan yang wajib AMDAL” yang mampu melakukan penilaian

sebanyak 20 perusahaan dari 15 perusahaan yang ditargetkan.

2. Penaatan Hukum Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan (output):

a. Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan lingkungan.

b. Sosialisasi peraturan tentang lingkungan hidup

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

a. Sampai dengan akhir Desember 2012 ini, kasus pencemaran lingkungan yang ditangani sebanyak 11 kasus dari target yang telah ditetapkan sebanyak 10 kasus.

Tabel 4.43. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

No	Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1	PT. EMAL	Agroindustri	Sarolangun	1 – 2 Maret 2012
2	PT. Prima Pembangunan Kerinci	AMP	Kerinci	5 – 7 Maret 2012
3	PT. Angso Duo Sawit	Agroindustri	Muaro Jambi	1- 2 Maret 2012
4	PT. Megasawindo Perkasa	Agroindustri	Tebo	5 – 6 Maret 2012
5	PTPN Bunut Muaro Jambi	Agroindustri	Muaro Jambi	20 – 21 April 2012
6	PT. Bukit Bintang Sawit	Agroindustri	Muaro Jambi	24 – 25 April 2012
7	PT. Graha Lintas Mandiri	Stockfile	Muaro Jambi	24 – 25 April 2012
8	PT. Karya Bakti Project	Agroindustri	Muaro Jambi	18 Juni 2012
9	PT. Kuansing Inti Makmur	Stockfile	Bungo	10 – 11 Juli 2012
10	PT. Bina Mitra Makmur	Agroindustri	Bungo	23 – 24 Okt 2012
11	PT. PSUT	Industri Kayu	Muaro Jambi	24 – 25 Okt 2012

Sumber : Badan Lingkungan Hidup daerah

Tim penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari Pejabat Pengawas Lingkungan

Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BLHD Provinsi Jambi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang tata cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

- b. Sosialisasi peraturan tentang lingkungan hidup dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk publikasi berupa iklan melalui media TVRI dan RRI.

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 105% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*. Pencapaian kinerja pada sub kegiatan “Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan” yang mampu melakukan penanganan kasus sebanyak 11 kasus dari 10 kasus yang ditargetkan.

➤ **Sasaran 2 dan 3 : Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlaksananya peningkatan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup**

Sasaran ini diimplementasikan melalui 4 kegiatan, yaitu:

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) :

- a. Pemantauan kualitas air sungai lintas Kab/Kota
- b. Pemantauan kualitas udara ambien
- c. Pemantauan Bahan Perusak Ozon

d. Rapat Teknis

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

- a. Pemantauan kualitas air sungai lintas Kab/Kota telah dilaksanakan sebanyak 1 kali pemantauan pada 16 titik sampel di 7 wilayah kab/kota yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil uji laboratorium lingkungan terhadap 15 parameter didapat hasil kelebihan baku mutu dari lokasi pengambilan sampel sebagai berikut::
- Kelurahan Muara Tebo Kabupaten Tebo
 - Kelurahan Tanjung Gedang Kabupaten Bungo
 - Kelurahan Mampun Kabupaten Merangin
 - Desa Pauh, Desa Batu Kucing, dan Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun
 - Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten kerinci
 - Desa Simpang Tigo Rawang kecamatan Hamparan Rawang dan Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh
- b. Pemantauan Kualitas Udara Ambient telah dilaksanakan di 11 kab/Kota dengan lokasi di daerah Perkantoran, Transportasi, Pemukiman dan Industri. Parameter yang diperiksa antara lain SO₂ dengan baku mutu 23, NO₂ dengan baku mutu 53, O₃ dengan baku mutu 26 dan NH₃ dengan baku mutu 1.960.

Dari hasil uji laboratorium diketahui bahwa kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi dalam **keadaan baik** karena masih di bawah baku mutu udara sesuai PP 41/ 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- c. Pemantauan Bahan Perusak Ozon telah dilaksanakan di 4 Kabupaten pada 12 sampel perusahaan dengan rincian Kab. Muaro Jambi 1 perusahaan, Kab. Tebo 3 perusahaan, Kab. Sarolangun 4 perusahaan dan Kota Sungai Penuh 4 perusahaan yang dijumpai dalam bentuk usaha bengkel servis AC mobil/kulkas, dan bengkel. Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

2. Pengkajian Dampak Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) :

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran Sungai Batang Bungo dengan 9 parameter.

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 170% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

4. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan (output) :

- a. Penyediaan bahan kimia untuk pemeriksaan kualitas lingkungan.

- b. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium lingkungan.
- c. Penyediaan peralatan pengujian air, udara dan tanah.
- d. Pengujian kualitas air, udara dan tanah.

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

1. Pembelian Bahan Kimia

- a. Pembelian bahan kimia merupakan kebutuhan pokok UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah BLHD Provinsi Jambi dalam melakukan pengujian sampel – sampel lingkungan baik yang diantar oleh pelanggan maupun sampel – sampel hasil pemantauan BLHD Provinsi Jambi.
- b. Penyediaan bahan kimia untuk pemeriksaan kualitas lingkungan telah terlaksana sebanyak 32 item.

2. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium lingkungan.

- a. Pekerjaan kegiatan ini meliputi 25 unit. Adapun tujuan dilaksanakannya pemeliharaan alat laboratorium yaitu untuk menerapkan prinsip jaminan mutu hasil pengujian.

3. Penyediaan peralatan pengujian air, udara dan tanah.

- Pekerjaan kegiatan pengadaan peralatan pengujian air, udara dan tanah sebanyak 17 unit (13 unit dibiayai oleh APBD Murni dan 4 unit dibiayai oleh APBD Perubahan). Tujuan pengadaan peralatan yaitu meningkatkan kinerja UPTB laboratorium Lingkungan Daerah BLHD Provinsi Jambi dalam memenuhi permintaan konsumen.

4. Re-akreditasi Laboratorium.

 Pekerjaan kegiatan ini meliputi 20 parameter. Adapun tujuan dari jasa surveilen ini adalah untuk meningkatkan kompetensi UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi dan tetap konsisten dalam menerapkan sistem manajemen mutu.

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

- **Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar**

Sasaran ini diimplementasikan melalui 2 kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 120% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

2. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dan Penyuluhan Lahan dan Hutan.

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 95,46% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

- **Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup**

Sasaran ini diimplementasikan melalui 2 kegiatan, yaitu:

1. Batang Hari Bersih

Indikator Kinerja Kegiatan (output) :

- a. Penandatanganan Superkasih / Pembinaan terhadap dunia usaha di sepanjang sungai Batanghari
- b. Sosialisasi kegiatan Batanghari Bersih pada masyarakat di sekitar sungai Batang Hari
- c. Pembangunan WC dan sambungan instalasi air bersih
- d. Pemberdayaan kelompok masyarakat peduli Batang Hari (Pokduri)

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

- a. Penandatanganan Superkasih / Pembinaan terhadap dunia usaha di sepanjang sungai Batanghari dilaksanakan oleh 13 perusahaan dari target 10 perusahaan. Adapun perusahaan dimaksud adalah :
 - PT. Hoktong (Industri Crumb Rubber di wilayah Kota Jambi)
 - PT. Remco (Industri Crumb Rubber di wilayah Kota Jambi)
 - PT. Batanghari Tembesi (Industri Crumb Rubber di wilayah Kota Jambi)
 - PT. Angkasa Raya (Industri Crumb Rubber di wilayah Kota Jambi)
 - PT. Jambi Waras (Industri Crumb Rubber di wilayah Kota Jambi)
 - Mall WTC/Wiltop Hotel Jambi (Perhotelan di wilayah Kota Jambi)
 - Mall Ramayana Jambi (Pertokoan di wilayah Kota Jambi)
 - PT. Hypermart (Pertokoan di wilayah Kota Jambi)

- PT. PSUT (Industri Plywood dan Glue di wilayah Kabupaten Muaro Jambi)
- PT. Pertamina Unit Pemasaran Jambi (Di wilayah Kota Jambi)
- PT. NTC (Industri Dok Kapal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi)
- PT. Nan Riang (Stock File Batubara di wilayah Kabupaten Muaro Jambi)
- PT. Pelita (Industri Minyak Goreng di wilayah Kabupaten Muaro Jambi)

Peran aktif yang diminta dari dunia usaha ada 2 (dua) yaitu :

- Membersihkan sampah yang terdapat di bantaran dan badan Sungai Batang Hari yang berada di areal usaha miliknya, baik dngan membentuk POKDURI sendiri atau menggunakan jasa POKDURI yang sudah ada.
- Membantu pembiayaan pembuatan WC dan sarana air bersih untuk masyarakat yang berada di lingkungan terdekat lokasi usahanya yang masih menggunakan WC dan jamban di Sungai Batang Hari.

b. Sosialisasi kegiatan Prokasih pada masyarakat di sekitar sungai Batang Hari.

Sosialisasi ini dilaksanakan terhadap rumah tangga sasaran penerima bantuan wc dan sambungan instalasi air bersih, kelompok masyarakat peduli sungai batanghari (Pokduri), dan terhadap dunia usaha yang berada di sepanjang sungai batanghari di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 4.44 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Batang Hari Bersih.

No.	Waktu	Jenis Sosialisasi	Lokasi
1.	26 Maret 2012	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Kantor Kepala Desa Penyengat Olak
2.	27 Maret 2012	POKDURI	Kantor Camat Pelayangan
2.	28 Maret 2012	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Kantor Lurah Tanjung Johor
3.	29 Maret 2012	POKDURI	Kantor Camat Danau Teluk
4.	30 Maret 2012	POKDURI	Kantor Camat Telanaipura
5.	02 April 2012	POKDURI	Kantor Kepala Desa Penyengat Olak
6.	05 April 2012	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Kantor Lurah Arab Melayu
7.	11 April 2012	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Kantor Lurah Tahtul Yaman
8.	16 April 2012	POKDURI	Kantor Camat Jambi Timur
9.	18 April 2012	POKDURI	Kantor Camat Danau Teluk
10.	19 Juli 2012	Dunia Usaha	Kantor BLHD Provinsi Jambi
11.	30 Agustus 2012	Dunia Usaha	Kantor BLHD Provinsi Jambi

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah

c. Pembangunan WC dan Sambungan Instalasi Air Bersih
Pembangunan WC dan Sambungan Instalasi Air Bersih dilaksanakan sebanyak 291 unit.

Tabel 4.45 Kelurahan / Desa Penerima Bantuan Pembangunan WC dan Sambungan Instalasi Air Bersih.

No	Kelurahan / Desa	WC (unit)	Sumur Bor (unit)
1.	Kelurahan Arab Melayu	89	
2.	Kelurahan Tahtul Yaman	68	
3.	Kelurahan Tanjung Johor	30	
4.	Desa Penyengat Olak	104	
Jumlah		291	30

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah

d. Pemberdayaan kelompok masyarakat Peduli Batang Hari (Pokduri).

POKDURI dibentuk dengan tujuan membantu Pemerintah Provinsi Jambi membersihkan sampah yang terdapat di bantaran dan badan Sungai Batang Hari serta sebagai tenaga penyuluh yang mengajak anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan Sungai Batang Hari.

Tabel 4.46 Jumlah POKDURI Yang Dibentuk Pada Masing-Masing Kelurahan/ Desa.

No.	Kelurahan / Desa	Kecamatan	POKDURI
1.	Kelurahan Ulu Gedong	Danau Teluk	3 Kelompok / 30 orang
2.	Kelurahan Olak Kemang	Danau Teluk	3 Kelompok/ 30 orang
3.	Kelurahan Tanjung Pasir	Danau Teluk	3 Kelompok / 30 orang
4.	Kelurahan Tanjung Raden	Danau Teluk	3 Kelompok / 30 orang
5.	Kelurahan Pasir Panjang	Danau Teluk	3 Kelompok / 30 orang
6.	Kelurahan Kasang	Jambi Timur	3 Kelompok / 30 orang
7.	Kelurahan Sijenjang	Jambi Timur	3 Kelompok / 30 orang
8.	Kelurahan Arab Melayu	Pelayangan	5 Kelompok / 50 orang
9.	Kelurahan Tahtul Yaman	Pelayangan	4 Kelompok / 40 orang
10.	Kelurahan Taanjung Johor	Pelayangan	3 Kelompok / 30 orang
11.	Kelurahan Mudung Laut	Pelayangan	3 Kelompok / 30 orang
12.	Kelurahan Jelmu	Pelayangan	2 Kelompok / 20 orang
13.	Kelurahan Kampung Tengah	Pelayangan	2 Kelompok / 20 orang
14.	Kelurahan Legok	Telanaipura	3 Kelompok / 30 orang
15.	Kelurahan Solok Sipin	Telanaipura	3 Kelompok / 30 orang
16.	Kelurahan Buluran Kenali	Telanaipura	3 Kelompok / 30 orang
17.	Kelurahan Penyengat Rendah	Telanaipura	3 Kelompok / 30 orang
18.	Desa Penyengat Olak	Jambi Luar Kota	4 Kelompok / 40 orang
Jumlah		5 Kecamatan	56 Kelompok / 560 orang

Sumber : Badan Lingkungan Hidup daerah

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 141% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Kegiatan (output) :

- a. Penilaian Kota Bersih
- b. Penilaian Adipura
- c. Penilaian Kalpataru
- d. Penilaian Adiwiyata
- e. Penilaian lomba menggambar/mengarang/poster tentang Lingkungan Hidup
- f. Peringatan Hari Lingkungan Hidup se – Dunia

Tolak Ukur Kinerja (Outcome) sebagai berikut :

- a. Penilaian Kota Bersih (ADHI KARYA MANGKUNEGORO) bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan khususnya di bidang kebersihan. Pembinaan dan Penilaian Kota Bersih lokasi kegiatan di Kota Sengeti, Kota Muara Sabak, Kota Muara Tebo dan calon ibukota Kabupaten Kerinci.
- b. Pembinaan dan Penilaian Adipura lokasi kegiatan Kota Jambi, Kota Muara Bulian, Kota Kuala Tungkal, Kota Muara Bungo, Kota Sarolangun, Kota Bangko dan Kota Sungai Penuh.
- c. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu maupun kelompok orang yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan kepada

perorangan/kelompok masyarakat yang telah menunjukan kepeloporan dan memberikan sumbangsihnya dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Pembinaan dan Penilaian Penghargaan Kalpataru lokasi kegiatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

d. Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga aekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pembinaan sekolah adiwiyata dilaksanakan dengan membagikan tong sampah ke sekolah – sekolah.

e. Tujuan penilaian Lomba Menggambar, Poster dan Mengarang tentang Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada anak-anak tentang pentingnya lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestariannya. Yang pesertanya mulai SD/MIN/MIS Sederajat, SLTP/MTS Sederajat dan SLTA/MAN sederajat di 11 kab/kota.

f. Peringatan Hari Lingkungan Hidup se – Dunia

Hari lingkungan hidup sedunia ditetapkan dalam 188ias188e umum PBB tahun 1972 untuk menandai pembukaan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm. Hari lingkungan hidup sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil

tindakan lingkungan yang positif dan merupakan penting yang digunakan PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan dan mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 bertempat di Universitas Jambi Kampus Mendalo, terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi, Universitas Jambi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan KKI WARSI.

Tema peringatan hari lingkungan hidup sedunia tahun 2012 adalah *“Green Economy: Does it include you?”* dan disesuaikan dengan konteks Indonesia, maka Tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menjadi *“Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”*.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2012 antara lain :

- 1). Lomba sepeda santai mengelilingi Kampus UNJA Mendalo.
- 2). Penanaman pohon penghijauan sebanyak 6.000 batang yang mengambil lokasi di dalam Kampus UNJA Mendalo, di kanan kiri jalan sepanjang Kampus UNJA Mendalo, dan di lingkungan sekolah dan perumahan di wilayah Kota Jambi dan Kampus UNJA Mendalo.
- 3). Pembuatan film tentang lingkungan hidup.
- 4). Talkshow di TVRI Jambi.

- 5). Uji emisi kendaraan roda empat.
- 6). Pemantauan kualitas udara jalan raya.
- 7). Pemantauan kinerja lalu lintas.
- 8). Uji bahan bakar.
- 9). Sosialisasi tentang lingkungan hidup melalui TVRI, RRI dan media cetak.

Selain itu juga dilaksanakan Seminar Sehari dengan tema “Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Penanggulangan Asap Lintas Batas Dalam Kerangka Kerjasama ASEAN” yang pelaksanaannya atas bantuan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Puncak acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2012 diisi dengan penyerahan penghargaan oleh Bapak Gubernur Jambi yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada :

- 1). Bupati dan Walikota peraih predikat Kota Bersih.
- 2). Penerima Penghargaan Kalpataru.
- 3). Penerima Penghargaan Penyusun SLHD Terbaik.
- 4). Penerima Penghargaan Adiwiyata.
- 5). Penerima Penghargaan PROPER, dan
- 6). Pemenang Lomba Menggambar, Mengarang dan Poster Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

➤ **Sasaran 6 : Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup**

Sasaran ini diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Pencapaian kinerja ini adalah 98,18% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

4.1.9. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Untuk pelaksanaan program prioritas BPMD dan PPT Provinsi Jambi Tahun 2012 melaksanakan 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif sehingga terciptanya kemitraan dunia usaha, kemitraan antar usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal di Provinsi Jambi. Upaya mewujudkan sasaran dari program peningkatan promosi dan kerjasama ini, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : a). Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah; b). Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal; c). Kegiatan peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; d). Kegiatan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri; e). Kegiatan Pembuatan Video Profile Peluang Investasi di Provinsi Jambi.

Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Kecil Menengah mempunyai tujuan agar terjalinnya kerjasama antara Pengusaha besar dengan UMKM, dengan bentuk

kegiatan berupa Temu Usaha kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Temu Usaha Kabupaten dalam Provinsi Jambi yaitu: Kabupaten Batanghari dan Sarolangun dengan jumlah peserta pada masing-masing kabupaten sebanyak 100 pengusaha besar, kecil dan menengah. Dalam pertemuan tersebut di atas terinventarisir permasalahan mengenai terbatasnya permodalan dan akses ke sumber-sumber permodalan, lemahnya dalam organisasi dan manajemen serta kelemahan akses pasar. Guna mengatasi masalah diatas perlu adanya peningkatan kualitas UMKM baik dari sisi permodalan maupun kualitas SDM yang berkaitan dengan UMKM tersebut.

Fasilitasi koordinasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal yaitu dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (RKPPMD) di seluruh Kabupaten dan Kota yang hasilnya dikoordinasikan dan sinkronisasikan kembali pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (RKPPMD) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 bertempat di Hotel Tepian Ratu Ruang Sumatera, yang dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bapak Ir. H. Erman Rahim. Dari kegiatan tersebut dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Rencana Tata Ruang/ Wilayah masing-masing Kabupaten/ Kota (kejelasan peta pengembangan/ peruntukan tanah) harus ditindaklanjuti secara intensif guna sinkronisasi perencanaan penanaman modal lintas instansi, Kabupaten/ Kota dan Provinsi.

- b. Keberadaan kelembagaan PTSP harus diperkuat dengan pelimpahan/ pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dari daerah masing-masing.
- c. Teknologi informasi yang ada harus dimaksimalkan penggunaannya dalam melakukan promosi investasi daerah.
- d. Data potensi daerah dan integrasi pendataan aktivitas penanaman modal di seluruh Kabupaten/ Kota dan Provinsi harus selalu di updating setiap tahunnya guna memberikan informasi terbaru kepada pihak investor dan yang memerlukan.
- e. Komunikasi intensif dengan pengusaha dan investor yang telah melakukan MoU melalui Koordinasi yang berkesinambungan antara Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat dalam hal promosi dan kerjasama investasi.

Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yaitu pemantauan dan pembinaan terhadap PMDN/PMA di Provinsi Jambi dengan hasil pemantauan sebanyak 100 perusahaan PMDN/PMA. Selain itu dalam kegiatan ini dilaksanakan penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan penanaman modal. Perkembangan Investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.23 Trilyun sampai dengan akhir September 2012 Meningkat menjadi Rp. 19.62 Trilyun (dalam bentuk rupiah). Sedangkan dalam bentuk dollar mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar US \$91.82 juta menjadi dengan nilai US\$ 89.72 Juta pada tahun 2012. PMDN dengan rencana investasi sebesar Rp. 82.96 triliyun terealisasi sebesar Rp19.62 triliyun, rencana investasi PMA dalam bentuk Rupiah ditargetkan sebesar Rp8.36 triliyun dengan realisasi Rp. 6.58 triliyun, rencana investasi PMA ditargetkan sebesar US \$ 1.810.395.210,- dengan realisasi sebesar US \$ 89.727.360

Peningkatan promosi produk unggulan dan peluang investasi Provinsi Jambi melalui kegiatan pameran agar Sektor Unggulan daerah Provinsi Jambi terpromosi dengan baik. Adapun beberapa kegiatan yang telah diikuti antara lain :

- Jambi Emas Expo pada bulan Februari 2012.
- Pameran Otonomi Expo yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2012.
- Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) I yang dilaksanakan di Padang pada Bulan Juni 2012.
- Gelar Investasi dan Potensi Daerah yang dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 2012.
- Pameran Aktivasi dan Publikasi Province Profile yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan November 2012
- Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) II yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan November 2012.
- Silaknas Conference & Expo ICMI yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Desember 2012.

Promosi produk unggulan dan peluang investasi provinsi Jambi di luar negeri, salah satunya dengan mengikuti Pasar Malam Indonesia di Belanda pada tanggal 27 Maret s.d 02 April 2012, untuk mempromosikan potensi wisata, perdagangan, investasi, dan seni budaya serta kuliner beberapa daerah di Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang telah bermukim di Belanda maupun kepada masyarakat Belanda pada umumnya. Dari hasil pelaksanaan tersebut, ada beberapa calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di Provinsi Jambi yaitu:

- Ir. Ing. Gatot Supranoto, yang tertarik untuk berinvestasi di bidang infrastruktur.

- Mr. Robert Halvast, yang tertarik berinvestasi pada bidang telekomunikasi.

- Mr. Robert Peddes, yang tertarik pada bidang panas bumi.

Calon investor tersebut selanjutnya akan menindaklanjuti pertemuan dengan melakukan kontak melalui email dan telepon kepada BPMD dan PPT Provinsi Jambi. Selain itu ada beberapa kegiatan yang Luar Negeri yang diikuti antara lain:

1. Investment Promotion Forum: Regional Potential Investment Opportunities yang dilaksanakan di Guangzhoo, tiongkok pada tanggal 12 s.d 18 Maret 2012.
2. Undangan Business Meeting, dilaksanakan di Ube City Yamaguchi, Jepang pada tanggal 1 s.d 7 September 2012.
3. Pameran International Trade Malaysia (Intrade) 2012 DI Kuala Lumpur pada tanggal 27 s.d 29 November 2012.

Selanjutnya dilaksanakan pembuatan Video Profile Peluang Investasi dan Penyusunan data Peluang Investasi Daerah di Provinsi Jambi untuk menggali potensi Investasi yang akan dikembangkan di Provinsi Jambi dalam upaya memacu laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, sehingga dapat memberikan masukan kepada para calon Investor serta meningkatnya investasi di Provinsi Jambi.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan dari program ini adalah koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi, antara lain melakukan Inventarisasi Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan (berupa SIUP, IUP, APIT, IMTA dan Izin-izin yang diberikan oleh Kab./Kota. Selama Tahun 2012 pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal sudah menerbitkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perizinan dan non-perizinan

yang terdiri dari 18 (delapan belas) perizinan dan 57 (lima puluh tujuh) non-perizinan.

Pada tahun 2012 ini Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi telah berhasil menjadi Nominee Penyelenggara PTSP Provinsi terbaik ke-4 Tahun 2012 se-Indonesia. Dengan keberhasilan ini diharapkan kedepannya BPMD dan PPT Provinsi Jambi dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam hal ini para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

4.1.10. Sosial

Berdasarkan berita resmi yang diekspose BPS pada 2 Januari 2012 penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi dalam kurun 6 bulan dari Maret-September 2012 menurun sebesar 0,14 % dari 271,67 ribu jiwa (8,42 %) pada maret 2012 menjadi 270,08 ribu (8,28 %) atau 1,6 ribu. Begitu juga dengan jumlah angka pengangguran pada agustus tahun 2011 sebesar 60.169 Orang (BPS Agustus 2011)/ 4,24 %, dari 1.495.167 Orang angkatan kerja (BPS Agustus 2011) dengan berbagai program kegiatan angka tersebut diakhir tahun 2012 dapat ditekan menjadi 47.295 orang (3,16 %). Penurunan angka pengangguran tersebut melalui BPTT sebanyak 1600 orang (1.040 orang dari anggaran APBD 560 orang dana APBN), melalui Job Fair 2.748 orang dapat terserap 100 % di awal triwulan I 2013 pada 55 perusahaan.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, secara fungsional, kewenangan dan keuangan yang terbatas. Untuk itu perlu adanya sinergisitas program dan anggaran antara Provinsi

dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Untuk membantu mengatasi permasalahan sosial Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp.3.339.995.000 dengan realisasi Rp. 3.111.198.400 (93,15 %) untuk mendanai tiga program terkait ketenagakerjaan yaitu:

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya peran lembaga perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial seperti cacat berat, lanjut usia terlantar. Selain itu memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat bersama pemerintah memupuk rasa kesetiakawanan sosial dengan motto *aku adalah engkau, engkau adalah aku..* Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKS) Provinsi Jambi dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelaksanaan koordinasi Organisasi oleh BKKS serta kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dengan tujuan pemberdayaan Karang Taruna. Selain itu program ini didukung juga dengan kegiatan KSN, yaitu untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial secara nasional melalui kegiatan bhakti sosial seperti sunnatan massal, donor darah dan Home care.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.150.205.000 untuk membiayai ketiga kegiatan tersebut dengan realisasi

keuangan sebesar Rp.145.875.000 (96,49 %) dengan realisasi fisik 100 %.

- 1) Kegiatan Peringatan HKSNI dengan dana Rp.66.050.000 dengan realisasi Rp.66.020.000 (99,95 %). Pos anggaran untuk kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan ATK, Dokumentasi, pengadaan kaos, belanja cetak dan makan minum rapat. Output dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan HKSNI tahun 2012, sedangkan Sasaran (outcome) adalah meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial masyarakat terbukti dengan ikut partisipasi donor darah, sunnatan massal dan bhakti sosial.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi dengan dana Rp.43.175.000 dengan realisasi Rp.43.165.000 (99,98 %). Pos anggaran kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan antara lain insentif nara sumber, ATK, dokumentasi, transportasi dan belanja perjalanan dinas. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas pelaksanaan koordinasi Orsos oleh BKKKS
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dengan dana Rp.40.900.000 dengan realisasi Rp.36.090.000 (89,53 %). Pos anggaran kegiatan ini dilakukan untuk untuk pembayaran honorarium narasumber, ATK, dokumentasi, transportasi dan belanja perjalanan dinas. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan karang taruna yang mandiri.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi (pendampingan) manajemen bagi keluarga miskin dengan tujuan agar tercapainya manajemen yang baik bagi usaha keluarga miskin, kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan tujuan terwujudnya pemberdayaan bagi KAT pada lokasi Purna Bina.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.534.297.000 untuk membiayai kedua kegiatan tersebut dengan realisasi keuangan sebesar Rp.530.909.900 (99,21 %) dengan realisasi fisik 100 %.

1) Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pendamping) dengan dana Rp.364.208.000 dengan realisasi Rp. 362.905.500 (99,64 %). Pos anggaran kegiatan digunakan antara lain untuk belanja ATK, honorarium tim ahli/instruktur/pendamping, Dokumentasi, transportasi, makan minum rapat dan perjalanan dinas. Output kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi manajemen bagi keluarga miskin sebanyak 1 kali dengan peserta 1500 orang. Kegiatan ini bersifat pendampingan yaitu memberikan pelatihan manajemen usaha keluarga/kelompok bagi kubu yang dibantu oleh Kementerian Sosial baik FM Desa maupun FM Kota.

Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan manajemen usaha bagi keluarga miskin.

2) Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina dengan dana Rp.170.089.000 dengan realisasi Rp. 168.004.000 (98,77 %). Pos anggaran kegiatan ini digunakan lain untuk insentif nara sumber, ATK, pembelian bibit tanaman dan ternak, dokumentasi, transportasi dan belanja perjalanan dinas dengan output utama kegiatan bantuan bibit tanaman sebanyak 142 untuk 142 orang/KK dan bantuan ternak sebanyak 11 ekor/orang untuk 146 orang/KK. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemberdayaan bagi penduduk KAT di lokasi purna bina.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya keterampilan anak terlantar dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan agar outcome dari program ini dapat terwujud adalah kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar dengan tujuan terwujudnya keterampilan bagi anak terlantar, kegiatan Kesiapsiagaan peanggulangan korban bencana dan orang terlantar dengan tujuan Kesiapsiagaan peanggulangan korban bencana dan orang terlantar.

Program Pembinaan Anak Terlantar melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.114.207.000 untuk membiayai kedua kegiatan tersebut dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.088.071.500 (97,65 %) dengan realisasi fisik 100 %.

- 1) Kegiatan Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar dengan dana Rp.932.587.000 dan terealisasi sebesar Rp.917.658.000 (98,40 %). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendidikan dan Latihan Keterampilan bagi anak terlantar selama 1 tahun dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini terwujudnya peningkatan keterampilan anak terlantar dalam peningkatan ekonomi keluarga.
- 2) Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana dan Orang Terlantar dengan dana Rp.181.620.000 dengan realisasi mencapai Rp.170.413.500 (93,83 %). Pos anggaran untuk kegiatan ini antara lain digunakan untuk pengadaan ATK, Bahan Bakar, transportasi dan belanja perjalanan dinas dengan output utama kegiatan ini adalah terlaksananya pemulangan orang terlantar serta kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana dengan mengerahkan anggota sukarela dari masyarakat (TAGANA). Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah tercapainya kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana dan orang terlantar serta sampainya orang terlantar ketempat tujuan.

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Outcome dari program ini adalah agar meningkatkannya kesadaran dan motivasi penyandang cacat dan trauma untuk kembali melaksanakan fungsi sosial. Kegiatan yang dilaksanakan agar outcome dari program ini dapat terwujud adalah melalui kegiatan pembinaan, pengiriman dan pemulangan penyandang anak cacat dan trauma dengan

tujuan terlaksananya pembinaan pengiriman dan pemulangan penyandang cacat dan anak.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.134.622.000 untuk membiayai kegiatan Pembinaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat dan Anak. Adapun kegiatan yang didanai melalui kegiatan ini antara lain adalah insentifi pengelola kegiatan, ATK, transportasi dan perjalanan dinas dengan realisasi keuangan sebesar Rp.117.722.500 (87,45 %) dengan realisasi fisik 100 %. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat dan anak sebanyak 30 orang pada tahun 2012.

5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Outcome dari program ini adalah meningkatkannya pelayanan pemerintah dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pembinaan dan pelayanan panti. Kegiatan yang dilaksanakan agar outcome dari program ini dapat terwujud adalah melalui kegiatan pelayanan kebutuhan panti/panti kompo dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan hidup untuk lanjut usia di panti asuhan/panti jompo kepada 70 orang Lansia di UPTD Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Jambi.

Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo Anak Terlantar melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.731.410.000 untuk membiayai kegiatan Pelayanan Kebutuhan Panti Jompo. Adapun kegiatan yang didanai melalui kegiatan ini antara lain

adalah insentif pengelola kegiatan/satpam/sopir, insentif narasumber/penceramah/, ATK, pengadaan peralatan rumah tangga, bibit tanaman, makan-minum, dan perjalanan dinas dengan realisasi keuangan sebesar Rp.727.380.500 (99,45 %) dengan realisasi fisik 100 %. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan hidup untuk lanjut usia penghuni panti Sosial Tresna Wedha “Budi Luhur” Jambi selama tahun 2012 sebanyak 70 orang lanjut usia terlantar.

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial

Outcome dari program ini adalah meningkatnya motivasi dan rasa percaya diri eks penyandang cacat sosial untuk kembali ke masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan agar outcome dari program ini dapat terwujud adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang cacat sosial dengan tujuan dapat meningkatkan keterampilan berusaha bagi WTS dan melalui kegiatan penyuluhan sosial tuna sosial dan rehabilitasi sosial eks korban Napza dengan tujuan terwujudnya pembinaan tuna sosial dan eks korban Napza dapat kembali melaksanakan fungsinya di masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp.675.283.000 untuk membiayai kedua kegiatan tersebut dengan realisasi keuangan sebesar Rp.501.239.000 (87,71 %) dengan realisasi fisik 100 %.

- 1) Kegiatan Pelatihan dan Keterampilan Berusaha bagi Eks. Penyandang Cacat Sosial dengan dana Rp.587.283.000

dengan realisasi keuangan Rp.420.429.000 (71,59 %) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran untuk kegiatan ini digunakan antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, instruktur/nara sumber, cleaning service dll, ATK, bahan praktek, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi eks. Penyandang cacat sosial sebanyak 35 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini terlaksana Pendidikan dan Latihan/Kursus guna meningkatkan keterampilan berusaha bagi WTS/PSK.

- 2) Kegiatan Penyuluhan Sosial Tuna Sosial dan Rehabilitasi Sosial Eks. korban Napza dengan dana Rp.88.000.000 dengan realisasi Rp.80.810.000 (91,83 %) dengan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan antara lain ini digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, instruktur/nara sumber, ATK, dokumentasi, makan-minum, dekorasi dan perjalanan dinas dengan output penyuluhan bagi Tuna Sosial dan eks. Korban Napza sebanyak 300 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan tuna sosial dan eks.korban Napza sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sosial kembali dimasyarakat.

4.1.11. Ketenagakerjaan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2012 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenaga kerjaan sebesar Rp.6.143.187.700 dengan realisasi Rp.6.000.398.300 (97,67 %) untuk mendanai 3 program yaitu: 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2) Program peningkatan kesempatan

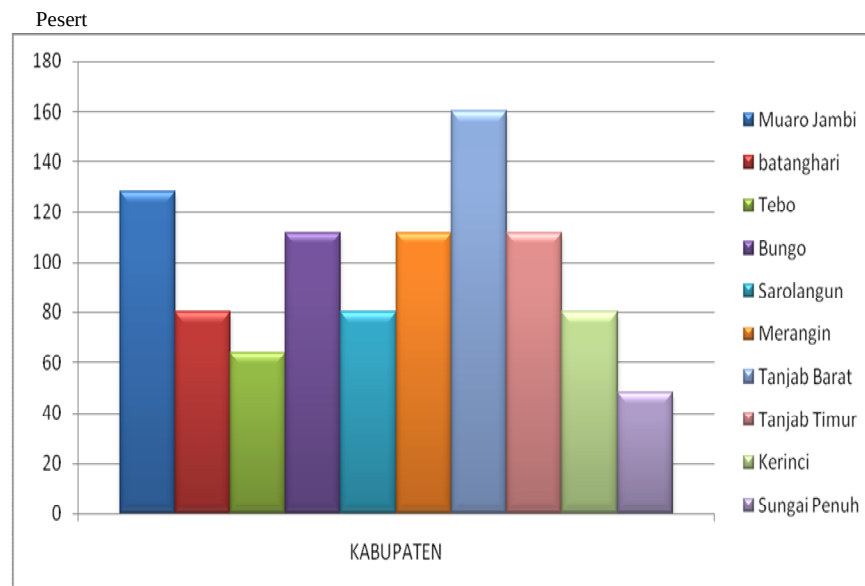
Kerja dan 3) program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dari 60.055 orang pada tahun 2011 turun menjadi 47.295 orang pada tahun 2012.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Outcome dari program ini adalah meningkatnya kualitas, produktivitas dan kuantitas tenaga kerja/calon tenaga kerja atau pencari kerja pada berbagai bidang keterampilan. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebesar Rp.4.635.449.200 dengan realisasi sebesar Rp.4.525.150.500 (98,44 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Untuk mewujudkan sasaran program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan melalui 5 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja dengan total anggaran Rp.3.755.449.200 dengan realisasi sebesar Rp.3.654.769.000 (97,32 %). Output dari kegiatan ini antara lain terlatihnya 1.040 orang peserta dimana 976 diantaranya dari KK miskin program Samisake berasal dari 37 Kecamatan di 10 Kabupaten/Kota. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan bagi seluruh peserta latih sehingga memudahkan mereka bersaing di bursa kerja atau membuka usaha sendiri.

**Gambar 1 Realisasi Pelatihan
Tenaga Kerja Program Samisake**



Sumber : Disosnakertrans Provinsi Jambi

**Gambar 4.11 Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Instalasi Listrik
Program Samisake Tahun 2012 di Kecamatan
Tengah Ilir Kabupaten Tebo.**

- 2) Kegiatan kewirausahaan produktivitas dengan dana sebesar Rp.395.160.000 dengan realisasi Rp.390.570.000 (98,84 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi bahan praktek, biaya transpor, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output kegiatan terlaksana pelatihan kewirausahaan produktif bagi 180 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas wirausahawan dalam menjalankan usahanya serta mendorong minat masyarakat menjadi pengusaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 3) Kegiatan Kerjasama Pelatihan Dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dengan total dana sebesar Rp.294.065.500 dan terealisasi sebesar Rp. 292.501.900

(99,47 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran pada kegiatan ini antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi bahan praktek, biaya transpor, makan-minum dan perjalanan dinas sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kerjasama pelatihan antara Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 34 LPKS dengan total jam pelatihan 240 jam, Sasaran (outcome) yang ingin dicapai adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan bidang keterampilan sesuai kejuruan masing-masing 1. Kegiatan menjahit, 2. Kegiatan operator komputer, 3. Teknisi HP, 4. Salon/Tatarias sebanyak 80 orang.

- 4) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas tenaga kerja dengan dana sebesar Rp.118.404.000 dengan realisasi Rp.115.879.000 (97,87 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran pada kegiatan ini anatara lain digunakan UNTUK insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlatihnya peserta sebanyak 60 orang tentang peningkatan produktivitas. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas perusahaan masyarakat menjadi pengusaha yang handal, mampu dan menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.
- 5) Kegiatan Bimbingan konsultasi UMKM calon penerima Sidhakarya dengan dana sebesar Rp. 72.370.000 dengan realisasi Rp. 71.430.000 (98,70 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, nara

sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya bimbingan dan konsultasi 20 UMKM. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan 20 UMKM calon penerima Sidhakarya tahun 2012.

2.Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh; Kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKA; Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran; Penyusunan Program RTKD dan Analisa Keberhasilan Program; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan; Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja; Pameran Bursa Kerja (Job Fair 2012); Pengiriman dan Penempatan TKI ke Malaysia dan Koordinasi Penempatan TKI ke luar negeri; dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan.

Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja. Total dana yang disediakan untuk Peningkatan Kesempatan Kerja adalah sebesar Rp.1.024.051.500 dengan realisasi Rp.1.018.447.500 (99,12 %) dengan realisasi fisik 100 % untuk mendanai kegiatan.

- 1)Kegiatan Pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri, penyuluhan penempatan TKI dan monitoring penggunaan tenaga kerja asing dengan total dana sebesar Rp.311.0879.500 dengan realisasi dana Rp.311.066.500 (99,12 %) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk ATK, biaya makan minum,

narasumber, dengan output terlaksananya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, TKI sebanyak 7480 orang, penyuluhan penempatan calon TKI keluar negeri dan pengendalian penggunaan TKA, ATK, makan minum dll. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengangguran serta tersedianya data TKA yang bekerja di Provinsi Jambi.

2) Monitoring kesempatan kerja sektoral dan koordinasi penanggulangan pengangguran dengan dana Rp.102.321.500 dengan realisasi Rp. 102.321.500 (100 %) dengan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini antara lain digunakan antara lain untuk honor Tim Koordinasi penanggulangan pengangguran, dengan output terlaksananya monitoring pengumpulan data sektoral, kesempatan kerja sektoral dan koordinasi penanggulangan pengangguran dengan output berbentuk buku data sektoral ketenagakerjaan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah diketahuinya kesempatan kerja dari ke sembilan sektor lapangan usaha, serta dapat ditanganinya permasalahan dalam penanggulangan pengangguran di Provinsi Jambi.

3) Kegiatan Penyusunan Program RTKD dan analisa keberhasilan program dengan dana Rp.68.387.000 dengan realisasi Rp. 67.987.000 (99,42 %). Pos anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini antara lain digunakan untuk Adapun kegiatan yang didanai melalui kegiatan ini antara lain untuk Honor tim penyusun kegiatan, instruktur/nara sumber, ATK, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output tersusunya buku program RTKD Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi sebanyak 200

buku. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah tersusunya dokumen program tahun 2013.

4) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan dana Rp.63.995.000 dengan realisasi Rp. 63.515.000 (99,25 %). Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk sosialisasi peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan yang dilaksanakan di Hotel Grend dengan jumlah peserta 90 orang dengan narasumber dari Direktorat PTA Kementerian Nakertrans RI. Peserta bersal dari perusahaan-perusahaan yang ada si Provinsi Jambi serta dari Dinas Kabupaten/Kota, dengan output tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dibidang penempatan kepada 90 orang (dari perusahaan dan Petugas Kab/Kota) pada tahun 2012. Adapun kegiatan yang didanai melalui kegiatan ini antara lain untuk uang transport, Uang Saku peserta, Konsumsi, Honor dan Transport Narasumber pusat, ATK. (outcome) dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman terhadap peraturan tersebut yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran.

5) Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI ke Malaysia dan Koordinasi Penempatan TKI ke luar negeri dengan dana sebesar Rp.71.054.000 dengan realisasi Rp. 70.529.000 (99,26 %). Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri (Malaysia) dalam rangka koordinasi dan monitoring penempatan tenagakerja Indonesia asal Jambi yang bekerja di Malaysia. Dengan output termonitornya sejauhmana perlindungan TKI asal Jambi mendapatkan

Hak serta dalam melaksanakan kewajibannya baik oleh Agen maupun oleh pemerintah Malaysia, koordinasi penempatan TKI ke luar negeri. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini terlaksananya penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (khususnya Malaysia).

- 6) Kegiatan Pengembangan Masyarakat melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan dana sebesar Rp.192.815.000 dengan realisasi Rp. 192.613.000 (99,90 %). Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pelatihan melalui penerapan TTG dengan output terlatihnya masyarakat pencari kerja tentang Teknologi Tepat Guna sebanyak 45 orang dan dilaksanakan di Kab. Ma. Jambi dan Kab. Batang Hari. Setelah pelatihan peserta diberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi pencari kerja.
- 7) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) dengan dana Rp.73.360.000 dengan realisasi Rp. 69.710.000 (95,02 %). Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pembayaran honorarium pengelola data, analisa data, pengolah IPK Kabupaten/Kota dengan output tersedianya data IPK untuk 12 bulan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini tersedianya data IPK yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi pasar kerja.
- 8) Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair 2012) dengan dana Rp.97.649.000 dengan realisasi Rp. 97.649.000 (100 %). Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini

antara lain digunakan untuk pelaksanaan pameran bursa kerja yang dilaksanakan di WTC Batang hari serta diikuti 58 perusahaan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.748 orang dan pelamar yang masuk 3.868 orang, realisasi penempatan s/d Desember 2012 sebanyak 268 orang (sisanya akan terealisasi awal triwulan I Tahun 2013. Pameran Bursa kerja dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh 55 perusahaan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini Tersalurkannya tenaga kerja sebanyak 268 orang ke perusahaan besar dan kecil di Provinsi Jambi.

9) Kegiatan Penyusunan Profil Ketenaga Kerjaan dengan dana Rp.43.380.000 dengan realisasi Rp. 43.056.000 (99,25 %). Pos anggran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorrarium tim teknis, entri data, profil,, tim analisis data, ATK, biaya makan-minum rapat dan perjalanan dinas dengan output tersusunya buku profil ketenaga kerjaan tahun 2012 sebanyak 30 buah. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini tersedianya informasi tentang ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi sebagai bahan dalam membuat kebijakan terkait ketenagakerjaan.

3.Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan kegiatan Monitoring UMP, THR dan pengawasan ketenaga kerjaan; Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP dan Bintek Survey KHL dan Pengupahan (UMP); Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit; Pelaksanaan Program PBTA sesuai

Pergub No.21 Tahun 2008. Outcome yang diharapkan dari program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ini adalah 1) meningkatnya peran kelembagaan perlindungan tenaga kerja dalam mendorong partisipasi aktif tenaga kerja dan dunia usaha dan 2) meningkatkan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha.

Untuk menjalankan program ini telah dianggarkan dana APBD Provinsi Jambi tahun 2012 sebesar Rp.483.687.000 dengan realisasi sebesar Rp.456.801.000 (94,48 %). Secara rinci kegiatan yang dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Monitoring UMP, THR dan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan total dana sebesar Rp.90.000.000 dengan realisasi dana Rp. 80.145.000 (89,05 %) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya monitoring UMP, THR dan pengawasan ketenagakerjaan pada 2218 buah perusahaan di 11 Kabupaten/Kota. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terlaksananya UMP dan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2012.
- 2) Kegiatan Pembahasan dan survey kebutuhan layak (KHL) serta UMP & BinteK survey KHL dan pengupahan UMPP dengan dana Rp.220.000.000 dengan realisasi Rp. 209.232.000 (95,57 %) dengan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif

pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya pembahasan dan survey KHL dan UMP serta terlaksanya Bintek survey KHL dan pengupahan UMP sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 25 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya data KHL dan bahan penetapan UMP tahun 2013 serta meningkatnya pengetahuan peserta Bintek survey KHL dan pengupahan UMP dibidang Hubungan Industrial.

- 3) Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit dengan dana Rp.72.200.000 dengan realisasi Rp. 70.891 (94,19 %). Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium kelompok kerja Tripartit, instruktur, ATK, makan-minum rapat dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya mekanisme lembaga kerjasama tripartit yang saling bersinergis dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha (perusahaan) selama tahun 2012.
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) sesuai dengan Pergub Jambi Nomor 21 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan dana Rp.102.487.000 dengan realisasi Rp. 96.532.000 (94,19 %). Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan/narasumber/instruktur, penyediaan ATK, transportasi dan perjalanan dinas. Sedangkan output utama dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Pergub Jambi Nomor 21 tahun 2008

tentang Penyusunan Rencana Aksi PBPTA Kab/Kota kepada 5 Kab/Kota yang belum menyusun Rencana PBPTA (Kota Sungai Penuh, Kab. Kerinci, Kab. Ma. Jambi, Kab. Tanjab Barat, dan kab. Tanjab Timur. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman terhadap program PBPTA sesuai Pergub Jambi Nomor 21 tahun 2008 sehingga pada gilirannya diharapkan dapat meminimalkan anak bekerja tidak sesuai dengan peraturan (pekerjaan terburuk) selama tahun 2012.

4.1.12. Koperasi dan UMKM

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan daya saing UMKM. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu: 1) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan di Provinsi Jambi; 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM; 3) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD; 4) Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Batik dan HKI di Provinsi Jambi; 5) Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se Provinsi Jambi; 6) Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu : 1) Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan di Provinsi Jambi sebanyak 100 UMKM; 2) Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM bagi 50 orang pelaku usaha kecil; 3) Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD bagi 50 orang pengurus koperasi; 4) Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Batik dan HKI di Provinsi Jambi 50 orang peserta Batik dan 100 orang peserta

HKI; 5) Terselenggaranya Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se Provinsi Jambi sebanyak 11 Kab/Kota; 6) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha kecil bagi 50 orang.

Capaian dari program ini yaitu terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi secara dinamis dan berkelanjutan. Hal tersebut digambar dari peningkatan jumlah koperasi dari 3.275 unit di tahun 2010 menjadi 3.306 pada tahun 2011 atau naik sebesar 0,94%, sedangkan Target RPJMD tahun 2012 sebanyak 3.260 unit koperasi. Sedangkan untuk Koperasi yang dapat melaksanakan RAT juga mengalami peningkatan sebesar 8,98% dari 902 pada tahun 2010 Koperasi menjadi 983 pada tahun 2011, jumlah tersebut sekaligus telah melampaui target dalam RPJMD Provinsi, dimana pada tahun 2012 ditetapkan sebanyak 873 koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.47 Perkembangan Kelembagaan Koperasi tahun 2010 s.d. 2012

Perkembangan KSP / USP Koperasi	Sat	Capaian		
		2010	2011	2012
Jumlah KSP	Unit	56	56	74
Jumlah USP Koperasi	Unit	1.151	1.151	2980
Penilaian Kesehatan KSP/SUP-Kop	Unit	201	190	267
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	1000	550	900
Perkuatan Permodalan Dana Bergulir Bagi KSP/USP-Kop	Rp	45.163.500.000	50.508.500.000	66.501.232.240
Bansos Kop. Perkotaan Dan Pedesaan	Rp	-	650.000.000.000	1.350.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

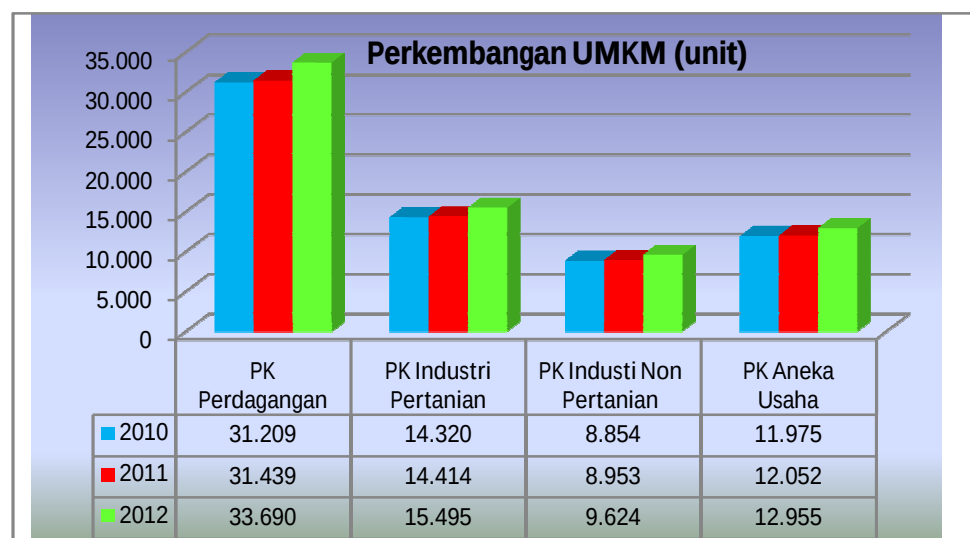
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.

Tujuan program ini adalah untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya lokal yang ada secara optimal sesuai tuntutan pasar. Adapun kegiatan pada program ini adalah : 1) Pengembangan Sarana Promosi dan Penyelenggaraan Promosi UMKM Tingkat Nasional serta Regional; 2) Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal; 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 4) Perkuatan Perkembangan Permodalan Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha Produktif; 5) Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Kop. Penerima Dana Bergulir; 6) Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi PMK; 7) Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir; 8) Peningkatan Pengembangan BDSP-KKMB dalam Megakses Permodalan KUKM dengan Perbankan; 9) Sosialisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pemanfaatan Dana KUR di Provinsi Jambi.

Adapun output dari kegiatan-kegiatan diatas yaitu: 1) Terlaksananya Pengembangan Sarana Promosi dan Penyelenggaraan Promosi UMKM Tingkat Nasional serta Regional Dalam Provinsi sebanyak 6 kali dan Luar Provinsi Sebanyak 3 kali; 2) Terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Kawasan Strategis Kabupaten di 5 (lima) Kecamatan di 2 Kabupaten (Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin); 3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dari berbagai kegiatan di 9 kabupaten 2 kota; 4) Terlaksananya Perkuatan perkembangan permodalan dana bergulir bagi

kelompok usaha produktif, bagi 60 kelompok; 5) Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Kop. Penerima dana bergulir 288 KSP/USP; 6) Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi PMK sebanyak 900 Pengusaha Mikro Kecil (PMK); 7) Terlaksananya Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir bagi 72 orang; 8) Terlaksananya Peningkatan Pengembangan BDSP-KKMB dalam Megakses Permodalan KUKM dengan Perbankan bagi 29 BDS-P/KKMB.

Capaian dari program ini yaitu tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif dan meningkatnya kesadaran berwirausaha sebagai budaya serta mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.

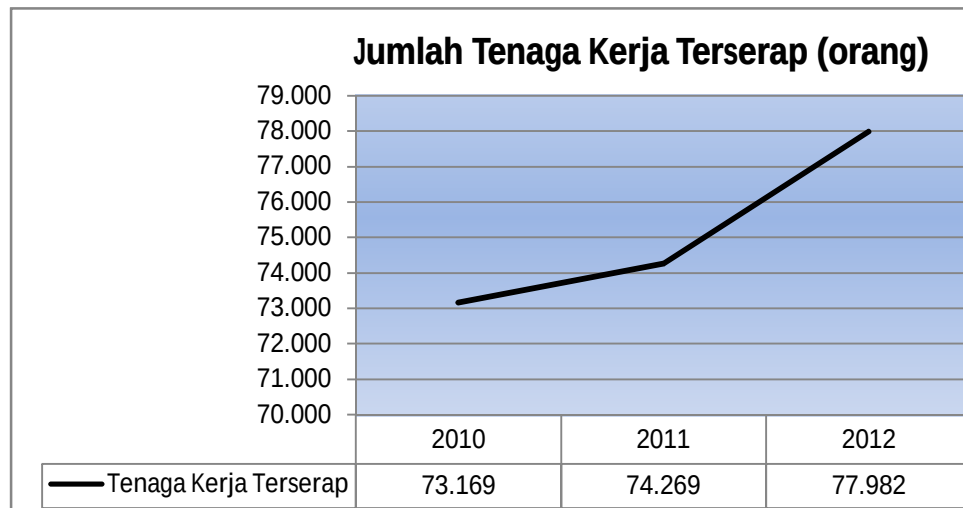


Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Grafik 4.12 Perkembangan UMKM

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa UMKM mengalami peningkatan dari 66.358 unit pada tahun 2010, meningkat menjadi 66.858 unit, atau mengalami peningkatan 0,75%, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan sebesar 7,3% menjadi 71.764 unit. Sedangkan tenaga kerja yang terserap dengan tumbuhnya UMKM baru dapat digambarkan pada grafik berikut



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Grafik 4.13 Jumlah Tenaga Kerja Terserap

Dengan adanya peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2011 terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 77.982 orang. Selain itu keberhasilan program ini juga dilihat dari peningkatan pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Dimana pada tahun 2011 bantuan perkuatan dana bergulir tercatat lebih dari Rp 28 milyar.

Tabel 4.48 Realisasi Perkuatan Permodalan

No	Uraian	2010	2011	2012
1	TPKU	1.000.000	4.650.000	4.850.000
2	Bantuan Perkuatan Dana Bergulir	-	28.848.530	28.848.530
3	Pasar Tradisional	1.000.000	2.650.000	3.450.000
4	Penataan PKL	350.000	350.000	1.475.000
5	Bansos Wanita / Pemuda	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6	Tele Center	60.000	60.000	60.000
7	Bantuan Sarana Pemasaran	-	86.080	86.080
8	Bantuan Penataan Toko & Ritel Moderen	-	260.000	390.000
9	Bantuan Kantin Sekolah	-	100.000	100.000
10	Bansos Modal Usaha Budidaya Kentang	-	-	125.000
11	Bansos RMU (One Pass)	-	-	100.000
12	Bansos Peralatan Furniture	-	-	50.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas, Kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung program ini yaitu: 1) Pengembangan jaringan kemitraan Usaha Koperasi; 2) Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi; 3) Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi; 4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi; 5) Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi.

Adapun output dari beberapa kegiatan ini yaitu: 1) Terlaksananya Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha Koperasi di 11 kab/kota; 2) Terselenggaranya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi di 11 Kab/Kota; 3) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi di 11 Kabupaten/Kota; 4) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi di 11 Kab/Kota; 5) Terlaksananya Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi bagi 11 Kabupaten/Kota. Capaian dari program ini terbangunnya jaringan kemitraan usaha koperasi, terwujudnya kader koperasi yang handal, yang dapat memberikan pengalamannya dalam mengelola koperasi. Indikator keberhasilan dari program ini yaitu:

Tabel 4.49 Perkembangan Koperasi 2010 s.d. 2012

No	U r a i a n	Satuan	2010	2011	2012
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.275	3.306	3.443
2	Koperasi Aktif	Unit	2.368	2.401	2.211
3	Koperasi Tidak Aktif	Unit	907	905	1.232
4	Jumlah Anggota	Orang	353.028	353.758	357.893
5	Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	902	983	1.043
6	Jumlah Manajer	Orang	510	510	605
7	Modal Sendiri	Rp	258.703.358	262.918.598	377.986.269
8	Modal Luar	Rp	256.608.385	233.417.442	396.625.500
9	Volume Usaha	Rp	1.167.622.089	1.172.517.960	1.772.174.220
10	Sisa Hasil Usaha	Rp	48.638.159	62.688.546	54.225.221

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Tabel 4.50 Perkembangan Prestasi Koperasi

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Tujuan Memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu: 1) Sosialisasi Kebijakan tentang UMKM; 2) Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Provinsi Jambi; 3) Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Program

One Village One Product; 4) Fasilitas Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi; 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Diklat; 6) Fasilitas Pengembangan UKM melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM.

Adapun output dari kegiatan ini yaitu : 1) Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang UMKM bagi 100 UMKM; 2) Terselenggaranya Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Provinsi Jambi di 11 Kabupaten/Kota; 3) Terlaksananya Fasilitas Pengembangan UMKM melalui Program One Village One Product (OVOP) di 11 Kabupaten/Kota; 4) Terlaksananya Fasilitas Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi di 11 Kabupaten/Kota bagi 75 kelompok dan koperasi; 5) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Diklat di 11 Kabupaten/Kota; 6) Terlaksananya Fasilitas Pengembangan UKM melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM di 3 Kabupaten. Capaian dari program ini adalah melakukan pemberdayaan usaha terhadap KUKM agar KUKM memiliki daya saing yang kuat.

Teridentifikasi bahwa dalam pemberdayaan KUMKM di Provinsi Jambi dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan yang sangat krusial yaitu : 1). Internal dan 2). Eksternal yaitu :

1) Internal

Masih rendahnya kualitas SDM KUMKM yang berdampak kepada :

- a) Lemahnya KUMKM dalam meningkatkan akses kepada berbagai sumber dan mengembangkan pangsa pasar.
- b) Lemahnya Struktur Permodalan dan Terbatasnya akses KUMKM terhadap sumber Permodalan.

c) Terbatasnya kemampuan KUMKM dalam Penguasaan teknologi informasi.

d) Lemahnya organisasi dalam manajemen KUMKM.

e) Terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya.

2) Eksternal

a) Iklim usaha yang kurang kondusif.

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

c) Pembinaan KUMKM yang kurang terpadu.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM, baik terhadap permasalahan Internal maupun terhadap permasalahan Eksternal dilakukan berbagai strategi, yang meliputi :

1. Perkuatan Permodalan Bagi Usaha KUMKM.
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.
2. Perbaikan manajemen KUMKM.
3. Perluasan jaringan pemasaran usaha KUMKM.
4. Pengembangan kemitraan usaha KUMKM.

4.1.13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Lainnya Provinsi Jambi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPP) mempunyai kewenangan melaksanakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Jambi.

Sebagai bentuk akuntabilitas keuangan yang transparan dan akuntabel, di bawah ini disajikan capaian kinerja keuangan berdasarkan program kegiatan dan sasaran yang dilaksanakan BPMPP Provinsi Jambi. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan program/kegiatan yang dilaksanakan di BPMPP Provinsi Jambi Tahun 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.51
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Terwujudnya aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		650.000.000	644.884.900	99,2
	1	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan desa	50.000.000	47.545.000	95,1
	2	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100.000.000	99.362.000	99,4
	3	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Profil Desa	100.000.000	98.862.400	98,9
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat	50.000.000	49.750.000	99,5
	5	Pembinaan dan Perlombaan Desa/Kelurahan	350.000.000	349.365.500	99,8
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		150.000.000	147.370.000	98,3
	1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	50.000.000	48.294.000	96,6
	2	Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	100.000.000	99.076.000	99,1
Terwujudnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Sosial Budaya dan Adat	Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan		1.019.575.000	973.473.500	95,5
	1	Pembinaan Posyantekdes dan Gelar TTG	200.000.000	200.000.000	100
	2	Pembinaan Nilai Gotong Royong dan Adat Daerah	500.000.000	497.098.500	99,4
	3	Sosialisasi Perda No. 7 / 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000	91.000.000	91
	4	Kegiatan Pembinaan Posyandu	75.000.000	71.600.000	95,5
	5	Advokasi Kelembagaan KPA	86.425.000	58.525.000	67,7
	6	Pelatihan Pemetaan Lokasi, Populasi Kunci dan Pelayanan LSM	58.150.000	55.250.000	95

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Terciptanya Komunitas Masyarakat dan Lembaga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Berfungsinya Sumber Daya Ekonomi Masyarakat untuk menunjang Kebutuhan Masyarakat Perdesaan	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		800.000.000	689.354.200	86,2
	1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan PNPM-MP dan Sekretariat TKPK Provinsi Jambi	800.000.000	689.354.200	86,2
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi		150.000.000	117.928.400	78,6
	1	Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UMKM di Perdesaan	50.000.000	41.403.400	82,8
	2	Kegiatan Pembinaan UED-SP dan CPPD	50.000.000	43.474.000	87
	3	Kegiatan Pembinaan dan Rakor Pengelolaan Pasar Desa	50.000.000	33.051.000	66,1
Terciptanya Peranan Perempuan dalam Pembangunan Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik serta terintegrasinya Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		50.000.000	50.000.000	100
	1	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000	50.000.000	100
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		836.200.000	816.583.500	97,7
	1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	50.000.000	50.000.000	100
	2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	176.200.000	176.200.000	100
	3	Kegiatan Bintek Kekerasan Terhadap Anak bagi Guru BK dan Agama	100.000.000	96.348.000	96,4
	4	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	60.000.000	59.500.000	99,2

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
	5	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	200.000.000	185.941.500	93
	6	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak	150.000.000	148.594.000	99,1
	7	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	50.000.000	50.000.000	100
	8	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG	50.000.000	50.000.000	100
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		460.000.000	430.674.056	93,6
	1	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	75.000.000	66.780.000	89
	2	Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	75.000.000	75.000.000	100
	3	Kegiatan Sosialisasi sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	68.480.000	68.480.000	100
	4	Kegiatan Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	50.000.000	50.000.000	100
	5	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan	50.000.000	28.894.056	57,8
	6	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan	141.520.000	141.520.000	100
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		480.000.000	390.143.400	81,3
	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	480.000.000	390.143.400	81,3
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Membangun		150.000.000	133.763.600	89,2
	1	Kegiatan Rakor Peran Serta dan Kesetaraan Gender	150.000.000	133.763.600	89,2

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Terjaminnya, terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		50.000.000	50.000.000	100
	1	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	50.000.000	50.000.000	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan		1.800.000.000	1.731.032.991	96,2
	1	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.800.000.000	1.731.032.991	96,2
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		925.359.500	876.230.373	94,7
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000	750.000	100
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.000.000	57.457.973	71,8
	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.050.000	104.850.000	88,8
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.100.000	74.100.000	100
	5	Penyediaan alat tulis kantor	39.513.500	38.366.350	97,1
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.330.000	9.296.050	43,6
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.095.000	12.095.000	100
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.681.000	1.475.000	87,8
	9	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	15.000.000	100
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	532.840.000	532.840.000	100
	11	Penyediaan jasa tenaga penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	30.000.000	30.000.000	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		903.245.000	793.085.307	87,8
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kantor	476.914.000	465.914.000	97,7

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	97.476.000	96.976.000	99,5
	3	Pengadaan mebeleur	58.600.000	57.900.000	98,8
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	59.200.000	98,7
	5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	177.225.000	80.514.307	45,4
	6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	23.030.000	22.925.000	99,5
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	10.000.000	9.656.000	96,6
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		27.300.000	27.262.500	99,9
	1	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	27.300.000	27.262.500	99,9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		32.207.500	20.300.000	63
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	32.207.500	20.300.000	63
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		4.200.000	4.200.000	100
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.200.000	4.200.000	100
Jumlah Belanja Langsung			8.488.087.000	7.896.286.727	93
Jumlah Belanja Tidak Langsung			4.649.308.435	3.702.182.292	79,6
Total Anggaran			13.137.395.435	11.598.469.019	88,3

Sumber : BPMPP Provinsi Jambi

Dari tabel di atas, diketahui bahwa secara umum realisasi anggaran yang dimanfaatkan dari belanja langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan pada BPMPP Provinsi Jambi Tahun 2012 sebesar 93,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2011 sebesar 92,23%, maka diketahui adanya kenaikan dalam penyerapan anggaran sebesar 0,8%.

Selanjutnya kondisi realisasi penyerapan anggaran pada BPMPP tahun 2012 tersebut, dapat dianalisis berdasarkan jenis program, kegiatan dan sasaran strategis yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan program dengan kategori tertinggi dilaksanakan pada : Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, yang masing-masing sebesar 100%.
2. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan program dengan kategori terendah dilaksanakan pada : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi sebesar 78,62% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 63,03%.
3. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan dengan kategori terendah dilaksanakan pada : Kegiatan Advokasi Kelembagaan KPA (67,72%); Kegiatan Pembinaan dan Rakor Pengelolaan Pasar Desa (66,10%); Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (63,03%); Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan

(57,79%); Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional (45,43%); dan Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (43,58%).

4. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis, yang tertinggi adalah pada sasaran 1 (pertama) yaitu Terwujudnya aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 99,04%, sedangkan terendah pada sasaran 3 (ketiga) yaitu Terciptanya Komunitas Masyarakat dan Lembaga yang berpartisipasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Berfungsinya Sumber Daya Ekonomi Masyarakat untuk menunjang Kebutuhan Masyarakat Perdesaan sebesar 82,39%.

1) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan Program ini adalah meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, penanaman nilai kegotongroyongan, pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Melalui program ini dilakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan dalam pengelolaan pemerintahannya. Pada tahun 2012 ini berdasarkan hasil penilaian lomba desa, Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Menjadi Juara Harapan III Tk.Nasional. Dalam pemanfaatan dan penerapan TTG, dalam gelar TTG Tingkat Nasional, beberapa produk yang berasal dari Provinsi Jambi juga memperoleh apresiasi yang baik dengan terjualnya beberapa alat-alat hasil penerapan TTG seperti Pompa air Hydrolit tanpa minyak, alat penangkat kumbang sawit dari pipa paralon, alat pengering ikan tanpa bahan pengawet dan alat pompa tanpa

menggunakan mesin/listrik. Pada kesempatan itu TTG dari Provinsi Jambi memperoleh penghargaan Juara Harapan 1 Tk. Nasional. Sedangkan pelaksanaan BBGRM telah berhasil dilaksanakan di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci pada tanggal 12 Mei 2012, sedangkan untuk tingkat nasional diselenggarakan di Puspo Agro Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 23 Mei 2012.

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Perdesaan

Melalui program ini sebagai bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah memberikan dampak pada penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam membangun di wilayah perdesaan. Saat ini untuk mendukung perencanaan pembangunan, telah tersusun RPJMDesa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengintegrasikan perencanaan di tingkat desa sebanyak 849 desa yang telah menyusun RPJMDesa. Selain itu, masyarakat juga telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

a. Bidang Ekonomi

- 1)Peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan perekonomian keluarga oleh kaum perempuan melalui kelompok usaha bersama dengan digulirkannya Dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) sebagai modal usaha. Tahun 2012, telah terbentuk sebanyak 279 kelompok SPP dengan dana bergulir sebesar Rp. 12.029.945.000,-.

2)Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pedesaan untuk membuka akses sentra produksi masyarakat ke pasar guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian pedesaan, antara lain: Pembangunan jalan sepanjang 128.548 Meter dengan penyerapan dana sebesar Rp. 15.973.490.000,- dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 214.393.500; Pembangunan jembatan sebanyak 26 unit dengan panjang 868 meter dengan penyerapan dana sebesar Rp. 4.244.600.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 83.013.000; Pembangunan saluran irigasi sebanyak 24 unit dengan panjang 27.964 meter dengan penyerapan dana sebesar Rp. 4.235.100.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 37.637.000; Pembangunan 5 unit pasar desa dengan serapan dana sebesar Rp. 767.015.750,- dan swadaya masyarakat sebesarRp. 23.206.000; Pembangunan alat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 1 unit dengan penyerapan dana sebesar Rp. 322.500.000,- dan swadaya masyarakat Rp. 59.714.100; Pembangunan 4 unit tambatan perahu dengan panjang 87 meter dengan dana sebesar Rp. 760.475.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 63.285.000,-

b. Bidang Sosial Budaya

1)Bidang Pendidikan : Pembangunan gedung sekolah sebanyak 70 unit dengan dana sebesar Rp. 14.069.595.000,- dan swadaya masyarakat Rp. 400.583.600; Rehab gedung sekolah sebanyak 12

unit dengan dana sebesar Rp. 1.435.686.750,- dan swadaya masyarakat Rp. 17.979.000; Pelatihan Keterampilan untuk belajar mengajar dengan serapan dana sebesar Rp. 526.680.999; dan Bantuan pendidikan atau beasiswa sebesar Rp. 205.200.000.

2) Bidang Kesehatan : Pembangunan 18 unit gedung kesehatan dengan serapan dana sebesar Rp. 2.402.550.000,- dan dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp. 84.525.500; Pembangunan sarana air bersih berupa sumur bor, sumur gali, bak air dan penampung air hujan sebanyak 7 unit dengan panjang 6.906 Meter dengan penyerapan dana sebesar Rp. 858.847.500,- dan dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 40.710.000; Pembangunan MCK sebanyak 4 unit dengan penyerapan dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 788.025.000.

3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Melalui program ini dibina kelompok-kelompok perempuan peduli lingkungan, yang turut aktif dalam pelestarian lingkungan termasuk dalam memprakarsai gerakan tanam danelihara pohon. Selain itu, juga dilakukan pembinaan melalui pendekatan sosial budaya kepada masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan tugas perempuan langsung di masyarakat melalui pendekatan sosial budaya yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

4) Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak

Sampai dengan saat ini melalui program ini P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, melalui koordinasi dengan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jambi, rumah Sakit Umum Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi telah menangani 42 dan memberikan pendampingan apabila berkaitan dengan hukum. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban psikologi korban.

a. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Dalam upaya mendukung penyusunan anggaran yang responsif gender, telah dilatih 25 orang *focal point* dari setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, selain 20 orang *focal point* yang ada di SKPD-SKPD Provinsi Jambi. Kelompok kerja PUG Provinsi Jambi juga telah terbentuk, sehingga koordinasi penyusunan anggaran responsif gender dapat dilakukan dengan baik. Dalam penguatan kelembagaan perlindungan anak juga telah terbentuk Forum Anak Daerah Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak anak dalam perikahidupannya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk berekspresi dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Melalui Forum Anak Nasional telah dikukuhkan 10 orang duta anak Indonesia yang salah satunya berasal dari Provinsi Jambi sebagai Sekretaris Forum Anak Indonesia.

b. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Daerah Perdesaan

Program ini ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif perempuan yang melalui Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi kegiatan untuk menunjang 10 Program Pokok PKK.

Secara umum, rata-rata capaian kinerja BPMPP Provinsi Jambi Tahun 2012 sebesar 89,5 % meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2011 yaitu 83,7% atau naik 5,8%.

4.1.14. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan karena terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Terkait dengan urusan wajib kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan kekayaan Budaya

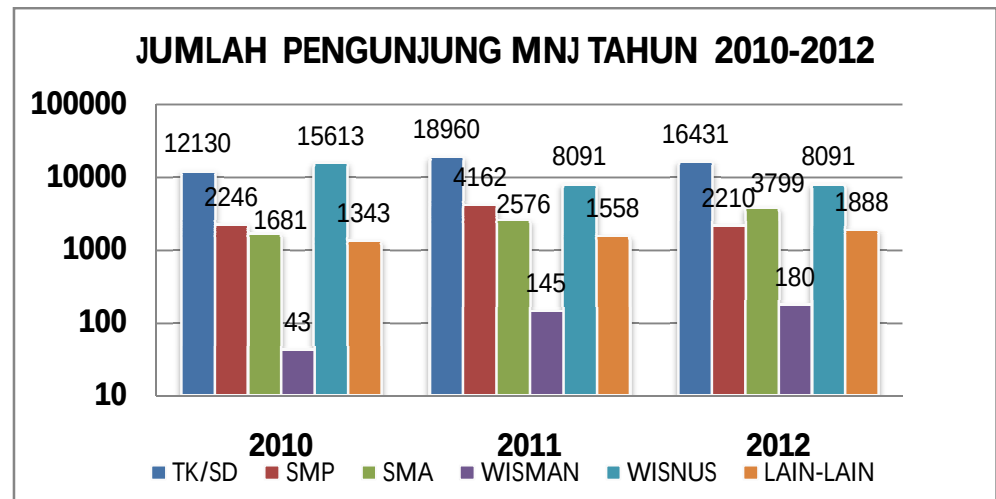
Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan Nilai-nilai budaya, seni dan film yang dapat memberikan makna pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan masyarakat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Selain itu juga guna meningkatkan apresiasi masyarakat terutama kalangan pendidikan terhadap nilai sejarah dan budaya daerah Jambi. Pada Tahun 2012, program ini mendapat dukungan dana sebesar Rp 4.162.742.500,- dengan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan yaitu: (a) Meningkatkan Fungsi Museum Negeri Jambi, (b) Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi, (c) Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, (d) Pendataan Lanjutan Situs Percandian Muara Jambi Untuk Dipersiapkan Sebagai Warisan Dunia Tahap III, (e) Pendataan Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Merangin, (f) Seminar Sejarah Perjuangan Jambi, dan (g) Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Realisasi program ini mendorong terlaksananya Pendataan Kepurbakalaan Situs Merangin bersama dengan Tim Geologi Pusat dari Kementerian ESDM menuju pengembangan menjadi Global GeoPark Network, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, Pembuatan review DED Candi Muaro Jambi, seminar Nasional situs Percandian Muaro Jambi menuju warisan dunia dan pengadaan 4 unit perahu karet dan 4 buah duplikat benda cagar budaya. Pameran koleksi Museum Negeri Jambi dalam kegiatan pameran bersama Museum Negeri se-Sumatera, pameran bersama Museum negeri se Indonesia di mataram, sarasehan kesejarahan Jambi dan pameran koleksi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dalam kegiatan pameran dalam rangka MTQ tingkat Provinsi Jambi, pameran khusus se Indonesia di Yogyakarta, Pekan Kejuangan Rakyat Jambi, dialog sejarah perjuangan rakyat Jambi, Pekan Pesona Budaya Jambi 2012, temu karya Taman Budaya se-Indonesia di surabaya, pegelaran seni, pameran seni rupa, PPSS di Kota Medan dan telah dilaksanakan kegiatan tampilan kesinian krinok, diskusi / workshop seni budaya jambi se-Provinsi Jambi serta pertemuan Penyair Nusantara (PPN) IV di Kota Jambi.

Adapun perkembangan data pengunjung Museum Negeri Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

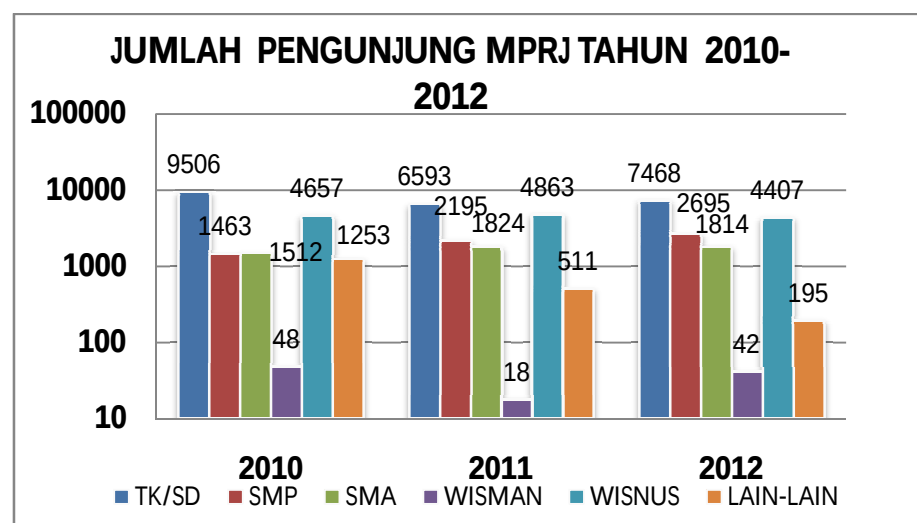
Gambar. 4.14 Data Kunjungan Museum Negeri Jambi



Sumber ; UPTD Museum Negeri Jambi (M. Seginjai)

Sedangkan untuk Museum Perjuangan Rakyat Jambi jumlah pengunjung pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar. 4.15 Data Kunjungan Museum Perjuangan Rakyat Jambi



Sumber ; UPTD Museum Perjuangan Rakyat Jambi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain, masih rendahnya minat masyarakat khususnya pemuda Jambi terhadap kelestarian kebudayaan tradisi daerah Jambi, dan secara bersamaan budaya luar semakin tidak terbendung untuk masuk dan bersaing dengan budaya.

Solusi yang dapat ditempuh pada masa yang akan datang adalah dengan meningkatkan kualitas dan kreatifitas para budayawan Jambi serta memperbanyak kegiatan apresiasi seni dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan dan minat masyarakat terhadap budaya Jambi yang merupakan warisan budaya Jambi yang wajib.

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran program ini adalah menumbuhkan kemampuan dalam menyerap nilai budaya yang positif dalam upaya memperkaya khazanah budaya bangsa yang berlandaskan moral spiritual, norma dan etika. Program ini didukung dana sebesar Rp. 1.116.368.500,- dengan melaksanakan kegiatan; Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Melalui program ini telah terlaksana Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah antara lain dengan melaksanakan PMI (Pasar Malam Indonesia) di Denhag Belanda , Gita Bahana Nusantara di Jakarta, pergelaran kesenian daerah Jambi di dalam dan luar daerah, dan kegiatan Pekan Pesona Budaya Jambi di kota Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain masih rendahnya minat masyarakat khususnya pemuda terhadap kelestarian kebudayaan tradisi daerah Jambi, dan secara bersamaan budaya luar semakin tidak terbendung masuk dan bersaing dengan budaya lokal.

Solusi yang dapat ditempuh pada masa yang akan datang adalah dengan meningkatkan kualitas dan kretifitas para budayawan Jambi serta memperbanyak kegiatan apresiasi seni dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan dan minat masyarakat terhadap budaya Jambi.

4.1.15. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pembina kegiatan kepemudaan dan olah raga dalam Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2012 Dinas Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 10 program dan 38 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.24.995.003.100,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 penyerapan anggaran mencapai Rp.23.984.190.021,- atau sebesar 95,96 %. Gambaran pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan berikut ini.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan memberikan dan menyediakan kelengkapan dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi secara optimal. Sasaran program adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Mendukung program ini, pada tahun anggaran 2012 disediakan dana sebesar Rp.2.515.966.400,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp.2.395.811.264,- atau 95,22 %. Untuk mencapai sasaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 12 (duabelas) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
- d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
- g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
- k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- l. Kegiatan penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi secara optimal. Mendukung pelaksanaan program ini, pada tahun anggaran 2012 disediakan dana sebesar Rp.1.067.701.740,- dan telah terealisasi sebesar Rp.1.005.985.300,- atau mencapai 94,22 %.

Untuk mencapai sasaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- b. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mencapai sasaran program peningkatan disiplin aparatur, program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Sasaran program yaitu terwujudnya PNS yang taat dan patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.50.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.375.000,- atau mencapai 99,60 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis sumberdaya manusia (SDM) aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional dan terampil sesuai tuntutan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan tersebut disediakan dana sebesar Rp.30.000.000,- dan sampai akhir tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.29.990.000,- atau mencapai 99,97 %.

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olah Raga. Untuk mencapai sasaran program dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan laporan dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp.100.696.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp.96.390.000,- atau mencapai 95,72 %.

6. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemuda dalam berorganisasi, serta membangun jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda sehingga para pemuda dapat partisipasi aktif dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Untuk mendukung program ini pada tahun 2012 dianggarkan dana sebesar Rp.1.462.294.000,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi penyerapan program ini mencapai Rp.1.300.970.105,- atau sebesar 88,97 % dari anggaran yang disediakan.

Dari alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan 3 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi KNPI Provinsi Jambi. Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi pembiayaan yang diusulkan dan telah menjadi agenda kegiatan KNPI Provinsi Jambi. Mendukung kegiatan ini telah disediakan anggaran sebesar Rp.250.000.000,-.
- b. Kegiatan Seleksi, Pelatihan dan Rekreasi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Nasional. Seleksi Calon Pasukan Penggerak Bendera Pusaka untuk tanggal 17 Agustus 2012 diikuti sebanyak 80 Peserta yang berasal dari kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dari seleksi tersebut terpilih sebanyak 56 peserta terdiri dari 2 orang peserta untuk tingkat nasional dan 54 peserta untuk tingkat provinsi yang dilatih dari tanggal 31 Juli s/d 18 Agustus 2012. Kegiatan ini dimulai dari seleksi calon peserta (siswa/siswi SLTA) dari 11 kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan ini juga berbentuk TOT (Training Of Trainer) yaitu kegiatan pelatihan untuk pelatih paskibraka, dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Peserta kegiatan ini merupakan utusan

dari 11 Kabupaten/Kota dan pengurus Provinsi yang dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 7 Desember 2012. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.730.346.900,-

- c. Kegiatan Bulan Bakti Pemuda. Dalam kegiatan bulan bakti pemuda ini terdapat beberapa kegiatan yaitu kegiatan pemilihan pemuda pelopor, kegiatan napak tilas jejak pahlawan, dan kegiatan penyuluhan narkoba. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan OKP-OKP dan OSIS SMA/SMK/MAN sederajat yang ada di Provinsi Jambi. Anggaran untuk kegiatan bulan bakti pemuda ini sebesar Rp.481.947.100,-

7. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan memberikan keterampilan teknis dan majerial kepada para pemuda agar mereka dapat meningkatkan produktifitas kerja, menumbuhkan usahawan baru, mengembangkan aktfitas ekonomi, mengurangi ketergantungan pada orang lain serta mampu bersaing dalam pasar kerja. Untuk mendukung program ini pada tahun 2012 dianggarkan dana sebesar Rp.504.463.500,- yang akan dipergunakan untuk membiayai 4 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, realisasi anggaran dari program ini mencapai Rp.446.222.700,- atau sebesar 88,45 %. Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. Jumlah pemuda peserta pelatihan yang dibina adalah sebanyak 30 orang. Peserta pelatihan diberi pengetahuan dasar tentang dunia usaha dan bantuan modal kerja. Diharapkan kepada peserta pelatihan kewirausahaan ini, dapat menumbuhkembangkan usaha dengan memanfaatkan

potensi dan peluang usaha yang ada di Provinsi Jambi, sehingga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat Provinsi Jambi.

- b. Kegiatan Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP-3). Program ini bertujuan memberdayakan para sarjana untuk terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa melalui fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di desa. Implementasi program ini, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan dukungan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah merekrut sebanyak 30 orang Sarjana dalam Provinsi Jambi yang akan dilatih dan ditempatkan di 4 (empat) provinsi tujuan yaitu : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya, Provinsi Jambi menerima kedatangan peserta PSP-3 dari 4 (empat) provinsi diatas, yang ditempatkan di Kabupaten Tebo dan Bungo, yang tersebar di 8 (delapan) desa.
- c. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) dan Kapal Pemuda Nusantara serta JENESYS (*Japan East Network Of Exchange For Student and Youth*). Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2012. Peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 40 Orang peserta dan terpilih sebanyak 3 orang peserta mewakili Provinsi Jambi ke Negara Tujuan yaitu 1. Canada 2. Korea Selatan, dan 3. Malaysia. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) pada tahun 2012 di tiadakan. Untuk Seleksi kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Mei

2012 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang. Dari hasil seleksi telah terpilih 6 orang peserta yaitu 3 putra dan 3 putri. Kegiatan KPN dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Kegiatan seleksi JENESYS (*Japan East Network Of Exchange For Student and Youth*) dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Januari 2012 dengan jumlah peserta 30 orang. Dari hasil seleksi terpilih 2 orang peserta yaitu 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti kegiatan JENEYS 2012.

- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (KWP). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembinaan KWP sebanyak 10 kelompok. Masing – masing kelompok diberi bantuan dana / modal kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang kegiatannya berupa usaha rumah tangga (*Home Industry*). Kegiatan ini bertujuan menggerakkan ekonomi usaha kecil sehingga dapat berkembang dan mampu meningkatkan usahanya, baik yang bergerak dibidang peternakan, pertanian, perikanan, perbengkelan dan semua jenis usaha *Home Industry*.

8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan manusia secara individu maupun kelompok masyarakat. Mengoptimalkan program ini, disosialisasikan semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pada tahun anggaran 2012, disediakan dana untuk program ini sebesar Rp.17.415.276.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.985.360.157,- atau mencapai 97,53 %.

Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga didukung oleh 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan KONI Daerah Jambi dan pengurus daerah masing – masing cabang olah raga (Cabor). Peranan Dispora sebagai wakil pemerintah daerah adalah memfasilitasi pembiayaan (penyedia dana) sedangkan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh masing – masing pengurus daerah Cabor yang dikoordinasikan oleh KONI.
- b. Kegiatan kompetisi olahraga tradisional. Kegiatan Olahraga Tradisional tingkat Daerah di selenggarakan pada tanggal 20 s/d 21 Mei 2012 di Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini diikuti semua kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dengan menampilkan olahraga tradisional masing-masing daerah, dengan jumlah peserta sebanyak 165 orang. Kegiatan ini bertujuan menggali dan melestarikan olahraga tradisional dalam masyarakat khususnya olahraga tradisional daerah Jambi yang mengandung nilai – nilai sejarah dan budaya.
- c. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 10 s/d 14 Juli 2012 dengan memperlombakan 8 cabang olahraga. Kegiatan POPDA bertujuan mencari bibit-bibit calon olahragawan dalam masyarakat, selanjutnya akan dibina secara intensif. Melalui kegiatan ini diharapkan akan muncul atlet berbakat yang akan mengharumkan Provinsi Jambi di masa mendatang.
- d. Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Daerah. Semua atlet PPLP berasal dari siswa – siswa yang berbakat dan memiliki minat terhadap prestasi

berolahraga. Di Provinsi Jambi kegiatan PPLP diselenggarakan di 2 tempat yaitu di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Pada tahun 2012, kegiatan PPLP menampung/membina atlet pelajar sebanyak 24 orang.

- e. Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA). Kegiatan ini diikuti oleh 250 orang Atlet, Pelatih dan official. Cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan sebanyak 3 cabang olahraga yaitu atletik, renang dan tenis meja. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 5 s/d 9 November 2012. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri anak-anak penyandang cacat untuk berprestasi pada semua aspek kehidupan.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Mendukung program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.200.045.860,- yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan prasarana dan sarana pembinaan atlet Provinsi Jambi. Sampai dengan akhir tahun anggaran, program ini telah merealisasikan dana sebesar Rp. 1.162.820.050,- atau sebesar 96,90 %.

Untuk mencapai sasaran program peningkatan sarana dan prasarana olahraga didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Yaitu pembuatan pagar stainless-steel pembatas kolam renang prestasi dan kolam loncat indah sebanyak 1 paket.

- b. Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana olahraga.
Bentuk kegiatan ini diantaranya : rehab lapangan tembak perbakin, rehab gedung PPLP kolam renang kota baru, rehab pagar GOR kota baru, rehab lapangan volley ball / basket kota baru, rehab total gedung PTMSI GOR kota baru.
- c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga, yang diperuntukkan bagi : Yayasan Nusa Raya Sarolangun, berupa : bola kaki 30 buah, meja tenis meja 6 buah, net tenis meja 6 buah, score board tenis meja 6 buah, bola tenis lapangan 6 tabung, bola tenis meja 6 tabung. Bantuan untuk Cabor tenis meja, berupa : lapangan tenis meja 1 buah, net 1 buah, bed 4 buah, sekat lapangan 10 buah. Bantuan untuk Cabor renang, berupa : bola polo air 25 buah, fist clock 4 buah. Bantuan untuk Cabor dayung, berupa : perahu kayak 4 buah, dayung 4 buah. Bantuan peralatan untuk kolam renang kota baru, berupa 250ias250e cleaner swimming pool 1 buah, dan AC 1 buah.

10. Program Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk mensinergikan program provinsi dengan program kabupaten/kota, sehingga program pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan dapat selaras dan berkesinambungan. Pelaksanaan program di setiap kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah masing-masing, yang menyentuh kebutuhan dunia kepemudaan dan keolahragaan daerah Jambi. Pada tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp.647.983.500,- untuk mendukung terlaksananya program ini. Sampai dengan akhir tahun anggaran program ini telah merealisasikan dana

sebesar Rp.628.455.120,- atau sebesar 96,99 % dari pagu anggaran yang disediakan.

Untuk mencapai sasaran, program kebijakan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan rapat koordinasi (Rakor) program kepemudaan dan keolahragaan yang diikuti semua instansi yang membina kepemudaan dan olahraga di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- b. Kegiatan pengendalian dan monitoring kepemudaan dan keolahragaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan Dispora Provinsi Jambi maupun kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota di 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- c. Kegiatan pendataan kepemudaan dan keolahragaan. Implementasi kegiatan dilakukan dalam bentuk menghimpun data di bidang pemuda, olahraga dan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga baik fisik maupun non fisik.
- d. Kegiatan perencanaan dan penyusunan program. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan perencanaan program dan program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan dalam Provinsi Jambi.

Secara umum masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap fungsi dan peranan pemuda

dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah pemuda yang terlibat dalam proses pembangunan terutama di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan koordinasi dan sosialisasi agar pemerintah kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dapat meningkatkan atau mempertajam program kerja yang benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jambi.

Beberapa penghargaan dan prestasi yang telah dicapai Provinsi Jambi dibidang kepemudaan dan olah raga pada tahun 2012, diantaranya :

1. Bidang kepemudaan

Peringkat Ke-4 Nasional Program SP-3 berprestasi Tingkat Nasional Atas Nama **Aisya Gusli, S.Pd.** yang merupakan SP-3 Angkatan XXI yang ditempatkan di Desa Tanang Abang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dengan kegiatan pengembangan budidaya jamur tiram, dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan potensi lokal melalui budidaya kolam ikan air tawar.

Peringkat ke-4 Nasional Pemuda Pelopor Bidang seni budaya, atas nama **H. Marwan dan Fadli, H.M.** Keberhasilan pembinaan seni budaya dengan memunculkan budaya dan kearifan lokal, dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Jambi Kabupaten Bungo.

2. Bidang keolahragaan

Keberhasilan pembinaan olah raga di Provinsi Jambi dibuktikan dengan berhasilnya atlet-atlet Provinsi Jambi mengukir nama harum daerah dalam event-event olah

raga berskala Nasional dan Internasional. Beberapa event yang diikuti atlet Provinsi Jambi tersebut diantaranya : Pekan Olahraga Nasional (PON) ke VIII tahun 2012 di Pekanbaru Provinsi Riau, Pekan Olah Raga Mahasiswa ASEAN di Laos, Nasional Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) XIX Tahun 2012 di Pekanbaru Provinsi Riau, Kejuaraan Karate Internasional Asia Fasific Tahun 2012 di Hongkong, dan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Ternate provinsi Maluku Utara.

Perolehan medali atlet-atlet Provinsi Jambi Tahun 2012, sebagai berikut :

Tabel 4.52 Daftar Perolehan Medali Atlet-Atlet Provinsi Jambi Tahun 2012.

NO	Event / Cabang Olah Raga	Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
I	Kejuaraan Karate Internasional Asia Fasifik	0	0	2
II	Pekan Olah Raga Nasional XVIII			
	- Tarung Derajat	1	0	0
	- Wushu	0	1	0
	- Sepatu Roda	1	1	0
	- Biliar	1	0	0
	- Panahan	0	1	0
	- Dayung	0	1	7
	- Gulat	0	3	2
	- Angkat Berat	0	1	0
	- Angkat Besi	0	0	1
	- Polo Air	0	0	1
	- Balap Sepeda	0	0	1
	- Tinju	0	0	1
	- Pencak Silat	0	0	1
	- Taekwondo	0	0	1
	- Judo	0	0	2
	- Senam	0	0	4
III	Pekan Olah Raga Mahasiswa ASEAN	1	0	1
IV	Pekan Paralympic Nasional XIX	3	2	5
V	Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Nasional	0	0	1

Sumber : Dispora Provinsi Jambi

4.1.16. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk mewujudkan visi dan misi Kesbangpol Provinsi Jambi diidukung dengan program prioritas terdiri dari :

1. Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perwujudan demokrasi yang dijabarkan dengan kegiatan antara lain: Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada serta pengembangan Partisipatif daerah, dengan penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi penyelenggaraan Pemilukada se Provinsi Jambi Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Kakan/Kaban Kesbangpol, Linmas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota, Unsur PNS Parpol, Organisasi Kepemudaan, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkup Provinsi serta pemantauan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sampai prosesi pelantikan Bupati. Sedangkan dalam Peningkatan dan pengembangan Kualitas proses politik bagi lembaga Parpol dalam rangka persiapan dan kesiapan bagi kader dan lembaga politik dengan mengadakan rapat verifikasi yang berkaitan dengan SPJ untuk bantuan parpol serta laporan atas kepengurusan Parpol kepada Pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini karena belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar pihak terkait tentang pemilukada untuk itu perlu peningkatan pelaksanaan koordinasi melalui rakor evaluasi penyelenggaraan pemilukada.

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Melalui program ini telah terlaksananya Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan/eksistensi ORPOL, ORMAS, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan. Untuk mengetahui perkembangan keberadaan eksistensi dan tersusunnya laporan data ORMAS setiap tahunnya, sehingga dapat ter-updatenya buku direktori PARPOL, ORMAS, OKP di Provinsi Jambi, serta terselenggaranya forum diskusi dan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik yang diikuti oleh unsur Kesbangpol, Linmas, Ketua KPU, Kabag Pemerintahan Setda Kab/kota, Unsur PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, PARPOL, OKP, ORMAS, BEM dan LSM.

Dalam hal ini dapat dilihat hasil terhadap perkembangan keberadaan organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan selama tahun 2011 pada tabel::

Tabel 4.53 Data Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Provinsi Jambi Tahun 2011.

NO	Organisasi	Jumlah	Ket
1	Ormas / LSM Kesamaan Fungsi	173	
2	Ormas / Asosiasi	39	
3	Ormas / Yayasan	24	
4	Ormas / Keagamaan	29	
5	Ormas / Profesi	18	
6	Ormas / Kepemudaan	28	
7	Ormas / Peguyuban (Kesukuan)	19	
8	Ormas / Kegiatan	44	
J u m l a h		374	

Sumber Data : Kesbangpol Provinsi Jambi 2012

Tabel 4.54 Kondisi Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Provinsi Jambi.

NO	Organisasi	Jumlah
1	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	
	Habis masa berlaku SKT (Proses Perpanjangan)	168
	Masih Aktif	33
Jumlah 1		201
2	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	
	Habis masa berlaku SKT (Proses Perpanjangan)	140
	Masih Aktif	33
Jumlah 2		173
Jumlah 1 + 2		374

Sumber Data : Kesbangpol Provinsi Jambi 2012

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, terhadap generasi muda di lingkungan pendidikan SLTA, untuk memahami kesadaran berbudaya dalam rangka peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, sedangkan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan terlatihnya tenaga pembaharuan kebangsaan dan terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan di daerah.

4. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan dilaksanakan Program ini dalam rangka memfasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan idiologi di lingkungan generasi muda (santri/ santriwati) kabupaten/kota, sehingga dapat peningkatan penamtapan wawasan kebangsaan bela negara melauai PKBN di daerah.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Keyamanan Lingkungan.

Secara umum program ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah dengan kegiatan pembinaan dan pemantapan eksistensi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), agar terjadi hubungan harmonis antar unsur intelijen daerah, aparat pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terdeteksi dini, tangkal dini, cegah dini dan antisipasi dini sehingga dapat menciptakan situasi keamanan, ketertiban yang kondusif. Serta terlaksananya pemantauan dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjab Timur, Sarolangun, Bungo dan Kota Sungai Penuh.

6. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.

Dalam pelaksanaan Program ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM Asing Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing, untuk itu telah dilaksanakan Rakor dan Konsultasi dan koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pemantauan kegiatan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), NGO Asing, Peneliti kunjungan maupun lalulintas orang asing sehingga terdata dengan baik terutama di Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur Bungo, Kerinci Batanghari dan Merangin.

Pembinaan aparat dan penanganan konflik dalam upaya peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara untuk itu telah dilaksanakannya koordinasi antar Kesbangpol, Linmas Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah sehingga masyarakat dapat bekerjasama dalam

menjaga kebersamaan kehidupan dalam masyarakat dalam melaksanakan pemantauan konflik dan situasi di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tebo Tanjab Barat dan Bungo.

Sedangkan dalam Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan harapan terbinanya dan terkembangnya FKUB yang berkelanjutan, untuk itu telah dilaksanakan Rapat internal wanhat dan pengurus FKUB, Rakorda FKUB se Provinsi dan dialog interaktif permasalahan FKUB dan pemecahannya.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program ini dalam rangka Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri No. 12 Tahun 2006) sehingga dapat deteksi dini, tangkal dini, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bentrok, agar tercipta rasa aman dan tentram dilingkungan masyarakat. Memberikan sosialisasi terhadap pengurus FKDM Kab/Kota dalam rangka mengantisipasi , menjaga , keamanan , ketertiban masyarakat sebagai jejaring komunikasi terhadap pemerintah dalam mendeteksi timbulnya keamanan,

Hambatan dalam pelaksanaan Program ini kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensukseskan FKDM tersebut, untuk itu diharapkan pemerintah setempat dapat mengalokasikan dan pendukung kegiatan sehingga dapat membentukl kepengurusan FKDM di setiap kecamatan.

Sulitnya membangun demokrasi yang tidak sekedar 259ias259e259259259n tapi juga 259ias259e259259259na; yaitu demokrasi yang tidak sekedar ditandai oleh adanya 259ias259e dan prosedur tapi juga demokrasi berkualitas yang menjunjung kedaulatan rakyat, memenuhi hak-hak individu, menjamin hak minoritas, serta menyejahterakan warganegara.

Nilai Indeks Demokrasi Provinsi Jambi dalam IDI 2010 adalah 65,88. Angka ini merupakan angka komposit dari ketiga aspek IDI 2010 yaitu Kebebasan Sipil (85,15), Hak-hak Politik (48,14), dan Kelembagaan Demokrasi (69,81). Capaian ini menggambarkan kinerja demokrasi di Provinsi Jambi yang secara umum masih dalam tingkatan sedang, dan bila dilihat dari aspek-aspeknya menunjukkan diskrepansi antar-aspek yang sangat lebar. Kebebasan Sipil mendapatkan nilai paling tinggi dan sudah tergolong “baik”, diikuti oleh Kelembagaan Demokrasi yang dapat digolongkan sebagai “sedang”, dan Hak-hak Politik yang masih tergolong “buruk”.

4.1.17. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

4.1.17.1 Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, telah didistribusikan beberapa program dan kegiatan pada masing-masing Biro dilingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Uraian secara rinci pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut, antara lain;

A. Biro Kesejahteraan Masyarakat

Urusan wajib yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi pada tahun 2012 meliputi program **pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama; dan Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat**; dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.153.930.000,- dengan tingkat penyerapan dana sebesar Rp9.632.182.451,- atau 94,86 %.

1. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama

Tujuan pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama adalah terpelihara dan termanfaatnya rumah ibadah; kenyamanan para jamaah dalam beribadah; terciptanya hubungan silaturahmi antar umat beragama dan antar umat seagama; serta terwujud dan terciptanya SDM yang islami dan berprestasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain;

1. Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan MTQ Nasional Tahun 2012

Dengan alokasi dana Rp2.169.184.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.162.224.800,- (99,68 %). Tujuan dari pelaksanaan MTQ baik tingkat

Provinsi maupun Tingkat Nasional adalah untuk menumbuhkembangkan semangat membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an bagi masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya MTQ Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2012 di Kabupaten Merangin dengan terpilihnya Juara MTQ Provinsi Jambi sebanyak 42 Orang, dan selanjutnya mewakili Provinsi Jambi pada ajang MTQ Tingkat Nasional (9 peserta masuk 6 besar pada kejuaraan MTQ Tingkat Nasional). Outcome dari kegiatan ini adalah terselenggaranya MTQ Provinsi Jambi dan Pengiriman Peserta STQ Nasional.

2. Kegiatan Pembinaan pondok pesantren mandiri dan pendidikan luar sekolah.

Dengan alokasi dana Rp302.215.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp302.215.000,- atau setara dengan (100 %).

Output kegiatan ini adalah Terselenggaranya kegiatan pembinaan pondok pesantren mandiri melalui study banding.

Outcome dari kegiatan ini adalah Terbinanya para pengelola usaha ekonomi di pondok pesantren.

3. Kegiatan Pembinaan keagamaan dan pengelolaan Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Dengan anggaran sebesar Rp1.330.985.100,- dengan realisasi keuangan Rp1.327.960.100,- atau setara dengan (99,77 %).

Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Keagamaan dan

Pengelolaan Masjid Agung Al-Falah Jambi dan Outcome kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan PBHI, Pengajian (rutin dan Ramadhan), dan terfasilitasinya pengelolaan Masjid Agung Al-Falah dan FASI.

4. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Haji dan Umroh Provinsi Jambi

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.058.950.800,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.053.089.300,- atau setara dengan (99,45 %). Output kegiatan yang dihasilkan adalah terlaksananya pengiriman Petugas TPHD dan peserta Umroh dan outcome adalah terkoordinasinya pelaksanaan pelayanan jama'ah Haji provinsi Jambi dan terfasilitasinya Umroh bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Masyarakat secara umum.

5. Kegiatan Koordinasi dan fasilitas Pengelolaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi.

Alokasi dana untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- dengan tingkat penyerapan dana sebesar Rp.427.588.862,- setara dengan (85,52 %). Adapun output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitas pengelolaan MUI Provinsi Jambi dalam pembinaan Umat. Outcome kegiatan adalah Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengelolaan MUI dalam pembinaan Umat.

6. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jambi.

Besarnya dana untuk pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.14.450.000,- setara

dengan (99,63 %), dengan output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan BAZDA Provinsi Jambi, terkumpulnya penerimaan Zakat, Infak, sadaqah pada tahun 2013 sebesar 1,8 Milyar rupiah dan tersalurnya Zakat, Sadaqah dan infak sebesar 1,6 Milyar rupiah (66,67 %) kepada yang berhak. Dan outcome dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya dan terfasilitasinya pengumpulan dan pendistribusian zakat/infak/sadaqah.

7. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelola Pondok Karya Pembangunan (PKP) Al-Hidayah Provinsi Jambi.

Alokasi dana untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- dengan tingkat penyerapan dana sebesar Rp249.999.900,- setara dengan (99,99 %). Adapun output kegiatan yang dihasilkan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi dengan peserta diklat sebanyak 55 guru yang mengajar di PKP Al-Hidayah Jambi. Outcome kegiatan adalah terkoordinasi dan terfasilitasinya proses pendidikan dan pengajaran di PKP Al-Hidayah Jambi.

8. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Persidangan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Provinsi Jambi.

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp149.450.000,- setara dengan (99,63 %). Output kegiatan yang dihasilkan adalah terlaksananya penyelenggaraan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Wilayah Jambi. Outcome kegiatan adalah

tercipta/adanya panduan pelaksanaan dan program PGI dalam menentukan kebijakan dan pelayanan Gereja-gereja Provinsi Jambi.

a. Permasalahan dan solusinya

Dalam pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama selama tahun 2012, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang antara lain:

- Rentang waktu pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dengan MTQ Tingkat Nasional yang terlalu dekat, sehingga persiapan untuk pelatihan qori'-qori'ah yang akan dikirim ke MTQ Nasional kurang maksimal.
- Terbatasnya SDM yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menyikapi kondisi tersebut, langkah-langkah yang akan diambil antara lain :

- Mengupayakan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dengan Tingkat Nasional sehingga rentang waktu pelaksanaan menjadi lebih panjang.
- Memberikan himbauan kepada pimpinan SKPD untuk memerintahkan stafnya agar dapat berpartisipasi pada pengajian rutin.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan baik formal maupun informal.

2. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

Tujuan dan sasaran Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat adalah :

- Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera
- Meningkatnya wawasan nasionalisme masyarakat sebagai warga NKRI,
- Tersusunnya program kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat, maka pada tahun 2012 ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Semangat Jiwa Patriotisme, Keperintisan dan Kepedulian dengan alokasi dana Rp96.90.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp91.585.000,- atau setara dengan (95,31 %). Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Peringatan hari besar nasional sebanyak 6 kali dan Outcome kegiatan Terciptanya Kesadaran Nasional untuk memperkuat Persatuan dan Kesatuan NKRI.
2. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemantauan Tenaga Kerja dan LKS Tripartit, dengan alokasi dana sebesar Rp88.000.000,- dan realisasi penyerapan dana sebesar Rp81.988.400,- (93,17 %). Output kegiatan terlaksananya koordinasi ketenaga kerajaan ke kabupaten/kota di Provinsi Jambi, terlaksananya koordinasi dan konsultasi tentang UMP dan

pengawasan tenaga kerja ke pusat. Outcome kegiatan Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar pengusaha, tenaga kerja dan Pemerintah (Tripartit) serta terpantaunya kegiatan suatu perusahaan terhadap tenaga kerja.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perempuan, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp75.000.000,- dengan realisasi Rp74.134.200,- (98,19 %).

Output kegiatan : Terlaksananya rakor program pembinaan/ pemberdayaan perempuan. Outcome kegiatan : Terkoordinasi dan sinerginya kebijakan pembinaan organisasi perempuan provinsi Jambi dan kabupaten/kota.

4. Kegiatan Koordinasi Rapat Teknis dan Penyusunan Program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.128.005.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.127.913.900,- (99,93 %).

Output kegiatan adalah terlaksananya rapat teknis dan penyusunan program bidang Kesramas dalam Provinsi Jambi. Outcome kegiatan : Terkoordinasinya program Kesra dan Kemasyarakatan.

5. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Desa Transmigrasi, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp116.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp115.572.200 atau setara dengan (98,86 %)

Output kegiatan Terbinanya mental dan spiritual masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal,

Terkendalinya dan sinerginya kegiatan transmigrasi antar dinas terkait

Outcome kegiatan Terciptanya suasana yang kondusif antar masyarakat transmigrasi dan lokal serta Terpantaunya kegiatan para masyarakat transmigrasi.

6. Koordinasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.219.090.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.219.090.000,00 (100%)

Output kegiatan Terbinanya tim pembina UKS di 11 kab/kota

- Koordinasi pengiriman peserta Jambore
- Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam Lomba sekolah sehat tingkat Provinsi

Outcome kegiatan Terciptanya Pembinaan UKS dan Kesehatan di Provinsi Jambi

7. Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Jasmani serta Peningkatan Kesegaran Jasmani, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.103.055.100,00 dengan realisasi keuangan Rp.99.209.100,00 (96,27%)

Output kegiatan :

- Pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi PNS dilingkungan Setda Provinsi Jambi.

Outcome :

- Terciptanya aparatur yang sehat serta terciptanya rasa kebersamaan antar aparatur pemerintah

8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan, alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp415.780.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.413.552.650,00 (99,46%)

Output kegiatan :

- Tersedianya Obat obatan dan Alat Kesehatan di Poliklinik Kantor Gubernur Jambi

Outcome kegiatan :

Meningkatnya Kesehatan PNS dan keluarganya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

9. Koordinasi dan Pembinaan KB di Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp.76.000.000,- terealisasi sebesar Rp.71.000.000,- atau 93,42%.

10. Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penanggulangan Permasalahan Sosial Masyarakat Kepada Pengurus LSM, ORSOS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dan Lain-Lain. Dana untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp.163.565.000,- yang terealisasi sebesar Rp.163.565.000 atau 100%.

11. Kunjungan Kerja Legiun Veteran dalam Provinsi Jambi, dengan alokasi dana sebesar Rp.135.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.130.303.500 atau 96,52%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja legiun veteran dalam Provinsi Jambi.

Outcome terciptanya rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

12. Perencanaan dan Koordinasi Komda Lansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.800.000,- atau 96,52%.

13. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jambi, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.875.685.750,- atau 87,57%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba terhadap PNS, TNI/POLRI, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum;

14. Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.497.500,- atau 99,84%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan adat Melayu Jambi.

Outcome yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya pelestarian adat dan budaya melayu di Provinsi Jambi.

B. Biro Hukum

Pada tahun 2012, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.337.775.000,- dan realisasi keuangan sebesar 93,55 % untuk melaksanakan 5 (lima) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembentukan Hukum

Program ini secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai forum publik, dalam rangka penyusunan ranperda, diskusi dan konsultasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp195.193.000,- realisasi keuangan mencapai sebesar 92,47 %. Adapun output dari program ini adalah tersusunnya naskah Rancangan

Peraturan Daerah dan outcome : Terwujudnya naskah Rancangan Peraturan Daerah Tahunan.

2. Program Perencanaan Hukum

Secara umum program ini bertujuan untuk menciptakan produk-produk Hukum yang sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 733.346.000,- dan realisasi keuangan sebesar 93,27 %. Output dari pelaksanaan program ini diperoleh:

- a. Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Terkajinya Perundang-undangan Daerah yang akurat dan harmonis.
- c. Terciptanya koordinasi lintas instansi terkait dalam penyusunan penyempurnaan produk hokum dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Outcame : Terwujudnya Produk-produk Hukum Provinsi, Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode pengembangan terhadap kesadaran Hukum dan HAM, produk-produk hukum melalui lembaran daerah dan berita daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 922.405.000,- yang terealisasi sebesar 99,65%.

Output dari program ini adalah sebagai berikut:
Terselenggaranya lokakarya HAM/workshop,
terselenggaranya Bimbingan Masyarakat Taat Hukum
(Binmatkum) ke masyarakat/aparatur, terselesainya
permasalahan sengketa pulau berhala di Mahkamah
Konstitusi, tersosialisasinya Produk Hukum,
terhimpunnya produk-produk Hukum Daerah Provinsi
Jambi dan terencananya serta tersedianya Tata Usaha
Biro, pengelolaan barang dan program biro.

Outcome Program : Terwujudnya Masyarakat yang taat
terhadap Peraturan Perundang-undangan, baik
peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah.

4. Program Pengkajian Kasus HAM

Program ini bertujuan untuk mengatasi dan
menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 93.4553.600,- yang
terrealisasi sebesar 96,46 %. Adapun output dari
program ini adalah terinventarisasi kasus pelanggaran
hukum dan outcome : Terwujudnya dan terpenuhinya
HAM di Provinsi Jambi dengan baik.

5. Program Peningkatan Advokasi

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran untuk program
ini sebesar Rp 99.257.500,- berupa kegiatan Semiloka
Kegiatan Bantuan Hukum dengan tingkat realisasi
serapan dana mencapai 92,49 %. Adapun output dari
program/kegiatan ini adalah terlaksananya penyegaran
bidang tugas aparatur pemerintah penegak hukum dan
outcome : Terwujudnya Aparatur Sumber Daya Manusia
yang handal dalam penanganan perkara di Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama

C. Biro Ekonomi Pembangunan Dan SDA

Pada tahun 2012, Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumberdaya Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.321.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.4116.463.140,- atau 83%. Diarahkan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 18 kegiatan pembangunan yaitu:

1. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan

Program pembinaan ini pada tahun 2012 mendapat dialokasi anggaran sebesar Rp.2.307.324.930,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.1.602.329.050,00 atau 69,45%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang.
- b. Terhimpunnya data pelaporan realisasi APBD Provinsi Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD.
- c. Terlaksananya fasilitasi administrasi pada Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- d. Terpantaunya perkembangan fisik pembangunan APBD Provinsi Jambi di lapangan.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumberdana yang tersedia.
- b. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

- c. Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- d. Masih sering terlambatnya penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing-masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
- c. Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- d. Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD / BUMN dan Pendapatan Keuangan

Program ini mendapat alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp198.489.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp197.589.000,00 atau 99,55%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersusunnya bahan rumusan kebijakan sektor penanaman modal, BUMD/BUMN dan pendapatan keuangan di Provinsi Jambi.
 - b. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Penanaman Modal.
 - c. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang BUMD/ BUMN dan Kerjasama Secara umum,
- Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :
- a. Mengingat banyaknya BUMN yang kantor pusatnya berlokasi di Jakarta maka sulit untuk memperoleh data tentang perkembangan BUMD/ BUMN di Provinsi Jambi.
 - b. Penyampaian laporan penanaman modal yang tidak tepat waktu oleh instansi terkait.
 - c. Tidak tersedianya beberapa data penanaman modal di kab/kota atau instansi terkait.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Perlunya meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pihak pemerintah dengan BUMD/BUMN.
- b. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi terhadap instansi terkait agar menyampaikan laporan penanaman modal tepat waktu.
- c. Perlunya himbauan dan peningkatan koordinasi kepada kab/ kota atau instansi terkait agar aktif dalam penghimpunan data penanaman modal.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi dibidang Koperindag

Pelaksanaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk program ini Rp.215.062.600,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.211.076.600,00 atau 98,15%. Dari pelaksanaan program tersebut, output yang didapat adalah terhimpunnya data harga kebutuhan bahan pokok masyarakat; dan terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang koperindag.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasaran yang sulit dikendalikan.
- b. Masih terdapat produk yang sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi beredar di pasaran.
- c. Kurangnya dukungan infrastruktur jalan menuju sentra produksi industri (pertanian, kerajinan, UMKM dan lainnya) baik di dalam daerah maupun luar daerah.

Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin dengan instansi terkait untuk menangani fluktuasi harga bahan pokok.
- b. Membuat himbauan kepada instansi terkait untuk melakukan usaha-usaha penstabilan harga bahan kebutuhan pokok dipasar (operasi pasar dan pasar murah).
- c. Membuat himbauan kepada instansi agar menangani masalah produk yang tidak layak konsumsi di pasar.

- d. Memberi masukan kepada instansi terkait dalam rangka untuk memperlancar transportasi ke sentra produksi Industri (pertanian, kerajinan UMKM dan lainnya) agar dapat meningkatkan infrastruktur jalan ke lokasi tersebut.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk Program ini telah di alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.618.415.800,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.602.289.300,00 atau 97,39%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output yaitu terhimpunnya data pelaporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata; adanya laporan administrasi pembangunan Biro Ekbang dan SDA; Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertaraf nasional.

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya Koordinasi, dan Sinergitas antar Lintas Sektoral dan Dinas/Instansi terkait.
- b. Lemahnya upaya dalam mensinkronisasikan Program Pengembangan Pembangunan Ekonomi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan peningkatan baik kualitas dan kuantitas infrastruktur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan intensitas Rapat Koordinasi dengan dan antar Dinas/Instansi dan dengan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengembangan Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata;
- b. Membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Pembangunan Bidang Kebudayaan Pariwisata dan Promosi Industri Kepariwisata;
- c. Memberi masukan kepada instansi terkait agar dapat meningkatkan infrastruktur bidang kebudayaan dan pariwisata.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.625.631.050,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.564.138.090,00 atau 90,17%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, pemukiman dan bidang pekerjaan umum lainnya.
- b. meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan dan Terjalannya koordinasi pembangunan bidang perhubungan serta penyelenggara sektor jasa transportasi umum;
- c. Terjalannya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan

terhimpunnya laporan pemantauan keadaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Secara umum, permasalahan yang dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota, belum optimal disebabkan kab/kota belum membentuk Tim Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitas Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran;
- c. Masih banyaknya masalah dalam Pembinaan Sektor Perhubungan dan Jasa Transportasi;
- d. Masih terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan pembangunan ekonomi yang dikelola tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- a. Menjadwalkan secara Periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kab/Kota;
- b. Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota;
- c. Mengkoordinir dan mensinergikan program dan kegiatan dinas/instansi untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang;
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pengelolaan lingkungan guna terciptanya

kegiatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Alam

Untuk tahun 2012 alokasikan anggaran untuk program ini Rp1.356.396.620,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp1.239.041.100,00 atau 91,35%. Pelaksanaan program ini menghasilkan output antara lain :

- a. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sektor pertanian, ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi;
- d. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Data yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di daerah masih kurang;
- b. Kurang dipahaminya berbagai aturan kehutanan oleh aparat yang berkedudukan disekitar kawasan hutan, sehingga ada aparat yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah di kawasan hutan tersebut

Bebasis pada permasalahan di atas, langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki

pelaksanaan program pada masa yang akan datang adalah :

- a. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Pemerintah kabupaten/Kota melalui pelaksanaan rapat koordinasi guna melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di daerah
- b. Pemerintah Kab/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait agar dapat mengawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada pengecer yang ada di daerah.
- c. Perlu upaya untuk meningkatkan fasilitasi penyelesaian konflik kawasan hutan dengan pemilik izin Hutan dan sosialisasi mengenai peraturan di bidang kehutanan.

D. Biro Humas

Pada tahun 2012, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.752.985.300,- dengan tingkat penyerapan dana sebesar 91,32 % yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembinaan media lokal, sehingga output dari program ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan alokasi anggaran Rp1.898.805.000,- realisasi serapan dana mencapai 81,92 %. Adapun kegiatan utamanya adalah penyediaan bahan bacaan. Output : Tersedianya bahan bacaan bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi tahun

2012 dan outcome program : Meningkatnya pengetahuan dan kinerja Aparatur.

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

Secara umum tujuan dari program ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas Instansi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dari tugas keprotokolan. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.601.712.850,- dengan tingkat penyerapan dana mencapai 98,46 %. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerimaan dan pelayanan tamu pada tahun 2012 di Provinsi Jambi dengan baik, lancar dan aman, terlaksananya kegiatan acara dan keprotokolan sesuai aturan. Outcome Program : Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Pemerintah Daerah dan pelayanan Acara keprotokolan.

3. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pembangunan di Provinsi Jambi, melalui penyediaan sarana publikasi dan informasi masyarakat, untuk itu dialokasikan dengan sebesar Rp 10.618.143.950,- dengan tingkat realisasi serapan dana mencapai 88,695 %. Dari hasil pelaksanaan program ini diperoleh hasil :

- a. Output kegiatan : Tersedianya bahan berita pada tahun 2012 bagi Media Cetak, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi pada tahun 2012, terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat dan terselenggaranya Peringatan Hari Pers Nasional di Provinsi Jambi pada tahun 2012
- b. Outcome program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang program Pemerintah.

4. Program pengembangan pemetaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi serta penerimaan, pengiriman dan penyampaian berita sandi dan berita biasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 634.323.500,- dengan tingkat capaian serapan dana 80,36 %. Adapun kegiatannya berupa peningkatan sarana dan prasarana komunikasi, output kegiatan adalah tercapainya penyampaian berita dengan cepat dan tepat dan outcome program : meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

E. Biro Pemerintahan

Pada tahun 2012, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi mendapat lokasi anggaran sebesar Rp 3.014.157.003,- dengan capaian serapan dana sebesar Rp 2.921.913.545,- atau setara dengan 96,94 % untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Batas Wilayah

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tata batas antar Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Untuk program ini dianggarkan dana sebesar Rp.800.189.400,- dengan serapan dana senilai Rp 792.311.900,- atau 99,02 %. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh output kegiatan yaitu :terlaksananya Bimbingan teknis Nama Rupabumi;Terlaksananya Penataan batas Provinsi; terdifikasinya Bats Kabupaten/Kota; terlaksananya Rakor Kerjasama di Wilayah Perbatasan

2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan dan Otda di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menanamkan semangat kebangsaan, keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.001.112.603,- dengan realisasi sebesar Rp1.948.679.145,- atau 97,38 %. Dari pelaksanaan program ini diperoleh output kegiatan yaitu; terlaksananya Pembinaan trantib; terlaksananya Bintek PPAT bagi Camat; terlaksananya sistem informasi Administrasi kependudukan (SIK); terlaksananya Pembinaan dan Bintek Kependudukan (SIK);terlaksananya Pembangunan Pemerintah Kecamatan dan penilaian camat teladan;terhimpunya LPPD se-Provinsi Jambi dan Sosialisasi LPPD;terpantaunya DKTP di Provinsi Jambi;

terfasilitasinya Administrasi di Biro Pemerintahan; tertibnya pelaksanaan e-KTP; Terlaksananya Dokumentasi Pemilukada Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung peningkatan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, untuk mewujudkan provinsi, kabupaten/kota yang mandiri melalui kerja sama antar unsur Forkopimda, pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2012, untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp186.459.700,- dengan tingkat realisasi serapan dana sebesar Rp154.584.700,- atau sebesar 82,91 %. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh output kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Kerja APPPSI dan out Program adalah meningkatnya Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini pada tahun 2012 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 26.395.300 dengan realisasi sebesar Rp 26.337.800,- atau 99,78 %, yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Dari progra diperoleh output kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi (Rakor) kependudukan dan catatan sipil se-provinsi Jambi, dengan kelompok sasaran kegiatan adalah dinas/badan/kantor pengelola administrasi kependudukan

dan catatan sipil. Adapun outcome yang diperoleh adalah meningkatnya koordinasi dan Administrasi Dukcapil.

F. Biro Organisasi

Pada tahun 2012, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.065.513.200,00 yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi bidang kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp.937.911.150,00 dan terealisasi sebesar 88,83%. Adapun output yang dihasilkan adalah terinventarisirnya data tentang PNS di lingkup Sekretaris Daerah baik tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, jumlah pegawai yang mutasi, jumlah PNS yang pensiun dan yang diberhentikan. Secara umum permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja program adalah belum disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi. Untuk itu, sebagai solusi kedepan diupayakan melalui penyusunan SOP pelayanan administrasi.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan dan analisis jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.451.121.400,00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,67%. Adapun output yang dihasilkan adalah

tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional Umum; Pergub analisis jabatan lingkup Setda; terlaksananya bimtek pembobotan jabatan dan analisis beban kerja. Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional. Untuk itu, sebagai solusinya dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan melaksanakan sosialisasi tentang peran dan fungsi jabatan fungsional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.228.413.000 dan terealisasi hanya mencapai 57%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah terkirimnya PNS dilingkungan Setda Provinsi Jambi yang mengikuti diklat, kursus dan lain-lain.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Peraturan Daerah.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.448.067.150,00 dan teralisasi sebesar 73,63%. Dari pelaksanaan program tersebut, output yang diperoleh antara lain: tersusunnya LAKIP Tahun 2011, RKT Pemerintah Propinsi Jambi Tahun 2012 dan LAKIP Sekretariat Daerah Propinsi Jambi Tahun 2011; teraksananya pembinaan terhadap 10 OPD; terbinanya

organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; terevaluasinya 4 UPTD; terlaksananya rapat koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, workshop Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta sosialisasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

G.Biro Aset

Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, pada tahun anggaran 2012, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.039.273.703,00 dan terealisasi sebesar 94,70%. Dari total anggaran tersebut didistribusikan untuk melaksanakan 3 tiga program dan 12 kegiatan yaitu;

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran pelayanan yang diberikan. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan program ini, telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi sebesar Rp.1.615.000.000,-. Ouput dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah meningkatnya jumlah gedung yang layak pakai.
2. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk melakukan penilaian terhadap asset daerah dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah Provinsi Jambi. Untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut, telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.187.192.489,- dan telah terealisasi mencapai 96,68%. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan secara umum adalah terlaksananya penilaian barang milik daerah dan tersusunya laporan neraca asset secara baik dan benar.

3. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah. Program ini bertujuan untuk menginvtaris barang milik daerah; pengadaan dan pengamanan terhadap asset; peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur tentang aset. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan program telah di alokasikan anggaran sebesar Rp.4.237.081.214 dan terealisasi mencapai 94,11%. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan ini antara lain; terlaksananya inventarisasi aset daerah; terlaksananya pengadaan dan pengamanan aset daerah; termanaftatkannya asset daerah.

H. Biro Umum

Pada tahun 2012, Biro Umum Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 56.140.369.500,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp. 46.365.707.003,00 atau setara dengan 82,59% yang diarahkan untuk melaksanakan 3 (tiga) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari 15 kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.850.534.150,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 22.842.263.849,- atau terealisasi sebesar

82,62 %. Adapun output yang dihasilkan adalah Terwujudnya fasilitas Administrasi Pemerintahan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 30.599.764.500,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 27.456.195.150,- atau 83,79 %. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya fasilitas Sekretariat Pemerintah Daerah dan pimpinan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan dana sebesar Rp. 743.600.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 640.702.500,- atau 86,16 %. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bersikap disiplin dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Untuk itu, sebagai upaya solusi pemecahan masalah tersebut, adalah dengan mengintensifkan Pengawasan Melekat dan melaksanakan peraturan tentang disiplin PNS secara proporsional.

4.1.17.2 Sekretariat DPRD

Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diterapkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi tujuan, sasaran, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu Memberikan Pelayanan Administrasi kepada Anggota Dewan.

Gambaran umum mengenai bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Kursus, pelatihan dan bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2012 telah dialokasikan dana sebesar Rp 82.500.000,- dengan kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis, dan telah terealisasi dana sebesar Rp 33.778.000,- (40.94%) .

b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

1. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp20.709.491.120. dan realisasi keuangan 83,30 %

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda direalisasikan dengan kegiatan pembahasan masalah Raperda dan produk-produk hukum daerah, dengan pagu anggaran Rp 7.767.260.000. dengan realisasi keuangan 83,30 %
- b. Kegiatan Reses, dengan pagu anggaran tahun 2012 Rp 3.103.200.000. berupa kegiatan Kunjungan kerja dan Peninjauan Lapangan Pimpinan Dan Anggota DPRD adapun tujuan kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai input dalam penetapan kebijakan tahun yang akan datang dengan realisasi keuangan 94,92 %
- c. Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peninjauan lapangan merupakan kegiatan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan sebagai bahan masukan dan informasi pembangunan dan juga sebagai fungsi pengawasan pagu kegiatan Rp.1.146.417.120 dengan realisasi keuangan 60,98 %
- d. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan & Anggota DPRD bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan staf secretariat DPRD serta meningkatkan kemampuan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu anggaran Rp 6.094.130.000 dengan realisasi keuangan 93,79 %
- e. Kegiatan Pembahasan Ranperda inisiatif merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pembahasan Rancangan Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD

dengan pagu anggaran tahun 2012 Rp. 2.264.034.000 dengan realisasi keuangan 59,25 %

- f. Kegiatan Publikasi Rapat-rapat Paripurna DPRD bertujuan memberikan akses informasi kepada masyarakat terhadap kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD pagu anggaran kegiatan Rp. 334.450.000 dengan realisasi keuangan 93,29 %

4.1.17.3 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Menyadari peran penting Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 dan UU no. 18 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi ditetapkan dengan Perda No. 15 tahun 2008. Berdasarkan Perda tersebut tugas pokok dari Balitbangda Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Balitbangda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang di daerah
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Litbang Daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Litbang Daerah

1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi pada tahun 2012 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi telah melaksanakan beberapa program

kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.736.660.570,00 realisasi keuangan 93,49 %

2. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

a. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jambi

Tujuan :

- a. Mereview konsep dan metode yang digunakan untuk menghitung NTP di Provinsi Jambi.
- b. Menghitung NTP Provinsi Jambi secara objektif yang dirinci menurut masing-masing sub sektor pertanian.
- c. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP Provinsi Jambi.

Rekomendasi : 1) Mengingat konsep perhitungan NTP yang digunakan oleh BPS cukup komprehensif, maka untuk meningkatkan kredibilitas hasil perhitungan NTP yang diperoleh, sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berkolaborasi secara obyektif dengan pihak BPS terutama dalam hal menambah jumlah sampel kecamatan dan responden, serta mensuplai data sekunder berupa laporan dari dinas yang terkait. 2) Ketimbang memperdebatkan hasil perhitungan NTP yang masih rendah, sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten segera bertindak untuk mengambol langkah-langkah kongrit untuk menaikkan NTP Provinsi Jambi. Adapun langkah-langkah kongrit tsb adalah sebagai berikut: a) Mendorong kinerja Dolog agar senantiasa menampung hasil panen padi masyarakat. b) Mengupayakan agar pasar lelang komoditas dapat beroperasi secara periodik sesuai

dengan waktu yang ditentukan. C) Mendorong industri crumb rubber agar 294ias294e kesempatan yang lebih luas kepada petani produsen yang berminat memasarkan karet mereka secara langsung ke Pabrik meski dengan persyaratan tertentu. D) Mendorong pembentukan kelompok dalam pemasaran hasil pertanian agar dapat membangun kekuatan tawar dengan cara merubah bentuk pasar dari monopsonistik menjadi oligopolistik di mana petani produsen berkolusi satu dengan yang lainnya sehingga kekuatan permintaan dan penawaran menjadi seimbang. Hal ini pada gilirannya akan memperpendek saluran pemasaran sehingga dapat memberikan harga yang lebih baik kepada petani produsen. E) Pemerintah Daerah dengan perangkat yang dimiliki dapat memfasilitasi petani produsen agar dapat membuat kesepakatan baik antara 294ias294e petani maupun dengan pihak ketiga yakni berupa pedagang yang menjadi konsumen komoditas pertanian yang mereka hasilkan. Dengan bermitra maka petani akan mendapat bimbingan teknis dan sarana produksi dari perusahaan mitra dan hasil panennya mendapat kepastian pasar dengan harga yang 294ias ditentukan di depan tergantung dari kesepakatan. F) Alternatif lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harga komoditas pertanian ditingkat petani produsen adalah dengan membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil produksi petani. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan industri hilir berbahan baku produk pertanian secara lokal. Dengan adanya perubahan bentuk hasil pertanian sedekat mungkin dari

sumbernya diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan indeks terima petani. G) Guna mengantisipasi beban biaya yang cukup besar ditanggung oleh petani dalam menggunakan saprodi, pemerintah dapat secara intens mengontrol harga input yang relatif terjangkau hingga di tingkat lokal petani produsen. Pemerintah juga diharapkan dapat menjamin agar subsidi input pertanian dapat mengenai sasaran yang tepat sebagaimana yang diharapkan. Di samping menjaga ketersediaan input bersubsidi secara tepat waktu dan tepat sasaran, pemerintah juga sudah saatnya melakukan sosialisasi input organik guna menghindari ketergantungan petani terhadap input un-organik yang untuk memperolehnya membutuhkan dukungan modal yang cukup besar.

2. Kajian Tata Niaga Hasil Pertanian di Provinsi Jambi

Tujuan :

- a. Mengidentifikasi terbentuknya saluran tataniaga komoditas pertanian khususnya Karet, Padi, Kentang dan ikan Nila dan ikan Patin di Provinsi Jambi.
- b. Mengetahui struktur perilaku, dan penampilan pasar dalam tataniaga komoditas pertanian khususnya Karet, Padi, Kentang dan ikan Nila dan ikan Patin di Provinsi Jambi.
- c. Keterpaduan pasar dan transmisi harga dalam tataniaga komoditas pertanian khususnya Karet, Padi, Kentang dan ikan Nila dan Ikan Patin di Provinsi Jambi.

Rekomendasi : Tataniaga Karet Perlu dilakukan kebijakan yang mengantarkan program untuk memperluas pembinaan usahatani karet lebih holistik. Perbaikan tataniaga karet seringkali terkait dengan berbagai kelemahan pada sisi produksi, organisasi petani, aspek pembiayaan, informasi, kelancaran distribusi komoditas karet, dan struktur serta perilaku pasar. Pembinaan di mulai dari tingkat usahatani karet dalam aspek organisasi petani (kelompok tani) dalam proses produksi, pengolahan karet, dan standar mutu. Pembinaan tingkat usahatani juga dapat meliputi perbaikan skala tanam dan rehabilitasi kebun karet. Pada tingkat tertentu jumlah usahatani yang dibina telah memerlukan : a) unit pasar lelang karet atau kemitraan tataniaga langsung dengan pihak Crumb Rubber terdekat; b) unit koperasi atau lembaga pembiayaan untuk menjadi alternatif sumber pembiayaan dalam produksi karet, rehabilitasi atau perluasan kebun karet. **Tataniaga Ikan Nila** Menyediakan lembaga permodalan yang mampu menyediakan modal dengan prosedur yang mudah serta bunga pinjaman yang rendah bagi pembudidaya ikan Nila. Hal ini untuk memberikan pilihan bagi pembudidaya dalam mendapatkan modal usaha, agar tidak terikat kepada modal dari pedagang pengumpul, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tawar pembudidaya terhadap pedagang pengumpul. **Tataniaga Ikan Patin** Guna meningkatkan *share* (bagian) keuntungan kepada pembudidaya dapat dilakukan dengan melalui penerapan pemasaran tipe saluran II dengan menghilangkan fungsi pedagang

pengumpul. Sesungguhnya fungsi ini dapat digantikan oleh kelompok pembudidaya atau koperasi. **Tataniaga Beras** Komoditas beras merupakan kebutuhan pokok yang harus dapat diakses oleh setiap individu pada setiap waktu dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk menjamin kontinuitas ketersediaannya terutama melalui peningkatan pemasaran beras 297ias297 di daerah sendiri.

3. Kajian Analisis Peranan Bantuan Ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi kepada Masyarakat

Tujuan :

- a. Mengetahui gambaran tentang pemanfaatan bantuan Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diberikan kepada masyarakat.
- b. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan pemerintah Prov. Jambi.
- c. Merumuskan pola penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Prov. Jambi yg ideal untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat Prov. Jambi.

Rekomendasi : 1) Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dalam penyaluran dana ke UMK dan Instansi pelaksana untuk menghindari penyimpangan di tahap penyaluran. 2) Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan dana bantuan ekonomi agar penggunaannya telah efektif. 3) Perlu dilakukan pengawasan terhadap bantuan peralatan, agar nilai yang diberikan sesuai dengan jumlah

anggaran dan peralatan dapat dimanfaatkan secara maksimal

4. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pariwisata di Kab. Muaro Jambi

Tujuan : Memberikan gambaran yang mendalam mengenai kondisi infrastruktur Situs Percandian Muaro Jambi dan Memberikan gambaran mengenai kebutuhan infrastruktur Situs Percandian Muarajambi. Analisis yang dilakukan meliputi analisis arkeologi, fisik dan lingkungan, 298ias298e kependudukan, ekonomi, pengembangan tata ruang (infrastruktur), kebijakan dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur baik itu jumlah dan kualitasnya masih belum memadai. Infrastruktur yang diperlukan antara lain infrastruktur wisata minat khusus, wisata pendidikan, wisata alam/lansekap, wisata kuliner dan wisata religi.

Rekomendasi : 1) Aktivitas pelestarian situs berupa: Kantor pengelola situs, laboratorium arkeologi, ruang penampungan sementara benda temuan arkeologi, mess pengelola. 2) Wisata Pendidikan berupa: Visitor center (galeri informasi, audio visual), museum (indoor/outdoor), gardu pandang, bangku, street furniture, penanda, spot fotografi. 3) Minat khusus (Penelitian): Hall – class/ meeting room, ruang workshop, ruang perpustakaan. 4) Wisata outdoor: Pedestrian – heritage trail/ path, shelter, arboretum tanaman tropis, promenade, playground/camping ground, picnic area/outbond. 5) Wisata religi: Pendopo, pelataran – open space, bangunan persiapan ibadah. 6)

Wisata perairan: Dermaga, menara observasi, Ruang tunggu/ Bangku, water – river park, kanal. 7) Wisata kuliner: Fasilitas makan-minum, restoran terapung, keamanan. 8) Seni dan Budaya: Amphitheater, open space, bangku dan taman, Hall / pendopo, pusat/kios cinderamata. 9) Aktivitas penunjang: Community center (pendopo, pelataran – open space untuk interaksi warga dan wisatawan), shelter, playground, picnic area, parkir. 10) Penanda: Gerbang kawasan, tiketing, shelter, area parkir sementara, sculpture, lavatory, mushalla.

5. Kajian Manajemen Pelayanan RSUD Raden Mattaher Menuju Rumah Sakit Pendidikan di Provinsi Jambi.

Tujuan :

- a. Mengetahui Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi.
- b. Menggali Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher.

Rekomendasi : 1) Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pegawai yang memberikan pelayanan di RSUD Raden Mattaher. 2) Meningkatkan Kemampuan SDM Pelayanan melalui training (pelatihan) pelayanan prima. 3) Mempertegas komitmen tenaga dokter dalam tugas memberikan pelayanan pasien RSUD Raden Mattaher.

6. Kajian Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Birokrasi melalui Pemberian Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi.

Tujuan :

- a. Memberikan Gambaran Tentang Informasi Beasiswa, Persyaratan Beasiswa, Mekanisme Seleksi Beasiswa, Efektivitas Penggunaan Beasiswa, Sistem Monitoring dan Tingkat Manfaat Penerima Beasiswa.
- b. Mengetahui Hubungan Variabel-variabel Mengenai Informasi Beasiswa, Persyaratan Beasiswa, Persyaratan Beasiswa, Mekanisme Seleksi Beasiswa, Efektivitas Penggunaan Beasiswa, Sistem dan Tingkat Manfaat Penerima Beasiswa.
- c. Aspirasi Penerima Beasiswa Sebagai Bahan Masukan Untuk Perbaikan Pengelolaan Beasiswa di lingkungan Pemprov. Jambi pada masa akan 300ias300e.

Rekomendasi : 1) Mekanisme Beasiswa dikalangan birokrat kab/kota se Provinsi Jambi mesti bekerjasama dengan kepala daerah kab/kota tertentu. 2) Untuk kelancaran pengelolaan dan penyaluran beasiswa sepenuhnya menjadi kewenangan BKD Provinsi yang disesuaikan dengan formasi dari usulan masing-masing kab/kota. 3) Optimalisasi penyaluran dana beasiswa akan ditindak lanjuti dengan standar operasional (SOP). Hal ini dimaksudkan agar rentang waktu penyaluran tidak terlalu lama dan menguntungkan baik bagi Pemprov maupun bagi mahasiswa sendiri. 4) Penyaluran dana beasiswa perlu diupayakan satu pintu oleh karena BKD Provinsi selaku intitusi sebagai 300ias300e300 langsung/tidak kepegawaian daerah maka secara efesien dan efektif pengelolaan dana beasiswa tersebut menjadi tanggung jawab BKD

sedangkan alokasi dana APBN tetap dialokasikan oleh Diknas. 5) Segala sesuatu mengenai mekanisme beasiswa merujuk kepada Peraturan Gubernur antara lain : Indikator 301ias301e ekonomi penerima.

7. Kajian Standar Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jambi

Tujuan :

- a. Mendeskripsikan persepsi responden terhadap perencanaan, penganggaran, pengadaan dan pengawasan belanja ATK oleh unit-unit kerja SKPD di Provinsi Jambi.
- b. Mengestimasi dan menganalisis standar belanja ATK bagi setiap SKPD di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi.

Rekomendasi : 1) Dalam rangka meningkatkan efisien belanja ATK dan control penggunaan ATK lebih baik jika terfokus disekretariat atau bagian tata usaha. 2) Pentingnya aplikasi ASB (Analisis Standar Belanja) untuk meningkatkan efisien anggaran ATK di lingkungan Provinsi Jambi.

8. Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Cabe Keriting dalam Mendukung Kawasan Agroindustri Pertanian Terpadu

Tujuan : Untuk dapat meningkatkan ekonomi petani cabe di kawasan agroindustri pertanian pada khususnya petani cabe wilayah provinsi Jambi umumnya.

Rekomendasi : 1) Diharapkan pemerintah kabupaten terus mengembangkan kawasan agro pertanian. 2)

Diharapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan petani cabe dalam menerapkan teknologi budidaya cabe di Kab. Merangin.

9. Pengembangan Penerapan Teknologi Pengelolaan Asap Cair (liquid smoke)

Tujuan :

- 1) Meningkatkan hasil pengolahan batok kelapa di Kab. Tanjab. Barat dan Timur.
- 2) Meningkatkan kualitas produksi batok kelapa.

Rekomendasi : Diharapkan petani kelapa di Kab. Tanjab. Barat dan Timur dapat meningkatkan penghasilannya dengan cara mengolah batok kelapa menjadi asap cair.

10. Penelitian Mandiri

a. Kajian Optimalisasi Pendataan Penerima Bantuan Beasiswa Program Satu Milyar Satu Kecamatan.

Tujuan : a) Dapat memberikan gambaran terhadap persoalan-persoalan yang menyebabkan tidak maksimalnya pendataan penerima bantuan beasiswa program SAMISAKE, sehingga ke depan diharapkan persoalan-persoalan ini tidak terulang kembali. B) Memberikan masukan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan program tersebut.

Rekomendasi : 1) Dalam rangka mengoptimalkan validitas penerima program Samisake, Bappeda Provinsi Jambi selaku koordinator program Samisake perlu untuk terus melibatkan pihak pemerintah kabupaten dan pihak kecamatan. 2) Pemerintah

Provinsi Jambi melalui Bappeda perlu menyusun mekanisme pemutakhiran (update) data pendidikan di kecamatan dengan melibatkan pihak pemerintah kecamatan dan UPTD Dinas Pendidikan di kecamatan (Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan) mengingat setiap tahun ajaran akan terjadi perubahan tingkat pendidikan. 3) Secara keseluruhan, agar program Samisake lebih optimal, mengingat pelaksanaan Samisake sudah diserahkan ke daerah kabupaten/kota (didaerahkan) maka Bappeda Provinsi Jambi harus meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Samisake yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan baik, tepat dan akurat sesuai tujuan program. 4) Adapun sebutan “Beasiswa” pada program Samisake sebaiknya diganti dengan sebutan “Bantuan Pendidikan” karena “beasiswa” biasanya diberikan melalui persyaratan akademik tertentu, melalui proses seleksi kemampuan/prestasi dan berkesinambungan dari awal hingga akhir proses studi.

**b. Kajian Implementasi Kegiatan Sertifikasi Pendidikan
Dalam Program Samisake Provinsi Jambi**

Tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Samisake di Provinsi Jambi.
2. Untuk melihat dan menganalisis pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah dalam program samisake di Provinsi Jambi.

3. Untuk mengetahui Solusi dan strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan samisake di Provinsi Jambi.

Rekomendasi : a) Validitas calon penerima sertifikat mesti ditetapkan setelah dilakukan studi lapangan dan studi kelayakan, terhadap penerima program, karena bila harus berpedoman sepenuhnya pada data masyarakat miskin didesa yang telah ditetapkan berdasarkan data penerima BLT belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat pelaksanaan program Sertifikasi tanah. B) Antisipasi terhadap prosedur kepengurusan ke BPN yang tumpang tindih dengan program kabupaten dan pemerintah pusat, sangat diperlukan, dan sebagai solusi perlu adanya koordinasi berkelanjutan diantara pemangku kepentingan terkait program sertifikasi gratis dalam program samisake dengan program-program lain yang bersamaan. C) Distribusi penyebaran program juga harus adil dan merata, sebagai contoh pada tahun 2011 ada desa yang tidak mendapatkan alokasi sertifikasi tanah, didalam kecamatan yang mendapatkan alokasi samisake jika hal ini dibiarkan akan menjadi sebuah hambatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. D) Potensi dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Terpadu Pada Kawasan Minapolitan di Provinsi Jambi.

c. Potensi dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Terpadu Pada Kawasan Minapolitan di Provinsi Jambi.

Tujuan :

1. Mengetahui potensi usahatani pada kawasan minapolitan dalam mewujudkan 305ias305e305 pangan terpadu di Provinsi Jambi.
2. Mengetahui strategi pengembangan usahatani di kawasan minapolitan untuk mewujudkan 305ias305e305 pangan terpadu di Provinsi Jambi.
3. Menentukan strategi prioritas pengembangan usahatani pada kawasan minapolitan dalam mewujudkan 305ias305e305 pangan terpadu di provinsi Jambi.

Rekomendasi : 1) Dalam membangun 305ias305e usahatani terintegrasi perlu dipertimbangkan kemampuan petani, kebutuhan petani, 305ias305e lingkungan ekonomi dan 305ias305e yang berada disekitar petani dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. 2) Dalam membangun 305ias305e305 pangan terpadu di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi perlu mempertimbangkan strategi pengembangan komoditas utama.

d. Prilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip umum pengelolaan sampah rumah tangga yang baik di tingkat RT di kelurahan Pasar Sarolangun.

2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat menerapkan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Pasar Sarolangun.
3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kelurahan Pasar Sarolangun.
4. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kelurahan Pasar Sarolangun.

Rekomendasi : 1) Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu lebih gencar melaksanakan sosialisasi kebersihan, dan memasyarakatkan penerapan prinsip 3R sehingga bukan hanya piala adipura yang dapat dipertahankan namun kualitas pengelolaan sampah juga dapat ditingkatkan. Dengan sosialisasi dan memasyarkatkan prinsip 3R diharapkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat yang pada akhirnya membantu beban pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan baik. 2) Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebaiknya memperluas wilayah pelayanan penjemputan sampah kerumah-rumah warga. 3) Pemerintah juga sebaiknya memberikan pelatihan dan bimbingan serta mengadakan lomba-lomba kebersihan dan 3R kepada aparatur pemerintah, masyarakat, pelajar dan mahasiswa bahkan kepada anak-anak sedini mungkin. Dengan penerapan 3R yang baik dan benar oleh masyarakat diharapkan dapat membawa

banyak dampak positif antara lain, mengurangi timbulnya sampah yang berarti juga mengurangi beban pemerintah dalam pengelolaan kebersihan dan memperpanjang masa pakai TPA, memanfaatkan potensi nilai ekonomi sampah, dan peningkatan kualitas lingkungan. 4) Pemerintah sebaiknya segera memenuhi kurangnya fasilitas kebersihan seperti TPS, dan armada pengangkut khususnya motor dump untuk menjemput sampah kerumah warga dan grader untuk di TPA. 5) Pemerintah sebaiknya juga segera memenuhi kebutuhan tenaga ahli kebersihan dan 3R. 6) Kepada Masyarakat umum termasuk pelajar dan mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang baik dan menerapkan 3R, sehingga dapat menjadikan lingkungan lebih bersih, sehat dan nyaman bahkan dapat mendatangkan nilai ekonomi.

e. Transformasi Pola Pemanfaatan Hutan Oleh Suku Anak Dalam

Tujuan : 1) Mendapatkan data tentang SAD Bathin IX di Desa Senami Kecamatan Tembesi yang terlibat jual beli hasil hutan. 2) Mendapatkan data tentang SAD Bathin IX di Desa Senami Kecamatan Tembesi yang bekerja di 307ias307e lain dan tidak lagi mengandalkan hidup dari hutan dan hasilnya. 3) Mendapatkan informasi mengapa SAD Bathin IX mau bekerjasama dengan pihak lain untuk mengeksploitasi hasil hutan. 4) Menganalisis persepsi masyarakat SAD Bathin IX terhadap konservasi hutan di Kecamatan Tembesi. 5) Memperoleh informasi tentang pilihan

pekerjaan/keterampilan yang diinginkan masyarakat SAD Bathin IX untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rekomendasi : 1) Tingginya kesadaran warga SAD Bathin IX untuk tidak terlibat dalam jual beli hasil hutan atau kegiatan eksploitasi hutan lainnya harus diapresiasi dengan menyediakan pilihan pekerjaan atau insentif bagi mereka. Saat ini warga SAD Bathin IX berkebun dengan memanfaatkan lahan warisan orangtua mereka yang merupakan pembagian Dinas Sosial Provinsi Jambi tahun 1999 sebanyak 2 Ha/ KK, yang hasilnya tidak mencukupi. Insentif yang diberikan dapat berupa bibit tanaman dan ternak sehingga mereka tidak tergoda merambah hutan. 2) Pemerintah Kabupaten Batanghari perlu mengusulkan kepada Departemen Kehutanan untuk memberi izin khusus pemanfaatan hasil hutan non sehingga memberi peluang kepada warga SAD untuk memanfaatkan rotan/damar, tanaman obat-obatan, madu dan lain-lain hasil hutan non kayu. 3) Meningkatkan pemberian pelatihan yang bersifat *life skill* yang cocok dengan karakter SAD Bathin IX guna menciptakan peluang kerja baru. Disarankan *life skill* yang diberikan tidak berbasiskan lahan, seperti beternak dan memelihara ikan, atau keterampilan home industri atau industri kreatif lainnya. 4) Memperkuat fungsi TAHURA sebagai kawasan ekowisata dan pusat pendidikan lingkungan. Keistimewaan TAHURA sehingga dapat dipromosikan sebagai kawasan ekowisata/pendidikan lingkungan adalah hutan ini merupakan habitat asli pohon Bulian (*Eusideroxylon Zwageri*) dan jenis-jenis flora

komersial diantaranya dari keluarga pohon meranti (*dipterocarpaceae*). Juga terdapat beraneka jenis satwa yang sudah dinyatakan langka dan dilindungi. Kedatangan wisatawan ke lokasi tersebut akan membuka peluang usaha jasa dan perdagangan warga SAD.

5) Membenahi pendidikan formal anak-anak keluarga SAD Bathin IX sehingga terbangun generasi mendatang SAD Bathin IX yang lebih mampu membangun perekonomian keluarga dan melindungi TAHURA.

6) Harus diambil tindakan tegas dan penegakan hukum terhadap warga pendatang di kawasan TAHURA karena mereka menjadi ancaman terhadap TAHURA terkait keterlibatan mereka dalam mengambil kayu hutan secara ilegal dan kepemilikan tanah perumahan yang tidak sah.

7) Pemerintah Kabupaten Batanghari disarankan melakukan langkah preventif untuk mencegah mengalirnya pendatang baru ke kawasan TAHURA.

8) Perlu penelitian lebih luas tentang kehidupan warga SAD Bathin IX dan upaya meningkatkan perekonomian mereka.

f. Otonomi Daerah dan Pendidikan di Provinsi Jambi

Tujuan :

1. Menganalisis tingkat peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari di dalam meningkatkan pembangunan pendidikan.
2. Menerangkan tingkat peranan masyarakat Kabupaten Batang Hari untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Menganalisis tingkat peranan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Batang Hari di dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Rekomendasi : 1) Di dalam menempatkan pegawai pada salah satu jabatan di dalam hirarki pemerintahan daerah, kepala daerah hendaknya ditetapkan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pegawai yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban.

2) Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Karena masyarakat lebih tahu tentang harapan dan keinginan mereka di dalam pembangunan pendidikan di daerah mereka. 3) Pengawasan masyarakat diharapkan lebih dominan terhadap proses pelaksanaan pembangunan pendidikan guna mewujudkan transparansi, efesiensi, efektifitas dan akuntabel.

g. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi

Tujuan : 1) Untuk mengetahui realibilitas PAD yang bersumber obyek penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan dan aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi.

Rekomendasi : 1) Penghitungan Potensi PKB di Provinsi Jambi harus dilakukan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kebijakan penetapan target. Manfaat lain dari perhitungan potensi PKB yang realistis atau target tidak hanya ditetapkan dengan menambah prosentase tertentu saja. 2) Perlu dilakukan serangkaian strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain : a) Validasi riil data terhadap seluruh obyek PKB dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemda Kab/Kota. B) Meningkatkan pelayanan dengan cara yang mudah, cepat dan menertibkan calo dan biro jasa. C) Menyediakan kotak saran dan pengaduan.

h. Peran Komite dan Tenaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Prestasi Sekolah

Tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran secara deskriptif tentang komite sekolah, tenaga kependidikan dan prestasi sekolah pada beberapa SMP kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dengan studi kasus pada SMPN 1 Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Komite Sekolah terhadap prestasi sekolah.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tenaga kependidikan terhadap prestasi sekolah.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Komite Sekolah dan tenaga kependidikan terhadap prestasi sekolah.

Rekomendasi : 1) Perlu ada revitalisasi dan reorganisasi terhadap komite sekolah yang kepengurusannya sampai lebih dari 5 tahun tidak ada perubahan melalui rapat umum pengurus yang diatur dalam AD/ART komite sekolah. 2) Tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional baik pada bidang eksakta, non eksakta dan tenaga lainnya perlu peningkatan kapasitas sebagai pengelola melalui kursus/pelatihan sesuai dengan profesionalitas yang diampunya. 3) Peran komite sekolah dan tenaga kependidikan bukan satu-satunya variabel yang menentukan prestasi sekolah, masih ada lain yang juga menentukan prestasi sekolah antara lain adalah peran orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah/pusat, swasta, LSM dan sebagainya.

i. Prospek Pengembangan Sayur Organik

Tujuan :

- a. Untuk menghitung pendapatan yang diterima petani sayuran organik.
- b. Untuk mengetahui prospek pengembangan sayuran organik di Provinsi Jambi.
- c. Untuk merumuskan kebijakan yang dibutuhkan dalam pengembangan sayuran organik di Provinsi Jambi.

Rekomendasi : 1) Mengembangkan usaha tani sayuran organik sebaiknya terintegrasi dengan ternak dan energi. 2) Upaya pemerintah sebaiknya menyediakan pasar dan mempromosikan sayuran

organik untuk memperoleh harga premium. 3) Perlunya dilakukan penelitian lanjut tentang integrasi usahatani sayuran, ternak dan energi. 4) Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada petani dalam sertifikasi produk organik, guna untuk menjamin kualitas produk yang akan dipasarkan. 5) Masih perlu diteliti ulang berapa produktivitas yang optimum untuk mencapai usahatani yang optimum.

Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jambi

Tujuan :

1. Mereview konsep dan metode yang digunakan untuk menghitung NTP di Provinsi Jambi.
2. Menghitung NTP Provinsi Jambi secara objektif yang dirinci menurut masing-masing sub sektor pertanian.
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP Provinsi Jambi.

Rekomendasi : 1) Mengingat konsep perhitungan NTP yang digunakan oleh BPS cukup komprehensif, maka untuk meningkatkan kredibilitas hasil perhitungan NTP yang diperoleh, sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berkolaborasi secara obyektif dengan pihak BPS terutama dalam hal menambah jumlah sampel kecamatan dan responden, serta mensuplai data sekunder berupa laporan dari dinas yang terkait. 2) Ketimbang

memperdebatkan hasil perhitungan NTP yang masih rendah, sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten segera fokus untuk mengambol langkah-langkah kongrit untuk menaikkan NTP Provinsi Jambi. Adapun langkah-langkah kongrit tsb adalah sebagai berikut: a) Mendorong kinerja Dolog agar senantiasa menampung hasil panen padi masyarakat. b) Mengupayakan agar pasar lelang komoditas dapat beroperasi secara periodik sesuai dengan waktu yang ditentukan. c) Mendorong industri crumb rubber agar memberi kesempatan yang lebih luas kepada petani produsen yang berminat memasarkan karet mereka secara langsung ke Pabrik meski dengan persyaratan tertentu. d) Mendorong pembentukan kelompok dalam pemasaran hasil pertanian agar dapat membangun kekuatan tawar dengan cara merubah bentuk pasar dari monopsonistik menjadi oligopolistik di mana petani produsen berkolusi satu dengan yang lainnya sehingga kekuatan permintaan dan penawaran menjadi seimbang.

Hal ini pada gilirannya akan memperpendek saluran pemasaran sehingga dapat memberikan harga yang lebih baik kepada petani produsen. e) Pemerintah Daerah dengan perangkat yang dimiliki dapat memfasilitasi petani produsen agar dapat membuat kesepakatan baik antara sesama petani maupun dengan pihak ketiga yakni berupa pedagang yang menjadi konsumen komoditas pertanian yang mereka hasilkan. Dengan bermitra maka petani akan

mendapat bimbingan teknis dan sarana produksi dari perusahaan mitra dan hasil panennya mendapat kepastian pasar dengan harga yang bisa ditentukan di depan tergantung dari kesepakatan. f) Alternatif lainnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harga komoditas pertanian ditingkat petani produsen adalah dengan membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil produksi petani. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan industri hilir berbahan baku produk pertanian secara lokal. Dengan adanya perubahan bentuk hasil pertanian sedekat mungkin dari sumbernya diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan indeks terima petani. g) Guna mengantisipasi beban biaya yang cukup besar ditanggung oleh petani dalam menggunakan saprodi, pemerintah dapat secara intens mengontrol harga input yang relatif terjangkau hingga di tingkat lokal petani produsen. Pemerintah juga diharapkan dapat menjamin agar subsidi input pertanian dapat mengenai sasaran yang tepat sebagaimana yang diharapkan. Di samping menjaga ketersediaan input bersubsidi secara tepat waktu dan tepat sasaran, pemerintah juga sudah saatnya melakukan sosialisasi input organik guna menghindari ketergantungan petani terhadap input un-organik yang untuk memperolehnya membutuhkan dukungan modal yang cukup besar.

4.1.17.4 Inspektorat Provinsi Jambi

Sejalan dengan visi Inspektorat Provinsi Jambi yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, efisien, efektif melalui pengawasan yang profesional, maka pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp6.704.501.150,00 dengan 6 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, 5) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Selanjutnya dalam rangka mencapai misi dari Inspektorat Provinsi Jambi yaitu 1) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, 2) Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, 3) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, 4) dan menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi telah dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebesar Rp6.422.427.406,00 atau 95,79%. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.55 Capaian Program Inspektorat Tahun 2012

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.918.567.200	1.773.425.356	92,43
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.525.000	7.725.000	78,85
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	4.212.258.950	4.113.920.050	97,66
5.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	187.200.000	158.149.000	84,48
6.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	349.950.000	348.133.000	99,48
Jumlah		6.704.501.150	6.422.427.406	95,79

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Dari data tersebut terlihat semua program realisasinya sudah cukup baik dan maksimal yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Guna pencapaian target dari program tersebut, Inspektorat Provinsi Jambi dalam hal peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kementerian Teknis lainnya. Peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur Inspektorat Provinsi Jambi sebagian besar telah terpenuhi dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis, atas kerjasama tersebut terjadi efisiensi dari program ini hingga 84,48%. Begitu juga dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 99,48%, hal ini berdampak positif dengan adanya kerjasama dengan BPKP Provinsi Jambi, Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, dan Provinsi Lainnya dalam rangka penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Kegiatan utama Inspektorat Provinsi Jambi berupa pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan tujuan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut termasuk dalam program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.212.258.950,00 dan terealisasi sebesar Rp4.113.920.050,00 atau 97,66%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemeriksaan/pembinaan terhadap 170 Objek Pemeriksaan (Obrik) dengan 170 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 96,04% dari target yang telah rencanakan sebelumnya. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel 4.56 berikut :

Tabel 4.56 Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2012

No.	U r a i a n	Pelaksanaan	Realisasi	
			Obrik	LHP
1.	Pemeriksaan Kas dan Stock Opname	Januari dan Desember	66	66
2.	Review Laporan Keuangan	Januari	4	4
3.	Monitoring Samisake	Nopember	11	11
4.	Reguler Pemprov Jambi	April s.d Des	45	45
5	Pemeriksaan Penilaian SKPD Provinsi Jambi	Desember	44	44
Jumlah			170	170

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Tindaklanjut hasil pemeriksaan sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah

(APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus diupayakan penyelesaiannya. Dari 248 temuan dengan 640 rekomendasi, Inspektorat Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2012, telah ditindaklanjuti sebesar 31,71% dengan katagori selesai dan 68,28% katagori dalam proses. Jumlah kerugian negara telah ditarik sebesar Rp258.395.581,26 atau 34,52% dari seharusnya Rp748.430.606,91 selebihnya dalam katagori dalam proses yang meruapkan hasil pemeriksaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 80 temuan dengan 99 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 97 rekomendasi atau 97,97% sedangkan 2 rekomendasi atau 2,02% lainnya masih dalam proses. Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2010-2012 sebanyak 248 temuan dengan 640 rekomendasi, dari sejumlah rekomendasi tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan percepatan terhadap tindak lanjut pada beberapa SKPD Provinsi Jambi dengan hasil selesai tindak lanjut sejumlah 437 rekomendasi atau 68,28% dan sisanya sejumlah 202 rekomendasi atau 31,56% pada katagori dalam proses, sisa rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang baru selesai dilaksanakan pada tahun 2012.

Secara rinci tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan BPK RI dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.57 Tindakan lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2010 s.d 2012

No	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok temuan	Temuan Pemeriksaan			Selesai Ditindak Lanjuti			Temuan Dalam Proses		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai
1	2	3		4	3		4	3		4
A	HAPSEM I TA 2012									
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	6	12	1.340.208.702,25	0	0	633.124.702,25	0	12	707.084.000,00
2	Temuan Kelemahan SPI	15	29	236.147.500,00	0	0	126.147.500,00	0	29	110.000.000,00
3	Temuan 3E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (A)		6	9	1.576.356.202,25	0	0	759.272.202,25	0	41	817.084.000,00
B	HAPSEM II TA 2011									
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	12	28	648.051.950,00	0	0	0	0	28	648.051.950,00
2	Temuan Kelemahan SPI	2	5	0	0	0	0	0	5	0
3	Temuan 3E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (B)		14	33	648.051.950,00	0	0	0	0	33	648.051.950,00
C	HAPSEM I TA 2011									
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	19	43	4.360.098.448,14	0	10	939.657.547,11	0	32	3.420.440.901,03
2	Temuan Kelemahan SPI	17	43	2.062.474.399,00	0	6	126.362.000,00	0	37	1.936.112.399,00
3	Temuan 3E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (C)		36	86	6.422.572.847,14	0	16	1.066.019.547,11	0	69	5.356.553.300,03
D	HAPSEM II TA 2010									
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	3	7	2.181.376.312,22	0	5	1.601.140.327,02	0	2	580.235.985,20
2	Temuan Kelemahan SPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Temuan 3E	10	28	0	0	0	0	0	28	0
Sub Jumlah (D)		13	35	2.181.376.312,22	0	5	1.601.140.327,02	0	30	580.235.985,20

No	HAPSEM Lingkup Pemeriksaan Kelompok temuan	Temuan Pemeriksaan			Selesai Ditindak Lanjuti			Temuan Dalam Proses		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai
1	2	3		4	3		4	3		4
E	s.d HAPSEM I TA. 2010									
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	84	226	38.503.003.043,38	0	219	36.978.896.569,38	0	7	1.524.106.474,00
2	Temuan Kelemahan SPI	59	143	3.269.188.696,71	0	137	3.239.188.696,71	0	6	30.000.000,00
3	Temuan 3E	21	76	0	0	60	0	0	16	0
Sub Jumlah (E)		164	445	41.772.191.740,09	0	416	40.218.085.266,09	0	29	1.554.106.474,00
TOTAL		248	640	52.600.549.051,70	0	437	43.644.517.342,47	0	202	8.956.031.709,23

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Tabel. 4.58 Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d 2012.

No	Hasil Pemeriksaan Semesteran	Temuan Pengawasan			Selesai Ditindak Lanjuti			Temuan Dalam Proses		
		J u m l a h			J u m l a h			J u m l a h		
		Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai	Temuan	Saran	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	HP.Semester I TA.2012	90	165	57.627.307,73	0	0	0	0	165	57.627.307,73
B	HP.Semester II TA 2011	146	290	353.285.354,30	24	42	28.140.209,38	122	248	325.145.144,92
C	HP.Semester I TA 2011	73	137	40.505.697,00	46	82	22.363.590,00	27	55	18.142.107,00
D	HP.Semester II TA 2010	58	117	33.460.580,38	32	64	22.097.720,38	26	53	11.362.860,00
E	HP.Semester I TA 2010	44	92	263.551.667,50	33	66	185.794.061,50	11	26	77.757.606,00
TOTAL		411	801	748.430.606,91	141	254	258.395.581,26	186	547	478.672.165,65

Selain kegiatan yang bersifat rutinitas dan terjadual, Inspektorat Provinsi Jambi juga melaksanakan tugas yang bersifat insidentil berupa penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat. Pada tahun 2012 berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.59 Rekapitulasi Klasifikasi Pengaduan Masyarakat
Posisi per Juni 2012

No.	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Klasifikasi Dumas									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MenPAN & Reforma si Birokrasi	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Itjen Kemendagri	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Gubernur Jambi	19	4	-	6	4	-	1	-	1	-	3
4	BKN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Setneg	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
JUMLAH		27	7	1	8	4	-	2	-	1	1	3

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Keterangan :

01: Penyalahgunaan Wewenang

02: Pelayanan Masyarakat

03: Korupsi/Pungutan Liar

04: Kepegawaian/Ketenagakerjaan

05: Pertanahan/Perumahan

06: Hukum Peradilan

07: Kewaspadaan Nasional

08: Tata Laksana Pemerintahan

09: Lingkungan Hidup

10: Umum

Pelimpahan penyelesaian atas pengaduan masyarakat dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Jambi cq. Inspektorat Provinsi Jambi dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang sebanyak 7 surat atau 25,92%, Kepegawaian/Ketenagakerjaan 13 pengaduan atau 30,95%, pertanahan/ perumahan sebanyak 4 surat atau 14,81%, Umum sebanyak 3 surat atau 11,11%, Korupsi/Pungutan liar sebanyak 8 surat atau 29,63%, Hukum Peradilan sebanyak 2 surat atau 4,40%, Pelayanan masyarakat sebanyak 1 surat atau 3,70% Tata Laksana Pemerintahan sebanyak 1 surat atau 3,70% Lingkungan hidup sebanyak 1 surat atau 3,70%. Sedangkan tujuan surat pengaduan masyarakat paling banyak ditujukan langsung kepada Gubernur Jambi yaitu sebanyak 19 surat atau 70,37%, Lembaga lain sebanyak 3 surat atau 11,11%, dan kepada Inspektorat Provinsi sebanyak 3 surat atau 11,11% dan Bupati/Walikota sebanyak 2 surat atau 7,41%.

Tabel 4.60 Rekapitulasi Tujuan Dumas Posisi per Juni 2012

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tujuan Surat			
			Gub	Bupati/ Walikota	Inspektorat Provinsi	Lembaga Lain
1	MenPAN dan Reformasi Birokrasi	2	-	-	1	1
2	Itjen Kemdagri	2	2	-	-	-
3	Gubernur Jambi	19	17	-	1	1
4	BKN	1	-	1	-	-
5	Setneg	3	-	-	1	1
Jumlah		27	19	2	3	3

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Dari data tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah menindaklanjuti atas surat pengaduan tersebut berupa pemeriksaan, klarifikasi dan penegasan terhadap surat pengaduan dengan hasil; 17 surat pengaduan dilakukan

pemeriksaan, 1 surat dilakukan klarifikasi, dan 9 surat ditindaklanjuti dengan penegasan.

Tabel 4.62 Rekapitulasi Tindak Lanjut Surat Dumas Posisi per Desember 2011

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tindak Lanjut Surat				
			Diperiksa	Klarifikasi	Penegasan	Tidak Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
1	MenPAN & Reformasi Birokrasi	2	1	1	-	-	-
2	Itjen Kemendagri	2	1	-	1	-	-
3	Gubernur Jambi	19	15	-	4	-	-
4	BKN	1	-	-	1	-	-
5	Setneg	3	-	-	3	-	-
Jumlah		27	17	1	9	-	-

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Dari data tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah menindaklanjuti sebanyak 17 surat atau 62,96 %, tindak lanjut dengan klarifikasi sebanyak 1 surat atau 3,70 %, tindak lanjut dengan penegasan sebanyak 9 surat atau 33,33 %, Tidak ada pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dan tidak ada yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 4.63 Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Dumas Posisi per Desember 2011

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Hasil Tindak Lanjut Surat					
			Diperiksa		Klarifikasi		Penegasan	
			Terbukti	Tidak Terbukti	TS	TTS	TS	TTS
1	MenPAN dan Refor masi Birokrasi	2	-	1	-	1	-	-
2	Itjen Kemdagri	2	-	1	-	-	-	1
3	Gubernur Jambi	19	9	6	-	-	-	4
4	BKN	1	-	-	-	-	-	1
5	Setneg	3	-	-	-	-	-	3
Jumlah		27	9	8	-	1	-	9

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Keterangan :

TS : Tuntas.

TTS : Tidak Tuntas

Beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan selama melakukan program dan kegiatan prioritas Inspektorat Provinsi Jambi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Jumlah Personil yang memahami Kasus-kasus tertentu.
2. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
3. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.
4. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikutkan personil Inspektorat Provinsi Jambi untuk mengikutkan Diklat Khusus seperti Diklat Audit Investigasi.
2. Mengupayakan penyelesaian Kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
3. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP
4. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan lembaga pemeriksaan, baik APFP maupun BPK sehingga tindaklanjut dapat dilaksanakan dengan cepat
5. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

4.1.17.5 Kantor Perwakilan Jambi di Jakarta

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam bidang penghubung yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas perbantuan (desentralisasi) yang diberikan oleh Pemerintah Kepada Gubernur. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai fungsi 1) Perumusan kebijakan, pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman, 2) Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Swasta di Jakarta, 3)

Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah daerah di Jakarta dan Daerah lainnya, 4) Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Daerah yang ada di Jakarta serta Daerah lainnya, 5) Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah di Jakarta, 6)Penghubung Pemerintah Kabupaten/Kota serta Legislatif dengan Lembaga Departemen 7) Pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, 8) Pengelolaan ketatausahaan dan 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai misi yaitu 1) Melayani dan melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas kerjasama Pemerintah Jambi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah sehingga mempercepat jalannya Administrasi Pemerintah dan Pembangunan, 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, 3) Melaksanakan promosi pembangunan dalam rangka mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan investasi serta berperan aktif dalam upaya Pembinaan masyarakat Daerah Jambi sebagai asset dalam Pembangunan Daerah.

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai “Show Window” dan pilar utama dalam pengembangan Potensi Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan dalam peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah mempunyai 7 (tujuh) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp9.875.797.045,00 dan terealisasi sebesar Rp8.837.121.656,00 atau 89,48%.

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai 2 (dua) Program/Kegiatan yang sangat menunjang dalam pencapaian misi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta yaitu pada pelaksanaan Programnya berupa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencapai 44,77% dan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Peningkatan seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi mencapai 99,17%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012, dapat dilihat dari realisasi kontribusi, retribusi sewa Mess Jambi yang meningkat sebesar Rp2.452.900.000,00 dari Target sebesar Rp2.008.000.000,00 atau 122,16 % sedangkan pada Tahun 2011 mempunyai target sebesar Rp1.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.448.900.000,00 atau 129,56%, dan apabila dibandingkan nilai over target retribusi Mess Pemprov Jambi terjadi penurunan nilai sebesar Rp8.800.000,00.

Tabel 4.64 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta Tahun Anggaran 2012

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	332.000.000	148.650.000	44,77
	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	332.000.000	148.650.000	44,77
2.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	903.872.664	896.370.331	99,17
	Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi	903.872.664	896.370.331	99,17

Sumber : Perwakilan Provinsi Jambi

Dari data tersebut terdapat 1 (satu) program yang realisasinya belum maksimal yaitu program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kantor Perwakilan Pemprov Jambi telah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Kantor Perwakilan yang ada diseluruh Indonesia guna peningkatan pelayanan kedinasan, sehingga terjadi penghematan anggaran. Pada pelaksanaan Program/Kegiatan ini bila dilihat dari jumlah pelayanan kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang diperoleh ada sebanyak 126 kali kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga hal ini dinilai sudah dapat memenuhi kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah sehingga terciptanya hubungan kerja sama yang harmonis, baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi mempunyai kegiatan baru pada Tahun 2012 yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Anjungan Daerah Jambi di TMII, dimana akan diberikan kesempatan kepada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk tampil bergiliran tiap bulannya untuk mempromosikan Kebudayaan Daerah serta Potensi Sumber Daya Alam guna meningkatkan investor pada daerahnya masing-masing.

4.1.17.6 Sekretariat KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu wadah aktualisasi bagi anggota Korpri, keberlangsungan, dan kesinambungan pemerintahan sangat bergantung pada profesionalisme para anggota Korpri dalam menjalankan rencana, program dan kebijakan pemerintah. Sesuai dengan Visi Korpri adalah terwujudnya Korpri sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun Pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat kopri tertuang dalam beberapa program prioritas tahun 2012 di dukung alokasi anggaran sebesar Rp.1.712.157.820- Program yang telah dilakukan pada tahun 2012 antara lain: Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pembinaan mental dan Kerukunan hidup beragama bagi anggota KORPRI, Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum,

kelembagaan, peraturan daerah dengan kegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dan Program Kerjasama peningkatan olahragawan anggota KORPRI yang berbakat dan berprestasi sampai bulan Desember 2012 realisasi keuangan mencapai Rp.1.372.557.559,- atau 80,17 persen.

1. Realisasi Program Kegiatan.

- a. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pembinaan mental dan Kerukunan hidup beragama bagi anggota KORPRI dengan kegiatan Pembinaan mental dan Kerukunan hidup beragama bagi anggota KORPRI dengan terselenggaranya musyawarah Badan Pembina Rohani (BABINROH) KORPRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemilihan pengurus BABINROH Provinsi Jambi periode tahun 2012-2016 Saudara Ir.H. Haviz Husaini.MM sebagai Ketua Periode Tahun 2012-2016.
- b. Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah dengan sasaran prgramkegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI yang diikuti 39 orang anggota KORPRI dilingkungan SKPD dan 11 orang dari Kabupaten/kota yang bertujuan memberi pengenalan dan pemahaman tentang LKBH KORPRI serta memotivasi Kabupaten/Kota untuk membentuk LKBH KORPRI di Kabupaten/Kota sehingga terjalin komunikasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta dapat menciptakan rasa aman bagi anggota KORPRI dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Selama tahun 2012 terdapat 5 kasus permohonan bantuan hukum ke LKBH KORPRI.

Program Kerjasama peningkatan olahragawan anggota KORPRI yang berbakat dan berprestasi. Untuk mencapai sasaran program peningkatan olahragawan anggota KORPRI dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja BAPOR KORPRI dan kegiatan Pekan Olah Raga KOPRI Provinsi Jambi yang diikuti dari Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi Jambi dengan berbagai Cabang Olah raga yang bertujuan untuk Meningkatkan kerjasama, solidaritas, kekompakan dan sportifitas antara sesama anggota KORPRI, serta sebagai abdi negara juga abdi masyarakat yang telah menghabdi, untuk itu Sekretariat KORPRI telah pemberian penghargaan berupa :Satya Lencana Karya, Purna Bhakti PNS atas jasa dan pengabdinnaya kepada bangsa dan negara, PNS Teladan dan Bantuan Pendidikan KORPRI dan ASKES peduli pada Hari Ulang Tahun KORPRI ke 41 Tahun 2012.

4.1.18. Kepegawaian

4.1.18.1 Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi; disebutkan bahwa BKD adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, BKD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kepegawaian ;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengurusan, pemindahan dan pemberhentian pegawai daerah lainnya;
- g. Pembinaan di bidang kepegawaian terhadap seluruh perangkat daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas maka pada tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi memperoleh dana sebesar Rp.6.305.722.900,-. Dari dana tersebut, implementasi tugas pokok dan fungsi BKD dijabarkan kedalam 5 program dan 35 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, dari dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp.4.005.430.085,- atau mencapai 63,52 %. Pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan dibawah ini.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini adalah memberikan dan menyediakan dukungan dan fasilitas yang lengkap dan memadai untuk pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Sasaran program adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian Provinsi Jambi dengan dukungan dana sebesar Rp.786.390.650,-. Untuk mencapai tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini telah dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah terealisasi sebesar Rp.693.966.657,- atau mencapai 88,70%, dengan realisasi terkecil adalah pada kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu sebesar 45,84 %. Hal ini disebabkan adanya penghematan dalam pemakaian energi di BKD Provinsi Jambi. Secara umum tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan program ini karena kegiatan yang bersifat fasilitasi terhadap daya dukung kelembagaan BKD Provinsi Jambi yang secara rutin merupakan pembiayaan operasional yang tiap bulan dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan daya dukung pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian BKD Provinsi Jambi melalui ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan maupun mobilitas, dengan total anggaran sebesar Rp.608.486.825,-. Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- g. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Program ini telah terealisasi sebesar Rp.513.533.203,- atau mencapai 84,40 % dengan realisasi terkecil pada kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional yaitu sebesar 50,50%. Hal ini terjadi

karena tahun 2012 kegiatan pemeliharaan hanya bersifat berkala dan tidak perlu melakukan perbaikan berat sehingga terdapat efisensi anggaran pada program ini.

Mengingat program ini bersifat dukungan teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini juga tidak menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang bersifat fasilitasi terhadap daya dukung kelembagaan BKD Provinsi Jambi yang secara rutin merupakan pembiayaan operasional, telah disediakan pendanaannya dan telah diprogramkan secara berkala.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran program peningkatan disiplin aparatur adalah terwujudnya sosok PNS yang taat dan patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku serta tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Melalui program ini diharapkan setiap PNS mengerti akan kewajiban dan haknya. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, kedisiplinan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembinaan dan pengembangan disiplin PNS pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini, telah dianggarkan dana sebesar Rp.42.375.000,- untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. Adapun realisasi program ini adalah sebesar Rp.38.369.500,- atau mencapai 90,55% dan secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Untuk mencapai tujuan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, telah dianggarkan dana sebesar Rp.718.183.025,- dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu: Kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.

Dalam pelaksanaannya program ini telah terealisasi sebesar Rp.413.641.875,- atau mencapai 57,60 % dengan realisasi terkecil pada kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural sebesar 43,09 %. Kecilnya realisasi untuk kegiatan ini dipengaruhi oleh usulan calon pejabat struktural eselon II dari kabupaten/kota yang lebih rendah dari tahun 2011. Dengan berkurangnya usulan pemerintah kabupaten/kota, maka proses seleksi menjadi berkurang sehingga diperoleh efisiensi anggaran. Gambaran kegiatan seleksi dan jumlah calon pejabat struktural yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.65 Rekapitulasi Konsultasi Pengangkatan Calon Pejabat Struktural Kabupaten/Kota di BKD Provinsi Jambi Tahun 2011 dan 2012.

No	Kabupaten / Kota	Jumlah	
		2011	2012
1.	Kabupaten Kerinci	-	12 orang
2.	Kabupaten Merangin	3 orang	16 orang
3.	Kabupaten Sarolangun	19 orang	9 orang
4.	Kabupaten Bungo	-	10 orang
5.	Kabupaten Tebo	27 orang	10 orang
6.	Kabupaten Batanghari	-	4 orang
7.	Kabupaten Muaro Jambi	15 orang	18 orang
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	46 orang	12 orang
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	-	5 orang
10.	Kota Sungai Penuh	27 orang	11 orang
11.	Kota Jambi	6 orang	14 orang
J U M L A H		143 orang	125 orang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Sementara itu, proses penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Jambi dalam melakukan asesment bagi calon pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dilaksanakan dari bulan Januari s/d September 2012. Hasil penilaian tersebut ditindaklanjuti dengan pengangkatan pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, meliputi: pejabat eselon II sebanyak 29 orang, pejabat eselon III sebanyak 105 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 258 orang serta pejabat eselon V sebanyak 1 orang. Sedangkan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional adalah sebanyak 115 orang.

Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS, dipergunakan bagi PNS yang mengikuti diklat,

bintek, dan diklatpim dengan pengiriman sesuai dengan kebutuhan. Sementara kepesertaan Diklatpim Tk. II Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Bidang SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklatpim Tk. II sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur merupakan inti pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di Provinsi Jambi. Program ini bertujuan membangun sistem pembinaan PNS yang komprehensif dan membangun sistem pola karir PNS yang terstruktur. Untuk mencapai sasaran program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan. Dana yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah sebesar Rp.2.741.415.600,- dan telah terealisasi sebesar 92,52%. Gambaran pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aparatur, dapat diuraikan berikut ini.

1) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS/Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

Pada kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor : 800-632 Tahun 2011 dan Nomor : 141 PMK.01/2011

tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Moratorium/Penundaan Penerimaan PNS dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan efisiensi anggaran. Penundaan Sementara Penetapan Tambahan Formasi untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Untuk tahun ini kegiatan seleksi penerimaan CPNS/pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini dipergunakan untuk penyelesaian proses administrasi pengangkatan tenaga honorer di Kantor Badan Kepegawaian Negara. Di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tenaga honorer yang masuk data base sebanyak 238 orang, sedangkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BKN yang memenuhi syarat berjumlah 178 orang dan sampai sekarang masih dalam proses penetapan NIP.

2) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan Data SAPK.

Melalui kegiatan ini telah dibangun Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang terkoneksi antara BKD kabupaten/kota dengan BKD Provinsi Jambi serta Badan Kepegawaian Negara. Dari sistem ini dapat mempermudah akses dan menyederhanakan proses administrasi kepegawaian dari BKD kabupaten/kota ke BKD Provinsi Jambi dan ke BKN melalui jaringan internet (teknologi informasi). Melalui sistem ini pula dapat diperoleh validitas data kepegawaian di lingkup

pemerintah Provinsi Jambi, dalam bentuk daftar urut kepangkatan (DUK) dan untuk perencanaan pengembangan pegawai. Sesuai amanah Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008, bahwa untuk proses pemberian Nomor Indentitas PNS (NIP), Pemberian Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS, Penetapan Keputusan Pensiun PNS dan Peremajaan Data Kepegawaian PNS dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Komputer yang terintegrasi antara BKN, Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah Daerah (BKD).

Diharapkan dengan perangkat jaringan Speedy mendukung SAPK, akan mempercepat proses validasi data PNS yang akan dipergunakan penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Program pembuatan kartu elektronik mewujudkan Nomor Identitas Tunggal bagi PNS di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi penggandaan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selain itu, PNS dapat menggunakan KPE tersebut untuk layanan lain seperti mengambil gaji di anjungan tunai mandiri (ATM) bank pengelola, kesehatan, tabungan hari tua, tabungan perumahan serta transaksi keuangan lainnya. Pada tahun 2012 KPE yang sudah diterbitkan sebanyak 62.672 kartu yang diperuntukkan bagi PNS dalam Provinsi Jambi.

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring dapat dideteksi permasalahan dalam

pelaksanaan tugas BKD sehingga upaya penyelesaian permasalahan dapat lebih awal dan lebih efektif. Melalui kegiatan evaluasi dapat diketahui titik lemah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD, sehingga menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

4) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Kegiatan pemberian satyalancana karya satya sampai dengan akhir bulan November 2012 telah diusulkan untuk 10 tahun sebanyak 72 orang, 20 tahun sebanyak 199 orang, dan 30 tahun sebanyak 41 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti sebanyak 374 orang, dengan rincian cuti tahunan sebanyak 43 orang, cuti hamil sebanyak 0 orang, cuti melaksanakan umroh / haji sebanyak 139 orang, dan cuti sakit sebanyak 28 orang.

Untuk kegiatan pembuatan Kartu Istri dan Kartu Suami (Karis/Karsu) untuk Karis sebanyak 154 orang dan Karsu sebanyak 175 orang, sedangkan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 186 orang.

Tabel 4.66 Rekapitulasi Pemberian Satyalancana Karya Satya, Cuti Karis/Karsu Dan Karpeg Bagi PNS Tahun 2011-2012

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	
		Tahun 2011	Tahun 2012
1	Satyalancana karya satya :		
	10 Tahun	121 Orang	72 Orang
	20 Tahun	305 Orang	199 Orang
	30 Tahun	66 Orang	41 Orang
2	Cuti	68 Orang	374 Orang
3	Kartu Isteri	153 Orang	154 Orang
4	Kartu Suami	135 Orang	175 Orang
5	Kartu Pegawai	196 Orang	186 Orang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

5) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terhadap penyelesaian kasus-kasus PNS, dapat dikategorikan 3 (tiga) jenis; antara lain hukuman disiplin ringan sebanyak 5 orang berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hukuman disiplin sedang tidak ditemukan serta hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 4 (empat) orang.

6) Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Pada Tahun 2012, seleksi penerimaan Calon Praja IPDN telah melalui 5 (lima) tahapan yaitu seleksi administrasi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, dan seleksi akademik. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 382 orang; yang memenuhi syarat psikologi sebanyak 118 orang, yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 105 orang, yang memenuhi syarat kesemaptaaan sebanyak 100 orang. Sedangkan yang dinyatakan lulus seleksi akademik sebanyak 64 orang dan dinyatakan berhak mengikuti PANTUKHIR di Kampus IPDN Jatinangor. Setelah pelaksanaan PANTUKHIR, jumlah putra-putri asal Provinsi Jambi yang dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN sebanyak 64 orang.

7) Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan koordinasipembinaan dan pengembangan aparatur, BKD Provinsi Jambi

melaksanakan 2 kegiatan yaitu ujian dinas dan rapat koordinasi kepegawaian. Kegiatan ujian dinas dikelompokkan menjadi ujian dinas tingkat I yang diikuti oleh 183 orang dan ujian dinas tingkat II yang diikuti 107 orang peserta. Selain ujian dinas, kegiatan yang diselenggarakan yaitu rapat kerja kepegawaian se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada Bulan Nopember 2012.

8) Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi PNS

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas belajar. Pada tahun anggaran 2012, PNS tugas belajar yang masih dibiayai Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 19 orang, meliputi 1 orang untuk PNS tugas belajar Strata1, 9 orang untuk PNS tugas belajar Strata 2, dan 9 orang untuk PNS tugas belajar Strata 3.

9) Kegiatan Seleksi Kenaikan Pangkat dan Proses Seleksi Pensiun Bagi PNS

Pada periode 1 April 2012, jumlah PNS yang diusulkan kenaikan pangkat dalam Provinsi Jambi sebanyak 1.428 orang terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebanyak 692 orang sedangkan PNS di dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 736 orang. Pada periode 1 Oktober 2012 PNS dalam Provinsi Jambi yang mengajukan kenaikan pangkat sebanyak 1.023 orang, terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi sebanyak 640 orang sedangkan untuk PNS dilingkungan Pemerintah

Provinsi Jambi 383 orang. Jumlah PNS yang mengajukan usulan kenaikan pangkat pada tahun 2012 sebanyak 2.451 orang.

Penyelesaian usul pensiun PNS dilakukan ke BKN Regional VII Palembang sebanyak 106 orang dan BKN Pusat dan Sekretariat Negara sebanyak 15 orang. Total PNS yang pensiun pada tahun 2012 sebanyak 121 orang.

10) Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Kegiatan ini telah dilaksanakan, dengan prioritas CPNS Daerah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah diangkat menjadi PNS, baik melalui pelamar umum maupun dari tenaga honorer sebanyak 811 orang.

11) Kegiatan Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan disiplin bagi PNS. Melalui pemahaman tersebut diharapkan dapat mewujudkan PNS yang disiplin, handal, profesional dan bermoral. Selain itu, melalui penguasaan aturan disiplin bagi PNS dapat menggugah kesadaran dan semangat sebagai penyelenggara pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan ini mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Selama Tahun 2012, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan lokasi

di Aula Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dengan jumlah peserta 100 orang, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dan Aula BKD Provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang.

12) Kegiatan Proses Seleksi Penerimaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Kegiatan seleksi calon mahasiswa STKS Bandung merupakan program kerja sama antara STKS dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk pengiriman peserta pendidikan dari Provinsi Jambi ke Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Tahun 2012 merupakan tahun pertama pelaksanaan kerjasama tersebut, dimana berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan, dari 202 orang jumlah pelamar sebanyak 10 orang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa STKS Bandung. Adapun tahapan seleksi yang diikuti peserta meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi wawancara dan penentuan akhir. Pembiayaan bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima menjadi Mahasiswa STKS-Bandung sebanyak 10 orang tersebut, dalam bentuk bantuan biaya tugas belajar dari dana APBN melalui mekanisme Cost Sharing sebanyak 3 orang sedangkan 7 orang di bebaskan melalui pembiayaan sendiri (swadana).

13) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

Bentuk kegiatan ini adalah penyelesaian proses administrasi mutasi dan kenaikan gaji berkala bagi PNS Pemerintah Provinsi Jambi. Proses mutasi yang diproses

BKD Provinsi Jambi meliputi mutasi PNS dalam Provinsi Jambi, mutasi antar provinsi, mutasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat maupun sebaliknya. Sampai dengan akhir tahun 2012 PNS yang mutasi yang pengelolaan administrasinya dilakukan BKD Provinsi Jambi sebanyak 542 orang. Selain itu BKD Provinsi Jambi juga melakukan proses administrasi kenaikan gaji berkala bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Rekapitulasi proses mutas PNS dalam provinsi Jambi yang dikelola BKD Provinsi Jambi dapat digambarkan pada tabel berikut

Tabel 4.67 Rekapitulasi Mutasi PNS di Provinsi Jambi Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1	Dari Provinsi Lain ke Provinsi Jambi	13 Org
2	Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi	112 Org
3	Antar Instansi (SKPD) dalam Provinsi Jambi	47 Org
4	Dari Provinsi Jambi ke Provinsi Lain	2 Org
5	Dari Prov.Jambi ke Kab/Kota dlm Prov.Jambi	46 Org
6	Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi	255 Org
7	Dari Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi Jambi	23 Org
8	Dari luar Provinsi Jambi ke Kabupaten/Kota	44 Org
JUMLAH		542 Org

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

14) Kegiatan Penyusunan Formasi CPNS

Kegiatan penyusunan formasi CPNS ditetapkan berdasarkan perhitungan analisis jabatan maupun

analisis beban kerja yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Melalui kedua analisis tersebut diketahui kebutuhan jumlah dan jenis pegawai negeri sipil disetiap satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jambi untuk mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi serta tanggungjawabnya. Menindaklanjuti moratorium penerimaan CPNS daerah, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jambi belum mengusulkan formasi CPNS 2013.

4.1.18.2 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Dalam rangka percepatan terwujudnya Provinsi Jambi yang ekonominya Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (Jambi EMAS) 2015, perlu didukung sumberdaya aparatur pemerintah yang kompetitif, profesional dan bermoral. Pembentukan aparatur yang kredibel tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan simultan sehingga terbentuklah aparatur yang mau dan mampu melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasil guna. Tugas pembentukan karakter PNS Provinsi Jambi yang handal dibebankan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bandiklatda). Pengejawantahan tugas pokok dan fungsi Bandiklatda tersebut, pada tahun anggaran 2012 Bandiklatda diberikan pendanaan melalui APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 9.211.397.610,- yang dijabarkan kedalam 6 program.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi perkantoran berupa perlengkapan, sarana dan parasarana yang berhubungan dengan administrasi kantor. Program ini merupakan dukungan administratif bagi setiap unit kerja di Bandiklatda sehingga membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Jambi. Program ini bersifat rutinitas dan dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2012, program ini memperoleh dana sebesar Rp. 1.143.725.780,- yang telah terealisasi sebesar 95 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana serta mobilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2012, program ini menerima dana sebesar Rp. 2.777.676.750,- dan telah terealisasi mencapai 98,10 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur bertujuan membentuk aparatur yang taat dengan peraturan perundang-undangan, berdisiplin dan memiliki loyalitas terhadap pemerintah dan pimpinannya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan pakaian dinas PNS Bandiklatda. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp. 34.900.000,- dan telah terealisasi seluruhnya.

4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS Bandiklatda Provinsi Jambi, perlu dilaksanakan pelatihan dan kursus singkat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS. Mendukung program tersebut pada tahun 2012 disediakan dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengiriman PNS Bandiklatda mengikuti

pelatihan dan kursus singkat. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, dana program ini terealisasi seluruhnya.

5. Program Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana gedung yang representatif. Mengingat kondisi fisik bangunan yang dikelola Bandiklatda Provinsi Jambi telah berumur lebih dari 30 tahun, maka untuk menoptimalkan manfaat gedung dan menjamin keselamatan penggunaan gedung, diperlukan rehab sedang/berat gedung kantor. Untuk itu, pada tahun 2012 disediakan dana sebesar Rp. 3.068.542.830,- untuk melakukan rehab sedang/berat gedung Bandiklatda Provinsi Jambi. Kegiatan ini telah terealisasi fisik sebesar 100 %, sedangkan realisasi keuangan mencapai 89,00 %.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelaksanaan program ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok diklat, yaitu kelompok diklat manajemen pemerintahan, kelompok diklat fungsional, kelompok diklat teknis dan kelompok diklat struktural. Program ini menerima anggaran dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 sebesar Rp. 2.136.552.250,- yang telah terealisasi mencapai 83 %. Selain dana APBD Provinsi

Jambi, Bandiklatda juga mengelola dana kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi untuk kegiatan Prajabatan Golongan I dan II bagi CPNS dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Jumlah kontribusi untuk kedua kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.532.000.000,- dan telah dipergunakan sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok diklat yang diselenggarakan Bandiklatda Provinsi Jambi dapat diuraikan berikut ini.

a. Kelompok Diklat Manajemen Pemerintahan

Program Diklat Manajemen Pemerintah ditujukan untuk mendukung kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja. Program ini didukung beberapa kegiatan diklat, antara lain : Diklat Sekretaris Desa, Diklat Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Peningkatan Kompetensi Lurah dan Diklat Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP). Anggaran yang disediakan untuk Program Diklat Manajemen Pemerintahan sebesar Rp. 362.999.450,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, realisasi anggaran untuk program ini mencapai 311.580.950,- atau mencapai 85,84 %. Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sehingga meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain : kurangnya ketersediaan tenaga pengajar dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kurangnya minat aparatur sekretaris desa untuk mengikuti Diklat dan tidak terdatanya para peserta yang mengikuti diklat tersebut. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Perlunya penambahan tenaga Widyaiswara, Harus mengadakan sosialisasi pada aparatur dan Harus mengadakan pendataan peserta yang telah mengikuti Diklat tersebut.

b. Kelompok Diklat Fungsional

Program ini bertujuan untuk mendukung kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp 432.473.900,- dengan realisasi sebesar Rp 331.371.550,- atau mencapai 76,62 %. Implementasi program ini dilaksanakan dalam bentuk Diklat Training of Trainer (ToT) Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Diklat Training of Trainer (ToT) Penatausahaan Aset Daerah, Diklat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK), Diklat Penyusunan Modul, dan Diklat MOT. Dengan terlaksananya program ini dapat meningkatkan kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya.

c. Kelompok Diklat Teknis

Untuk mencapai sasaran Program Diklat Teknis didukung oleh kegiatan, Diklat teknis Bendahara Keuangan Daerah pada SKPD, Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Diklat Operator Komputer, Diklat

Perencanaan Tahunan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp 309.719.400,- dengan realisasi sebesar Rp 209.349.150,-. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, masih kurangnya koordinasi tentang program kegiatan yang dilaksanakan pada SKPD, masih kurangnya minat aparatur yang ikut serta dalam Pengelola Barang Daerah, Masih kurangnya minat aparatur mengikuti Diklat Perencanaan.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Harus mengadakan koordinasi dan sosialisasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan pada SKPD.

d. Kelompok Diklat Struktural

Tujuan dari program Diklat Struktural adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur para pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung kegiatan, Diklat Pim Tk IV, Diklat Pim Tk III, Diklat Prajabatan Gol I dan II , Diklat Prajabatan Gol III,. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp 1.022.754.500,- dengan realisasi sebesar Rp 915.926.600,- atau sebesar 89,55 %.

Dengan terlaksananya program ini, dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial

bagi para pejabat di lingkup Provinsi Jambi. Bagi para calon pegawai negeri sipil, diklat Prajabatan ini memberikan penguatan kepada kemampuan teknis pemerintahan dan penguatan sikap dan perilaku sehingga cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

4.1.19. Komunikasi Dan Informatika

4.1.19.1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dalam pelaksanaan sehari-harinya dibantu oleh Sekretariat KPID Provinsi Jambi, dimana Sekretariat KPID Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi dan mempunyai fungsi menjembatani dan memfasilitasi tugas dan fungsi komisioner dengan tugas fungsi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Perencanaan Strategis KPID Provinsi Jambi Pemerintah Daerah berkomitmen dalam rangka penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2003 tentang Penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. terutama menyangkut kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan APBD Provinsi Jambi kedepan.

Sesuai dengan Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Penyiaran yang Berkeadilan,

Bermartabat dan Bermanfaat guna Mendukung Jambi yang Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015”

1. Program dan Kegiatan

Dalam mengimplementasikan perencanaan KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dalam penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Selama tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai Program kegiatan dalam rangka terciptanya mutu penyiaran yang berkualitas serta terciptanya hubungan antar lembaga dan masyarakat.

Dalam rangka mendukung kebijakan Visi KPID Provinsi Jambi tahun 2012 di dukung berbagai Program dengan anggaran Rp. 2.799.037.670,- sampai Desember 2012 telah terealisasi sebesar Rp.2.632.744.785,- atau 94,06 %.

2. Realisasi Program Kegiatan

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa.

Secara umum pelaksanaan Program ini dalam rangka menciptakan sistem penyiaran daerah dengan memberikan pelatihan terhadap pengkajian sistim informasi kepada lembaga peyiar yang ada di provinsi Jambi dan aparaturnya pemerintah daerah sehingga dapat memberikan informasi dan isi siaran yang bersifat memdidik dan bermutu serta dapat terselenggaranya

pengawasan isi siaran yang didukung alat studio yang memadai.

b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi,

Tujuan Program ini dalam rangka tertibnya dan teraturnya isi siaran dengan pembinaan lembaga penyiaran dan pemirsa dan pendengar radio dengan memberikan petahihan bagi Guru BP, Siswa SMK dan SMA se Provinsi Jambi yang dapat mengurangi pengaruh negatif dari perkembangan sistim infomasi dewasa ini bagi siswa yang merupakan pemimpin bangsa yang akan datang serta melaksanakan evaluasi dengar pendapat kepada 14 lembaga penyiaran.

c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat dan bermartabat dan menciptakan serta hubungan lembaga penyiaran yang baik dan bermutu diperlukan dukungan semua pihak dan tanggungjawab bersama tidak semata-mata tanggung jawab KPID tanpa campur tangan lembaga Pemerintah, masyarakat dan penyiar dan tidak dipungkiri lagi pad saat ini media televisi atau radio banyak di akses masyarakat kerena penyiarannya dikemas menarik dan mudah dicermati baik sebagai media komunikasi dan informasi untuk itu perlu pengawasan yang terpadu antar antar lembaga dan masyarakat. Untuk itu telah dilakukan kerjasama antar lembaga penyiar dan KPID dengan melaksanakan MoU dengan IAIN, MUI, KNPI dan KPU serta melaksanakan literasi media dengan Dharma Wanita, PKK, Bayangkari

dan Guru-guru Konseling SMA/SMK Kota Jambi serta telah dilakukan survey pemirsa TV dan pendengar radio di 8 kecamatan Kota Jambi dan expose ke lembaga penyiaran dan lembaga lainnya di Provinsi Jambi.

d. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

Seraca umum Program ini bertujuan untuk menciptakan mutu penyiaran dan hubungan antar lembaga penyiaran dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Publikasi dengan melaksanakan :

- b. Pengadaan Website, SMS Gateway serta ILM TV dan Radio.
- c. Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik serta melaksanakan Lomba Siaran & LCC Lembaga penyiar serta gerakan memonton sehat dan pendengar santun.

4.1.19.2 Kantor PDE

Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi merupakan salah satu Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga – lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok menyusun data dan informasi secara sistematis, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk menunjang

proses pengambilan keputusan yang berdaya guna berhasil guna serta peningkatan kualitas dan kinerja dari Kantor PDE.

1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok Kantor Pengolahan Data dan Elektronik sebagai penyusunan data dan informasi secara sistematik dengan sasaran tersedianya data dan sistem Teknologi Informasi (TIK) yang terintegrasi dan dapat dipergunakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan pengambilan kebijakan di daerah, untuk itu telah dilaksanakan berbagai program dengan dana anggaran sebesar Rp. 6.814.318.200,- (enam milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.614.658.877,- atau 97,07 %.

2. Realisasi Program Kegiatan

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan meningkatkan pengguna internet dan peningkatan disiplin aparatur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur dengan didukung kelengkapan peralatan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta memberikan pembinaan kepada setiap SKPD untuk lebih memahami tentang sistem informasi yang telah disediakan oleh KPDE sehingga sistem informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pelaksanaan program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa dituangkan kedalam beberapa kegiatan :

- a) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, untuk pemanfaatan jaringan tersebut pemerintah daerah pada tahun 2012 telah menganggarkan pengadaan mesin absensi/hendkey dan pengadaan hardware dan software sebanyak 19 unit untuk SKPD dalam rangka memantau disiplin dan ketaatan PNS mematuhi jam kerja dan tahun 2012 seluruh SKPD dalam Provinsi Jambi telah tersambung dan telah terintegrasi melalui jaringan internet/intranet yang bekerja sama dengan PT. Lintas Arta selaku provider penyedia Bandwith pada tahun 2012 terdapat penambahan Bandwith 5 Mbps menjadi 10 Mbph.

Tabel 4.68 Pemasangan Hendkey/Mesin Absensi pada SKPD Berbasis Webbase secara Online

No	Unit Kerja	No	Unit Kerja
1.	Biro Pemerintahan	11	Dinas Pekerjaan Umum
2	Biro Kesramas	12	Dinas Pendidikan
3	Biro Kebang dan SDA	13	Dinas Pemuda dan Olah
4.	Biro Hukum	14	Rumah Sakit Raden Mattaher
5	Biro Organisasi	15	Rumah Sakit Jiwa
6.	Biro Humas	16	Badan Kepegawaian Daerah
7	Biro Umum	17	Bappeda
8	Biro Keuangan	18	Sekretariat DPRD
9.	Biro Pengolahan Aset & Kekayaan	19	Satpol PP
10	Dinas Pendapatan Daerah		

Sumber : Kantor PDE Provinsi Jambi

- b) Kegiatan Pengkajian dan Pemafaatan Sistem Informasi dan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Pada pelaksanaan

kegiatan tersebut dilaksanakan pembangunan dan tersedianya perangkat Situation Rom dalam upaya penyediaan data dan informasi yang akurat guna sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan oleh Bapak Gubernur Jambi serta serta penambahan dari 11 tahun 2011 menjadi 14 aplikasi tahun 2012 yang menjadi kebutuhan dari SKPD:tersebut beberapa aplikasi yang ada sekarang sebagai berikut :

Tabel 4.69 Aplikasi Yang telah dibangun oleh KPDE

No	Aplikasi	SKPD Pemakai
1.	Sistim Informasi Kepegawaian dan Penggajian	BKD
2	Sistim Informasi Penindutrsian	Biro Perindag
3	Sistim Informasi Pemerintahan	Biro Pemerintahan
4.	Sistem Informasi Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
5	Sistem Informasi Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Dinas Budpar
6.	Sistem Informasi ESDM	Dinas ESDM
7	Sistem Informasi Pertanian	Dinas Pertanian TP
8	Sistem Informasi Perkebunan	Dinas Perkebunan
9.	Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
10	Sistem Informasi Peternakan dan Hewan	Dinas Peternakan dan Hewan
11	Sistem Informasi Siskum	Biro Hukum
12	Sistem Informasi SISTAP	Kota Jambi
13	Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
14	Sistem Informasi e-Office	Sekretariat Ktr Gubernur

Sumber : Kantor PDE Provinsi Jambi

Terselenggaranya program ini tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana peralatan yang ada dan kerja sama antar instansi terkait, guna pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun semaksimal mungkin sehingga dapat membantu SKPD dalam mengabilan keputusan yang tepat sasaran.

4.1.20. Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam rangka mewujudkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sebagai yang terdepan dalam penyajian informasi iptek dan kebudayaan serta sebagai lembaga yang profesional dan proporsional dalam tatanan Pemerintah daerah dibidang Perpustakaan dan kearsipan, maka dilaksanakan beberapa program yang diharapkan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi yaitu : 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, dan 4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

4.1.20.1 Kearsipan

Di bidang kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain : terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metoda pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat dalam penemuan kembali, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan perpustakaan dan kearsipan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program ini bertujuan untuk memilih tenaga pengelola arsip berprestasi terbaik tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk diikutkan pada pemilihan arsiparis tingkat nasional. Adapun masukan untuk program ini adalah dana sebesar Rp36.500.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp35.900.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Untuk mendukung tujuan program, dilakukan dengan melaksanakan Kegiatan Pemilihan Tenaga Pengelola Arsip Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi Jambi, dimana dengan melaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat tercapai perbaikan sistem administrasi berbasis pengelola arsip berprestasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada tenaga pengelola arsip untuk meningkatkan pengetahuan cara mengelola dan menata arsip sesuai ketentuan serta memberikan penghargaan kepada pemenang.

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan memanfaatkan arsip in aktif secara optimal, menghimpun data-data tentang kondisi fisik arsip statis serta menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kajian sistem administrasi kearsipan berkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2005.

Masukan dari program ini adalah dana sebesar Rp385.934.800,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp342.721.850,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk mencapai tujuan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu : 1) Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Aset Provinsi Jambi, 2) Kegiatan pelaksanaan Penelusuran, Akuisisi Arsip Pemilu/Pemilukada dan Kartografi, 3) Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah, 4) Kegiatan Penyuluhan Preservasi Bahan Perpustakaan, dan 5) Kegiatan Pemusnahan dan Akuisisi Arsip Badan/Instansi Daerah.

Adapun capaian dari program ini salah satunya adalah bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip, dimana pada tahun 2011 tercatat 539 foto, 100 kartografi, dan 883 buku, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 648 foto, 367 kartografi, dan 883 buku/konvensional. Pemanfaatan arsip statis ini adalah untuk menunjang atau mendukung kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan serta informasi kepada para pengguna merupakan wujud nyata dari lembaga kearsipan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal dan nasional. Sementara pemberkasan arsip in aktif pada tahun 2012 sebanyak 950 berkas, mengalami penurunan jumlah dibandingkan pada tahun 2011 yaitu sebanyak 5.062 berkas. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tentang pentingnya arsip, sehingga perlu dilakukan penyelamatan dan pemanfaatan arsip secara optimal.

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi masa lampau yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan apresiasi dan pengetahuan masyarakat terhadap arsip sejarah Jambi serta mengetahui tentang pentingnya fungsi arsip.

Masukan dari program ini adalah dana sebesar Rp158.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp146.298.300 dan realisasi fisik sebesar 100%. Implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan, yaitu : 1) Pameran Kearsipan, 2) Rapat Koordinasi Kearsipan, 3) Pelaksanaan Layanan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jambi, dan 4) Pembinaan SDM Kearsipan.

Capaian dari program ini antara lain yaitu terlaksananya Pameran Kearsipan sebanyak 4 kali, dimana diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal kearsipan dan mengenal khazanah arsip secara lebih mendalam, disamping itu pula dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan sejarah. Capaian lain dari program ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis bagi tenaga pengelola kearsipan sebanyak 50 orang. Dengan diadakannya bintek tersebut dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan manajerial kepada pengelola arsip yang sesuai kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan peran pengelola kearsipan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4.1.20.2 Perpustakaan

Peran Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk bersaing perlu meningkatkan kualitas pustakawan dan layanan perpustakaan sehingga dapat mendorong masyarakat yang belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan serta meletakkan landasan pembentukan watak kepribadian, pengamalan nilai-nilai budaya dan pola kebangsaan melalui pemberdayaan informasi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung peningkatan kualitas perpustakaan, terdapat 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

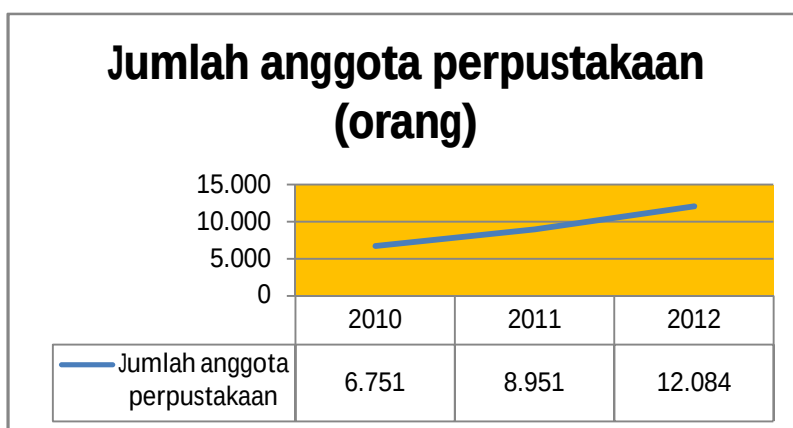
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan SDM pengelola dan fungsional pustakawan, meningkatkan koleksi bahan pustaka yang variatif, meningkatkan pelayanan perpustakaan keliling, meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat Jambi serta meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, melestarikan informasi tentang kebudayaan daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional agar dapat selalu ada dan dapat diketahui dan bermanfaat bagi generasi berikutnya, melaksanakan pembinaan dan monitoring pendataan pelaporan perpustakaan, dan memelihara buku-buku perpustakaan.

Masukan dari program ini adalah dana sebesar Rp1.222.684.650,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.194.381.750,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan dengan didukung beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, 2) Pengembangan Minat Baca dan Pengkajian Budaya Baca, 3) Pengembangan Koleksi Deposit dan Pelestarian Karya Cetak/Karya Rekam Khazanah Budaya Rakyat Jambi, 4) Pengembangan, Pengolahan Sistem Otomasi dan Koleksi Bahan Perpustakaan, 5) Evaluasi, Pelaporan Pendataan Anggota Perpustakaan NPP, 6) Bintek Tenaga Pengelola Kearsipan, dan 7) Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip.

Capaian dari program ini adalah meningkatnya jumlah anggota perpustakaan dari 8.951 orang di tahun 2011 menjadi 12.084 orang pada tahun 2012, demikian juga dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang meningkat menjadi 145.707 orang pada tahun 2012 dari 132.461 orang pada tahun 2011.

Gambar 4.16 Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.17 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Dengan terlaksananya program ini, meningkatnya jumlah pengunjung serta terwujudnya perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan Perpustakaan sehingga terwujudnya pelayanan kepada Pemustaka. Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat sehingg tercapainya tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca. Terlaksananya pengembangan koleksi deposit serta koordinasi sehingga terwujudnya jumlah koleksi deposit dan pendayagunaan. Terlaksananya seleksi Buku Perpustakaan; Jumlah Bahan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dan penerbitan litelatur sekunder sehingga tersedianya Koleksi Bahan Perpustakaan yang variatif. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi Perpustakaan sehingga terwujudnya masyarakat gemar membaca.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan, masih adanya kesan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan hanya tempat menyimpan buku. Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan. Rendahnya apresiasi terhadap pustakawan.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut antara lain, Peningkatan koleksi perpustakaan, Peningkatan layanan perpustakaan, Peningkatan fasilitas layanan perpustakaan dan Pelestarian fisik bahan Perpustakaan, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Pameran perpustakaan, Publikasi melalui media cetak dan elektronik, Penyelenggaraan lomba dibidang perpustakaan, Melakukan Bimbingan dan menumbuhkan budaya baca dan menanamkan kecintaan anak sejak dini cinta terhadap Perpustakaan serta terus meningkatkan apresiasi terhadap pustakawan.

Tabel 4.70 Capaian bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi Jambi tahun 2012 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

No	Uraian	2011	2012
1.	Jumlah anggota perpustakaan	8.951 orang	12.084 orang
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	132.461 orang	145.707 orang
3.	Jumlah koleksi buku	159.951 buku	95.054 (judul) 162.002 (eks)
4.	Pengelola kearsipan (bintek arsip)	40 orang	50 orang
5.	Jumlah Pustakawan	24 orang	22 orang
6.	Jumlah buku yg telah diperbaiki	4.500 eks	4.395 eks
7.	Fumigasi yg dilaksanakan	1 kali	2 kali 6.500 eks bahan pustaka 3.500 berkas/400 box arsip
8.	Penjilidan majalah dan koran	20 jilid	18 jilid
9.	Jumlah karya cetak yg dpt dikumpulkan	520 eks	660 eks
10.	Jumlah entry literatur skunder	320 judul	600 judul
11.	Jumlah buku yg dialih mediakan	100 judul	100 judul
12.	Pengadaan bahan pustaka	3.865 eks	5.138 eks
13.	Pengolahan bahan pustaka	3.865 eks	5.138 eks
14.	Input data bibliografi pd pangkalan data (otomasi)	1.800 eks	2.440 eks
15.	Penyusunan literatur skunder :		
	- Katalog induk daerah	464 entry	714 entry
	- Daftar tambahan buku	290 entry	315 entry
	- Bibliografi khusus beranotasi	70 entry	222 entry
	- Abstrak laporan penelitian	94 entry	72 entry
16.	Pemberkasan arsip in aktif	5.062 berkas	950 berkas
17.	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	539 foto	648 foto
		100 kartografi	367 kartografi
		883 buku	883 buku/konvensional
18.	Telaksananya pameran kearsipdan	4 kali	4 kali
19.	Jumlah perpustakaan		
	a. Perpustakaan umum	11 perpustakaan	11 perpustakaan
	b. Perpustakaan perguruan tinggi	10 perpustakaan	24 perpustakaan
	c. Perpustakaan sekolah :		
	- SMA/MA	124 perpustakaan	124 perpustakaan
	- SMP/MTs	220 perpustakaan	294 perpustakaan
	- SD/MI	466 perpustakaan	730 perpustakaan
	d. Perpustakaan khusus	181 perpustakaan	181 perpustakaan
	e. Perpustakaan lainnya/desa	338 perpustakaan	809 perpustakaan

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

a. Kendala dan Masalah

Adapun beberapa kendala dan permasalahan saat ini adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kualitas tenaga yang memiliki kemampuan dan kompetensi secara profesional pada masing-masing bidang, khususnya pada sub bidang perencanaan.
- Belum mantapnya jaringan nasional antara Perpustakaan Nasional RI dengan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten / Kota maupun dengan Perguruan Tinggi se Indonesia.
- Belum optimalnya sinergisitas dan kerjasama pengembangan perpustakaan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten / Kota dan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kementrian Agama dan Kementrian / lembaga lainnya.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perpustakaan disemua jenis perpustakaan dan kearsipan.
- Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan.
- Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung layanan perpustakaan dan kearsipan, masih adanya anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga Perpustakaan dan kearsipan hanya sekedar tempat menyimpan buku dan arsip.
- Sebagian masyarakat masih suka mendengar dan minta pendapat kepada orang-orang tertentu daripada mengambil rujukan / baca buku.

- Belum lengkapnya koleksi Bahan Perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk.
- Masih kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap keberadaan Perpustakaan Umum maupun Perpustakaan Desa/ Kelurahan.
- Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan pada sebagian besar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi belum dikelola dengan baik.
- Pemahaman dan kesadaran terhadap perpustakaan dan kearsipan relatif masih kurang.
- Masih Terbatasnya peraturan perundang- undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka dan khasanah arsip.
- Masih terpisahnya gedung perpustakaan dan gedung arsip ($\pm$ 1 Km).
- Letak gedung BPAD yang tidak strategis dan tidak representatif.

b. Langkah-langkah antisipatif

Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Memberikan bimbingan teknis (Bintek) kepada tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.

3. Koordinasi dengan Instansi terkait.
4. Rehab/perbaikan gedung kantor Perpustakaan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan.
6. Pengadaan bahan pustaka sebanyak 23,079 eksemplar.
8. Mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat)
9. Akan mengajukan usulan pembangunan gedung Perpustakaan yang refresentatif kepada Perpunas RI serta mengadakan pemilihan Pustakawan Teladan setiap tahun.
10. Melaksanakan survey ke desa-desa yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan keliling dan menyiapkan bahan bacaan yang sesuai dengan kondisi daerah.

4.1.21 Badan Ketahanan Pangan

Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan selama Tahun 2012, dibiayai melalui 2 (dua) sumber dana, yaitu ; APBD Provinsi Jambi dan Dana Dekonsentrasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program prioritas yang dibiayai oleh APBD 1(satu) program yakni :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan, tidak terlepas dari 4 (empat) aspek ketahanan pangan yakni : (1). Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; (2). Aspek distribusi dan harga pangan; (3). Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan (4). Aspek Manajemen Ketahanan Pangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dari keempat aspek tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1.Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, hasil yang telah dicapai antara lain :

- Ketersediaan Energi Tahun 2011 dan 2012.

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2011, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.409 Kkal/Kap/Hari, dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 89,64 hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kkal/Kap/Hari, sedangkan perkiraan ketersediaan energi Tahun 2012 sebesar 3.425 Kkal/Kap/Hari, dengan skor PPH tingkat ketersediaan sebesar 89,90 (Angka Perkiraan), sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 4.71 Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan NBM) Provinsi Jambi Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi		Ketersediaan Ideal
		(Kkal/Kap/Hari)		(Kkal/Kap/Hari)
		2011	2012*	
1.	Padi – Padian	1721	1.729	1.100
2.	Umbi – Umbian	212	218	132
3.	Pangan Hewani	150	154	264
4.	Minyak Dan Lemak	770	770	220
5.	Buah Biji/Berminyak	181	181	66
6.	Kacang – Kacangan	111	112	110
7.	Gula	132	132	110
8.	Sayuran dan Buah	132	133	132
9.	Lain – Lain	-	-	66
	Jumlah	3.409	3.425	2.200

Ket : * Tahun 2012 angka perkiraan
Data : BKP Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat Skor PPH di Tingkat Ketersediaan, energi dari kelompok pangan hewani masih kurang, sedangkan kelompok pangan lainnya telah melebihi standar kecukupan ditingkat ketersediaan.

- Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi.

Pengertian ketersediaan pangan dalam bahasan berikut ini adalah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat yang berasal dari produksi lokal yang merupakan selisih dari produksi daerah dikurangi dengan kebutuhan benih (khusus padi dan palawija), tercecer dan pakan. Ketersediaan pangan dari kemampuan produksi daerah, seperti yang ditampilkan pada

Tabel

4.72.

Tabel 4.72 Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2011 dan 2012 , Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan

No.	Komoditas	Tahun 2011				Tahun 2012			
		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdskan PPH		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdskan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1	Padi	363,563	309,691	296,753	269,775	372,249	317,443	301,178	273,798
2	Jagung	2,547	761	1,43	1,3	24,716	780	1,452	1,32
3	Kedelai	4,803	15,158	25,447	23,133	3,531	15,693	25,826	25,826
4	Kacang Tanah	1,557	919	3,849	3,499	1,52	942	3,906	3,906
5	Kacang Hijau	396	1,157	3,295	2,996	305	1,186	3,344	3,344
6	Ubi Kayu	38,791	20,35	65,731	59,756	35,781	20,859	66,711	60,647
7	Ubi Jalar	60,487	5,928	21,042	19,129	73,876	6,076	21,356	19,414
8	Daging	25,628	23,022	30,092	27,357	29,243	23,828	30,41	27,656
	- Ruminansia	7,305	3,008	5,412	4,92	8,221	3,313	5,493	4,993
	- Non Ruminansia	18,323	20,014	24,68	22,437	21,022	20,515	25,048	22,771
9	Telur	10.497	27.641	38,965	35,423	78,915	27,162	39,546	35,951
10	Ikan	83.179	71.955	106,951	97,228	89.965	73.754	108,546	98,678

Sumber : Badan Ketahan Pangan Provinsi Jambi

Dari Tabel diatas terlihat bahwa konsumsi penduduk Jambi melebihi kebutuhan berdasarkan Pola Pangan Harapan yang mengacu kepada AKG di Tingkat Konsumsi 2.000 Kkal/Kap/Hari, oleh karena itu jika dilihat dari jumlah yang telah dikonsumsi penduduk, ketersediaan bahan pangan dari produksi dari 10 jenis komoditi pangan hanya 3 komoditi yang ketersediaan dari kemampuan produksi belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yaitu kedelai, kacang hijau, dan telur, namun demikian ketersediaan dipasar dapat terpenuhi dari pasokan luar daerah.

Stock (Cadangan Pangan) dalam hal ini untuk bahan pangan beras yang dikelola Perum Bulog berkisar antara 3.000 Ton sampai dengan 8.000 Ton setiap bulan. Stok cadangan pangan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Peningkatan terbesar terjadi pada bulan Juni dan bulan April. Hal ini bervariasi sesuai dengan perkembangan produksi dan kebutuhan bahan pangan wilayah.

Cadangan Beras Pemerintah yang berada di Perum Bulog Divre Jambi kondisi Tahun 2011 dan tahun 2012 seperti pada tabel 4.73 berikut ini :

Tabel 4.73 Stok Cadangan Pangan Beras Pada Perum Bulog Divre
Jambi Tahun 2011 dan 2012

No.	Bulan	Stock/Cadangan Pangan (Ton)		Perkemb (%)
		2011	2012	
1	Januari	2,223.42	5,846.19	163
2	Februari	1,564.26	7,000.79	348
3	Maret	1,729.11	5,138.12	197
4	April	909.14	6,893.57	658
5	Mei	1,660.11	6,266.76	277
6	Juni	1,185.89	6,706.21	466
7	Juli	2,886.73	8,163.67	183
8	Agustus	2,513.22	7,446.20	196
9	September	1,672.02	5,387.84	222
10	Oktober	1,694.46	5,308.97	213
11	November	3,135.29	3,489.30	11
12	Desember	5,014.32	2,819.50	-44

Sumber Data : Perum Bulog Divre Jambi

Sementara itu stok cadangan pangan yang berada di masyarakat sifatnya dinamis dan berada di rumah tangga petani, konsumen, penggilingan (RMU) lumbung pangan dan pedagang. Sedangkan cadangan pangan beras yang berada pada kelompok lumbung pangan yang telah diberdayakan dari tahun 2009 – 2012 diperkirakan sebanyak 30 ton.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi telah dimulai pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012. Jumlah KK miskin hasil DDRT sebanyak 16.245 di 85 Desa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Perkembangan Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi dari tahun 2006 s.d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.74 Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Dari
Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2012

(Rp.000)

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Jumlah KK Miskin	Dana Bansos		Jumlah PMUK (Rp.000)
				Demapan (Rp.000)	Replikasi (Rp.000)	
1.	Sungai Penuh	5	408	300.000	0	300.000
2.	Kerinci	8	1.186	600.000	0	600.000
3.	Merangin	8	861	660.000	150.000	810.000
4.	Sarolangun	9	1.365	660.000	150.000	810.000
5.	Bungo	7	1.182	660.000	150.000	810.000
6.	Tebo	7	1.044	660.000	150.000	810.000
7.	Batanghari	10	1.761	400.000	0	400.000
8.	Muara Jambi	7	1.462	660.000	150.000	810.000
9.	Tanjab Barat *)	6	2.169	400.000	150.000	550.000
10.	Tanjab Timur	10	1.563	600.000	0	600.000
11.	Kota Jambi	8	3.244	400.000	0	400.000
Jumlah		85	16.245	6.000.000	900.000	6.900.000

Data : BKP Provinsi Jambi

Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi dilaksanakan melalui dana APBN, APBD II dan APBD I Provinsi.

- Pengembangan Lumbung Pangan.

Pada Tahun 2012 telah disalurkan Bansos Cadangan Pangan untuk 8 Kelompok lumbung pangan dan Bansos penguatan modal usaha kelompok untuk 12 kelompok lumbung pangan. Kelompok Lumbung Pangan penerima Bansos cadangan pangan dan bansos penguatan modal adalah sebagaimana tabel 4 dan 5 berikut :

Tabel 4.75 Daftar Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bansos
Cadangan Pangan Tahun 2012

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Lokasi	
			Kabupaten / Kota	Kecamatan / Desa
1.	Tani Makmur	Juremi	Bungo	Pelepat/Gapura Suci
2.	Karya Lestari	Askolani	Bungo	Bathin II Babeko/Simpang Babeko
3.	Sungai Batu	A. Rahman	Sarolangun	Pelawan/Penegah
4.	Mutiara	Subhan	Batanghari	Maro Sebo Ilir/Terusan
5.	Tunas Harapan	M. Basit	Batanghari	Bathin XXIV/Karmeo
6.	Sejahtera Bersama	Rodi Hermawan	Kerinci	Gunung Tujuh/Jernih Jaya
7.	Beringin Jaya	Abdul Anas	Kerinci	Kelilig Danau/Semerap
8.	Harapan	Muhardin	Kerinci	Danau Kerinci/Tebing Tinggi

Data : BKP Provinsi Jambi

Tabel 4.76 Daftar Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bansos
Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2012

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Lokasi	
			Kabupaten / Kota	Kecamatan / Desa
1.	Sejahtera	Tohari	Batanghari	Muara Bulian/Olak
2.	Suka Tani II	Samirun	Batanghari	Pemayung/Lubuk Ruso
3.	Sri Sedono	Katino	Bungo	Jujuhan Ilir/Sari Mulya
4.	Titian Bulian	A. Latif	Bungo	Tanah Sepanggal/Teluk Pandak
5.	Langgeng Karya	Yaya. H	Bungo	Pelepat/Cilodang
6.	Sri Khopal	Sapiyudin	Bungo	Tanah Sepanggal Lintas/Ambacang Gedang
7.	Maju Bersama	A. Kadir	Merangin	Margo Tabir/Lubuk Bumbun
8.	Nalo Makmur	Ja'far	Merangin	Nalo Tantan/Nalo Gedang
9.	Suka Maju	Suhardi	Kerinci	Gunung Raya/Air Mumu
10.	Kapulo Sakti	Yahya, M	Sei Penuh	Sitinjau Laut/Bungo Tanjung
11.	Antara Makmur	Agus, S	Tanjab Timur	Nipah Panjang/Nipah Panjang II
12.	Tirta Mulya	Dalijo	Tanjab Timur	Rantau Rasau/Rantau Jaya

Data : BKP Provinsi Jambi

- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dibuat berdasarkan 3 (tiga) filar ketahanan pangan (ketersediaan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan) dalam semua kondisi bukan hanya pada situasi kerawanan pangan saja. Selain itu FSVA juga bermaksud untuk mengetahui berbagai penyebab kerawanan pangan secara lebih baik atau kerentanan terhadap kerawanan pangan, bukan hanya kerawanan pangan itu sendiri.

FSVA menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap kehidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Tujuan utama pembuatan Peta Situasi Ketahanan Pangan adalah :

- Menyoroti titik-titik yang rentan rawan pangan kabupaten di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Ketahanan Pangan yang ada.
- Mengidentifikasi penyebab kerawanan pangan di suatu wilayah/ kabupaten.
- Menyediakan petunjuk/informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk menganani kerawanan pangan kronis.
- Alat untuk perencanaan program berkaitan dengan ketahanan pangan.

Kategori/prioritas penanganan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan menggunakan pola warna.

Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas IV	Prioritas V	Prioritas VI
Sangat Rawan	Rawan	Cukup Rawan	Cukup Tahan	Tahan	Sangat tahan
					

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat Ketahanan dan Kerentanan Pangan adalah sebagaimana Tabel 4.77 berikut :

Tabel 4.77 Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

No	Kelompok / Aspek	Indikator / Data	Sumber Data
I.	Ketersediaan Pangan	Jumlah warung/toko kelontong (tempat usaha untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran)	PODES 2011 (BPS)
II	Akses Terhadap Pangan	Persentase penduduk miskin	Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011
		Jalan utama desa yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:	PODES 2011 (BPS)
		Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	PODES 2011 (BPS)
III,	Pemanfaatan Pangan	Jumlah sarana /fasilitas kesehatan	PODES 2011 (BPS)
		Jumlah kematian balita dan ibu melahirkan	PODES 2011 (BPS)
		Jumlah penderita gizi buruk	PODES 2011 (BPS)

Data : BKP Provinsi Jambi

Ruang lingkup penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Jambi tahun 2012 meliputi 11 kabupaten/Kota yang terdiri dari 131 Kecamatan dan 1.372 Desa/Kelurahan.

Dari hasil analisis komposit (gabungan) 7 (tujuh) indikator yang digunakan diketahui klasifikasi Desa/Kelurahan menurut prioritas penanganan seperti berikut :

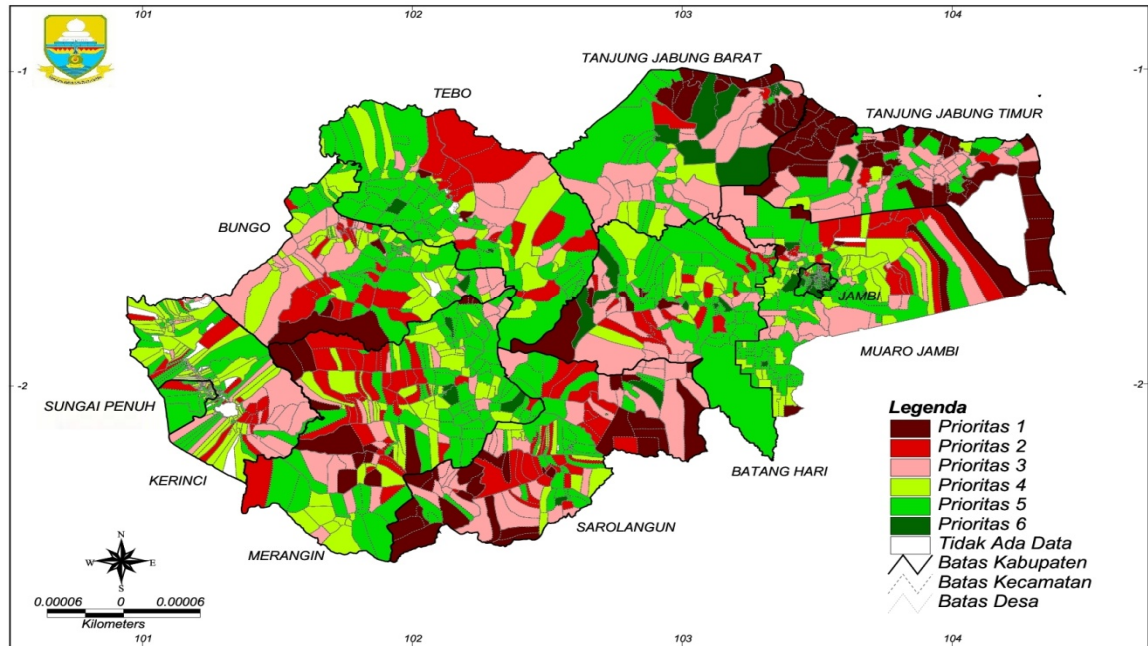
Tabel 4.78. Klasifikasi Desa / Kelurahan Menurut Prioritas Penanganan Kerentanan Pangan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Prioritas 1 s.d 3 (Rentan rawan pangan)					Prioritas 4 s.d 6 (Tahan Pangan)	
				1	2	3	1 s.d 3	%	4 s.d 6	%
1.	Kerinci	12	208	-	26	18	44	21,15	164	78,85
2.	Sungai Penuh	5	69	-	5	15	20	28,99	49	71,01
3.	Merangin	24	212	13	35	20	68	32,08	144	67,92
4.	Sarolangun	10	142	23	27	32	82	57,75	60	42,25
5.	Bungo	17	146	3	20	31	54	36,99	92	63,01
6.	Tebo	12	106	2	15	8	25	23,58	81	76,42
7.	Muara Jambi	11	151	5	11	13	29	19,21	122	80,79
8.	Batang Hari	8	113	5	17	22	44	38,94	69	61,06
9.	Tanjab Barat	13	70	14	2	20	36	51,43	34	48,57
10.	Tanjab Timur	11	93	37	2	26	65	69,89	28	30,11
11.	Kota Jambi	8	62	1	4	1	6	9,68	56	90,32
Jumlah		131	1.372	103	164	206	473	34,48	899	65,52

Data : BKP Provinsi Jambi

Berdasarkan diatas, terlihat bahwa secara umum Provinsi Jambi **cukup tahan pangan** (65,52% Tahan Pangan dan 34,48% Rentan Rawan Pangan), yang dapat digambarkan kedalam peta Ketahanan Pangan berikut

Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan
Provinsi Jambi



Sumber : BKP Provinsi Jambi

Gambar 4.18 Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan

2. Aspek distribusi dan harga pangan, hasil yang telah dicapai sebagai berikut ;

- Stabilitas Kepastian Harga Primer (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat / PLDPM).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar harga pangan dapat stabil tidak terlalu bergejolak, sehingga diharapkan agar petani tidak dirugikan, terutama komoditi beras/gabah. Kegiatan yang telah dilakukan berupa pembinaan terhadap Gapoktan yang telah menerima bantuan sosial (bansos) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang telah berlangsung sejak tahun 2009. Hingga saat ini telah dilakukan pembinaan terhadap 26 gapoktan yang menerima bansos PLDPM.

- Pemantauan Harga Pangan Strategis;

Pada tahun ini cabe merah masih memberikan sumbangan inflasi yang dominan untuk bahan pangan bila dibandingkan dengan komoditi pangan lainnya. Fluktuasi harga cabe merah menjadi dilema sendiri khususnya bagi masyarakat Kota Jambi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di Pasar Angso Duo yang merupakan pasar induk di Kota Jambi naik turunnya harga cabe merah sangat dipengaruhi oleh para spekulan dimana bila pasokan berkurang atau tidak lancar dari daerah sentra produksi maka para spekulan bisa langsung menaikkan harga saat itu juga. Sementara disisi lain, Kota Jambi maupun daerah lain di Provinsi Jambi pada umumnya belum memiliki daerah khusus sentra produksi cabe. Sehingga, pasokan cabe lebih banyak didatangkan dari luar daerah provinsi, ada beberapa kawasan maupun daerah kabupaten. Namun jumlahnya sangat sedikit, tidak bisa memenuhi kebutuhan di pasaran.

Beras masih merupakan komoditi strategis untuk mempengaruhi inflasi tahun 2012 di Kota Jambi, akan tetapi kondisi harga beras IR 64, IR 42 bervariasi setiap bulannya namun masih dalam batas yang wajar. Beras yang ada di Kota Jambi pada umumnya didatangkan dari Provinsi lain seperti dari Palembang dan Lampung.

3. Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan, hasil yang telah dicapai sebagai berikut ;

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kondisi konsumsi pangan penduduk provinsi Jambi selama beberapa tahun belakangan mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian), yaitu lebih dari 50 %. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan telah memperlihatkan hasilnya, walaupun belum optimal yang dicerminkan oleh kualitas konsumsi tersebut, Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan skor Pola Pangan Harapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.79 Skor Pola Konsumsi Pangan Harapan Aktual Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kelompok Pangan	Gram / Kap / Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Skor PPH
			Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap skor AKE dan Skor Maks	
1	Padi-padian	275,9	1042	54,7	52,1	0,5	27,4	26,1	25	1,1	25,0
2	Umbi-umbian	91,7	95	5,0	4,8	0,5	2,5	2,4	2,5	-0,1	2,4
3	Pangan Hewani	119,8	204	10,7	10,2	2,0	21,4	20,4	24	-3,6	20,4
4	Minyak dan Lemak	30,4	272	14,3	13,6	0,5	7,1	6,8	5	1,8	5,0
5	Buah/Biji Bermintya	6,8	37	1,9	1,8	0,5	1,0	0,9	1	-0,1	0,9
6	Kacang-kacangan	13,3	39	2,0	1,9	2,0	4,1	3,9	10	-6,1	3,9
7	Gula	30,0	106	5,6	5,3	0,5	2,8	2,7	2,5	0,2	2,5
8	Sayur dan Buah	202,2	83	4,3	4,1	5,0	21,7	20,7	30	-9,3	20,7
9	Lain-lain	67,0	27	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Total			1.904	100,0	95,2		88,0	83,8	100		80,7

Keterangan =

*) Angka Kecukupan Energi (AK 2.000 Kkal/Kap/Hari

*) Sumber Data := BPS Pusat

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan yang telah dilakukan berupa sosialisasi pangan beragam bergizi dan berimbang terhadap kader pangan di 11 kabupaten/kota, serta bantuan sosial berupa :

- a. Bantuan saprodi untuk Pengembangan Model Pemanfaatan Pekarangan 6 Paket;
 - b. Bantuan Saprodi untuk Optimalisasi Pekarangan sebanyak 6 paket.
 - c. Bantuan saprodi untuk Kampung Pangan Terpadu di Kabupaten Muaro Jambi.
- Penanganan Keamanan Pangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menangani keamanan pangan khususnya pangan segar, dan telah dilakukan beberapa sub kegiatan diantaranya ; Surveilance Prima, Pengawasan Keamanan Pangan Segar Buah-buahan dan Sayuran, dan Penyusunan Profil Usaha Tani Produk Prima 3. Untuk surveilance prima dan pengawasan keamanan pangan segar telah dilakukan uji residu terhadap sampel sayur dan buah-buahan sebagaimana terlihat pada berikut :

Tabel 4.80 Uji Residu Komoditi Sayura dan Buah-buahan.

No	Komoditi	Parameter yang Diuji	Biaya (Rp) / Parameter	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5
1	Strobery	klorfirifos, diazinon, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
2	Labu Siam	profenofos, klorfirifos, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
3	Daun Bawang (Prey)	profenofos, diazinon, sipermetrin deltametrin	200	800.000
4	Jeruk	klorfirifos, diazinon, deltametrin, profenofos	200	800.000
5	Terung Pirus	Fention, diazinon, profenofos, deltametrin	200	800.000
6	Bayam	sipermetrin, deltametrin, profenofos, fention	200	800.000
7	kangkung	diazinon, klorfirifos, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
8	Kemangi	profenofos, diazinon, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
9	Bayam Merah	profenofos, diazinon, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
10	sawi	fention, diazinon, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
11	Gambas	sipermetrin, klorfirifos, diazinon, endosulfan	200	800.000
12	Kacang Panjang	sipermetrin, deltametrin, klorfirifos, fenthion	200	800.000
13	Timun	propenofos, sipermetrin, deltametrin, fenthion	200	800.000
14	kangkung	Beta siflutrin, diazinon, profenofos, deltametrin	200	800.000
15	Bayam	sipermetrin, siflutrin, profenofos, klorfirifos	200	800.000
16	Sawi	fention, klorfirifos, beta siflutrin, metomil	200	800.000
17	Buah Naga	profenofos, diazinon, sipermetrin deltametrin	200	800.000
18	Sawi	sipermetrin, deltametrin, propenofos, fention	200	800.000
19	Selada	Sipermetrin, deltametrin, profenofos, fention	200	800.000
20	kangkung	Sipermetrin, deltametrin, profenofos, fention	200	800.000
21	selada	Sipermetrin, deltametrin, profenofos, fention	200	800.000
22	Pak Coi	sipermetrin, siflutrin, propenofos, klorfirifos	200	800.000
23	Kangkung	Sipermetrin, deltametrin, profenofos, klorfirifos	200	800.000
24	Terong	deltametrin, sipermetrin, profenofos, klorfirifos	200	800.000
25	Timun	Sipermetrin, deltametrin, profenofos, klorfirifos	200	800.000
26	Cabe Hijau	profenofos, diazinon, sipermetrin, deltametrin	200	800.000
27	Kacang Panjang	deltametrin, sipermetrin, profenofos, klorfirifos	200	800.000
28	Sawi kailan	Sipermetrin, deltametrin, profenofos, fention	200	800.000
29	Pak Coi	sipermetrin, siflutrin, propenofos, klorfirifos	200	800.000
Total Biaya				23.200.000

Data : BKP Prov. Jambi

4. Aspek Manajemen Ketahanan Pangan, hasil yang telah dicapai antara lain ;

- Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan merupakan kegiatan yang cukup strategis karena merupakan salah satu media untuk berkoordinasi dengan segenap dinas/instansi lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain ; Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode I Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2012 bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi yang diikuti oleh anggota dewan ketahanan pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dari rapat koordinasi ini telah diperoleh berupa rumusan hasil dan telah disampaikan ke masing-masing kabupaten/kota.

Untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode II Tahun 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 juga bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, hasil rumusan saat ini sudah disampaikan ke Gubernur Jambi, yang kemudian akan disampaikan ke kabupaten/kota.

- Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program Ketahanan Pangan.

Bertujuan untuk menyusun rencana dan merumuskan program ketahanan pangan untuk 1 (satu) tahun kedepannya, kegiatan yang telah dilakukan berupa musyawarah perencanaan pembangunan dan sinkronisasi operasional ketahanan pangan

4.1.22. Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian, kelautan perikanan dan kehutanan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan melalui SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jambi. Guna mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan, maka telah dilaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan antara lain; Kegiatan Kelembagaan Tani, Kemitraan Usaha Tani, Demplot Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan Program Pemberdayaan Penyuluhan dengan kegiatan antara lain; Pemberdayaan kelembagaan Penyuluhan, Penyembaran informasi dan teknologi penyuluh; penyusunan data base statistik kelembagaan penyuluh wilayah; monitoring dan evaluasi penyuluhan; koordinasi perencanaan dan perumusan program penyuluhan; Pembinaan dan pelatihan SDM penyuluh dan petani; Peningkatan Pengembangan Programa; Apresiasi Kompetensi Penyuluh THL-TB

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, didapat output dan hasil dari kegiatan antara lain;

1. Terlaksananya pembinaan lembaga penyuluhan Kabupaten/Kota dalam penyusunan program dengan hasil terciptanya keterpaduan dan sinergi program penyuluhan pada setiap tingkatan.
2. Terlaksananya sarana prasarana dan informasi teknologi penyuluhan
3. Tersusunnya data base statistik kelembagaan penyuluh dengan hasil tersedianya data base statistik kelembagaan penyuluh.

4. Terselenggaranya pelatihan-pelatihan agribisnis pertanian, perikanan dan peternakan, pelatihan manajemen organisasi poktan dan gapoktan
5. Teridentifikasinya perkembangan kelembagaan penyuluh di Provinsi Jambi, dengan hasil kegiatan adanya solusi dalam pemecahan berbagai permasalahan pengembangan kelembagaan penyuluh.

Akumulasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dicapai indikator program pembangunan penyuluhan yaitu :

1. Peningkatan jumlah balai penyuluh dan posluh di Provinsi Jambi sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.81 Data Balai penyuluhan, Penyuluh dan posluh yang ada di Provinsi Jambi Tahun 2012

No	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kel	BP3K	Penyuluh PNS			Posluh
					Tani	Ikan	hutan	
1	Kt. Jambi	8	62	8	30	3	-	6
2	Ma. Jambi	11	155	8	68	4	2	87
3	Batanghari	8	113	8	60	8	-	87
4	Tebo	12	107	12	57	-	2	-
5	Bungo	17	153	13	153	11	7	146
6	Sarolangun	10	143	10	75	-	4	54
7	Merangin	24	212	16	106	14	5	160
8	Tanjab Timur	11	93	11	53	6	4	9
9	Tanjab Barat	13	70	10	60	-	1	40
10	Kerinci	12	209	12	103	5	7	185
11	Sungai Penuh	5	69	5	21	2	4	35
12	Provinsi				23	8	1	
J u m l a h		131	1,386	115	809	62	37	809

Sumber : Data Dari Hasil Evaluasi Program Kegiatan Penyuluhan Set. Bakorluh 2012

2. Peningkatan jumlah kelembagaan tani di Provinsi Jambi.

a) Kelompok Tani

Kelembagaan tani mengalami peningkatan dari 14 persen pada tahun 2005 menjadi 18 persen di tahun 2012 atau terjadi peningkatan setiap tahunnya lebih kurang 20%.

Perkembangan kelanjutan dari kelembagaan tani terutama pada tingkat kemampuan kelompok tani disetiap tingkatan , untuk tingkat BDK ; 20%, Pemula; 45%, Lanjut; 28%, Madya; 7%, Utama% hal ini tingkat kemampuan kelompok tani di nominasi oleh Pemula dan lanjut.

Tabel 4.82 Data kelompok tani Kabupaten kota se provinsi Jambi
Tahun 2012

No	Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Poktan	Tingkat Kemampuan				
					BDK	P	L	M	U
1	Batang Hari	8	113	714	109	375	220	26	1
2	Sarolangun	10	143	616	-	250	336	30	-
3	Bungo	17	153	725	222	349	140	12	2
4	Tanjab Barat	13	70	813	164	423	203	23	-
5	Kota Sei. Penuh	5	69	448	175	184	80	9	-
6	Kerinci	12	209	2.175	430	505	322	52	2
7	Tebo	12	107	503	-	373	108	21	1
8	Kota Jambi	8	62	125	2	35	55	31	2
9	Tanjab Timur	11	93	1.084	203	282	185	119	19
10	Merangin	24	212	1.463	132	389	436	149	11
11	Muara Jambi	11	155	1.035	-	678	315	42	-
JUMLAH		131	1.386	9.701	1.437	3.843	2.400	514	38

Sumber : Data Dari Hasil Evaluasi Program Kegiatan Penyuluhan Set. Bakorluh 2012

b)Gapoktan

Kondisi Gapoktan sampai tahun 2012, untuk Gapoktan Puap berjumlah 652 gapoktan dan selebihnya gapoktan LDPM- Luep, Lumbung Pangan dan mandiri pangan, yang

telah mencapai satu Gapoktan satu desa sehingga masih kurang 260 Gapoktan.

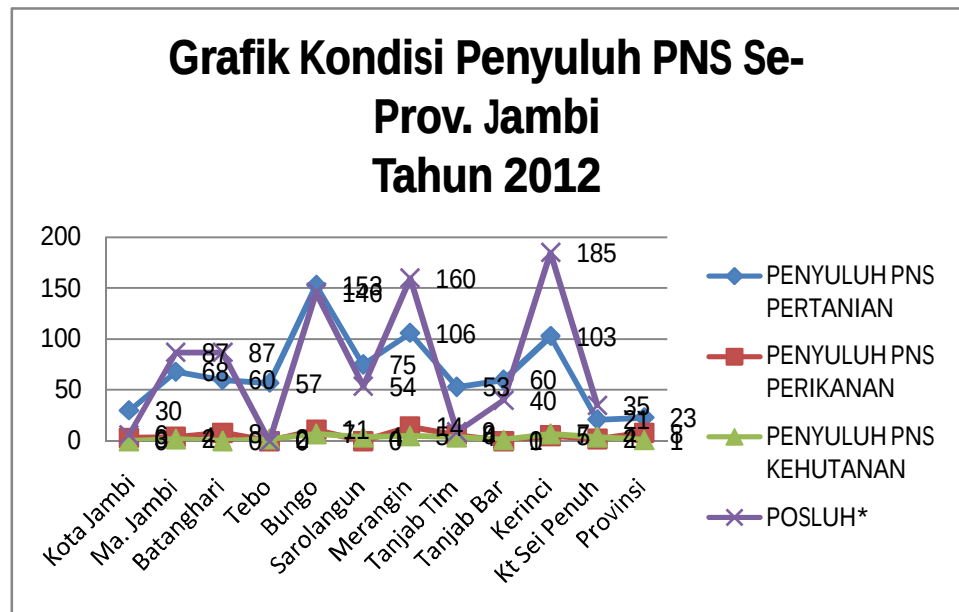
Tabel 4.83 Kondisi Gapoktan Provinsi Jambi 2012

NO	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kel	Poktan	Gapoktan
1	Kota Jambi	8	62	125	24
2	Ma. Jambi	11	155	1.035	143
3	Batanghari	8	113	714	108
4	Tebo	12	107	503	103
5	Bungo	17	153	725	107
6	Sarolangun	10	143	616	131
7	Merangin	24	212	1.463	149
8	Tanjab Tim	11	93	1.084	93
9	Tanjab Bar	13	70	813	70
10	Kerinci	12	209	2.175	122
11	Sei Penuh	5	69	448	53
12	Provinsi	-	-		
Jumlah		131	1.380	9.701	1.103

Sumber : Set. Bakorluh 2012

c) Penyuluh

Berikut Grafik Sebaran Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Prov. Jambi Tahun 2012

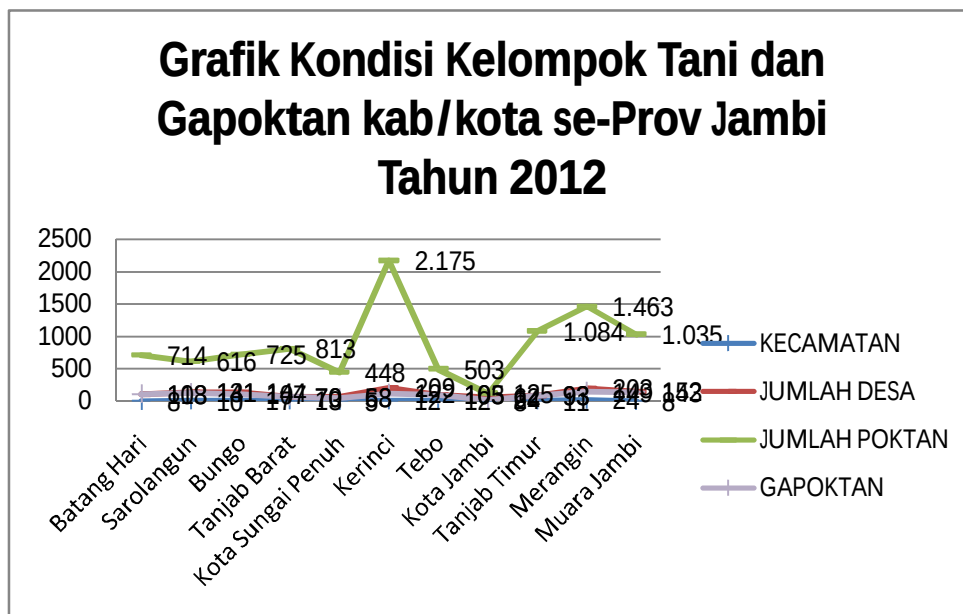


Sumber : Set. Bakorluh 2012

Gambar 4.19 Kondisi Penyuluh PNS Se Provinsi Jambi

d) Kelembagaan tani

Jumlah kelembagaan tani (kelompok tani) di Provinsi Jambi sebanyak 9.701 Kelompok tersebar di 1.362 Desa/ kelurahan 131 desa kecamatan dan 11 Kabupaten /kota. Dari jumlah kelompok tani tersebut yang terbanyak Kabupaten Kerinci sebanyak 2.175 Kelompok ,Kabupaten Merangin 1.463 kelompok, Kabupaten MuRO Jambi 1.036 Kelompok, Tanjab Barat 813 Kelompok.



Sumber : Set. Bakorluh 2012

Gambar 4.20 Kondisi kelompok Tani dan Gapoktan Kab/Kota

4.2 URUSAN PILIHAN

4.2.1. Pertanian

4.2.1.1. Pertanian Tanaman Pangan

Pada dasarnya Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan dan hortikultura yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir, yang memiliki orientasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun masyarakat sekitarnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebagai SKPD yang melaksanakan sebagian dari fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pertanian pada tahun anggaran **2012** memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp 11.657.411.800,00** yang dipergunakan untuk

mendanai 9 program dengan 5 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional).

Dari program prioritas tersebut, pada tahun **2012** Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar **14.604** ton atau sebesar **2,26 %** jika dibandingkan tahun **2011**, yaitu dari **646.640** ton GKG menjadi **661.244** ton GKG pada tahun 2012 (**ARAM II 2012**). Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar **0,46 Kw/Ha (1,11 %)**, serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar **1.790 Ha (1,14 %)**.

Namun demikian, produktivitas tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, yaitu sebesar **44,85 Kw/Ha**, sementara produktivitas yang telah dicapai adalah sebesar **41,53 Kw/Ha**. Hal tersebut disebabkan adanya musim kemarau pada awal tahun 2012 dan diikuti dengan banjir pada akhir 2012, sehingga lahan-lahan yang biasa ditanami padi ladang menjadi lebih kering dan pecah-pecah serta tidak memungkinkan untuk ditanami karena ketersediaan air tanahnya juga diragukan keberadaannya. Selanjutnya pada akhir tahun lahan persawahan mengalami fuso/rusak, karena tergenang air banjir dari luapan air sungai. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan jadwal tanam, pergeseran musim tanam.

Komoditi Kedelai juga mengalami **penurunan** produksi pada

tahun **2012** yaitu dari **5.669** ton pada tahun **2011** menjadi **3.853** ton, atau **menurun** sebesar **1.816** ton **(32,03 %)**, yang disebabkan karena penurunan luas panen seluas **1.506 Ha (33,00 %)**, walaupun produktivitas kedelai yang mengalami peningkatan sebesar **0,18 Kw/Ha (1,45 %)** dibanding tahun sebelumnya.

Untuk komoditi jagung, terjadi **peningkatan** produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun **2011** dari **25.522** ton menjadi **28.043** ton pada tahun **2012** atau mengalami peningkatan sebesar **2.522** ton **(9,88) %**. **Peningkatan** produksi jagung ini terjadi karena adanya penambahan luas panen sebesar **557 Ha (8,31 %)**. Hal ini disebabkan petani mengalihkan minat menanam kedelai yang resiko gagalnya tinggi dan tidak adanya jaminan pasar, dan lebih menguntungkan menanam jagung.

Tabel 4.84 Perkembangan Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2011–2012

No	Uraian	2011	Aram II 2012	Perkembangan 2012 Thdp 2011	
				(+ / -)	(%)
1.	<u>LUAS PANEN (Ha)</u>				
	Padi	157.441	159.231	1.790	1,14
	- Padi Sawah	132.523	134.254	1.731	1,31
	- Padi Ladang	24.918	24.977	59	0,24
	Jagung	6.706	7.263	557	8,31
	Kedelai	4.563	3.057	-1.506	-33,00
	Kacang Tanah	1.315	1.293	-22	-1,67
	Kacang Hijau	402	327	-75	-18,66
	Ubi Kayu	2.819	2.628	-191	-6,78
	Ubi Jalar	3.017	3.265	248	8,22
2.	<u>PRODUKTIVITAS (Kw / Ha)</u>				
	Padi	41,07	41,53	0,46	1,11
	- Padi Sawah	43,05	43,73	0,67	1,56
	- Padi Ladang	30,54	29,71	-0,82	-2,69
	Jagung	38,06	38,61	0,55	1,45
	Kedelai	12,42	12,60	0,18	1,45
	Kacang Tanah	12,77	12,81	0,03	0,26
	Kacang Hijau	11,08	11,09	0,01	0,13
	Ubi Kayu	143,53	142,02	-1,52	-1,06
	Ubi Jalar	227,82	256,95	29,12	12,78
3.	<u>PRODUKSI (Ton)</u>				
	Padi	646.640	661.244	14.604	2,26
	- Padi Sawah	570.552	587.030	16.477	2,89
	- Padi Ladang	76.088	74.215	-1.837	-2,46
	Jagung	25.522	28.403	2.522	9,88
	Kedelai	5.669	3.853	-1.816	-32,03
	Kacang Tanah	1.680	1.656	-24	-1,41
	Kacang Hijau	445	363	-83	-18,55
	Ubi Kayu	40.462	37.322	-3.140	-7,76
	Ubi Jalar	68.735	83.893	15.158	22,05

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani (NTP) rata-rata Bulan Januari hingga Desember 2012, Sub Sektor Tanaman Pangan adalah 90,01 dan NTP rata-rata Sub Sektor Hortikultura adalah 88,89. Perkembangan NTP tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat ada tabel berikut ini

Tabel 4.85 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Selama Tahun 2012

No.	Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)	
		Sub sektor Tanaman Pangan	Subsektor Hortikultura
1.	Januari	93,51	91,69
2.	Februari	91,69	90,72
3.	Maret	91,20	89,32
4.	April	90,13	88,49
5.	Mei	89,72	88,25
6.	Juni	89,87	88,64
7.	Juli	89,29	88,39
8.	Agustus	88,72	89,06
9.	September	88,82	88,20
10.	Oktober	89,27	88,30
11.	November	89,04	87,55
12.	Desember	88,91	88,07
Rata-rata		90,01	88,89

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

Menyikapi rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2012, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

- a. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.
- b. Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
- c. Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprota, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usahatani menikmati nilai tambah yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain : 1) Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll, 2) Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan, 3) Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar, 4) Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil

pertanian yang mudah rusak, 5) Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan 6) Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam rangka adopsi dan aplikasi penerapan teknologi yang sesuai dengan rekomendasi, sehingga nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan produksi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan kegiatan : Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani dengan melibatkan 145 orang petani yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sebagai peserta dengan alokasi dana Rp. 601.624.500,-

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Program ini secara umum bertujuan meningkatkan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian serta meningkatkan promosi dan pelayanan informasi pasar, mendorong iklim pemasaran hasil pertanian yang kondusif melalui pendekatan pengembangan kawasan, pengolahan hasil dan sistem serta kelembagaan. Guna mendukung program tersebut maka dilakukan kegiatan untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan pengolahan dan promosi hasil pertanian.

Melalui APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 sebesar Rp 379.723.800,00, melaksanakan program ini dengan melakukan kegiatan pembinaan pengolahan dan promosi hasil pertanian.

3. Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian

Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : a) Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan secara 6 tepat, b) Meningkatkan pembinaan pengembangan alsin dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan operator UPJA, c) Meningkatkan kelompok P3A/GP3A berprestasi, meraih juara III Tingkat Nasional d) Meningkatkan kelompok tani TAM berprestasi, yang telah meraih juara IV tingkat Nasional , e) Meningkatkan ketersediaan SID cetak sawah, dan f) Meningkatkan produktivitas lahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2012 melalui dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 1.145.421.250,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu : 1) kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilakukan di 11 kab/kota di Provinsi Jambi; 2) kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, dimana melalui kegiatan ini telah terlaksana pengadaan alat dan mesin pertanian seperti hand traktor standar sebanyak 4 unit, power thresher sebanyak 2 unit, Seed Cleaner sebanyak 6 unit, Power Spayer sebanyak 1 unit dan pembuatan sumur dangkal sebanyak 4 paket.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan tujuan antara lain : 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai, 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sayuran organik, dan tanaman hias, 3) Meningkatkan pengembangan hortikultura, 4) Meningkatkan ketersediaan benih padi, benih sumber kedelai, jagung dan kacang tanah, benih sumber BPMT, kentang G1, G2 dan G3 di BBU, 5) Meningkatkan ketersediaan benih di penangkar, dan 6) Meningkatkan kelompok penangkar benih, dan meningkatnya ketersediaan benih padi gogo dan benih padi dataran tinggi hasil pemurnian.

Melalui Dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2012 sebesar Rp 4.785.373,100,00, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan program ini melalui kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Akselerasi Peningkatan produksi Padi yang dilaksanakan di 11 kab/kota, 2) Pengembangan Kedelai melalui sentra pengembangan yang tersebar di 11 kab/kota, 3) Pengembangan Sentra Jagung, 4) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi, 5) Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran organik, 6) Penguatan kelembagaan perbenihan Hortikultura, 7) Penguatan Kelembagaan Perbenihan palawija, 8) Penguatan Kelembagaan Kentang Kayo Aro 9) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 10) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Hortikultura 11) Pengembangan Teknologi PHT Berbasis Agens Hayati 12) Penguatan Kelembagaan POS

IPAH 13) Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 14) Pengembangan Tanaman Hias 15) Pembinaan Pengembangan Hortikultura 16) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Jangkat 17) Peningkatan Sentra tanaman sayuran dan tanaman florikultura 18) Pembinaan pengembangan pasca panen tanaman hortikultura dan 19) kegiatan pengembangan sentra palawija.

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 mentargetkan PAD dari hasil retribusi jasa usaha berupa retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp 170.000.000,00 (5,59%) dibanding target tahun 2011 yaitu sebesar Rp 161.000.000,00. Realisasi tahun 2012 sebesar Rp 252.841.000,00 (48,73 %). Target dan Realisasi PAD Tahun 2012 dibandingkan 2011 seperti tertera pada tabel 4.86 berikut;

Tabel 4.86 Target dan Realisasi PAD Tahun 2011 - 2012 Lingkup
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

dalam ribuanrupiah

No	BBI/Taman Anggrek	Tahun 2011			Tahun 2012			% Realisasi 2012 : 2011
		Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	BBI Padi Sukajaya	56.000	50.036	100,1	56.000	56.471	100,8	112,8
2.	BBI Palawija Sebapo	45.000	47.370	105,3	45.000	45.180	100,4	95,3
3.	BBI Palawija Alai Ilir	-	-	-	-	-	-	-
4.	BBI Hortikultura Sungai Tiga	16.000	16.150	100,9	16.000	16.200	101,5	100,3
5.	BBI Kentang Kayu Aro	20.000	20.000	100	25.000	25.020	100,0	125,1
6.	BBU Kentang Jangkat	20.000	20.000	100	20.000	48.000	240,0	240,0
7.	Taman Anggrek	4.000	5.500	137,5	8.000	61.970	774,6	1126,7
Jumlah		161.000	165.056	102,5	161.000	165.056	102,5	300,06

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

4.2.1.2 Perkebunan

Pada tahun anggaran 2012 sektor perkebunan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp32.715.564.530,00 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan yang dilakukan antara lain Pemberdayaan Petani, Pengawalan Revitalisasi Perkebunan dan Penas, Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan ISPO,

Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan, Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren di Bidang Perkebunan, Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan, dan Pengembangan kawasan integrasi kelapa sawit dengan hewan ternak.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan program ini adalah dengan meningkatnya koordinasi tata niaga TBS, meningkatkan promosi dan Peluang Pasar serta Kerjasama IMT-GT, peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan, Pembinaan dan Informasi Harga komoditi perkebun, dan pengembangan/Peningkatan Jalan Produksi.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian telah dilakukan pengembangan Tata Air Micro (TAM), Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP), Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH, Bintek Perbanyakan Agens Hayati, Pembinaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB, serta Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.

Untuk peningkatan produksi pertanian/perkebunan telah dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan, pengawasan peredaran, penyimpanan pupuk dan pestisida sehingga terawasinya dan terkendalinya peredaran pupuk terutama yang bersubsidi sehingga tepat sasaran dalam penyalurannya.
- 2) Pengembangan Kopi memberikan dampak multi efek bagi peremajaan kebun kopi rakyat, meningkatkan penggunaan benih unggul kopi, meningkatkan produktivitas kopi rakyat, meningkatkan pendapatan petani kopi serta menggerakkan ekonomi di pedesaan wilayah sentra kopi.
- 3) Pemurnian kebun entres sehingga terjaganya kebun entres yang baik dengan dilakukannya pemurnian tanaman entres dan tersedianya kebun entres yang baik sebagai sumber benih karet yang unggul.
- 4) Pengembangan Karet Rakyat bertujuan untuk meningkatkan tanaman karet yang unggul sehingga dapat mengurangi tanaman karet yang sudah tua serta meningkatkan produktifitas karet.
- 5) Penyusunan program dan statistik perkebunan bertujuan untuk menyediakan data statistik perkebunan sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan perkebunan.
- 6) Pengembangan dan diversifikasi usaha tani tembakau sehingga terlaksananya diversifikasi usaha tani tembakau yang rendah nikotin serta terbinanya petani dalam diversifikasi usaha tembakau yang rendah nikotin.
- 7) Pemetaan komoditi unggulan perkebunan dan pertemuan teknis pengembangan perkebunan bertujuan untuk menyediakan peta komoditi unggulan perkebunan.
- 8) Pengembangan kopi dan coklat di areal kelapa dalam sehingga tersedianya kopi dan coklat yang unggul dan

meningkatkan pendapatan para petani kopi dan coklat di Areal Kelapa Dalam

- 9) Pembibitan tanaman perkebunan bertujuan untuk menyediakan bibit unggul tanaman perkebunan

4.2.1.3 Peternakan

Pada tahun anggaran 2012 bidang peternakan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi mengelola alokasi anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp.11.785.709.500,00 yang dipergunakan untuk mendanai program utama berikut :

- 1. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan**
- 2. Program Peningkatan Produksi Peternakan**
- 3. Program Pengembangan Usaha Peternakan**
- 4. Program Peningkatan Fungsi Kesmavet**

Keempat program utama tersebut diuraikan menjadi berbagai kegiatan, dengan lokasi kegiatan tersebar di 11 Kab/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Program pembangunan peternakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan penyakit hewan yang bersifat zoonosis (menular kepada manusia) strategis. Penyakit hewan strategis yang ditangani adalah SE (*Septicaemia epizooticae*), *Brucellosis*, AI (*Avian Influenza*), *Anthrax* dan *Rabies*.

Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan utama yaitu Kegiatan Pengembangan Laboratorium Keswan dan

Kesmavet serta Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.

A. kegiatan Pengembangan laboratorium keswan dan kesmavet

Dalam menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan maka difungsikan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner). Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan spesimen hewan, pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan yang dikirimkan oleh instansi teknis Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel secara langsung untuk jenis penyakit tertentu pada daerah yang diduga berpotensi sebagai sumber penular penyakit hewan strategis.

Sepanjang tahun 2012 UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi melalui kegiatan pengembangan laboratorium keswan dan kesmavet telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian spesimen dikerjakan oleh dokter hewan (medik veteriner) dan paramedik veteriner yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian laboratorium yaitu :

1. Laboratorium Keswan :
 - Pemeriksaan Parasitologi
 - Pemeriksaan Bakteriologi
 - Pemeriksaan Virologi
 - Pemeriksaan Serologi
 - Pemeriksaan Patologi Anatomi
2. Laboratorium Kesmavet
 - Pemeriksaan Organoleptik
 - Pemeriksaan Cemarkan Mikroba
 - Pemeriksaan Identifikasi Jenis Daging
 - Pemeriksaan Formalin

1. Laboratorium Keswan

1. Pemeriksaan Parasitologi

Pemeriksaan Parasitologi adalah kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan, penyidikan dan mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh parasit/ protozoa darah (Anaplasma, Babesia, Trypanosoma dll), ektoparasit (Sarcoptes, Psoroptes, Demodex dll) dan Endoparasit (Bunostomum, Paramphistomum, Coccidia dll).

Kegiatan pemeriksaan parasitologi yang dilaksanakan di Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet yaitu pemeriksaan Parasit Ulas Darah (PUD) dan endoparasit (feses). Pelaksanaan pemeriksaan PUD pada parasitologi menggunakan pewarnaan Giemsa. Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah spesimen yang diperiksa pada tahun 2012 sebanyak 2.175 sampel jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 2.821 sampel maka jumlah pemeriksaan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar (29,70%). Terjadinya penurunan dikarenakan aktifnya petugas dari Laboratorium mengambil spesimen ke lokasi/ lapangan sekaligus mengobati ternak dengan memberi obat cacing, biosalamin dan memeriksa penyakit ternak di laboratorium sehingga ternak yang sakit menurun, meningkatnya populasi dan produksi ternak di Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi.

Penyakit parasit darah merupakan penyakit menular pada hewan dan menyebabkan kerugian ekonomi berupa turunnya berat badan yang drastis, keguguran, gangguan pertumbuhan, penurunan produksi susu dan dapat menimbulkan kematian biasanya disertai gejala demam, anemia, ikterus, kurus dan lemah. Pada jenis

ternak sapi ditemukan parasit *Theileria* sp sebanyak 311 sampel, *Anaplasma* sp 136 sampel, Surra 17 sampel dan *Babesia* sp sebanyak 12 sampel. Dari jenis ternak sapi dan ayam yang diperiksa sebanyak 2.175 spesimen menunjukkan sebesar 52 spesimen ternak ayam tidak ditemukan parasit darah.

Tabel 4.87. Hasil pemeriksaan parasit darah Tahun 2012

No	Kab/Kota	Jenis Ternak	Hasil Pemeriksaan					
			Jumlah	THL	ANP	SR	BB	Ket
1	Kota Jambi	Sapi	30	2	3	0	0	
2	Batanghari	Sapi	234	46	9	0	0	
		Kerbau	3	1	0	1	0	
3	Ma. Jambi	Sapi	434	86	40	3	0	
		Ayam	52	0	0	0	0	
4	Tebo	Sapi	107	13	10	0	0	
5	Bungo	Sapi	511	61	22	3	6	
6	TanjabTimur	Sapi	153	25	13	0	2	
7	TanjabBarat	Sapi	265	37	21	0	0	
8	Sarolangun	Sapi	140	12	14	9	0	
9	Merangin	Sapi	153	17	1	0	1	
10	Kerinci	Sapi	35	7	0	1	3	
11	Kota Sei. Penuh	Sapi	58	4	3	0	0	
Jumlah 2012			2.175	311	136	17	12	
Jumlah 2011			2.821	312	270	0	196	

Sumber : Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Keterangan :

THL : *Theilleria* sp SR : Surra sp
BB : *Babesia* sp ANP : *Anaplasma* sp

Pada tabel menunjukkan hasil pemeriksaan sampel parasit internal (feses) yang dapat diperiksa pada tahun 2012 sebanyak 2.010 sampel. Endoparasit yang dapat ditemukan adalah *Bunustomum* sp sebanyak 141 sampel, *Cooperia* sp sebanyak 76 sampel, *Oeshophagustomum* sp 94, *Paramphistomum* sp sebanyak 165 sampel, *fasciola* sp sebanyak 68 sampel, *Schistosoma* sp sebanyak 50 sampel, *Ascaris* sp

sebanyak 46 sampel, Gastrothylax sp sebanyak 18 sampel, Eimeria sp sebanyak 32 sampel, Capilaria sp sebanyak 7 sampel dan Trichostrongylus sp sebanyak 2 sampel. Dibandingkan tahun 2011, jumlah spesimen endoparasit mengalami kenaikan sebesar 68,76 %.

Tabel 4.88. Pemeriksaan Parasit Internal Tahun 2012

No	Kab/Kota	Jumlah spesimen diperiksa	Hasil Pemeriksaan dan Jenis Parasit yang ditemukan										
			Bun	Cop	Oes	Par	Fas	Sch	Asc	Gas	Eim	Cap	Tric
1	Kota Jambi	190	6	18	4	6	12	9	3	5	7	3	0
2	Bthari	189	11	3	18	9	8	3	1	3	2	0	2
3	Ma.Jambi	341	21	4	12	13	7	2	4	4	3	0	0
4	TanjTim	144	11	1	5	10	7	4	1	0	0	0	0
5	TanjBar	370	28	11	21	5	8	7	6	0	1	0	0
6	Tebo	136	13	10	3	27	5	10	5	2	3	2	0
7	Bungo	278	6	9	3	19	7	3	3	2	6	2	0
8	Merangin	153	19	11	12	12	3	3	19	1	8	0	0
9	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sei.Penuh	35	2	1	3	1	0	0	1	1	2	0	0
11	Sarolangun	174	24	8	13	14	9	9	3	0	0	0	0
Jumlah 2012		2.010	141	76	94	165	68	50	46	18	32	7	2
Jumlah 2011		628	628	0	0	16	0	8	6	0	0	0	11

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Keterangan :

Bun	: Bunostomum sp	Asc	: Ascaris Vitulorum
Cop	: Cooperia pectinita	Gas	: Gastrothylax sp
Oes	: Oesophagostomum sp	Eim	: Eimeria sp
Cap	: Capilaria sp	Par	: Paramphistomum sp
Fas	: Fasciola Hepatika	Tric	: Trichostrongylus
Sch	: Schistosoma sp		

Ternak yang terinfestasi endoparasit, umumnya tidak menyebabkan kematian langsung namun hanya menunjukkan penurunan berat badan pada hewan dewasa dan pertumbuhan yang terhambat pada hewan muda. Disamping itu, dapat menurunkan kondisi tubuh sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penyakit bakterial, viral dan parasiter lainnya. Oleh karena itu,

diharapkan kerjasamanya baik peternak maupun petugas kesehatan hewan untuk memberikan anthelmintika berspektrum luas secara rutin.

2. Pemeriksaan Penyakit Bakteriologi

Pemeriksaan bakteriologi meliputi pewarnaan gram dan kultur jaringan untuk identifikasi jenis bakteri. Kultur jaringan sendiri memerlukan waktu lebih kurang 5 s/d 7 hari sampai ditemukan jenis bakteri.

Tabel 4.89 Hasil pemeriksaan preparat ulas darah (PUD) dan kultur jaringan tahun 2012

No	Kab/ Kota	Jumlah	Hasil Pemeriksaan				
			Gr (+)	Gr (-)	Esch	Shig	Prts
1	Kota Jambi	10	1	5	0	0	0
2	Batanghari	388	36	77	0	4	0
3	Ma. Jambi	362	0	30	0	0	0
4	Tanjabbar	205	2	32	0	0	0
5	Tanjabt看	110	0	12	0	0	0
6	Tebo	85	16	27	10	12	8
7	Bungo	81	0	25	0	0	0
8	Merangin	153	0	14	0	0	0
9	Sarolangun	0	0	0	0	0	0
10	Kerinci	35	0	15	5	0	0
Jumlah Th 2012		1.429	55	237	15	16	8

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Pada tabel menunjukkan jumlah spesimen PUD bakteriologi tahun 2012 menggunakan pewarnaan gram ditemukan sebanyak 55 sampel gram positif dan 237 sampel gram negatif. Pemeriksaan bakteri menggunakan kultur jaringan ditemukan *Shigella* sp, *Eschericia* sp, *Staphylococcus* sp, *Micrococcus* sp dan *Proteus* sp. Spesimen kultur jaringan yang diperoleh ini merupakan kiriman dari petugas lapangan Kabupaten/ kota. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk

mengendalikan bakteri adalah meningkatkan sanitasi lingkungan, meningkatkan higiens pakan dalam merawat ternak dan pemberian antibiotika pada ternak yang sakit. Di bawah ini merupakan tabel pemeriksaan kultur jaringan pada tahun 2012.

Tabel 4.90 Rekapitulasi hasil pemeriksaan kultur jaringan tahun 2012

No	Kab/Kota	Jenis Hewan	Jenis Spesimen	Jumlah Spesimen	Jenis Kuman Hasil Pemeriksaan
1	Batang Hari	Kerbau	Organ	4	Shigella sp
2	Tebo	Sapi	Organ	9	Eschericia sp
					Shigella sp
		Sapi	Organ	12	Shigella sp
					Eschericia sp
3	Bungo	Sapi	Organ	16	Staphylococcus sp
	Bungo	Sapi	Kuman	4	Bakteri gram (+)
		Sapi	Organ	32	Micrococcus sp
					Staphylococcus sp
					Proteus sp

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Berikut merupakan rincian jenis bakteri yang dapat teridentifikasi pada pemeriksaan kultur jaringan selama tahun 2012 sebanyak 77 sampel. Jenis-jenis bakteri yang teridentifikasi adalah :

1) Eschericia sp dan Shigella sp. (sapi)	=	21	(Tebo)
2) Shigella sp. (kerbau)	=	4	(Batang Hari)
3) Staphylococcus sp. (Sapi)	=	16	(Bungo)
4) Bakteri gram (+) (Sapi)	=	4	(Bungo)
5) Microcuccus sp, Proteus sp (Sapi)	=	32	(Bungo)
Jumlah	=	77	sampel

3. Pemeriksaan Virologi

Pemeriksaan Virologi adalah kegiatan melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pemeriksaan, penyidikan dan mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh virus yang dilaksanakan di Laboratorium Keswan dan Kesmavet berupa pemeriksaan penyakit rabies.

Pelaksanaan Kegiatan

Rabies atau dikenal dengan anjing gila merupakan penyakit hewan menular yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan bersifat zoonosis. Penyakit ini sangat ditakuti karena dapat menyebabkan kematian, baik pada hewan maupun manusia. Disamping itu Rabies juga menyebabkan kerugian ekonomi berupa biaya pengobatan yang sering memberatkan masyarakat.

Tabel 4.91. Hasil Pemeriksaan Rabies Tahun 2012

No	Bulan	Jumlah	Hasil Pemeriksaan		
			Positif	Negatif	SKB
1	Januari	13	7	0	6
2	Februari	9	8	0	1
3	Maret	5	5	0	0
4	April	6	6	0	0
5	Mei	7	7	0	0
6	Juni	6	6	0	0
7	Juli	5	5	0	0
8	Agustus	8	8	0	0
9	September	12	11	0	1
10	Oktober	6	6	0	0
11	Nopember	14	13	1	0
12	Desember	4	1	0	0
JUMLAH Th. 2012		95	83	1	8
JUMLAH Th. 2011		121	89	7	25

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Untuk menguji dalam memberikan kepastian terhadap kecurigaan Rabies, dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang diterima dengan permintaan uji rabies. Spesimen yang diperiksa di Laboratorium Virologi dapat berupa cadaver/ bangkai, kepala atau otak/ hypocampus HPR (Hewan Penular Rabies). Spesimen dapat berasal dari petugas Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota maupun masyarakat korban gigitan baik di dalam maupun di luar Provinsi Jambi.

Selama tahun 2012 jumlah sampel untuk pemeriksaan Rabies sebanyak 95 spesimen, berasal dari 9 Kabupaten dan Kota Jambi se-Provinsi Jambi. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 pemeriksaan rabies 121 spesimen, untuk itu terjadi penurunan kasus rabies sebesar 27,36%. Terjadi penurunan kasus rabies sesuai dengan target bebas rabies yang dicanangkan untuk Pulau Sumatera tahun 2015. Berarti masyarakat sudah menyadari bahaya rabies sehingga masyarakat melakukan vaksinasi dan eliminasi. Penurunan rabies diharapkan dapat meningkat sehingga dapat mewujudkan program Sumatra bebas rabies.

d. Pemeriksaan Serologi

• Pemeriksaan Brucellosis

Brucellosis merupakan penyakit hewan menular yang secara primer menyerang ruminansia dan secara sekunder menyerang berbagai jenis hewan lainnya termasuk manusia. Pemeriksaan Brucellosis yang dilaksanakan di Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet menggunakan metode RBPT (*Rose Bengal Plate Test*). Positif Brucellosis pada metode RBPT akan

terlihat adanya penggumpalan yang kasar dan cairan terlihat jernih. Berikut merupakan tabel hasil pemeriksaan Brucellosis di Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Jambi tahun 2012.

Tabel 4.91. Hasil Pemeriksaan Brucellosis dengan Uji RBPT

No	Kabupaten / Kota	Pengambilan		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan RBPT		
		Pasif	Aktif		Positif	Negatif	Rusak
1	Kota Jambi	0	100	100	0	100	0
2	Muaro Jambi	119	127	246	0	246	0
3	Batang Hari	79	373	452	0	452	0
4	Tebo	107	93	200	0	200	0
5	Bungo	139	184	323	0	272	51
6	Sarolangun	86	193	279	0	279	0
7	Merangin	100	149	249	0	249	0
8	Tanjab Barat	175	170	345	0	296	49
9	Tanjab Timur	144	118	262	0	256	6
10	Kerinci	107	0	107	0	107	0
11	Sungai Penuh	0	33	33	0	33	0
JUMLAH		1.056	1.540	2.596	0	2.490	106

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Tabel diatas menunjukkan jumlah sampel yang masuk untuk diperiksa RBPT sebanyak 2.596 sampel. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel serum sebanyak 2.490 sampel menunjukkan bahwa 100% sampel negatif terhadap *Brucellosis*. Hasil negatif menunjukkan bahwa tidak ditemukannya serum yang mengandung antibodi *Brucella sp.* Namun demikian patut diwaspadai, hasil negatif ini bisa jadi merupakan negatif palsu. Negatif palsu pada hasil uji serologis *Brucellosis* dapat diakibatkan karena bakteri masih dalam tahap masa inkubasi. Masa inkubasi merupakan tahapan waktu mulai mikroba masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala klinis. Pada masa inkubasi ini, keberadaan bakteri belum terdeteksi oleh respon

kekebalan tubuh sehingga tubuh belum mengeluarkan sistem imun. Infeksi laten pada sapi dara, sapi bunting dan anak sapi diduga juga bisa menyebabkan negatif palsu. Laten dapat didefinisikan sebagai jeda waktu antara stimulus/ rangsangan dan respon yang terpicu dalam suatu organisme. Infeksi laten tidak menimbulkan gejala penyakit dan keberadaan mikroba tidak terdeteksi. Hal lain yang bisa menyebabkan negatif palsu adalah infeksi kronis atau kemungkinan kesalahan teknis dari petugas dalam hal pemberian label atau pada saat pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan Brucellosis yang tidak dapat diuji sebanyak 106 sampel dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur karena rusak atau autolisis disebabkan oleh faktor pengiriman yang kurang tepat dan faktor listirik saat penyimpanan sampel serum di kabupaten tersebut. Dari Kabupaten Bungo sampel yang rusak sebanyak 51 sampel, Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 49 sampel dan Kabupaten Tanjab Timur sebanyak 6 sampel. Hal ini, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pengiriman dan penanganan sampel yang tepat agar sampel dapat diperiksa dengan baik.

- ***Pemeriksaan Flu Burung/ AI (Avian Influenza) dan ND (New Castle Disease)***

Pemeriksaan AI dan ND yang dilaksanakan di Balai laboratorium Keswan dan Kesmavet menggunakan metode HA-HI. Prinsip dari metode HA-HI AI dan ND adalah mengetahui titer antibodi/ kekebalan tubuh terhadap penyakit AI dan ND. Jumlah sampel yang diperiksa HA-HI terhadap penyakit AI dan ND

berjumlah 542 sampel, berasal dari Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjab Timur dan Kabupaten Tanjab Barat.

Dari tabel 7 menunjukkan 14 sampel seropositif terhadap AI dan 257 sampel seronegatif terhadap AI. Hasil pemeriksaan titer antibodi terhadap AI yang menunjukkan hasil seropositif, berasal dari peternakan ayam yang tidak melakukan vaksinasi AI dan kemungkinan terdapat infeksi dari alam terhadap penyakit AI. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap ND menunjukkan seropositif ND sebanyak 80 sampel dan seronegatif ND sebanyak 191 sampel. Hasil pemeriksaan titer antibodi terhadap ND yang menunjukkan hasil seropositif, berasal dari peternakan ayam yang tidak melakukan vaksinasi ND.

Tabel 4.92 Hasil Pemeriksaan AI dan ND dengan Uji HA-HI

No	Kabupaten	Jumlah	Uji AI		Uji ND	
			Seropositif	Seronegatif	Seropositif	Seronegatif
1	Kota Jambi	184	1	91	37	55
2	Batang Hari	104	7	45	16	36
3	Tanjab Timur	100	4	46	16	34
4	Tanjab Barat	154	2	75	11	66
JUMLAH		542	14	257	80	191

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama terhadap lalu lintas ternak ayam asal luar daerah untuk mencegah kemungkinan masuknya penyakit unggas. Penting juga dilakukan pemeriksaan antibodi secara berkala terutama setelah vaksinasi guna

mengetahui efektifitas vaksin yang dipakai. Selain itu, perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya resiko penyakit AI/ ND, biosecurity kandang dan pemberian desinfektan secara teratur untuk menghindari timbulnya penyakit.

- **Pemeriksaan Hog Cholera**

Hog Cholera merupakan salah satu penyakit babi yang sangat menular yang telah dimasukkan ke dalam 12 Penyakit Hama Menular (PHM) yang mendapat Prioritas Pengendalian/Pemberantasan pada Peraturan Direktur Jenderal Peternakan No.59/Kpts/PD.610/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang menggantikan Kep Dirjen Nak No. 103/TN.510/Kpts/DJP/0398. Oleh karena itu, dalam rangka pembebasan Hog Cholera di Provinsi Jambi dan wilayah Regional II, perlu dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel terhadap Hog Cholera. Berikut merupakan data sampel Hog Cholera tahun 2012.

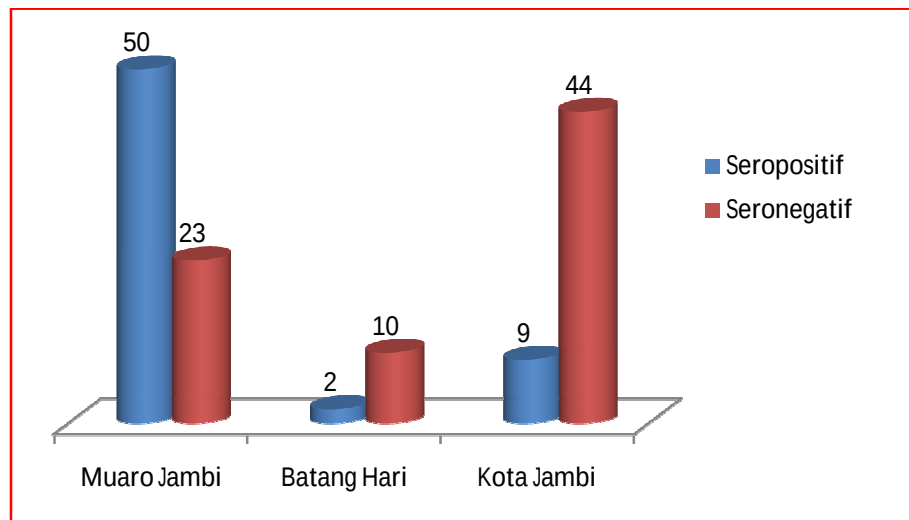
Tabel 4.93 Jumlah pengambilan sampel Hog Cholera tahun 2012

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jenis Sampel	Jumlah
1	Muaro Jambi	Mestong	Pondok Meja	Serum	73
2	Batang Hari	Muara Bulian	Kampung Baru	Serum	12
3	Kota Jambi	Jambi Timur	Sijenjang	Serum	53
JUMLAH					138

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Pemeriksaan Hog Cholera dilaksanakan di BPPV Regional II Bukittinggi menggunakan ELISA. Prinsip

pengujian menggunakan ELISA adalah ikatan antigen dan antibodi yang dibantu dengan ELISA reader untuk visualisasi hasil reaksi enzim dengan indikator perubahan warna. Berikut merupakan hasil pemeriksaan Hog Cholera tahun 2012.



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi
Gambar 4.21. Hasil Pemeriksaan ELISA Hog

Hasil pengujian sampel serum babi sebanyak 138 sampel dengan uji serologi ELISA terhadap virus Hog Cholera menunjukkan bahwa sebanyak 61 sampel (44,2%) positif antibodi Hog Cholera. Sedangkan sisanya 77 sampel (55,8%) negatif antibodi Hog Cholera. Hasil pemeriksaan titer antibodi terhadap Hog Cholera yang menunjukkan hasil seropositif, berasal dari peternakan babi yang tidak melakukan vaksinasi Hog Cholera. Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama terhadap lalu lintas ternak babi asal luar daerah untuk mencegah kemungkinan masuknya hewan carrier. Sedangkan, hasil titer antibodi positif yang berasal dari peternakan babi

yang melakukan secara rutin vaksinasi Hog Cholera dan kasus kematian babi akibat Hog Cholera secara klinis tidak pernah dilaporkan maka perlu dilakukan vaksinasi ulang untuk menghindari wabah di kemudian hari. Penting juga dilakukan pemeriksaan antibodi secara berkala terutama setelah vaksinasi guna mengetahui efektifitas vaksin yang dipakai.

Selain itu, diperlukan biosecurity dan desinfeksi secara teratur terhadap peralatan dan kandang babi mengingat pakan babi berasal dari sisa makanan dapur maupun restoran. Kondisi kandang dan lingkungan yang terawat dapat mengurangi timbulnya penyakit hewan.

d. Pemeriksaan Patologi Anatomi

Pemeriksaan patologi anatomi adalah kegiatan melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pemeriksaan, penyidikan dan mendiagnosa penyakit dengan spesimen bangkai (cadaver). Spesimen bangkai dilakukan pembedahan (nekropsi) untuk mengetahui organ atau bagian tubuh yang terjadi perubahan sel/jaringan, perubahan warna, perubahan bentuk dan bau akibat infeksi penyakit.

Pada tahun 2012, spesimen patologi anatomi yang dapat diperiksa laboratorium Keswan dan Kesmavet hanya 1 sampel dengan hasil pemeriksaan nekropsi shock akibat tersetrum listrik yang berasal dari Kabupaten Tanjab Timur. Hasil anatomi berupa jantung mengkerut, pulmo hemoragi dan hemoragi pada seluruh organ. Satu hal yang paling penting dalam pemeriksaan patologi anatomi adalah proses pengemasan spesimen yang baik

dengan dilengkapi es batu untuk menghindari autolisis (pembusukan). Di bawah ini merupakan hasil pemeriksaan patologi anatomi tahun 2012.

Tabel 494. Hasil pemeriksaan patologi anatomi tahun 2012

No	Kabupaten/kota	Hewan	Jumlah	Hasil	Diagnosa
1	Tanjab Timur	Harimau Sumatra	1	Tidak menciri penyakit	Shock akibat tersetrum
JUMLAH TH. 2012			1		

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

2. Laboratorium Kesmavet

a. Pemeriksaan Kesmavet

Pemeriksaan Kesmavet adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) yang dikonsumsi masyarakat terhadap kemungkinan pencemaran dan pemalsuan dalam pengolahan maupun penanganannya.

Kegiatan kesmavet yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet di bidang keamanan pangan bertujuan untuk menjamin Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Kegiatan kesmavet meliputi monitoring dan surveillans cemaran mikroba, uji fisik/ kimia, uji formalin dan kehalalan.

Sampel uji kehalalan menggunakan identifikasi daging babi diambil dari Kota Jambi. Disamping itu ada beberapa sampel yang diantar sendiri oleh masyarakat/ konsumen. Pengujian identifikasi daging babi menggunakan alat ELISA (*Enzim Linked Immunosorbent Assay*). ELISA merupakan salah satu

uji yang memanfaatkan prinsip ikatan antar antigen antibodi dan konjugat yang membantu visualisasi hasil reaksi enzim dengan indikator perubahan warna.

Pemeriksaan cemaran mikroba (TPC) yang dilakukan di Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Jambi Tahun 2012 sebanyak 38 sampel. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan cemaran mikroba berupa daging sapi, daging ayam, daging kambing, susu dan daging babi.

Sampel yang menunjukkan cemaran mikroba (> BMCM) sebanyak 58%, hal ini memperlihatkan masih rendahnya penerapan sanitasi, higienis dan penggunaan sarana air yang kurang bersih baik di tempat produksi maupun tempat penjualan daging di pasar. Sampel sebanyak 42% (< BMCM) sudah layak untuk dikonsumsi.

Tabel 4.95. Hasil Pemeriksaan Cemaran Mikroba (TPC) Tahun 2012

No	Asal Sampel	Dg Sapi	Dg Ayam	Dg Kambing	Susu	DagingBabi	<BMCM	>BMCM
1	Kota Jambi	8	6	6	12	1	20	13
2	Muaro Jambi	0	0	0	1	0	1	0
3	Batang Hari	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjab Timur	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanjab Barat	0	0	0	0	0	0	0
6	Sei Penuh	0	0	0	0	0	0	0
7	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0
8	Tebo	0	0	0	0	0	0	0
9	Merangin	0	0	0	0	0	0	0
10	Bungo	0	2	0	0	0	0	2
Jumlah 2012		8	8	6	13	1	21	15
							-58 %	-42 %
Jumlah 2011		21	13	2	0	2	17	31
							-26 %	-47 %

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Keterangan :

BMCM : Batas Maksimum Cemaran Mikroba

TPC : *Total Plate Count*

Dg : Daging

**Tabel 4.96. Hasil Pemeriksaan Identifikasi Daging Babi
Uji ELISA Tahun 2012**

No	Asal Sampel	Bks	Sate	Ngt	Ddg	Sss	Abn	Rdg	DII	Jlh	Elisa Daging	
											(+)	(-)
1	Kota Jambi	86	15	17	6	18	15	4	1	162	0	162
2	Muaro jambi	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	8
3	Batanghari	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	8
4	TanjabTimur	9	10	0	0	0	0	4	0	23	0	23
5	Tanjabbarat	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	8
6	Sei Penuh	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	8
7	Sarolangun	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	8
8	Tebo	6	2	0	0	0	0	0	0	8	0	8
9	Merangin	43	8	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10	Bungo	19	3	0	0	0	0	0	0	22	0	22
11	Kota S.Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Jumlah 2012		193	48	17	6	18	15	8	1	306	0	306
Jumlah 2011		136	56	4	2	4	6	0	0	208		

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Keterangan :

Bks : Bakso Sss : Sosis
 Ngt : Nugget Abn : Abon
 Ddg : Dendeng Rdg : Rendang

Hasil pemeriksaan ELISA identifikasi pemalsuan daging babi yang dilakukan tahun 2012 dari sampel sebanyak 74, tidak ada menunjukkan (+) daging babi, Sampel yang diperiksa diambil dari Kota Jambi. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 menunjukkan 1 positif daging babi. Berarti masyarakat sudah mulai mengetahui tentang daging yang ASUH. Untuk menghindari pemalsuan daging petugas bidang Kesmavet harus selalu melakukan surveillans dan monitoring terhadap sampel PAH dan HPAH di Kabupaten/Kota Jambi.

Tabel 4.97. Hasil pemeriksaan uji formalin dan fisik/ kimia tahun 2012

No	Asal Sampel	Jenis Sampel									Formali	
		Bks	Sss	Ngt	Abn	Dg Bb	St	Dg Sp	Dg Ay	Dg Kbg	(+)	(-)
1	Kota Jambi	10	4	3	4	1	8	4	6	3	0	43
2	Muaro jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TanjabTimur	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	19
5	Tanjabbarat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sei Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sarolangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Merangin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bungo	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
Jumlah 2012		29	4	3	4	1	18	4	8	3	0	74
Jumlah 2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Keterangan :

Bks : Bakso Dg bb: Daging babi
 Sss : Sosis St : Sate
 Ngt : Nugget Dg sp: Daging sapi
 Abn : Abon Dg ay: Daging Ayam
 DgKbg : Daging Kambing

Pemeriksaan fisik/ kimia dilakukan pada semua sampel PAH/ HPAH di Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Jambi sebagai pemeriksaan awal untuk melihat normal/ abnormal sampel mengenai warna, bau, pH dan konsistensi. Sampel pemeriksaan fisik/ kimia dan uji formalin yang telah dilaksanakan sebanyak 74 sampel.

B. Kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 498.351.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 489.522.000,00 (98,23%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut :

1. Pertemuan Koordinasi Kesehatan Hewan

Kegiatan pertemuan koordinasi kesehatan hewan dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 11 s/d 12 Juli 2012 bertempat di Hotel Ceria Jambi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap program kesehatan hewan di lapangan.
2. Menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pertanggung jawaban keuangan.
3. Menumbuhkan kembangkan semangat dan gairah petugas kesehatan hewan dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Meningkatkan pengetahuan petugas tentang kesehatan hewan.
5. Silaturahmi petugas kesehatan hewan dan pengawas lalu lintas ternak se-Provinsi Jambi.

Jumlah peserta dalam kegiatan Pertemuan Koordinasi Keswan Tahun 2012 adalah 60 orang, terdiri dari pejabat eselon III bidang kesehatan hewan, petugas medis dan paramedis serta petugas lalu lintas ternak dari Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Hasil rumusan pertemuan koordinasi kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

1. Operasional kegiatan di bidang kesehatan hewan yang didanai dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dapat dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2012.
2. Bagi Dinas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan vaksinasi baik Rabies dan SE supaya mengambil/mengajukan permintaan vaksin ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi di bidang kesehatan hewan.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan kegiatan operasional kesehatan hewan baik itu vaksinasi, eliminasi, penyemprotan desinfektan dan penanggulangan gangguan reproduksi, supaya segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dan dikirim ke Provinsi.
4. Pada tanggal 1 November 2012 merupakan batas waktu berapa realisasi kegiatan operasional kesehatan hewan yang mampu dikerjakan oleh Kabupaten/Kota. Apabila Kabupaten/Kota tidak mampu melaksanakan kegiatan 100%, maka sisanya akan dialihkan ke Kabupaten/Kota lainnya yang masih mampu.
5. Semua kegiatan operasional dibidang kesehatan hewan dilampirkan dokumentasi berupa foto.
6. Masing-masing Kabupaten/Kota supaya menunjuk kontak person yang dapat dihubungi apabila ada kesalahan dalam penyelesaian SPJ.
7. Untuk pertemuan yang akan datang supaya ada narasumber dari Pusat.

8. Tempat pertemuan Koordinasi Kesehatan Hewan diusulkan untuk dilaksanakan secara bergilir di masing-masing Kabupaten/Kota.

2. Belanja Bahan Kimia dan Peralatan Pemberdayaan Puskesmas

Belanja bahan kimia dan peralatan pemberdayaan puskesmas dilaksanakan untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan pelayanan kesehatan hewan dilapangan. Daftar barang yang diadakan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.98. Bahan kimia dan peralatan pemberdayaan puskesmas

No	Uraian Barang	Vol	Satuan
1	Sprit fiber glass	10	Buah
2	Sprit disposibel 1 ml	1.000	Buah
3	Sprit disposibel 3 ml	1.000	Buah
4	Sprit disposibel 10 ml	1.500	Buah
5	Jarum suntik fiber glass	10	Kotak (@ 12 buah)
6	Pakaian lapangan	10	Stel
7	Ice box	10	Buah
8	Sepatu lapangan	10	Psg
9	Aquadest	20	Btl/500 ml
10	Kapas	10	Bgks/kg
11	Alkohol 70 %	10	Btl/liter
12	Tas Obat	10	Buah
13	Brongsong anjing	10	Buah
14	Peralatan operasi minor	10	Paket

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran tahun 2012 terlaksana pengadaan bahan kimia dan peralatan pemberdayaan puskesmas. Daftar barang yang diadakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.99. Bahan kimia dan peralatan pemberdayaan puskesmas Anggaran Perubahan

No	Uraian Barang	Vol	Satuan
1	Sprit disposibel 3 ml	3.000	Buah
2	Sprit fiber glass	6	Buah
3	Ice Box	30	Buah

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

3. Belanja Bahan Kimia

Melalui Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan belanja bahan kimia sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.100. Daftar Belanja Bahan Kimia Anggaran Perubahan

No	Uraian Barang	Vol	Satuan
1	Ketamin 50 ml	1	Botol
2	Vaksin Anthraks	1.000	Dosis

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

4. Belanja Modal Peralatan Laboratorium

Melalui Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan Belanja modal peralatan laboratorium sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 4.101. Daftar Pengadaan peralatan laboratorium tahun 2012

No	Uraian Barang	Vol	Satuan
1	Refrigerator Depo	2	Buah
2	Kulkas penyimpan vaksin rabies	11	Buah

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

5. Operasional Vaksinasi Anthraks

Vaksinasi anthraks dilaksanakan di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi yang pernah terjadi kasus anthraks. Petugas pelaksana vaksinasi anthraks ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi nomor: 3554/KPTS/DISNAK-4.1/2012 tentang Penetapan Petugas Vaksinasi Anthraks. Realisasi vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari sebanyak 500 ekor dan di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 500 ekor.

6. Cetak Brosur Rabies

Dalam rangka sosialisasi tentang bahayanya penyakit rabies maka dilaksanakan pembuatan brosur rabies yang bertujuan agar masyarakat lebih waspada terhadap penyakit rabies. Melalui anggaran yang tersedia telah dilaksanakan pencetakan dan penyebaran brosur rabies sebanyak 1.000 lembar.

7. Honor Petugas Pelaporan Rabies

Honor petugas pelaporan rabies diberikan kepada petugas lapangan di Kabupaten/Kota yang merekap laporan kejadian gigitan Hewan Penyebar Rabies (HPR) untuk mengetahui secara pasti jumlah penyakit Rabies di Provinsi Jambi. Petugas ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi nomor: 3569/KPTS/DISNAK-4.1/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan Petugas Pelaporan Rabies. Honor diberikan kepada 13 orang petugas terdiri atas 11 orang petugas pelaporan berasal dari dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dan

2 orang petugas pelaporan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Jumlah honor yang diberikan adalah Rp. 250.000,-/orang/triwulan selama 2 triwulan. Pemberiaan honor ini diharapkan mampu menambah motivasi dan semangat para petugas dalam melakukan pemantauan dan pencatatan kejadian rabies dalam Provinsi Jambi.

2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN

Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan utama yaitu Kegiatan Pengembangan Balai Perbibitan Ternak serta Kegiatan Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan.

Pada program ini dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan penyediaan daging ternak besar (sapi dan kerbau) dalam menunjang program nasional swasembada daging sapi 2014.

A. Kegiatan Pengembangan Balai Perbibitan Ternak

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.451.772.000,00 dengan serapan dana sebesar Rp.1.183.170.000,00 (81,50%) serta realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Pengawasan Kelahiran Ternak Hasil IB

Pada tahun 2012 ditargetkan kelahiran anak hasil IB sebanyak 6000 ekor. Untuk memberikan motivasi kepada petugas IB (Inseminator) dalam upaya pencapaian target kelahiran anak hasil IB maka diberikan insentif sebesar Rp. 100.000,00 per kelahiran melalui Inseminasi Buatan. Realisasi kelahiran anak hasil

IB pada tahun 2012 sebanyak 4.814 ekor. Belum tercapainya target IB ini salah satunya disebabkan karena terbatasnya petugas inseminator dan sarana pelayanan IB yang ada saat ini.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja petugas IB dilapangan maka dilaksanakan pertemuan yang bertujuan menambah pengetahuan dan menggali permasalahan dilapangan untuk perbaikan kinerja serta meningkatkan silaturahmi antar petugas berupa Pertemuan Apresiasi Petugas IB se-Provinsi Jambi dan Pertemuan Evaluasi Kinerja Petugas IB.

b. Pembangunan Kandang Sapi

Tahun 2012 telah terlaksana pembangunan 2 (dua) unit kandang untuk sapi pembibitan dan sapi bull.

c. Pendistribusian Semen Beku dan N2 Cair

Pada tahun 2012 telah terealisasi pendistribusian N2 cair ke 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi

d. Pengadaan Ternak

Telah terlaksana Pengadaan ternak sapi bibit sebanyak 10 (sepuluh) ekor dan sapi bull 3 (tiga) ekor.

B. Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan

Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Budidaya Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pengembangan kawasan peternakan. Khusus untuk kawasan peternakan sapi potong, kegiatan utama yang dilakukan adalah peningkatan populasi melalui pemasukan

sapi/kerbau betina bibit serta perbaikan mutu genetis ternak melalui penerapan IB (Inseminasi Buatan).

Pada tahun 2012 melalui Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan untuk mendukung Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Nasional tahun 2014 telah melaksanakan penyebaran ternak antara lain : kerbau betina sebanyak 50 ekor, sapi penggemukan sebanyak 204 ekor serta satu kegiatan penyebaran ayam buras sebanyak 300 ekor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.451.674.500,00 dengan serapan dana sebesar Rp. 2.364.531.000 (96,45%) dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Uraian pelaksanaan kegiatan disajikan sengaai berikut :

a. Pengadaan ternak kerbau

Telah terlaksana penyebaran kerbau betina sebanyak 50 (lima puluh) ekor di 5 (lima) kabupaten terpilih. Setiap kabupaten menerima 10 (sepuluh) ekor kerbau betina. Uraian lokasi penyebarab ternak kerbau betina sebagai berikut :

1. Kabupaten Ma. Jambi, Decamatan Bahar Selatan, desa Tanjung Sari, Kel.Harapan Baru.
2. Kabupaten Sarolangun,Kecamatan Mandiangin, Desa Mandiangin, Kel Tuo Sekato.
3. Kabupaten Merangin, kecamatan Jangkat, Desa Ma. Madras, Kelompok Tunas Muda
4. Kabupaten Bungo, Kecamatan Bathin III Ulu, Dusun Buat, Kelompok Buat Mandiri.
5. Kabupaten Tebo,Kecamatan Tebo Ulu, Desa Benteng, Kelompok Buana Mandiri 5 ekor dan Desa Teluk Kuali Kelompok Karya Bersama.

b. Pengadaan ternak sapi penggemukan

Pengadaan ternak sapi penggemukan bertujuan sebagai penyangga untuk menghadapi hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri. Lokasi penyebaran sapi penggemukan diutamakan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan mengurangi resiko dan memudahkan dalam pengawasan, perawatan serta penarikan kembali.

Uraian lokasi penyebaran sapi penggemukan sebagai berikut :

1. Kota Jambi sebanyak 54 ekor.
2. Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 150 ekor.

c. Penyebaran Ayam Buras

Kegiatan dilaksanakan pada kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebanyak 100 ekor untuk masing –masing pada Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kec. Ma. Sabak Barat, Kelompok Talang Babat.
2. Kabupaten Bungo, Kecamatan Bathin III Ulu, Desa Sungai Telang, Kelompok Lubuk Tuman.
3. Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Mandiingin, Desa Guruh Baru. Kelompok Bukit Subuh.

Melalui kegiatan ini juga berkaitan dengan penyebaran ternak pemerintah maka pada tahun 2012 diperoleh PAD (Pemasukan Asli Daerah) yang bersumber dari gaduhan ternak sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.102. Capaian PAD dari Ternak Pemerintah Tahun 2012

No.	Jenis Penarikan	Jumlah	
		Target	Realisasi
1.	Penjualan ternak tidak layak bibit, ternak mati dan potong paksa	140.800.000	662.386.000
2.	Penjualan ternak penggemukan	1.200.000.000	1.103.487.300

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Dalam rangka mensinergikan dan saling bertukar informasi serta diskusi bersama telah dilaksanakan pula pertemuan petugas pengelola ternak pemerintah yang dihadiri 40 (empat puluh) peserta dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN

Terdapat satu kegiatan utama dalam program ini yaitu Kegiatan Penyuluhan dan Penguatan Kelembagaan Peternakan. Pengelola kegiatan ini adalah Bidang Usaha Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 470.475.000,00 dengan serapan dana sebesar Rp. 434.288.200,00 (92,31%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pokok kegiatan yang dilaksanakan meliputi pameran hasil peternakan sebagai promosi produk pertanian, pembinaan kelompok tani ternak dan pembuatan biogas.

a. Pameran Hasil Peternakan

Pameran hasil peternakan bertujuan untuk :

- a. Memecahkan masalah yang dihadapi petani atau pengusaha terutama dalam hal pemasaran.

- b. Memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk-produk peternakan dan hasil olahannya.
- c. Memberikan informasi peluang investasi di bidang peternakan kepada para investor/pemilik modal.
- d. Meningkatkan kualitas hasil produk peternakan serta olahannya sehingga mampu bersaing di pasaran.
- e. Mendapatkan masukan informasi pasar yang lebih akurat sehingga dapat dibuat perencanaan produksi hasil-hasil peternakan dan olahannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pameran hasil peternakan yang diikuti antara lain :

1. Jambi Emas Expo 2012

Kegiatan ini sebagai sarana promosi dan publikasi produk dan karya-karya inovasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh industri, masyarakat luas dan Pemerintah Daerah. Dilaksanakan pada tanggal 9-14 Februari 2012 di Arena Eks MTQ Jambi dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar.

2. Hari Krida Pertanian

Hari Krida Pertanian (HKP) merupakan hari bersyukur, hari berbangga hati sekaligus hari mawas diri serta hari dharma bakti. HKP diperingati oleh segenap masyarakat pertanian yakni para petani, peternak, nelayan, pegawai dan pengusaha yang bergerak disektor pertanian.

Peringatan HKP ke-40 tingkat Provinsi Jambi diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2012 di Desa Panap Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Peringatan HKP tingkat Provinsi Jambi dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi. Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Jambi mengikuti kegiatan ini berupa gelar teknologi peternakan dengan menampilkan display kegiatan, produk-produk peternakan serta penyebaran leaflet/brosur.

3. Pameran Ulang Tahun Jambi tahun 2012

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati Ulang Tahun Jambi ke-55 yang bertujuan untuk memperkenalkan/memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh instansi, BUMD serta mitra binaannya, badan usaha swasta, UKM dan Koperasi yang ada di Provinsi Jambi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Pameran Potensi Daerah dan Hasil Pembangunan Daerah

4. Bazar Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2012.

b. Pembinaan Kelompok Tani Ternak

Untuk pembinaan kelompok tani ternak dilaksanakan berupa kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). KUPS adalah skim kredit yang digunakan untuk mendanai pengembangan usaha agar mampu menyediakan sapi, memenuhi prosedur baku dan melakukan kemitraan. Bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha sebesar 5% pertahun dengan jangka kredit paling lama 5 (lima) tahun dengan masa tenggang (grace periode) selama 24 (dua puluh empat) bulan. Sosialisasi KUPS di Provinsi Jambi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Sosialisasi pertama diadakan di Hotel Ceria Jambi pada tanggal 24 April 2012 dan sosialisasi kedua di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi pada

tanggal 6 Agustus 2012. Sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas yang membidangi peternakan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peternak, Gapoknak, dan Koperasi Peternakan calon penerima dana KUPS untuk tahun 2013 dengan total dana yang diusulkan sebanyak Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah).

c. Pembuatan Biogas

Teknologi biogas merupakan teknologi tepat guna untuk mengolah limbah padat (tinja dan isi rumen) dan limbah cair (urine dan air pencucian kandang/ternak) yang dihasilkan dari usaha peternakan. Pengolahan yang dilakukan dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta memanfaatkan limbah sebagai produk berdaya guna penghasil sumber energi berupa bahan bakar gas (gasbio) dan dapat pula menghasilkan pupuk organik padat dan cair yang bermutu bagi usaha pertanian. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembangunan 2 (dua) unit biogas yang berlokasi di UPTD Pembibitan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dan di kelompok tani Teman Abadi Desa Kasang Pudak Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

d. Pengembangan Budidaya Lebah Madu

Sebagai salah satu alternatif usaha dibidang peternakan, budidaya lebah madu dirasa cukup baik untuk dijadikan pilihan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Pada tahun 2012 telah terlaksana kegiatan pengembangan budidaya lebah madu sebanyak 5

(lima) paket yang diserahkan kepada masyarakat di Kota Jambi (3 paket) dan Kabupaten Muaro Jambi (2 paket).

Setiap paket yang diserahkan terdiri atas :

- a. 1 (satu) unit kandang
- b. 1 (satu) ekor lebah ratu
- c. 5 (lima) ekor lebah pejantan
- d. 1000 (seribu) ekor lebah pekerja

4. PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI KESMAVET

Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan utama yaitu kegiatan penyediaan produk hewan yang ASUH dan kegiatan pengembangan kebun binatang taman rimbo.

Realisasi program diuraikan sebagai berikut.

A. Kegiatan Penyediaan Produk Hewan yang ASUH

Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Kesmavet pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 352.879.500,00 dengan serapan dana sebesar Rp. 352.079.500,00 (99,77%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan peredaran PAH

Dalam rangka jaminan keamanan kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) perlu adanya pengawasan peredaran PAH. Pengawasan PAH yang dilakukan terhadap daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam dan olahan, terdiri dari daging sapi 30 sampel, daging ayam 30 sampel, telur ayam 20 sampel dan olahan 120 sampel.

Kegiatan pengawasan ini mulai dari pengambilan sampel, pengiriman sampel dan pemeriksaan sampel.

Pengawasan yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, swalayan, RPH dan TPH dalam wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Pemeriksaan sampel ditujukan untuk mengetahui:

1. Tingkat cemaran mikroba, TPC, E.coli, Coliform, Salmonella dan residu antibiotika.
2. Tingkat hygiene-sanitasi pangan yang beredar
3. Tingkat keutuhan pangan yang beredar

Pemeriksaan sampel PAH untuk mengetahui cemaran mikroba dilakukan di BPPV Regional II Bukittinggi. Hasil Laboratorium menunjukkan bahwa dari 80 sampel yang diperiksa terhadap TPC (cemaran mikroba) ternyata cemaran mikroba 76 sampel masih diatas batas maksimal (95,00 %). Setelah dilakukan identifikasi maka tidak ditemukan (0,00 %) cemaran Coliform, E. Coli, Salmonella dan Residu antibiotika. Sedangkan terhadap pencampuran dengan daging babi tidak ditemukan (0,00 %), dengan kata lain bahwa pangan asal hewan (PAH) yang beredar tidak bercampur dengan daging babi.

2. Sosialisasi Kesmavet

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang pangan asal hewan yang ASUH baik dikalangan instansi pemerintahan maupun masyarakat.

Kegiatan yang sudah dilakukan adalah:

1. Road Show Public awareness Kesmavet. Kegiatan ini sebagai narasumber adalah Gubernur Jambi, Bupati Muaro Jambi, Direktur Kesmavet dan Pasca Panen serta ahli kesmavet DR. Denny Wijaya Lukman.

Semnetara yang hadir semua SKPD lingkup Provinsi Jambi dan lingkup Kab. Muara Jambi, para undangan yang terdiri dari peternak, pelaku usaha, PKK, Dharma wanita, pejabat, tokoh masyarakat, guru dan masyarakat sekitar. Jumlah audiens dalam Public Awereness berjumlah 100 orang.

2. Iklan di Media elektronik, kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu iklan sosialisasi pangan yang ASUH dan sosialisasi pemotongan dan pengawasan hewan qurban.

C. Sertifikasi Juru Sembelih Halal

Kegiatan ini dilakukan terhadap juru sembelih sapi dan ayam yang ada di Kab/Kota se Provinsi Jambi bekerja sama dengan LP POM MUI, MUI Provinsi Jambi dan Kemenag Provinsi Jambi. Jumlah juru sembelih yang sudah disertifikasi adalah 22 orang, terdiri dari juru sembelih sapi/kerbau sebanyak 8 orang dan juru sembelih ayam sebanyak 14 orang.

B. Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.001.142.000,00 dengan serapan dana sebesar Rp. 2.911.907.750,00 (97,03%) dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pemeliharaan dan perawatan hewan satwa yang ada dalam UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi. Sejak diresmikan pada tanggal 7 Agustus 2009 oleh Gubernur Jambi Kebun

Binatang Taman Rimbo Jambi terus berbenah diri agar pengembangannya lebih tertata, indah dan layak dikunjungi sebagai tempat rekreasi yang murah dan kaya pengetahuan tentang satwa.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah dalam Provinsi Jambi untuk mempromosikan Kebun Binatang Taman Rimbo sebagai tempat pendidikan dan pengenalan satwa terhadap para siswa sekolah maka sepanjang tahun 2012 tercatat sebanyak 646 sekolah yang melakukan kunjungan ke Kebun Binatang Taman Rimbo. Jumlah kunjungan sekolah/umum tahun 2012 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.103 Kunjungan Sekolah/Umum di Kebun Binatang Taman Rimbo tahun 2012

NO	BULAN	KB / T K	SD	SLTP	SLTA	PT	Organisasi
1.	Januari	5	1	-	-	2	2
2.	Februari	2	4	1	1	-	4
3.	Maret	2	1	-	-	5	-
4.	April	10	5	1	2	1	3
5.	Mei	39	206	26	4	-	14
6.	Juni	142	70	14	6	-	5
7.	Juli	1	-	-	-	-	2
8.	Agustus	-	-	-	-	-	1
9.	September	1	1	-	-	-	1
10.	Oktober	5	1	-	2	1	-
11.	November	8	4	-	-	-	6
12.	Desember	26	4	2	-	1	1
	JUMLAH	241	297	44	15	10	39

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Jumlah kunjungan sekolah tersebut diatas mengalami peningkatan yang sangat signifikan (215,33%) bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan sekolah pada tahun 2011 sebanyak 300 sekolah.

Total kunjungan masyarakat umum di Kebun Binatang Taman Rimbo pada tahun 2012 juga melebihi target yang ditetapkan. Target jumlah pengunjung yang ditetapkan

sebanyak 250.000 orang bisa tercapai bahkan melebihi dengan jumlah pengunjung yang datang pada tahun 2012 sebanyak 364.945 orang. Jumlah kunjungan sepanjang tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.104 Data pengunjung Kebun Binatang Taman Rimbo Tahun 2012

NO	BULAN	DEWASA	ANAK-ANAK	JUMLAH
1	Januari	22.700	9.293	31.993
2	Februari	11.135	3.965	15.100
3	Maret	13.554	5.042	18.596
4	April	13.576	4.911	18.487
5	Mei	16.368	9.177	25.545
6	Juni	23.870	13.060	36.930
7	Juli	13.615	5.654	19.269
8	Agustus	59.282	26.667	85.949
9	September	16.400	5.611	22.011
10	Oktober	17.050	6.183	23.233
11	November	17.877	6.652	24.529
12	Desember	29.573	13.730	43.303
	Jumlah	255.000	109.945	364.945

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Dari kunjungan yang melebihi target tersebut dengan sendirinya mampu meningkatkan jumlah PAD melalui retribusi tiket masuk dan potensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Dengan harga karcis anak-anak Rp 2.500,- dan dewasa Rp. 5.000,- maka total pendapatan dari karcis masuk diperoleh sebesar Rp 1.573.704.500,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah). Besaran PAD yang dihasilkan Kebun Binatang Taman Rimbo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.105. Realisasi PAD Kebun Binatang Tahun 2012

NO	JENIS SETORAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Retribusi Karcis Masuk	1.287.000.000,-	Rp.1.573.704.500,-
2	Kuda Tunggalan	7.200.000,-	Rp. 7.200.000,-
	JUMLAH	1.294.200.000,-	Rp.1.580.904.500,-

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi

Tahun 2012 pendapatan dari jasa parkir belum dapat direalisasikan karena masih dalam tahap pembangunan oleh rekanan dan rencananya akan dikerjasamakan dengan warga masyarakat dibawah koordinasi Kelurahan Talang Bakung. Penggalan potensi PAD baru lainnya adalah dengan diupayakan menjinakan gajah “Yanti dan Alfa” untuk dapat ditunggangi sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan baru melalui retribusi gajah tunggalan. Selain itu pada tahun 2013 direncanakan melalui upaya pemberdayaan warga sekitar kebun binatang akan dimanfaatkan areal depan kantor kebun binatang sebagai arena parkir, kios cinderamata dan entertain lainnya yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan yang lebih besar.

Kegiatan Fisik Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi TA. 2012 adalah :

1.Perbaikan kandang satwa.

Diprioritaskan untuk perbaikan kandang yang mengalami kerusakan antara lain kandang mamalia, kandang siamang, kandang buaya dan kandang tapir.

2.Pengecatan pagar dan pembuatan taman

Dipergunakan untuk pengecatan pagar bunbin, loket, kandang ungko, uwo, ular, mamalia kecil dan toilet serta pembuatan taman air mancur sebanyak 2 unit.

3. Belanja jasa konsultasi perencanaan

Adalah perencanaan untuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain : master plan pembangunan kebun binatang, perencanaan taman kupu-kupu, kolam renang, kandang reptil, kera, kuda, jembatan penyeberangan, pagar keliling, rumah jaga, rest area, balairung, ofset satwa, toilet dan pembangunan ruang bilas.

4. Pengadaan alat-alat peternakan

Pengadaan peralatan klinik hewan adalah yang terdiri dari 2 set kursi tunggu pasien, 1 unit kulkas, 1 unit TV, 1 unit dispenser, 2 buah tempat tidur, 1 set kompor gas, 1 set peralatan dapur, 2 unit mesin pompa air, 2 buah tedmon penampung air dan seperangkat peralatan sound sistem dan 2 unit printer.

5. Pengadaan konstruksi / bangunan TA. 2012

- a. Pembangunan gerbang masuk.
- b. Pemagaran areal parkir
- c. Pembangunan klinik dan kandang isolasi
- d. Penambahan tinggi pagar dan drainase
- e. Pembangunan gerbang keluar
- f. Pembangunan kandang gajah
- g. Pembuatan toilet dan sumur bor
- h. Penimbunan tanah
- i. Pembangunan kios souvenir
- j. Pemasangan conblok areal klinik
- k. Pembuatan papan nama satwa besar & kecil.
- l. Pembuatan tempat sampah
- m. Pembuatan shelter oleh
- n. Pembangunan musholah
- o. Pembangunan kandang macan dahan

Untuk menambah koleksi satwa kebun binatang taman rimbo maka pada tahun 2012 dilaksanakan penambahan satwa antara lain :

1. Kalkun jantan 2 ekor dan betina 1 ekor
2. Ayam Mutiara 2 ekor
3. Ayam Ketawa jantan 1 ekor dan betina/induk 3 ekor
4. Anak ayam ketawa 2 ekor
5. Ayam Pelung jantan 1 ekor dan betina 1 ekor
6. Ayam kokok belengek jantan 2 ekor
7. Anak buaya jinak 1 ekor
8. Kukang 1 ekor
9. Burung kakak tua jinak 1 ekor
10. Tupai terbang 1 ekor
11. Burung elang bondol 1 ekor
12. Burung elang jantan 1 ekor.

C. KEGIATAN, PERISTIWA DAN KUNJUNGAN TAHUN 2012

1. Tanggal 1 Januari 2012, Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi pertama kali mengadakan Parade Satwa. Kegiatan ini cukup menyedot kehadiran pengunjung ke kebun binatang. Jenis satwa yang mengikuti parade adalah satwa jinak yang telah berinteraksi dengan pengunjung seperti : ular sanca albino, sanca kembang, kakak tua, beruang, kuda, siamang, iguana, kura-kura sulcata, kelinci angora.
2. Tanggal 12 Maret 2012, Senin pukul 9.00 WIB terjadi peristiwa yang diluar dugaan, yakni lepasnya Harimau Sumatera Jantan “peter” dari kandangnya yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Piter dapat ditangkap kembali ± 1 jam melalui pembiusan

menggunakan tulup oleh Team yang berasal dari kebun binatang dan BKSDA Jambi.

3. Tanggal 5 Juni 2012 kunjungan Wagub. Jambi sehubungan dengan kelahiran rusa sambar sumbangan dari Bapak H. Fachrori Umar. Anak rusa yang baru lahir langsung diberinya nama “Tulip”
4. Tanggal 15 Juli 2012, Kunjungan Menteri Pertanian RI (Dr. Ir. H. Suswono, MMA) ke Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi.
5. Tanggal 29 Juli 2012, hari konservasi harimau se-dunia (Tiger Day), diadakan dengan dilandasi kepedulian, keprihatinan dan kenyataan bahwa kondisi hutan dan alam lingkungan Indonesia telah menunjukan titik yang sangat mengkhawatirkan. Bencana alam yang tiada henti menyadarkan kita bahwa sudah tidak ada lagi harmonisasi kehidupan di alam. Pada kegiatan ini pengelola kebun binatang Jambi bersama BKSDA Jambi melaksanakan lomba mewarnai dan melukis satwa harimau untuk anak sekolah TK dan SD.
6. 31 Juli 2012, kunjungan Direktur PHKA (Dr.Ir. Novianto Bambang W, Msi) dan Bapak Tony Sumampau (Pengurus PKBSI) beserta rombongan Jambi dalam rangka expose peluang kebun binatang Taman Rimbo Jambi untuk menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan Bapak Gubernur Jambi bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
7. 15 September 2012, mengikuti Rakornas PKBSI di Jogjakarta sekaligus study banding pengelola kebun binatang Jambi ke Bunbin Gembira Loka Yogyakarta.

8. 10 November 2012, Selamat datang “Alfa” gajah jantan dari balai konservasi WKS Sei. Tapa dalam rangka kesejahteraan satwa dan meningkatkan fungsi kebun binatang sebagai edukasi masyarakat di bidang konservasi.
9. 31 November 2012, Kebun Binatang Jambi turut serta mensukseskan kegiatan Perkempinas (Perkemahan Putri Nasional) dengan menggratiskan peserta pramuka yang berkunjung. Menerima Tim Penilai Adipura bersama tim BLH Kota Jambi.
10. 25 Desember 2012, dilaksanakan lounching gajah tunggang. Dihadiri Bapak Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus dan Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar. Pada kesempatan itu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur juga berkesempatan untuk menunggang gajah.

Salah satu kegiatan yang penting dilakukan di kebun binatang adalah pendataan satwa yang dilakukan secara periodik setiap bulan baik populasi maupun mutasi satwa yang terjadi. Hasil pendataan satwa sepanjang tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.106 Pendataan satwa kebun binatang tahun 2012

NO	KELAS DAN JENIS SATWA	KEADAAN AWAL 2012	SATWA MASUK			MUTASI		JUMLAH
			SUMBANGAN	PEMBELIAN	LAHIR	MATI	DISUMBANGKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MAMALIA							
1	Gajah Sumatra	1	1	0	0	0	0	2
2	Harimau Sumatra	4	2	0	2	1	0	7
3	Beruang Madu	6	1	0	1	2	0	6
4	Binturung	1	0	0	0	0	0	1
5	Rusa Tutul	11	0	0	6	0	4	13
6	Rusa Sambar	3	0	0	1	0	0	4
7	N a p u	6	0	0	1	3	0	4
8	Ungko	7	4	0	0	2	1	8
9	Siamang	3	0	0	0	0	0	3
10	Beruk	2	2	0	0	1	0	3
11	Monyet Ekor Panjang	4	1	0	0	1	0	4
12	Landak	9	0	0	1	0	0	10
13	Musang	3	0	0	0	0	0	3
14	Kuda Poni	4	0	0	2	0	0	6
15	Kukang	1	4	1	0	1	0	5
16	Kelinci	37	0	0	0	17	14	6
17	Marmaut	18	0	0	17	0	0	35
18	Tupai	3	0	0	0	1	0	2
19	Tapir	1	1	0	0	0	0	2
20	Kangguru Irian	1	1	0	0	0	0	2
21	Rusa Timur	1	0	0	0	0	0	1
22	Kancil	0	2	0	0	0	0	2
23	Tupai terbang	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah I		126	19	2	31	29	19	130

NO	KELAS DAN JENIS SATWA	KEADAAN AWAL 2012	SATWA MASUK			MUTASI		JUMLAH
			SUMBANGAN	PEMBELIAN	LAHIR	MATI	DISUMBANGKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Buaya Muara	1	0	0	0	0	0	1
3	Biawak	1	2	0	0	0	0	3
4	Iguana Hijau	3	0	0	0	0	0	3
5	Ular Sanca	6	0	0	0	3	0	3
6	U. Sanca Albino	2	0	0	0	0	0	2
7	Labi-labi besar	1	0	0	0	0	0	1
8	Kura-kura besar	3	0	0	0	1	0	2
9	Kura-kura kecil	6	0	0	2	0	0	8
10	Kura2 Sulcatta	2	0	0	0	2	0	0
11	Kura2 Radiatta	2	0	0	0	1	0	1
Jumlah II		32	2	1	2	7	4	26
III	A V E S							
1	Ay.Tibet/Kuau luar	1	0	0	0	0	0	1
2	Sempidan biru	1	0	0	0	0	0	1
3	Angsa	3	0	0	0	0	0	3
4	Brg.Bayan Merah	3	0	0	0	0	0	3
5	Brg. Kangkareng hitam	1	0	0	0	0	0	1
6	Brg Kangkareng perut putih	1	0	0	0	0	0	1
7	BangauTong-ong	8	0	0	2	0	1	9
8	B. Dara Mahkota	1	0	0	0	1	0	0
9	Brg. Dara Laut	2	0	0	0	0	0	2
10	Brg. Elang Laut	1	0	0	0	0	0	1
11	Brg.Elang Bondol	6	0	1	0	1	0	6
12	Brg. Elang Biasa	1	0	1	0	0	0	2
13	Brg. Elang Hitam	1	1	0	0	0	0	2
14	Burung Gagak	1	0	0	0	0	0	1
15	Burung Hantu	3	0	0	0	1	0	2
16	Burung Jalak	4	0	0	0	0	0	4

NO	KELAS DAN JENIS SATWA	KEADAAN AWAL 2012	SATWA MASUK			MUTASI		JUMLAH
			SUMBANGAN	PEMBELIAN	LAHIR	MATI	DISUMBANGKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Burung Kaswari	2	0	0	0	1	0	1
18	B. Kakatua Besar	3	0	0	0	0	0	3
19	B. Kakatua Kecil	2	1	1	0	0	0	4
20	B. Merpati Puter	2	0	0	0	0	0	2
21	Burung Merpati	12	0	0	8	0	0	20
22	B. Nuri Merah	1	0	0	0	1	0	0
23	Brg. Pecuk Ular	1	0	0	0	0	0	1
24	Burung Perhutut	2	2	0	0	0	0	4
25	Burung Poksai	1	0	0	0	0	0	1
26	Love Bird	1	0	0	0	0	0	1
27	Burung Kicau	21	0	0	0	0	0	21
28	Brg. Merak Hijau	2	1	0	0	0	0	3
29	Brg. Merak Biru	0	1	0	0	0	0	1
30	Murai Batu	0	4	0	0	0	0	4
31	A. ketawa merah	0	0	4	0	0	0	4
32	A. ketawa putih	0	0	2	0	1	0	1
33	Ayam Pelung	0	0	2	0	0	0	2
34	Ayam Kalkun	0	0	3	0	0	0	3
35	Ayam Mutiara	0	0	2	0	0	0	2
36	Ayam Kokok Balenggek	0	0	2	0	0	0	2
Jumlah III		88	10	18	10	6	1	119
JUMLAH I+II+III		248	33	14	43	42	24	274

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Jambi

D. PENANGANAN KESEHATAN SATWA

Penanganan kesehatan di Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi lebih mengedepankan pencegahan dari pada melakukan pengobatan.

a. Pencegahan Penyakit

Pencegahan yang dilakukan antara lain :

- Vaksinasi (pada anak harimau dan jenis primate)
- Biosecurity yaitu dilakukan penyemprotan kandang dengan menggunakan desinfektan khususnya pada kandang unggas.
- Pemberian obat cacing, tiap 3 bulan sekali pada semua jenis satwa
- Pemberian vitamin dilakukan sesuai situasi dan kondisi satwa, juga untuk mencegah terjadinya stress pada saat ramai pengunjung.
- Pemberian/ penyemprotan obat kutu/ caplak untuk satwa tapir.
- Pemeriksaan faeces satwa dilakukan secara laboratories, disesuaikan dengan kondisi masing-masing satwa.

b. Pengobatan

Pengobatan hanya dilakukan apabila satwa jatuh sakit atau satwa dalam keadaan terluka. Tahun 2012 Kebun Binatang telah melakukan pengobatan satwa antara lain :

1. Tapir sumbangan dari Desa Margo Sari NES Kab. Muaro Jambi.

2. Rusa Sambar dari rumah Gubernur Jambi, hasil sumbangan masyarakat dalam kondisi terluka dan lumpuh.
3. Beruang madu titipan dari BKSDA Jambi hasil Tangkapan masyarakat, yang terkena jerat dan jarinya putus.
4. Anak Macan Dahan titipan dari BKSDA Jambi, Hasil tangkapan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Anak Harimau yang bernama Seand dan Sendi yang lahir pada tgl 23 September 2012, dalam keadaan kurus dan mencret.
6. Anak Tapir Hasil sumbangan masyarakat Desa Bertam Kabupaten Muaro Jambi yang akhirnya mati.
7. Anak Harimau yang tertangkap masyarakat Desa Tangkit Jaya bernama Tri, akhirnya mati setelah dirawat selama 3 bulan.
8. Buaya sinyolong yang tidak mau makan selama 1 bulan, karena terkena anemia.
9. Perawatan rutin terhadap penyakit kulit (scabies) yang menyerang marmut dan kelinci.
10. Perawatan ayam pelung dan ayam ketawa
11. Perawatan Beruang madu yang tidak mau makan
12. Perawatan Bintorung yang tidak makan & pada akhirnya sehat.
13. Perawatan Gajah “Yanti” yang terkena miasis pada bagian punggung dan kepala.
14. Perawatan terhadap burung/ aves yang rutin dilakukan.

E. PERAWATAN SATWA BUNTING / AVES MENERAM.

Satwa yang bunting dan akan melahirkan, memerlukan perhatian khusus dari Keeper, penanganan kebersihan kandang, cara/pola pemberian pakan, karena satwa bunting mudah stres. Umumnya satwa langka jenis apapun di habitatnya beranak hanya setahun sekali, dikarenakan proses kebuntingan/ pengeraman telur sampai perawatan anak, baru dipisah bila anaknya sudah bisa mandiri.

Umur kebuntingan Harimau $\pm$ 103 hari, Kuda $\pm$ 11 bulan, Rusa $\pm$ 6 bulan, Bangau tongtong mengerami telurnya $\pm$ 45 hari dan jenis satwa lain kebuntingannya tergantung pada besar kecilnya jenis satwa.

F. PERAWATAN BAYI SATWA (BABBY ZOO)

Perawatan anak satwa yang dilakukan di KB. Taman Rimbo Jambi sbb :

a. Anak Harimau

Anak harimau lahir pada tanggal 23 September 2012 sebanyak 3 ekor anak, dalam keadaan hidup 2 ekor dan satu ekor dalam keadaan mati dan langsung diawetkan/ di ofset. Untuk merawat ke 2 anak harimau khususnya yang kurus (1 ekor) membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa, karena Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi selama 30 tahun baru dua kali dapat mengembangkan satwa Harimau.

b. Anak Beruang.

Anak beruang yang bernama Siupik Emas, lahir pada tanggal 9 Juli 2012 adalah anak beruang hasil perkawinan antara beruang jantan yang bernama

“Bujang” dan induknya yang bernama “Gery”.

Perawatan anak beruang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena beruang masih menyusui dan pemberian madu secara rutin.

c. Anak Tapir.

Anak Tapir hasil sumbangan masyarakat dari Desa Sei Bertam Kab. Ma. Jambi, akhirnya Mati setelah dirawat $\pm$ selama 1 bulan.

d. Perawatan anak Rusa Tutul.

Rusa tutul apabila beranak maka anaknya akan disembunyikan di bawah ranting-ranting, oleh karena itu apabila ada Rusa yang mau melahirnya maka harus disiapkan tumpukan ranting, pada tahun 2012 telah lahir anak rusa tutul sebanyak 4 ekor, 3 ekor lahir bertepatan dengan kedatangan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jambi, pada tanggal 25 Desember 2012.

e. Perawatan anak Napu

Napu/ Kancil adalah binatang malam yang mudah terkena stres dan jantan dominan harus ada satu pada sekelompok betina, karena setelah melahirkan, napu langsung dibarengi dengan perkawinan, oleh karena itu jantan lain harus dipisahkan, supaya tidak timbul perkelahiran, yang bisa mengakibatkan kematian.

f. Perawatan anak Bango Tong Tong

Bangau Tong Tong menetas sebanyak 2 ekor dan dalam keadaan sehat.

g. Perawatan anak Kuda

Kuda Poni bernama “Yuni” telah melahirkan anak betina pada tanggal 23 November 2012 dan diberi nama “JUJU”. Sedangkan Kuda Poni yang bernama “Kade” melahirkan anak betina pada tanggal 3 Desember 2012 dan diberi nama “SALSA”.

G. KEGIATAN PENJINAKAN SATWA

Satwa yang dijinakan termasuk pada program perawatan satwa. Tahun 2012 Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi telah melakukan program penjinakan satwa baik satwa yang ada maupun satwa yang berasal dari pengadaan satwa tahun 2012, dengan harapan satwa jinak dapat dijadikan media berfoto dengan satwa dan sosialisasi ke sekolah melalui program SMS (Satwa Masuk Sekolah).

4.2.2. Kehutanan

Pada tahun anggaran 2012 urusan kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 10.619.814.400,-. untuk mendanai 6 Program dan 21 kegiatan. Berikut ini adalah uraian program dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2012 yang dibiayai oleh APBD :

1. Program pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Program ini memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 307.486.650,-. Yang difokuskan dalam dua kegiatan yaitu Kegiatan Inventarisasi Potensi Hutan yang telah dilakukan inventarisasi potensi pada 8 kabupaten serta

Kegiatan Restrukturisasi Industri Kehutanan, Optimalisasi PNPB dari SDA sektor kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah melalui revitalisasi industri kehutanan dengan bahan baku yang legal dan berkelanjutan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Kegiatan ini dilakukan pada 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi.

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan ini didukung oleh 9 kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp 2.102.929.800,-. Hasil yang telah dicapai dengan terlaksananya kegiatan penanaman 1 Milyar Pohon danelihara pohon tingkat Provinsi Jambi sertapemeliharaan atas tanaman unggulan lokal dan tanaman OBIT yang telah tertanam pada tahun sebelumnya.Terlaksananya pemeliharaan tanaman di 2 Demplot HTR.Terlaksananya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 147,75 Ha.Terbentuknya Hutan Desa (HD) sebanyak 24 unit yang berada di 3 Kabupaten (Merangin, Bungo, Batanghari) dengan total luas 54 ribu Ha. Terlaksananya orientasi batas sesuai target yaitu 35,1 km dan sosialisasi tata batas di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjaung Jabung Barat (6 kecamatan).Terjaganya kawasan hutan dari perambahan dan terselesaikannya 5 kasus tindak pidana kehutanan.Terwujudnya konsep perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi yang telah melewati tahap uji konsistensi dari stakeholder dengan proses yang masih akan berlanjut di Tahun Anggaran 2013 mendatang.

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program ini memiliki satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan total dana sebesar Rp 192.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui anggaran APBD dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Kehutanan RI telah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (KBR) Kebun Bibit Rakyat sebanyak 11 (sebelas) Juta Pohon dan melaksanakan pendistribusian Bibit Tanaman Kehutanan sebanyak 64 ribu batang. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp 177.780.000,00 atau sebesar 92,50 %.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program ini dilaksanakan dengan total dana Rp 3.941.802.060,00, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan ini dilakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah terlaksana di 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi, pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Merangin, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
- b. Kegiatan Pembangunan Tanaman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari. Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan Gerakan 1 Pohon 1 PNS dengan jumlah bibit tanaman kehutanan yang telah didistribusikan sebanyak 19 ribu batang dan terlaksananya pembangunan-pembangunan fisik di Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari sehingga diharapkan

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atas Retribusi dan Taman Hutan Kenali selain nilai jasa lingkungannya, serta dapat terjaganya Kebun Raya Bukit Sari dari Perambahan dan menambah kontribusinya dalam ilmu Pengetahuan.

c. Kegiatan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan

Dalam kegiatan ini telah dilakukan patroli pengamanan hutan dari perambahan di 8 Kabupaten di Provinsi Jambi, Koordinasi pengamanan hutan di 9 Kabupaten serta pemberangsaan 15 perkara pidana kehutanan.

d. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan dan membentuk pola pikir masyarakat agar ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di 9 Kabupaten se Provinsi Jambi.

e. Kegiatan Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias

Kegiatan yang bekerjasama dengan DPD Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Provinsi Jambi Pada pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan pelatihan budidaya anggrek yang diselenggarakan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta mengikuti Rakornas Anggrek di Medan dan melakukan eksplorasi anggrek alam dengan bekerja sama dengan Universitas Jambi di 5 Kabupaten.

f. Kegiatan Pengawasan dan Monitoring HPH/HPHTI.

Dalam kegiatan ini dilakukan monitoring atas aktivitas pemanfaatan lahan hutan pada HTI sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

g. Kegiatan Pengelolaan Tahura Sekitar Tanjung (DAK)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga Tahura Sekitar Tanjung dari perambahan dan terkelolanya Tahura sesuai fungsinya. Untuk menunjang tercapainya tujuan kegiatan ini telah diadakan sarana dan prasarana pengamanan dan sosialisasi, dilakukannya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 40 ha.

5. Program Pengumpulan Data, Statistik dan Pemantapan Sistem Informasi/Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH.

Program ini mempunyai suatu kegiatan pendukung yaitu kegiatan Pusat Informasi Kehutanan Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp 290.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 275.636.707 atau sebesar 94,98 %. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi kehutanan Provinsi Jambi serta meningkatnya pengelola sektor kehutanan lewat kemudahan aksesibilitas dan ketransparanan informasi. Pada tahun 2012 melalui kegiatan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengikuti Pameran di dalam event PERKEMPINAS dan Jambi Emas Expo, serta membuka stand pada Kongres Kehutanan Indonesia Tahun 2012 di Medan.

6. Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan.

Memiliki suatu kegiatan prioritas Perencanaan dan Monitoring Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp 519.176.050,00. Realisasi keuangan pada tahun 2012 adalah sebesar 94,16 %. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan suatu perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dan dapat mendukung visi dan misi Gubernur terpilih. Dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis

kinerja, diharapkan berdasarkan perencanaan yang baik akan diperoleh realisasi kegiatan yang fokus pada sasaran. Realisasi dari kegiatan perencanaan dan monitoring evaluasi ini adalah telah terlaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012, terwujudnya Rencana Kerja Anggaran dan DPA Tahun 2012, tersedia data hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2012 serta tersusunnya DATA STATISTIK Kehutanan tahun 2012 dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011-2025.

4.2.3. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun anggaran 2012 bidang energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memperoleh anggaran sebesar Rp3.180.647.500,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 90,51% yang diarahkan untuk 4 program utama yaitu :

1. Program Pengembangan Energi

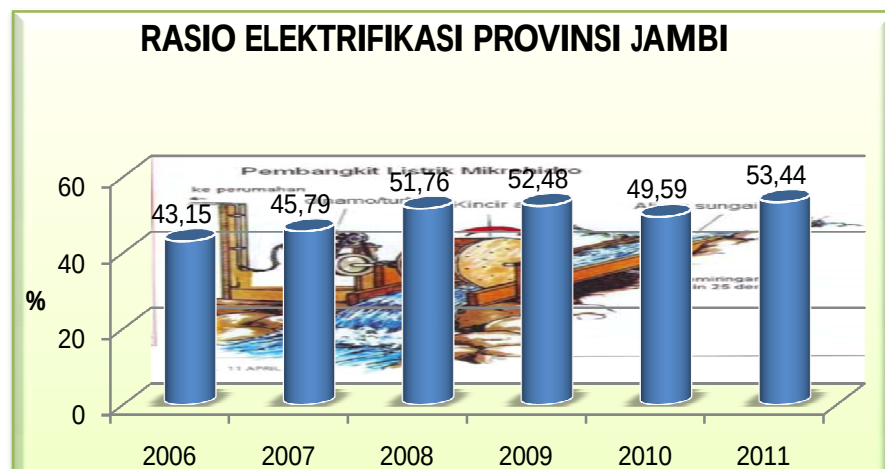
Program Pengembangan energi memperoleh anggaran dana sebesar Rp. 1.004.107.000,-. Yang diperuntukkan bagi 6 kegiatanyaitu :

1. Kegiatan Inventarisasi dan pembinaan Desa Mandiri Energi, yang bertujuan untuk penyediaan data potensi Energi Baru Terbarukan dan terbinanya desa mandiri Energi sehingga tersedia energy alternative guna mengurangi penggunaan BBM.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Biogas.

3. Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pembangunan PLTMH dan Jaringan di Kabupaten Sarolangun.
4. Kegiatan Inventarisasi Desa belum berlistrik di Provinsi Jambi.
5. Study Kelayakan potensi Mikrohidro (PLTMH).
6. Perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) dan Pembangkit Tenaga Kincir air di Kabupaten Bungo.

Selanjutnya terhadap perkembangan kelistrikan di Provinsi Jambi tergambar rasio elektrifikasi dari tahun 2006 – 2011 tertera pada grafik berikut :

Gambar 4.22 Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jambi

Sedangkan ratio elektrifikasi desa di Provinsi jambi sebesar 89,79 %. Dengan semua keterbatasan yang ada, maka tidak semua desa-desa dapat dialiri oleh listrik PLN. Dalam rangka penyediaan energi khususnya pada desa-desa yang tidak terjangkau oleh aliran PT. PLN (persero). Saat ini telah

dibangun Pembangunan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) beserta jaringannya dan pembangkit Tenaga Surya (PLTS).

2. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa

Secara umum, program ini bertujuan untuk mengawasi perhitungan lifting Migas per KKKS per daerah penghasil dan penyaluran Dana Bagi Hasil Migas, tersedianya data kuota BBM subsidi dan perusahaan pengangkut, serta tersedianya data distribusi paket perdana LPG 3 Kg di 130 kecamatan.

Saat ini tercatat sebanyak 16 kontraktor Kontrak Kerjasama yang ada di Provinsi Jambi. Dari 16 KKKS tersebut 9 KKKS masih dalam kegiatan eksplorasi sedangkan 7 KKKS migas telah berproduksi. Produksi Minyak dan Gas Bumi tahun 2012 tercatat sebanyak 22.500.071 barel Oil ekuivalen.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan penambangan yang baik sehingga dapat terbina kegiatan usaha pertambangan umum dengan prinsip *Good Mining Practices* berkurangnya kecelakaan tambang selain itu juga tersedianya data PNPB kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan data Dana Bagi Hasil kegiatan usaha pertambangan mineral batubara per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

Gambar 4.23 Perkembangan Dana bagi Hasil SDA Pertambangan Umum

Sampai dengan triwulan II.



Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jambi

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang berwawasan Lingkungan

Program ini difokuskan untuk mengetahui informasi geodiversiti, bencana geologi dan air tanah galian industri, mineral batubara, panas bumi serta mendeteksi bencana alam geologi di Provinsi Jambi dengan menginventarisir data kondisi dan lokasi bencana geologi, kawasan sumberdaya warisan geologi, informasi geologi lingkungan untuk penataan ruang kawasan andalan, kawasan peruntukan pertambangan, dan kawasan lindung geologi, informasi air tanah untuk pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Adapun anggaran untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp 717.750.400,00 yang dialokasikan untuk kegiatan :

monitoring bencana alam geologi, geodiversity dan air tanah di Provinsi Jambi. Penyelidikan pendahuluan Mineral, batubara dan panas bumi, kegiatan inventarisasi wilayah kerja dan pengembangan sumbu turisme dan minyak bumi, pengembangan sistem informasi geografis,

4.2.4 Pariwisata

Dalam ruang lingkup pariwisata, salah satu indikator keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7.751 orang, terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 8.543 orang (10,22%) dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan mencapai 9.231 orang (8,05%). Begitu pun untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2010 sebanyak 957.760 orang, dan meningkat menjadi 1.122.350 orang pada tahun 2011 (17,19%) dan untuk tahun 2012 kunjungan wisatawan nusantara meningkat sebanyak 1.278.240 (13,89%).

Sementara itu untuk industri pariwisata di Provinsi Jambi, secara bertahap namun pasti menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah hotel, restoran dan rumah makan, dan biro perjalanan wisata. Secara global perkembangan kunjungan wisatawan dan industri pariwisata di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.107 Data Perkembangan Kunjungan Wisatawan dan Usaha Pariwisata di Provinsi Jambi

No	Indikator	Periode			Perkembangan
		2010	2011	2012	(%)
1	2	3	4	5	6
I.	WISATAWAN	7.751	8.543	9.231	8,05
A.	Mancanegara				
	Terdiri dari :				
	1. Singapura	1.168	1.273	1.374	7,93
	2. Malaysia	1.595	1.692	1.716	1,42
	3. Thailand	3	7	9	28,57
	4. Philipina	16	18	31	72,22
	5. China	2.156	2.531	2.733	7,98
	6. Taiwan	995	1.094	1.101	0,64
	7. Jepang	449	453	667	47,24
	9. Amerika	553	557	592	6,28
	10. Australia	16	19	22	15,79
	11. Eropa	170	179	214	19,55
	12. Arab Saudi	2	26	45	73,08
	13. Iran	4	5	9	80
	14. Istanbul	2	3	6	100
	15. Denmark	26	4	7	75
	16. Korea	6	12	16	33,33
	17. Jerman	5	15	21	40
	T O T A L	7.751	8.543	932	443,03
B.	Nusantara	957.760	1.122.350	1.278.240	13,89
II.	Hotel :				
	- Bintang	22	23	25	8,7
	- Melati	118	123	137	11,38
III.	Restoran	42	53	105	98
IV.	Rumah Makan	415	572	540	6
V.	Biro Perjalanan Wisata	51	56	70	25

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Tahun 2012*

Dalam mendukung pembangunan bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapatkan

alokasi dana APBD sebesar Rp.2.892.482.450,00 untuk melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sasaran program ini adalah penyebaran informasi mengenai potensi kepariwisataan daerah Jambi ke berbagai segmen pasar. Pendukung dana APBD untuk program ini sebesar Rp. 1.845.999.225,00 dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan; (a) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, (b) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dan (c) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Daerah.

Aktifitas yang telah dilaksanakan antara lain mengikuti promosi pariwisata pada event Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta, Kemilau Sumatera, Pekan Pesona Budaya Jambi, pameran objek pariwisata dan budaya serta tampilan kesenian yang telah diikuti oleh Provinsi se-Sumatera, Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK), Jambi Emas Expo, Karnaval Budaya Hut Jambi, Hari Pers Nasional, Perkempinas di Kabupaten Muaro Jambi, cetak bahan promosi pariwisata, cetak buku profil pariwisata serta melaksanakan publikasi melalui internet, media cetak dan media elektronik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu masih belum optimalnya aktifitas promosi baik dari segi seleksi event/kegiatan yang akan diikuti, materi promosi, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktifitas promosi pariwisata daerah.

Dalam menyikapi masalah tersebut perlu adanya peningkatan seleksi event/kegiatan yang akan diikuti, peningkatan kualitas dan kuantitas materi promosi, serta

meningkatkan nilai jual potensi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media cetak maupun media elektronik.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas objek daerah tujuan wisata Provinsi Jambi melalui kegiatan Pengembangan Objek wisata unggulan dan kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana objek pariwisata unggulan, pengembangan dan penguatan informasi dan data base potensi objek destinasi wisata serta pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

Alokasi dana dalam pelaksanaan program ini sebesar Rp. 799.325.225 dengan pencapaian antara lain; pendataan objek wisata di kabupaten/kota dalam provinsi Jambi, pembuatan dokumen perencanaan pembangunan sebrang kota Jambi, dokumen perencanaan pengembangan Geotrack dan pembangunan pagar taman Rimba Jambi.

Masih rendahnya daya dukung pariwisata seperti akses sarana dan prasarana yang masih kurang, keterlibatan stakeholder yang kurang terpadu, SDM pengelola pariwisata (pemandu wisata) menjadi pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan terhadap pengembangan Destinasi pariwisata. Untuk itu koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta sinergitas dari pemerintah, Swasta dan Masyarakat seluruh stakeholder pariwisata agar terus ditingkatkan dalam memaksimalkan segala peluang dan potensi pariwisata yang ada.

3. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan potensi pariwisata Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, dan (b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 247.158.000,-.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; pelaksanaan workshop peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan dan pembekalan pelaku pariwisata dengan peserta Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabuapten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta pembinaan desa PNPM Pariwisata.

4.2.5. Kelautan Dan Perikanan

1. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan produk hasil perikanan sehingga mempunyai nilai jual serta meningkatkan dukungan pengembangan usaha pengolahan dalam aspek kualitas dan kuantitas dari unit-unit pengolahan dan pemasaran.

Adapun sasaran dari program ini yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dari produksi yang berbasis lokal. Total dana yang dibutuhkan untuk mendukung program ini yaitu :

Rp 460,578,500,00 dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Promosi dan Publikasi kegiatan sektor perikanan, 2) Peningkatan pelayanan LPPMHP, 3) Pengembangan sentra pemasaran.

Adapun output dari Program ini yaitu: 1) Terpublikasikannya kegiatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk olahan sebanyak 5 kali, 2) Terciptanya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan, khususnya memonitor kesegaran ikan, residu, dan bahan berbahaya, 3) Tersusunnya peta jaringan pemasaran guna meningkatnya kegiatan pemasaran komoditas perikanan di sentra-sentra pemasaran.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta) dan masih kurangnya dukungan lintas sektor untuk pembangunan industri pengolahan terpadu sehingga menyulitkan bagi para pedagang, untuk memenuhi permintaan pasar. Solusinya yaitu menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/ pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha perikanan ditingkat pembudidaya ikan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sasaran program ini yaitu meningkatnya pendapatan pembudidaya skala kecil. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu : Rp 1.341.515.000,00. Adapun Kegiatan yang mendukung program pengembangan kesejahteraan petani yaitu: 1)

Pengembangan kolam perkarangan masyarakat, 2) Pembinaan pondok pesantren, 3) Pemberdayaan desa mandiri pangan. 4) Restocking Ikan Perairan Umum

Adapun output dari kegiatan ini yaitu : 1) Terwujudnya pengembangan kolam pekarangan masyarakat, dengan penyediaan benih 90.000 ekor. 2) Terwujudnya bantuan benih bagi pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi sebanyak 50.000 ekor, 3) Terwujudnya bantuan benih ikan di desa Mandiri Pangan sebesar 100.000 ekor. 3) Terlaksananya penebaran benih ikan untuk tujuan restocking sebanyak 400.000 ekor. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu bertambahnya pendapatan dari pelaku usaha perikanan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan yang mengalami kenaikan sebesar 9,6 % pertahun. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 12.600.000 pertahun dan tahun 2012 sebesar Rp. 14.300.000,00 pertahun sehingga naik sebesar 13,5 % pertahun. Sedangkan pendapatan nelayan pada tahun 2011 sebesar Rp. 49.000.000 dan tahun 2012 sebesar Rp. 53.700.000 naik sebesar 10,4 % pertahun. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.108 Tingkat pendapatan nelayan/pembudidaya ikan tahun 2011 s.d 2012

No	Jenis Usaha	Pendapatan nelayan/pembudidaya		Perkembangan (%)
		2011	2012*	
1	Nelayan	49.000.000	53.700.000	9,6
2	Pembudidaya	12.600.000	14.300.000	13,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan dari program ini yaitu untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sasaran dari program ini yaitu optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan di pesisir. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp 118.617.500,00. Sedangkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yaitu Pemberdayaan ekonomi, sosial budaya dan masyarakat pesisir.

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dalam bentuk pertemuan fasilitasi pembentukan lembaga keuangan masyarakat dan bantuan untuk forum regenerasi nelayan. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Hal ini tergambar dengan semakin banyaknya bertambahnya prosentase masyarakat pesisir yang melakukan usaha budidaya ikan di tambak, dengan kenaikan mencapai 5,8 % sedangkan nelayan perikanan laut peningkatannya 3,3 %.

Tabel 4.109 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2011 – 2012

No	Jenis Usaha	Jumlah RTP/Tahun		Perkembangan
		2011	2012*	
1	Perikanan Laut	2.640	2.727	3,3
2	Perairan umum	8.525	8.619	1,1
3	Budidaya kolam	11.462	11.998	4,7
4	Keramba dan Japung	4.239	4.597	8,4
5	Budidaya tambak	758	802	5,8
6	Budidaya mina padi	95	102	7,4
J u m l a h		27.719	28.845	4,1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi

* Angka sementara Tahun 2012

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dari sektor budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menuju industrialisasi perikanan budidaya. Sasaran program ini yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup pembudidaya. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp. 3.027.848.000,-.

Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu 1). Pengembangan pembenihan ikan komersil, 2) Pengembangan ikan hias, 3). Pengembangan BBIS Kerinci, 4). Pengembangan proksimas semah, 5). Pengembangan budidaya air payau, 6) Pengembangan unit pengolahan ikan perikanan budidaya, 7) Pengembangan minapolitan budidaya, 8) Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi.

Adapun output dari kegiatan ini yaitu: Terlaksananya pengembangan pembenihan ikan komersil 1) Tersedianya

sarana pengembangan ikan di instalasi perbenihan provinsi jambi , 2) Terlaksananya pengembangan ikan hias sebanyak 4 paket, 3) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di BBIS Kerinci dan tersedianya calon induk untuk UPR, 4) Terlaksananya pengembangan proksimas ikan semah sebanyak 15.000 ekor benih, 5) Terlaksananya operasional UPBAP simpang jelita dan tersedianya benih patin 2.500 ekor, 6) Terlaksananya pengembangan unit pengolahan ikan perikanan budidaya, 7) Terlaksananya pengembangan minapolitan budidaya melalui bantuan benih dan pakan di kawasan minapolitan sebanyak 300.000 ekor serta bantuan di 5 kabupaten/kota, 8) Terlaksananya bantuan induk ikan nila super sebanyak 7.500 ekor.

Tabel 4.110 Perkembangan Produksi Perikanan menurut jenis usaha tahun 2011-2012

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2011	2012*	
1	Kolam	19.746,9	24.827,4	25,7
2	Keramba	12.289,9	13.777,8	12,1
3	Tambak	1.851,8	1.989	7,4
4.	Mina Padi	19,4	19,6	1
Jumlah		33.908	40.613,8	19,8

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi

* Angka sementara Tahun 2012

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan produksi tertinggi di tahun 2012 pada perikanan budidaya kolam sebesar 25,7 %, kenaikan produksi terendah terjadi pada Mina Pada yaitu 1 % Sedangkan secara keseluruhan produksi budidaya naik sebesar 19,8 %. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khusus kualitas air

di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA).

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan khususnya dibidang penangkapan ikan. Sasarannya adalah meningkatnya nilai tambah hasil peangkapan serta pendapatan nelayan. Adapun kegiatan yang mendukung program pengembangan perikanan tangkap yaitu :1) Revitaliasi Perikanan Tangkap, 2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), 3) Pembuatan Kapal Perikanan ≥ 30 GT dan Alat Tangkap, 4) Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap, 5) Optimalisasi perikanan tangkap.

Sasaran dari program ini yaitu tercapainya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas/keperluan bagi nelayan untuk melaut. Hal ini tergambar peningkatan produksi perikanan tangkap, dimana jumlah keseluruhannya mengalami peningkatan dari 51.839,7 ton pada tahun 2011 naik menjadi 52.133,7 ton pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan sebesar 0,6 %

Tabel 4.111 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2011 dan 2012

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2011	2012*	
I.	Perikanan Tangkap			
a.	Perairan Laut	44.700,2	44.878,5	0,4
b.	Perairan Umum	7.139,5	7.255	1,6
	Jumlah	51.839,7	52.133,7	0,6

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jambi

* Angka sementara Tahun 2012

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga dapat wilayah tangkap nelayan menjangkau daerah yang lebih luas.

6. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dana dalam pelaksanaan program ini Rp.126.735.00,00 sedangkan kegiatan yang mendukung program peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan yaitu : Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan.

Pencapaian dari program ini yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati ikan melalui pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumberdaya ikan, seperti penggunaan listrik, racun dan bahan peledak. Hal ini terlihat dari tidak ada nya pelanggaran penangkapan ikan yang terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2012.

Walaupun demikian, masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program

ini, antara lain: terbatasnya tenaga penyidik perikanan yang ada, yang bisa melakukan penyidikan perkara. Adapun pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan patroli bersama dengan petugas keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI.

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan sumberdaya alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Dana dalam pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini sebesar Rp.323.685.500,-.

Kegiatan yang mendukung program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam yaitu : 1) Kesehatan lingkungan dan pengendalian hama penyakit, 2) Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumberdaya alam. Pencapaian dari program ini yaitu tercapainya kondisi lingkungan habitat ikan yang sehat yang disertai dengan terkendalinya hama dan penyakit ikan, partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, serta bertambahnya populasi ikan sebagai hasil dari pemacuan stok ikan.

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu masih adanya sekelompok masyarakat yang belum sadar dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan, solusinya yaitu dengan meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya

dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Pokmaswas

4.2.6 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai sasaran, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu : 1) Pengembangan Infrastruktur lembaga Laboratorium UPTD Kemetrolagian, 2) Dukungan dan fasilitasi Pasar Murah, dan 3) Sosialisasi Kebijakan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Bahan Beredar (Bahan Berbahaya, Tabung Gas LPG dan Aksesorinya), 4) Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Laboratorium Kemetrolagian), 5) Tera Ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrolagian, dan 6) Pengawasan UTTP dan BDKT.

Masukan (input) dari program ini adalah dana sebesar Rp.534.268.000,- dengan realisasi keuangan hingga 31 Desember 2012 sebesar Rp.518.747.400,-. Dengan adanya program ini peredaran barang makanan yang mengandung bahan berbahaya dapat dikurangi, terjangkauunya harga bahan pokok/sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta untuk menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan bagi para pemilik alat ukur untuk menera ulang ukur, meningkatkan kualitas alat ukur milik masyarakat

dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan kebenaran ukuran dan perlindungan konsumen sehingga pelanggaran terhadap penggunaan alat UTTP di masyarakat dapat berkurang.

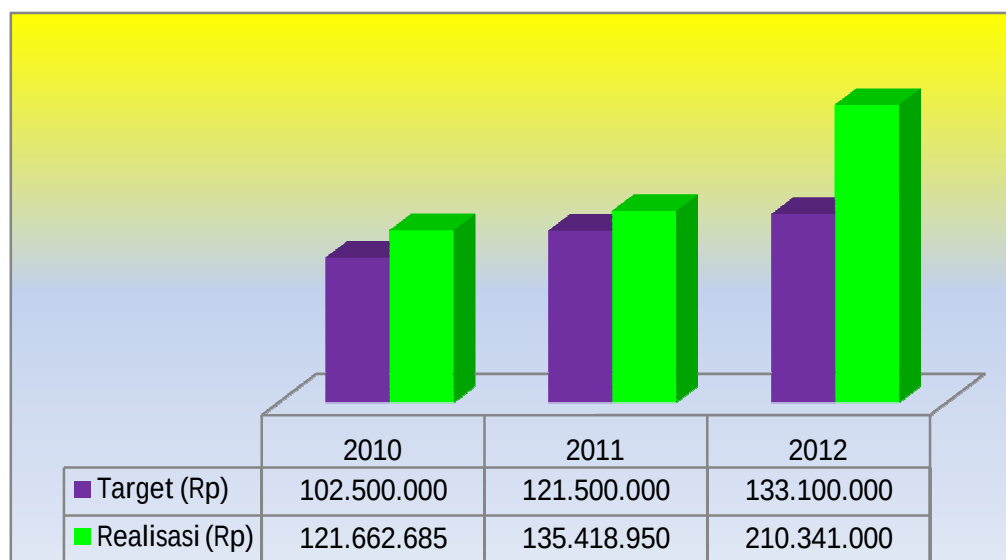
Capaian dari program ini yaitu terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan/hak konsumen melalui pengawasan terhadap barang beredar dan jasa. Pengawasan dilakukan secara bersinergi dengan instansi terkait terhadap barang-barang yang harus ber-SNI. Pada tahun 2012, produk-produk yang wajib ber-SNI adalah : aki kendaraan bermotor, ban dalam kendaraan bermotor, selang gas, regulator tabung gas, kipas angin, lampu swabalast (LHE). Selain produk yang ber-SNI, pengawasan juga dilakukan terhadap peredaran barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti : penggunaan formalin dan borax serta penggunaan zat warna tekstil (Rhodamin B dan Methanil Yellow) pada industri pangan.

Selanjutnya, pencapaian lain dari program ini yaitu terkendalinya kondisi ketersediaan stock dan harga barang pokok, penting dan strategis, dan berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2012, sebagai berikut : **1) Beras.** Harga rata-rata beras sepanjang tahun 2012 berkisar antara Rp8.950,00 – Rp9.500,00 per 1 Kg. Naiknya harga beras ini disebabkan permintaan meningkat dari konsumen. **2) Gula.** Harga gula selama tahun 2012 relatif stabil yaitu berkisar antara Rp10.000,00 hingga Rp12.000,00. Keadaan ini menggambarkan lancarnya pasokan gula ke Jambi dan stabilnya harga (stock yang cukup). **3) Minyak Goreng.** Harga minyak goreng selama tahun 2012 rata-rata berfluktuasi pada kisaran Rp9.000,00/Kg hingga Rp12.000,00/Kg. Harga tertinggi

dicapai oleh minyak goreng bermerek (Bimoli Botol Spesial) Rp16.000,00/Kg. Sedangkan harga minyak goreng curah yang umumnya dikonsumsi masyarakat menengah kebawah berada pada tingkat yang wajar yaitu kisaran Rp9.000,00/Kg-Rp11.000,00/Kg. Tidak ada fluktuasi harga karena diimbangi oleh produk lokal, khususnya minyak curah. **4) Daging dan Telur** selama tahun 2012 relatif stabil harganya yaitu rata-rata Rp70.000,00/Kg, kecuali menjelang lebaran H-3 hingga H-1 harga Daging mengalami kenaikan mencapai Rp85.000,00 kemudian setelah itu kembali normal seperti biasa. Pada tahun 2012, harga telur ayam Broiler berfluktuasi dengan kisaran Rp935,00–Rp1.000,00/butir. Fluktuasi harga dipengaruhi karena menghadapi hari-hari besar, sehingga permintaan meningkat. **5) Tepung Terigu dan Susu** Harga terigu selama tahun 2012 relatif stabil yang mana harga berkisar antara Rp7.000 – Rp8.000. Harga susu bubuk pada tahun 2012 relatif stabil dimana harga berkisar antara Rp25.000 – Rp26.000. **6) Cabe dan Bawang.** Harga cabe dan bawang dalam tahun 2012 mengalami kenaikan masing-masing; cabe berkisar antara Rp16.000-Rp50.000 dan Bawang berkisar Rp10.000,00-Rp16.000. Kenaikan harga Cabe dan Bawang ini disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga mengganggu pola tanam petani. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kebutuhan cabe dan bawang yang melonjak pada bulan puasa maka dilakukan pengaturan pola tanam cabe sehingga tidak kekurangan stok yang mengakibatkan harga melonjak. Dari jasa tera alat Ukur Takar Timbangan dan perlengkapannya (UTTP), telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi tahun

2012 sebesar Rp.210.341.000 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp.133.100.000 atau 158,03 persen. Bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2011, penerimaan tersebut meningkat sebesar 55,33 persen dari Rp.135.418.950. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.24

Gambar 4.24 Perkembangan Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi

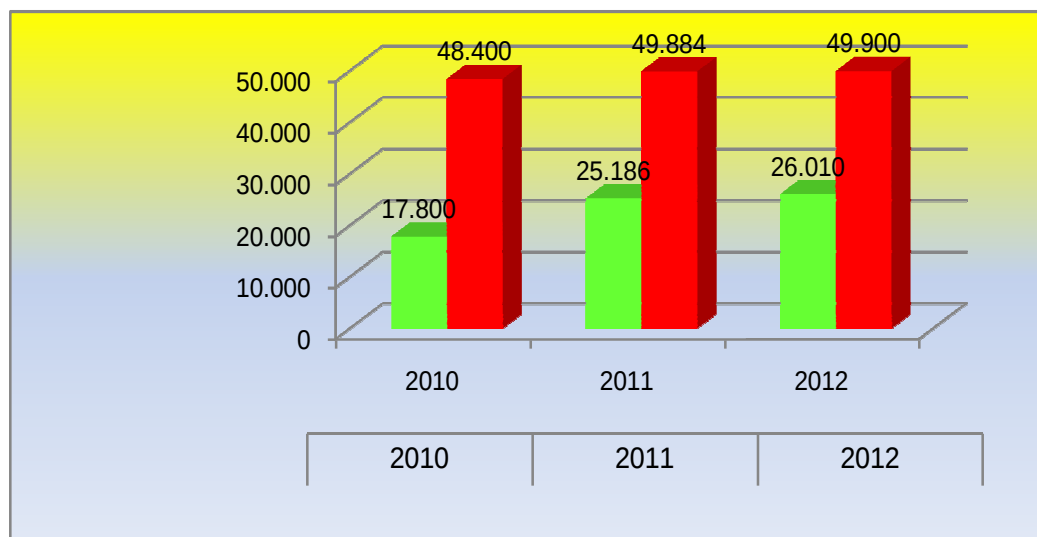
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi haknya sebagai konsumen serta belum optimalnya pemanfaatan perangkat kelembagaan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini antara lain melakukan sosialisasi kebijakan bahan berbahaya dan pengawasan bahan beredar kepada masyarakat.

2. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Besar (IKMB)

Program ini secara umum bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor. Masukan (input) dari program ini adalah dana sebesar Rp. 2.313.666.500,- yang bersumber dari APBD murni dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.108.734.050,-. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah peningkatan laju pertumbuhan industri dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, dengan didukung beberapa kegiatan yaitu: 1) Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se-Provinsi Jambi, 2) Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi, 3) Penguatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil, 4) Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan di Desa Mandiri Pangan, 5) Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kegiatan Rumah Tenun di Jambi, 6) Monitoring dan Evaluasi KUB, 7) Bimbingan Teknis Produksi Makanan Olahan Unggulan Daerah, 8) Bimbingan Teknis dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan di Kota Terpadu Mandiri, 9) Pelatihan dan Bantuan Mesin Peralatan Pembuatan Sparepart Kendaraan Roda Dua dari Karet, 10) Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon, 11) Seminar Bedah Motif Batik Jambi, 12) Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Perajin/IKM se-Provinsi Jambi, dan 13) Gelar Pameran/Bazar Perkemahan Putri Nasional se-Indonesia di Provinsi Jambi.

Capaian dari program ini tergambar dari meningkatnya jumlah usaha Industri Kecil (IK) di Provinsi Jambi pada tahun 2012 sebesar 26.010 unit usaha. Jumlah usaha industri kecil ini telah melebihi target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 yaitu 24.280 unit untuk tahun 2012. Jika dibandingkan tahun 2011 berjumlah 25.186 unit usaha, yang berarti bahwa jumlah unit usaha industri kecil mengalami peningkatan sebanyak 824 unit usaha atau sebesar 3,27%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2012 meningkat menjadi 49.900 orang dibandingkan tahun 2011 sebesar 49.884 orang.

Gambar 4.25 Perkembangan Industri Kecil di Provinsi Jambi

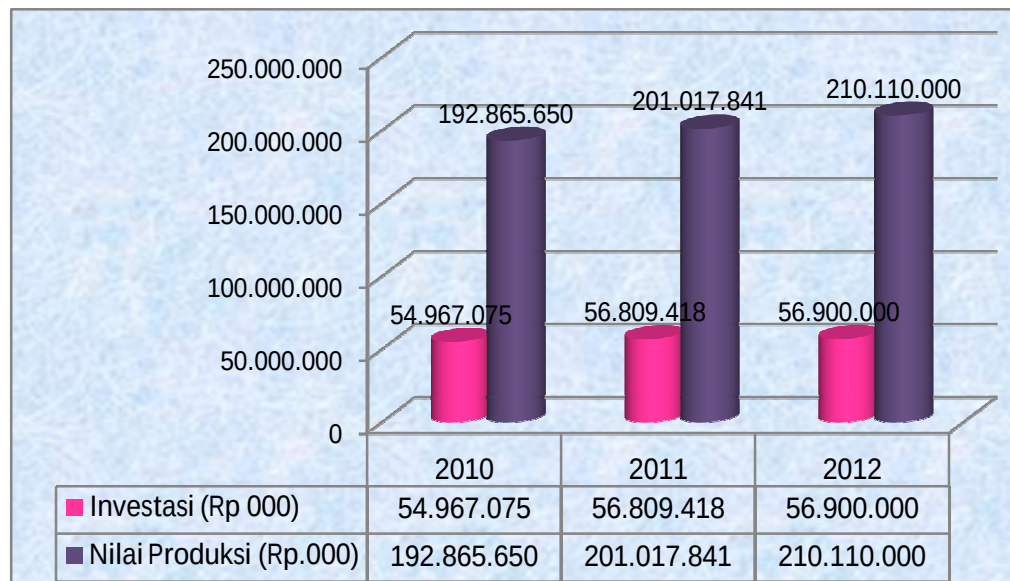


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi

Sementara nilai Investasi yang terserap pada usaha Industri Kecil pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 56.900.000,00 meningkat sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2011. Adapun nilai produksi usaha Industri

Kecil (IK) pada tahun 2012 adalah sebesar Rp210.110.000 atau meningkat sebesar 4,52 persen dibanding tahun 2011 yang mencapai Rp201.017.841,00.

Gambar 4. 26 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Usaha Industri Kecil



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi

Belum optimalnya pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang disebabkan luasnya wilayah dan banyaknya pelaku usaha kecil yang harus dibina merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini, disamping belum optimalnya dukungan keterkaitan mitra antara usaha besar dan BUMN baik berupa penyediaan bahan baku, modal dan pasar, serta terbatasnya akses pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka akses pasar, produktivitas, alih teknologi dan desain. Adapun solusi bagi permasalahan ini antara lain meningkatkan mitra usaha dengan usaha besar dan BUMN, memasyarakatkan sistem teknologi informasi dan

melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota dalam upaya pembinaan IKM.

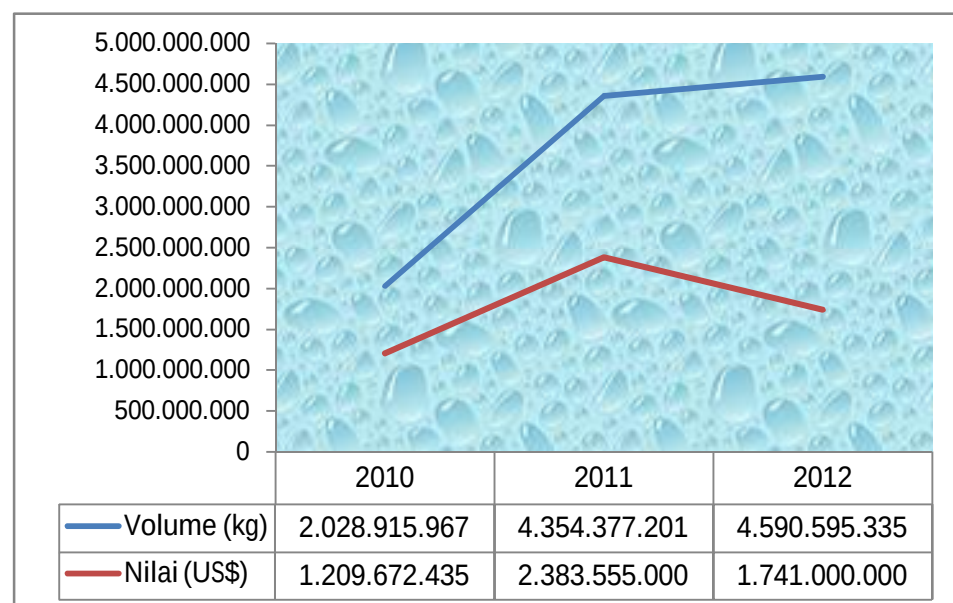
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan devisa bagi negara. Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp570.830.000,00 dengan capaian keuangan hingga 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 593.854.400,00 (92,24%) dan fisik kegiatan 100%. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang meliputi : 1) Kegiatan Pameran Luar Negeri dengan sasaran yang ditujukan kepada para perajin dan produk khas Jambi, dan 2) Forum Koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah.

Adapun output dari beberapa kegiatan di atas yaitu 1) Terselenggaranya terselenggaranya Pameran Luar Negeri guna mempromosikan produk/komoditi Jambi dan mencari peluang pasar baru, terciptanya interaksi bisnis antara pedagang luar negeri dengan pedagang daerah sehingga dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, pameran tersebut dilaksanakan di Pasar Malam Indonesia (PMI) 2012 pada tanggal 29 Maret – 1 April 2012 di Lapangan Malavela Den Haag Belanda 2) Terselenggaranya Forum Koordinasi peningkatan kinerja ekspor daerah sebanyak 3 kali dengan peserta 150 orang.

Dari sisi ekspor, realisasi nilai ekspor non migas tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 26,95 persen dari US\$ 2.384 juta menjadi US\$ 1.741 juta bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2011. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4. ...di bawah ini. Penurunan nilai tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai ekspor yang cukup signifikan dari Kelompok Pertanian terutama komoditi Pinang sebesar 48,95 persen dan Kelompok Industri terutama komoditi Karet Olahan sebesar 45,27 persen dan Minyak Nabati sebesar 38,65 persen. Kinerja tersebut tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi.

Gambar 4.27 Realisasi Ekspor



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi

Sedangkan komoditi ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditi Karet, Minyak Nabati (CPO dll) dan Pulp dan kertas/pulp. Adapun negara tujuan utama ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama tahun 2012 mencapai 13 negara, dengan 6 negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Malaysia, Singapura dan India.

4. Program Penataan Struktur Industri

Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu, sehingga ada keterkaitan antara satu industri dengan lainnya. Keterkaitan tersebut baik dalam hal bahan baku maupun jaringan pemasaran sehingga tercipta kerjasama yang menguntungkan dan meningkatkan efisiensi. Masukan dari Program ini adalah dana sebesar Rp643.831.000,00. Adapun capaian keuangan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 593.854.400,00 (92,24%) dan fisik kegiatan 95%. Melalui Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan 6 (enam) kegiatan yang meliputi : 1) Updating Data Industri Mennegah dan Besar, 2) Pembuatan Profil Investasi Barang dari Karet, 3) Identifikasi Industri Perbengkelan Otomotif, 4) Pelatihan dan Bantuan Mesin Pembuatan Barang Jadi dan Lateks (Bantal, Busa, Mainan Anak-anak, Souvenir), 5) Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut (Magang Pembuatan Sparepart Kendaraan Roda Dua di Bandung), dan 6) Mapping Industri Provinsi Jambi.

Capaian dari program ini dapat dilihat dari jumlah unit usaha perdagangan di Provinsi Jambi pada tahun 2012 berdasarkan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tercatat 2.470 unit usaha, mengalami penurunan

sebesar 141,25 persen jika dibandingkan tahun 2011 yang sejumlah 5.959 unit usaha. Pada tahun 2012, jumlah pelaku usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tercatat 2.368 terdiri dari Pedagang Besar (PB) 110 unit usaha, Pedagang Menengah (PM) sebanyak 583 unit usaha dan Pedagang Kecil (PK) sebanyak 1.588 unit usaha, serta Pedagang Mikro sebanyak 87 unit usaha.

Tabel 4.112 Perkembangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Provinsi Jambi

No	Tahun	SIUP				Jumlah
		Pedagang Kecil (PK)	Mikro	Pedagang Menengah (PM)	Pedagang Besar (PB)	
1.	2011	4.672	482	645	160	5.959
2.	2012	1.588	87	583	110	2.368

Sumber : Disperindag Provinsi Jambi, 2012

Untuk penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Provinsi Jambi selama tahun 2012, jumlah perusahaan yang telah terdaftar tercatat 2.915 usaha, yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT) sebanyak 167 unit usaha, CV sebanyak 680 unit usaha, Koperasi 83 unit usaha, Firma 1 unit usaha, Perorangan 1.813 unit usaha dan bentuk Badan Usaha Lain (BUL) sebanyak 117 unit usaha, izin dagang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota di pelayanan terpadu satu pintu.

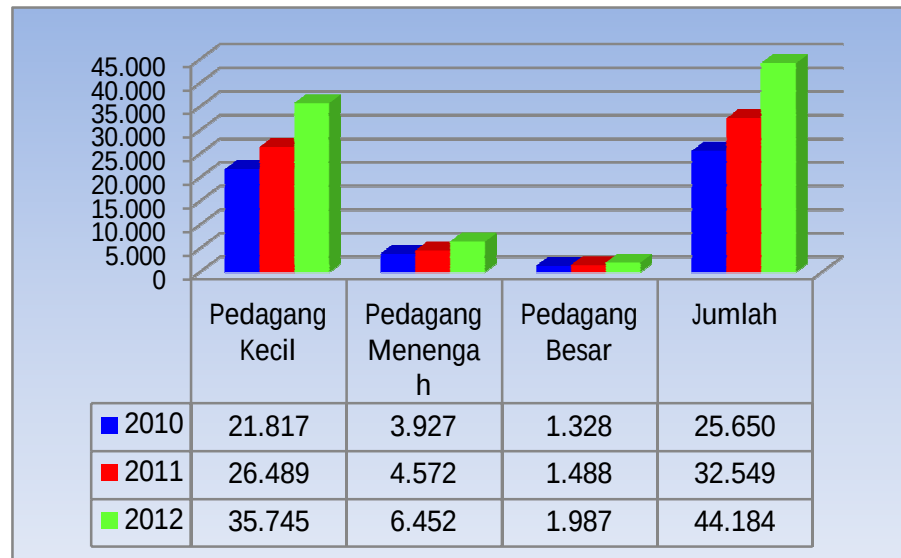
Tabel 4.113 Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Provinsi Jambi

No	Tahun	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)						Jumlah
		PT	Koperasi	CV	Firma	PO	BUL	
1.	2011	709	179	1.499	0	3.683	91	6.161
2.	2012	167	83	680	1	1.813	171	2.915

Sumber : Disperindag Provinsi Jambi, 2012

Sementara untuk jumlah pasar tradisional di Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 214 unit usaha, dengan rincian : 1) Kabupaten Kerinci sebanyak 25 unit, 2) Kabupaten Merangin 34 unit, 3) Kab. Sarolangun 12 unit, 4) Kab. Batanghari 15 unit, 5) Kab. Tanjab Timur 28 unit, 6) Kab. Tanjab Barat 34 unit, 7) Kab. Tebo 15 unit, 8) Kab. Bungo 19 unit, 9) Kota Jambi sebanyak 17 unit, belum termasuk pasar desa/kalangan yang aktivitasnya tidak setiap hari. Selain itu di beberapa Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Jambi bermunculan toko/mini market yang dikelola secara swalayan, sementara untuk pasar modern (gerai diatas 2.000 m²) di Ibu kota Provinsi Jambi diantaranya Pasar Handil dan Pasar Mama. Adapun jumlah usaha perdagangan di Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 44.184 unit usaha dengan klasifikasi ; Pedagang Kecil (PK) non formal sebanyak 35.745 unit usaha, Pedagang menengah (PM) sebanyak 6.452 unit usaha dan Pedagang Besar sebanyak 1.987 unit usaha.

Gambar 4.28 Perkembangan Usaha Perdagangan di Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi

5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, serta melindungi baik produsen maupun konsumen dengan cara memperpendek distribusi ataupun memperlancar distribusi yang sudah ada. Untuk melaksanakan program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu : 1) Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Lokal Karet, , 2) Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil, dan 3) Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Masukan dana dari program ini adalah sebesar Rp 372.835.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 353.661.500,- (94,24%) dengan realisasi fisik sebesar

100%. Dari program ini telah terlaksana Sosialisasi Penggunaan Larutan Pembeku Karet (deorub) pada petani di 4 Kabupaten, diantaranya di Desa Rantau Pandan Kab. Bungo, Desa Singkut Kab. Sarolangun, Desa Giri Winangun Unit 15 Kab. Tebo, dan Desa Bukit Baling Km. 39 Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya, telah terlaksana pemberian bantuan berupa 12 unit tenda dan 12 gerobak dorong kepada Pedagang Kecil (UKM) di Kota Jambi dan Kab. Muaro Jambi dalam rangka penguatan kelembagaan usaha dagang kecil informal, serta terselenggaranya promosi penggunaan produksi dalam negeri sebanyak 3 kali.

Capaian dari program ini yaitu terwujudnya pengembangan pasar lelang konvensional maupun pasar lelang agro forward (penyerahan kemudian). Selama tahun 2012 telah diadakan 4 kali pasar lelang Agro yang cukup berhasil dengan baik dimana pasar lelang mendapatkan respon positif dari produsen dan konsumen. Total transaksi pasar lelang agro tahun 2012 mencapai Rp15.963.180.000,00. Komoditi yang diperdagangkan dalam lelang agro adalah Beras, Cassiavera, coklat, bibit gaharu, gula merah, karet, pinang, kopi bubuk, aneka makanan, pala dan udang.

Belum optimalnya fungsi lembaga pemasaran berbagai produk lokal sehingga rantai perdagangan untuk beberapa produk belum efisien serta panjangnya rantai tata niaga komoditi agro yang mengakibatkan harga jual petani rendah merupakan beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan perdagangan produk lokal. Adapun solusi dari permasalahan ini antara lain dengan mengoptimalkan lembaga usaha niaga yang ada serta mengoptimalkan kegiatan pasar lelang komoditi agro.

6. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan memberikan pelayanan laboratorium pengujian terhadap mutu ekspor serta menguji komoditi yang beredar di dalam negeri yang termasuk daftar wajib SNI dan komoditi impor yang beredar di luar negeri. Hasil yang diharapkan yaitu tersedianya komoditi ekspor yang sesuai dengan SNI dalam rangka peningkatan daya saing produk ekspor di pasar internasional/global serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masukan dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 330.033.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 274.941.100 (83,31%) dengan fisik kegiatan 100%.

Guna mencapai sasaran program di atas, telah dilaksanakan 4 kegiatan meliputi: 1) Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi, 2) Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran, 3) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor, dan 4) Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi.

Melalui program ini telah terlaksana pemeliharaan dan penggantian suku cadang infrastruktur kelembagaan standarisasi, berupa terkaliberasinya alat-alat standar lab sebanyak 23 unit dan perawatan alat lab sebanyak 11 unit, terlaksananya pengawasan dan pengendalian mutu barang SNI wajib di pasaran, sebanyak 29 contoh produk di 8 kabupaten (kecuali Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh), bertambahnya ruang lingkup laboratorium berupa akreditasi sebanyak 11 komoditi dan laboratorium kalibrasi sebanyak 10 instrument, serta terlaksananya sosialisasi laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi sebanyak 2 kali di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.

Capaian dari program ini yaitu peningkatan jasa pengujian dan peningkatan PAD, dimana sampai 31 Desember 2012, jumlah jasa pengujian mutu komoditi ekspor pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 185,89 persen (6.971 sampel) dibandingkan target tahun 2011 dan target Renstra (3.750 sampel), serta juga mengalami peningkatan sebesar 101,18 persen (3.465 sampel). Sementara jumlah penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar 100,71 persen (Rp 181,18 juta) dibandingkan target tahun 2012 dan target Renstra (Rp 180 juta) serta juga mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011 (Rp 172,69 juta).

7. Program Perkuatan Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian UPTD BPSMB

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Barang Ekspor Impor melalui penambahan peralatan laboratorium. Masukan dari program ini adalah dana sebesar Rp336.280.100,00. Adapun capaian keuangan berdasarkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp333.619.800,00 (99,22%) dan fisik kegiatan 100%. Melalui Program perkuatan Laboratorium Kalibrasi dan pengujian UPTD BPSMB dilaksanakan hanya 1 kegiatan yaitu Penambahan Peralatan dan Bahan Uji serta Perawatan Laboratorium.

Adapun output dari program/kegiatan tersebut yaitu telaksananya penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium sebanyak 16 unit peralatan lab dan terlaksananya perawatan alat-alat lab sebanyak 18 unit.

Capaian dari program ini yaitu peningkatan jasa pengujian dan PAD, dimana hingga 31 Desember 2012 jumlah jasa pelayanan pengujian mutu komoditi ekspor jumlah penerimaan PAD retribusi pengujian mutu sampel produk sama dengan yang dihasilkan pada capaian program pengembangan standarisasi nasional.

4.2.7 Ketransmigrasian

Program transmigrasi bertujuan mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah/kawasan di Provinsi Jambi, meningkatkan keberdayaan masyarakat di lokasi transmigrasi dan masyarakat di kawasan terpadu mandiri (KTM) serta penyiapan areal transmigrasi yang potensial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program dan kegiatan di lokasi transmigrasi dan KTM diarahkan kepada penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi. Pada tahun anggaran 2012, kegiatan ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui APBD Provinsi Jambi sebanyak 1 program dan 14 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.239.121.050,-. Dari anggaran yang disediakan untuk kegiatan ketransmigrasian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 telah terealisasi mencapai Rp. 1.226.859.195,- atau sebesar 98,21 %.

Melalui Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, telah dilaksanakan 14 kegiatan berikut ini :

1. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan transmigrasi disediakan dana sebesar Rp. 27.375.000,-. Dari dana tersebut telah dilaksanakan pembinaan perempuan peserta program PKK di 2 lokasi transmigrasi. Kegiatan ini

bertujuan mengoptimalkan pencapaian tujuan PKK, yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi transmigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2012, realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp. 27.035.000,- atau sebesar 98,76 %.

2. Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigrasi dan Peternakan.

Mendukung kegiatan pengembangan hasil produksi pertanian dan peternakan di lokasi transmigrasi tahun 2012, disediakan anggaran sebesar Rp. 172.572.000,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan populasi ternak masyarakat transmigrasi. Penyerapan anggaran kegiatan ini mencapai 99,76 % atau sebesar Rp. 172.112.500,-

3. Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lokasi transmigrasi melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan, dilaksanakan kegiatan pengendalian obat di gudang farmasi kabupaten. Melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat akan mempermudah petugas kesehatan memberikan layanan sesuai standar pelayanan kesehatan. Kegiatan ini menyediakan anggaran sebesar Rp. 25.865.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp. 25.811.000,- atau 99,79 %.

4. Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi.

Dalam rangka mereduksi timbulnya permasalahan di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan upaya preventif melalui pembinaan masyarakat di lokasi transmigrasi secara berkesinambungan. Pembinaan tersebut dengan melebur dan

menghilangkan dikotomi kultur antara sesama warga transmigrasi maupun dengan masyarakat disekitar lokasi transmigrasi. Selain upaya preventif, upaya membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di lokasi transmigrasi seperti pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; merupakan sarana untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dengan melaksanakan pertemuan berkala semua pemangku kepentingan akan dapat mengeliminir timbulnya permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat dan damai. Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 64.925.100,- yang telah terealisasi sebesar Rp. 62.135.600,- atau sebesar 95,70 %.

5. Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama antar Daerah.

Potensi di lokasi transmigrasi yang belum diolah merupakan sumberdaya yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut dibutuhkan investor yang mau menanamkan modalnya. Guna menarik minat investor perlu dilakukan promosi potensi yang ada di lokasi transmigrasi. Kegiatan promosi potensi kawasan transmigrasi disediakan dana sebesar Rp. 88.563.400,-. Dana tersebut digunakan untuk membiayai promosi melalui media massa dan mengikuti event-event promosi. Selain itu membangun jaringan kerjasama antar daerah pengelola transmigrasi dan daerah lain diharapkan mampu menarik minat investor di lokasi transmigrasi. Realisasi kegiatan ini mencapai Rp. 88.240.900,- atau sebesar 99,64 %.

6. Kegiatan Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Penguatan Kelembagaan di UPT.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigrasi, perlu dilakukan penguatan lembaga perekonomian yang ada, diantaranya Koperasi Unit Desa (KUD). Sebagai sokoguru perekonomian di desa, peran KUD menjadi vital dan sentral dalam memfasilitasi perputaran ekonomi di desa. Agar peran KUD dapat optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan KUD dari sisi manajemen, sumberdaya manusia, akses, maupun sarana dan prasarana. Mendukung kegiatan pembinaan KUD dan penguatan kelembagaan di 5 UPT dalam Provinsi Jambi, telah dianggarkan dana sebesar Rp. 99.296.000,-. Dari dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 98.794.000,- atau 99,49 %.

7. Kegiatan Desain Teknis Peningkatan Jalan Poros/Penghubung di UPT/Kawasan KTM.

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produksi pertanian serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi, dibutuhkan infrastruktur jalan yang memadai guna memperlancar arus barang dari dan ke kawasan transmigrasi. Untuk menentukan desain infrastruktur jalan yang kompetitif dan menunjang aktifitas ekonomi, dibutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan desain teknis peningkatan jalan poros/penghubung di UPT/KTM dengan dana sebesar Rp. 65.000.000,-. Dalam pelaksanaannya kegiatan perencanaan tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 64.650.000,- atau mencapai 99,46 %.

8. Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi lokal, perlu diberikan penguatan keahlian sumberdaya manusia melalui pelatihan home industri. Pelatihan diberikan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku, nilai tambah produk dan pemasaran produk. Untuk menyelenggarakan kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 83.855.000,- atau sebesar 99,73 % dari anggaran disediakan sebesar Rp. 84.080.000,-.

9. Kegiatan Inventarisasi Pemenuhan Persyaratan Pengakhiran Status dan Sarana Prasarana di UPT.

Penetapan sebagai kawasan transmigrasi memiliki kurun waktu terbatas yakni selama 5 (lima) tahun. Setelah kurun waktu pembinaan tersebut maka status sebagai kawasan transmigrasi akan berubah menjadi desa yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat. Perubahan status tersebut juga diiringi dengan pemindahan status kepemilikan aset kepada pemerintah kabupaten bersangkutan. Sebelum pengakhiran status kawasan transmigrasi, perlu dilakukan inventarisasi penduduk, sarana dan prasarana yang dibangun dan aset yang akan dilimpahkan tersebut. Untuk itu, pada tahun 2012 telah dianggarkan dana bagi kegiatan dimaksud sebesar Rp. 31.145.000,-. Dari jumlah dana tersebut telah terealisasi semuanya sebesar Rp. 31.145.000,- atau 100 %.

10. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT.

Derajat kesehatan masyarakat di lokasi transmigrasi perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh akan tujuan program transmigrasi dapat tercapai. Derajat kesehatan ini dipengaruhi oleh perilaku, budaya, kondisi lingkungan dan pola konsumsi dan gizi masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2012, kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat, lingkungan dan gizi berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara lengkap dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, petugas medis dan peralatannya. Selain itu upaya penyehatan lingkungan pemukiman transmigrasi dan peningkatan gizi masyarakat akan mengurangi kasus kesehatan yang dialami masyarakat. Mendukung kegiatan ini telah disediakan dana sebesar Rp. 188.847.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 188.341.250,- atau mencapai 99,73 %.

11. Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi.

Untuk mengeliminir timbulnya konflik batas wilayah kawasan transmigrasi dengan masyarakat maupun pengusaha di sekitar kawasan transmigrasi, perlu ditetapkan batas definitif kawasan transmigrasi. Penetapan batas definitif tersebut selain tertuang dalam peta juga mempunyai batas yang jelas di lapangan yang dapat diketahui secara akurat. Oleh karena itu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya sehingga hasil penetapan dapat disepakati dan diterima. Penetapan batas dilakukan tidak saja sebelum penetapan kawasan transmigrasi, namun juga dilaksanakan bagi kawasan transmigrasi yang belum memiliki batas-batas yang kongkrit. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan menghabiskan dana sebesar Rp. 123.911.945,- atau sebesar

98,54 % dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 125.744.350,-

12. Kegiatan Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP.

Untuk menjaga agar proses pembangunan pemukiman dan STP transmigrasi berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun, perlu dilakukan monitoring secara berkala. Untuk kegiatan monitoring ini disediakan dana sebesar Rp. 26.972.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.929.800,- atau mencapai 85,01 % dari anggaran yang tersedia.

13. Kegiatan Perencanaan Teknis Pemukiman dan Penempatan.

Sebelum pelaksanaan pemukiman dan penempatan masyarakat di kawasan transmigrasi, perlu disusun perencanaan secara matang sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan dalam penempatan. Perencanaan ini disusun meliputi semua aspek baik sosial, ekonomi, budaya, keamanan, pengembangan kawasan, dan lainnya. Untuk memperoleh rencana yang komprehensif tentang pemukiman dan penempatan peserta transmigrasi, pada tahun 2012 disediakan dana sebesar Rp. 185.055.900,-. Dari jumlah dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 184.326.000,- atau 99,61 %. Adapun produk dari kegiatan ini adalah dokumen perencanaan teknis pemukiman dan penempatan peserta transmigrasi.

14. Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual.

Pembinaan kepada peserta trasnmigrasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi usaha tani, keterampilan, penguasaan teknologi, pengorganisasian masyarakat, pembangunan jejaring kerja dan pembinaan mental spiritual.

Pembinaan mental dan spiritual memiliki arti penting guna membangun rasa bersyukur dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pembinaan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi diantara sesama peserta transmigrasi maupun dengan masyarakat disekitar kawasan transmigrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 53.725.000,-. Sampai akhir tahun 2012 dana yang terserap untuk kegiatan ini mencapai Rp. 53.571.200,- atau sebesar 99,71 %.